



RPJMD

KABUPATEN BELITONG TIMUR
2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH





BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur untuk periode1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
10. Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut.
11. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
12. Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. PD dalam menyusun Renstra-PD
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.
- (3) Periodisasi pembangunan jangka menengah Daerah adalah selama 5 (lima) tahun.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD hanya diperlukan adanya penyempurnaan indikator kinerja Daerah, maka dapat dilakukan perubahan indikator kinerja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

- (1) Apabila selama periode RPJMD 2021-2026 terdapat evaluasi kelembagaan yang mengakibatkan perubahan nomenklatur maupun susunan Perangkat Daerah, maka Program yang mendukung visi dan misi Daerah disesuaikan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang baru.
- (2) Penyesuaian Program berdasarkan susunan perangkat daerah yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar evaluasi capaian kinerja Program Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2026 dan dapat diberlakukan sebagai program transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2026-2031 yang memuat visi, misi dan program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAKHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.43/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

Perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan berkesinambungan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perencanaan perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta daya saing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sangat penting untuk menentukan arah perkembangan dan juga signifikan perannya dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan tahap ke IV atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 – 2025. Rangkaian penyusunan RPJMD telah diawali oleh penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD oleh Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur yang berisi gambaran kondisi daerah dan keuangan, permasalahan pembangunan, serta perumusan isu strategis sebagai landasan penyusunan visi – misi bagi Kepala Daerah nantinya. Visi inilah yang merupakan gambaran atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan dan juga upaya – upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkannya lewat misi – misi pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Periode 2021-2026 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung Timur juga merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 tentu ikut memperhatikan arahan yang tertera dalam RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta memperhatikan arah kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perumusan kebijakan dan juga program pembangunan selama lima tahun kedepan juga merupakan salah satu bentuk integrasi dan sinergi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung capaian dari target pembangunan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang telah mengatur bagaimana proses pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota diselenggarakan. Salah satunya syarat dalam proses pendaftaran, syarat administratif yang harus disertakan adalah naskah visi dan misi calon Kepala Daerah. Visi-Misi dan program Kerja Calon Kepala Daerah tersebut akan dipromosikan selama masa kampanye, dan selanjutnya akan diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Terdapat perbedaan pada masa jabatan kepala daerah terpilih pada pilkada serentak tahun 2020 dibandingkan dengan sebelumnya, masa jabatan kepala daerah terpilih hanya efektif selama 3 (tiga) tahun. Setelah terpilih di tahun 2020, kepala daerah yang baru dilantik di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya Pilkada serentak di tahun 2024. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 berjalan seiring dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sehingga dengan demikian, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu pada periode 2021-2024.

Namun sesuai amanat Pasal 263 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai Pasal 201 ayat 7 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Undang, menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024. Oleh karena itu, maka periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah tahun 2021-2026.

Visi pembangunan yang diusung pada periode kali ini adalah “Belitung Timur Bangkit dan Berdaya” yang diartikan secara konseptual sebagai keinginan perubahan situasi dan kondisi di Belitung Timur dari kondisi stagnan menuju dinamis, lemah menjadi kuat dan bersemangat dengan segala tenaga, akal, ikhtiar, dan upaya.

Visi ini diterjemahkan kedalam tiga misi dengan masing – masing kata kunci yaitu manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Visi – misi inilah yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan serta program Perangkat Daerah (PD) dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Belitung Timur jangka waktu 5 tahun kedepan yang keseluruhannya termuat dalam dokumen ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 95

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 ini.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun dan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah paling lambat enam bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, aspiratif, atas bawah dan bawah atas melalui uji publik, Musrenbang, pembahasan dengan OPD dan DPRD; di samping penyelarasan internal antar bab serta eksternal dengan RPJMN, RPJPD dan RPJMD Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 ini telah disusun secara komprehensif, terstruktur dan sistematis, tematik, holistik, integratif dan spasial sehingga dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Namun demikian, apabila dalam perjalanannya nanti terdapat ketidaktepatan serta untukantisipasi perubahan perkembangan keadaan yang terjadi, maka RPJMD ini dapat direvisi dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Kepada Tim Penyusun RPJMD dan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan RPJMD, hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah bersama DPRD, pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya.

Demikian, semoga RPJMD ini dapat dipedomani, dan menjadi rencana pembangunan lima tahunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belitung Timur, dan menjadi Kabupaten yang **Bangkit dan Berdaya**.

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**
BURHANUDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I.8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I.15
1.5 Sistematika Penulisan.....	I.16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II.1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II.1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II.1
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana.....	II.7
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah	II.8
2.1.4 Kependudukan	II.19
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.22
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.22
2.2.2 Kesejahteraan Sosial.....	II.33
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga	II.38
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II.38
2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II.39
2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II.65
2.3.3 Fokus Urusan Pilihan.....	II.98
2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang.....	II.107
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II.131
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II.131
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II.134
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II.137
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II.139
2.5 Integrasi Dokumen RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	II.141
2.5.1 Aspek Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD.....	II.141
2.5.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II.149
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III.1

3.1.1	Kondisi Perekonomian Global.....	III.2
3.1.2	Kondisi Perekonomian Nasional.....	III.4
3.1.3	Kondisi Perekonomian Daerah.....	III.6
3.1.4	Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah.....	III.10
3.1.5	Kondisi Ketenagakerjaan.....	III.13
3.2	Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020.....	III.15
4.2.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III.16
3.2.2	Neraca Daerah.....	III.36
3.3	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Belitung Timur	III.45
3.3.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III.45
3.3.2	Analisis Pembiayaan.....	III.45
3.4	Kerangka Pendanaan.....	III.48
3.4.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III.48
3.4.2	Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.....	III.54
3.4.3	Kebijakan Belanja dan Pembiayaan Daerah	III.56
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV.1
4.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur.....	IV.2
4.1.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal.....	IV.2
4.1.2	Daya Saing dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Belum Optimal	IV.7
4.1.3	Pelayanan dan Akses Infrastruktur Belum Merata.....	IV.11
4.1.4	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Belum Optimal	IV.14
4.1.5	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat yang Belum Optimal	IV.16
4.2	Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV.32
4.2.1	Isu Strategis Global dan Regional.....	IV.32
4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV.37
4.2.3	Isu Strategis Daerah	IV.40
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
5.1	Visi	V.1
5.2	Misi	V.1
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V.3
5.4	Keterkaitan Visi-Misi RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	V.13
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI.1
6.1	Strategi.....	VI.1
6.2	Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pembangunan	VI.13
6.3	Sinkronisasi Program RPJMD dan RTRW	VI.14
6.4	Program Inovasi Daerah.....	VI.18
6.5	Program Pembangunan Daerah.....	VI.27

6.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Daerah	VI.29
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII.1
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII.2
7.2	Rencana Program Prioritas	VII.5
BAB VIII	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII.1
BAB IX	PENUTUP	IX.1
9.1	Pedoman Transisi	IX.1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX.2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasn Dokumen RTRW dan RPJMD Kabupaten Belitung TimurI.10
Tabel 1.2	Keselarasn Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026I.12
Tabel 1.3	Keselarasn RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.....I.13
Tabel 2.1	Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 II.9
Tabel 2.2	Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 II.16
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020..... II.20
Tabel 2.4	Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020..... II.20
Tabel 2.5	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020 II.24
Tabel 2.6	Jumlah Tindak Pidana menurut Kepolisian Resor Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020 II.32
Tabel 2.7	Jumlah Kelompok dan Gedung Kesenian di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020..... II.38
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020..... II.39
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020..... II.47
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020 II.52
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020 II.57
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020..... II.59
Tabel 2.13	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020..... II.63
Tabel 2.14	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020 II.66
Tabel 2.15	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020..... II.67

Tabel 2.16	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.69
Tabel 2.17	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.70
Tabel 2.18	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.72
Tabel 2.19	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.76
Tabel 2.20	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.78
Tabel 2.21	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.79
Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.82
Tabel 2.23	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.84
Tabel 2.24	Jumlah UMKM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.85
Tabel 2.25	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.85
Tabel 2.26	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.88
Tabel 2.27	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.92
Tabel 2.28	Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.93
Tabel 2.29	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.93
Tabel 2.30	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.94
Tabel 2.31	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.96
Tabel 2.32	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.98
Tabel 2.33	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.100
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.101
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.103
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.106

Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Administrasi Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.107
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Pengawasan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.109
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Perencanaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.111
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.117
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.123
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.129
Tabel 2.43	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.131
Tabel 2.44	Persentase Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan menurut Kelompok Makanan/ Pangan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.132
Tabel 2.45	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan/Non Pangan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.133
Tabel 2.46	Kondisi Jalan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.134
Tabel 2.47	Persentase Akses Air Bersih dan Air Minum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.136
Tabel 2.48	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resor Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.137
Tabel 2.49	Jumlah Penerbitan Izin Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.138
Tabel 2.50	Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.138
Tabel 2.51	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.139
Tabel 2.52	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020	II.140
Tabel 2.53	Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan	II.141
Tabel 2.54	Klasifikasi Jasa Lingkungan terhadap DDTLH Kabupaten Belitung Timur.....	II.149
Tabel 3.1	Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global.....	III.2
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDB Nasional (y-o-y) Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2020.....	III.4
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDB Nasional (y-o-y) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020.....	III.5
Tabel 3.4	Intervensi Kebijakan Penanganan Covid-19	III.12

Tabel 3.5	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020 ..	III.16
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	III.19
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	III.20
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	III.21
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	III.21
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	III.27
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	III.29
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	III.32
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	III.33
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	III.34
Tabel 3.15	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	III.35
Tabel 3.16	Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Belitung Timur	III.36
Tabel 3.17	Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Belitung Timur	III.37
Tabel 3.18	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2019	III.38
Tabel 3.19	Kebutuhan Belanja Aparatur Kabupaten Belitung Timur.....	III.45
Tabel 3.20	Perhitungan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Belitung Timur	III.46
Tabel 3.21	Komposisi Penerimaan Pembiayaan sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2019	III.46
Tabel 3.22	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2019	III.47
Tabel 3.23	Hasil Perhitungan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	III.52
Tabel 3.24	Hasil Perhitungan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur	III.55
Tabel 3.25	Hasil Perhitungan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur	III.57
Tabel 4.1	Keterkaitan dan Detail Permasalahan Kabupaten Belitung Timur.....	IV.24
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026	V.7
Tabel 5.2	Sinkronisasi Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.....	V.16
Tabel 5.3	Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten, Provinsi dan Nasional	V.18

Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026	VI.2
Tabel 6.2	Sinkronisasi Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dengan Strategi RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.....	VI.4
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan per Tahun.....	VI.13
Tabel 6.4	Sinkronisasi Program RPJMD dan RTRW	VI.14
Tabel 6.5	Integrasi Program Inovasi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.....	VI.31
Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2026	VI.38
Tabel 6.7	Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur terhadap Program Piroritas Nasional	VI.73
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	VII.2
Tabel 7.2	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2026	VII.5
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (Tujuan) Kabupaten Belitung Timur	VIII.2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Belitung Timur.....	VIII.3
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.....	VIII.6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	I.9
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	I.18
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Belitung Timur	II.1
Gambar 2.2	Kondisi Klimatologi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2020.....	II.2
Gambar 2.3	Kondisi Klimatologi Kabupaten Belitung Timur	II.3
Gambar 2.4	Kondisi Geologi Kabupaten Belitung Timur.....	II.4
Gambar 2.5	Grafik Debit Run-off Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019.....	II.5
Gambar 2.6	Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur	II.6
Gambar 2.7	Perubahan Lahan Kabupaten Belitung Timur.....	II.6
Gambar 2.8	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Belitung Timur	II.8
Gambar 2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.19
Gambar 2.10	Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020	II.21
Gambar 2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.23
Gambar 2.12	Laju Inflasi di Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.26
Gambar 2.13	PDRB per Kapita Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.27
Gambar 2.14	Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.28
Gambar 2.15	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2020	II.29
Gambar 2.16	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.30
Gambar 2.17	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.31
Gambar 2.18	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.32
Gambar 2.19	Perkembangan IPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.34
Gambar 2.20	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	II.34
Gambar 2.21	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2020.....	II.35
Gambar 2.22	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2020	II.36
Gambar 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	II.37
Gambar 3.1	Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020.....	III.8

Gambar 3.2	Perkembangan Perekonomian Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.....	III.9
Gambar 3.3	Penduduk Kabupaten Belitung Timur Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja selama seminggu yang lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015-2019.....	III.14
Gambar 3.4	Angkatan Kerja Terbuka Berdasarkan Kualifikasi Keterampilan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2019	III.14
Gambar 3.5	Angkatan Kerja Terbuka Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2019	III.15
Gambar 3.6	Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	III.18
Gambar 3.7	Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	III.22
Gambar 3.8	Proporsi Transfer Pemerintah Pusat dan Antar-Daerah terhadap Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	III.23
Gambar 3.9	Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	III.24
Gambar 3.10	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.....	III.30
Gambar 3.11	Proporsi dalam Belanja Operasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020	III.30
Gambar 4.1	Alur Keterkaitan Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	IV.2
Gambar 4.2	Rangkuman Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal..	IV.6
Gambar 4.3	Rangkuman Permasalahan Daya Saing dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Belum Optimal	IV.11
Gambar 4.4	Rangkuman Permasalahan Pelayanan dan Akses Infrastruktur Belum Merata	IV.16
Gambar 4.5	Rangkuman Permasalahan Kualitas SDM dan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat yang Belum Optimal	IV.23
Gambar 4.6	Isu Strategis Pembangunan Tingkat Global dan Regional.....	IV.36
Gambar 4.7	Isu Strategis Pembangunan Tingkat Nasional	IV.40
Gambar 5.1	Keterkaitan Visi–Misi RPJPD Tahun 2005–2025 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026.....	V.13
Gambar 5.2	Keterkaitan Visi–Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026	V.14
Gambar 5.3	Keterkaitan Visi–Misi RPJMN Tahun 2020–2024 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026.....	V.15
Gambar 6.1	Inovasi Daerah.....	VI.19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perencanaan perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta daya saing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sangat penting untuk menentukan arah perkembangan dan juga signifikan perannya dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Dalam proses penyusunannya, seluruh daerah harus mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki serta menyesuaikan dinamika perkembangan yang terjadi pada level daerah, provinsi maupun nasional. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa perumusan rencana pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Posisi strategis dalam sektor perdagangan dan pelayaran serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan wilayah yang cepat dan dinamis di Kabupaten Belitung Timur. Upaya pembangunan tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hasil pembangunan selama lima tahun terakhir memperlihatkan kondisi yang semakin membaik dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tiga misi pembangunan yang ditetapkan sebelumnya. Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dalam lima tahun terakhir dan juga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang akhirnya didapatkan pemerintah daerah pada tahun 2019 menandakan kualitas manajemen ketatapemerintahan yang semakin membaik. Indeks kualitas lingkungan hidup, rasio rumah layak huni, persentase akses sanitasi masyarakat dan juga akses air bersih yang semakin meningkat menunjukkan kebutuhan dasar masyarakat yang mulai terakomodasi lewat penyediaan infrastruktur. Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan PDRB perkapita masyarakat yang meningkat menunjukkan kondisi masyarakat yang semakin meningkat. Melihat capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur telah memberikan hasil yang berkontribusi positif bagi daerah di samping kekurangan–kekurangan yang masih harus diperbaiki.

Kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis menuntut diperlukannya perencanaan yang tepat dan akurat agar nantinya manfaat pembangunan dapat dirasakan sebagai solusi yang tepat sasaran. Melihat kondisi eksisting serta perkembangan Kabupaten Belitung Timur saat ini, diperlukan pembahasan terkait permasalahan serta potensi dalam rangka merumuskan dan memetakan isu-isu strategis sehingga dapat ditentukan tujuan–sasaran dan juga strategi–arah kebijakannya. Di sisi lain, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur untuk masa jabatan 2021–2024 juga telah terlaksana dan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Belitung Timur untuk lima tahun yang akan datang dengan turut mempertimbangkan dinamika yang ada.

Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *bottom up* dengan *top down planning*. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan disemua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Perundangan Daerah. Sedangkan pendekatan pembangunan daerah bawah–atas (*bottom up*) dan atas–bawah (*top down*) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan melalui musyawarah tingkat kabupaten/kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi antara pencapaian sasaran pada rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan tahap ke-IV atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005–2025. Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026, visi pembangunan yang diusung kepala daerah terpilih adalah “Belitung Timur Bangkit dan Berdaya” yang diartikan secara konseptual sebagai keinginan perubahan situasi dan kondisi di Belitung Timur dari kondisi stagnan menuju dinamis, lemah menjadi kuat dan bersemangat dengan segala tenaga, akal, ikhtiar, dan upaya. Visi tersebut diterjemahkan kedalam tiga misi dengan masing–masing kata kunci yaitu manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Operasional dari visi–misi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan serta program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas OPD yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Belitung Timur jangka waktu lima tahun kedepan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung Timur juga merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 turut memperhatikan arahan yang tertera dalam RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta memperhatikan arah kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perencanaan pembangunan harus memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, karena itu faktor keberlangsungan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam pembangunan daerah di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga memperhatikan dokumen KLHS yang memuat rekomendasi yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan sebagai dasar dalam penyusunan arah kebijakan untuk pembangunan lima tahun yang akan datang.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD, yaitu dokumen perencanaan OPD lima tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersifat indikatif. Setiap OPD selanjutnya menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja (Renja) OPD. Dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, RPJMD Tahun 2021–2026 juga menjadi acuan untuk menyusun RKPD Kabupaten Belitung Timur. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 ini merupakan pedoman bagi seluruh proses pembangunan dan berkaitan dengan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
30. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Berseumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
40. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);

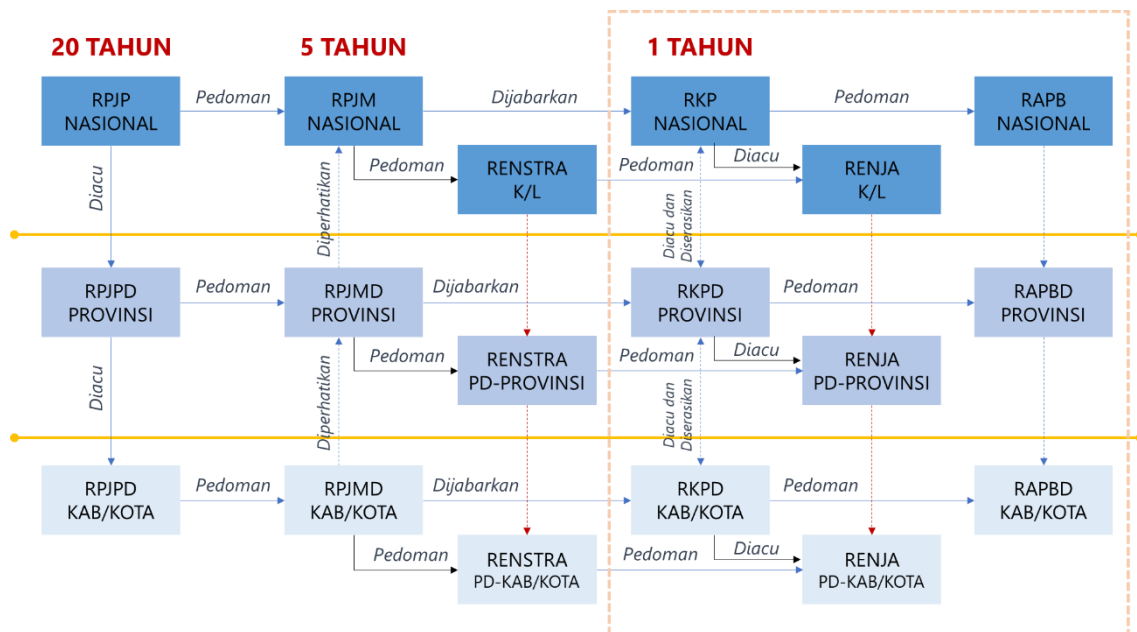
43. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
46. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah No 43); dan
47. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penguatan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RPJMD dilakukan melalui proses yang bertahap. Penyusunan dokumen RPJMD mencakup: a) analisis gambaran umum kondisi daerah; b) perumusan gambaran keuangan daerah; c) perumusan permasalahan pembangunan daerah; d) penelaahan dokumen perencanaan lainnya; e) perumusan isu strategis daerah; f) perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan; g) perumusan strategi dan arah kebijakan; h) perumusan kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, serta i) perumusan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Secara lebih rinci, proses penyusunan RPJMD dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.

Untuk mewujudkan konsistensi dalam perencanaan, RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 disusun sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Penyusunan RPJMD berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005–2025 yang memprioritaskan pada pemantapan pencapaian pembangunan daerah terutama ekonomi daerah yang berkelanjutan, kapabilitas masyarakat, juga pelayanan pemerintahan. Sementara itu, ketertiban–keamanan, stabilitas pembangunan ekonomi makro, dan juga sarana–prasarana wilayah yang berdaya saing juga menjadi sasaran pokok dalam pelaksanaan RPJPD tahap keempat ini. Hal itulah yang akan dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2021–2026 melalui perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penciptaan wirausahawan yang mandiri serta perluasan kesempatan kerja, dan mewujudkan sinergitas kebijakan penganggulangan juga pengentasan kemiskinan.

Diagram keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1 Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang kemudian menghasilkan tiga jenis dokumen perencanaan yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perbedaan ketiga jenis dokumen tersebut terletak pada jangka waktu perencanaan.

a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu perencanaan 20 tahun, terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional (RPJPN) dan di tingkat daerah (RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota). RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Sedangkan RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu perencanaan 5 tahun, terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah di tingkat nasional (RPJMN) dan di tingkat daerah

(RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Rencana pembangunan jangka menengah sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda Pemerintah yang berkuasa. Selain RPJM, secara sektoral juga terdapat Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan yang memuat isi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/OPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM dan bersifat indikatif.

c) Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut juga sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu perencanaan 1 tahun, terdiri dari rencana pembangunan tahunan di tingkat nasional (RKP Nasional) dan di tingkat daerah (RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Dokumen RKP selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan penganggaran yaitu Rancangan APBN, sementara di tingkat daerah Rancangan APBD disusun dengan berpedoman pada RKPD. Selain RKP, terdapat dokumen Rencana Kerja (Renja) yang juga merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan jangka waktu perencanaan 1 tahun. Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKP.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan memiliki hubungan keterkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021–2026 berkaitan dengan kewilayahan juga berpedoman pada RTRW Tahun 2014–2034. Penyusunan RPJMD ini memperhatikan dokumen RTRW yang di dalamnya berisi tentang bagaimana mewujudkan perencanaan struktur ruang meliputi pembangunan infrastruktur jaringan jalan, air minum dan transportasi publik. Selain itu juga membahas perwujudan pola ruang berkaitan dengan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang juga meliputi pengembangan wilayah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan pariwisata. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan potensi–potensi yang dimiliki.

Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen RTRW dan RPJMD Kabupaten Belitung Timur

RTRW KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2014-2034	RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2021-2026
<i>TUJUAN</i>	<i>VISI</i>
Terwujudnya Kabupaten Belitung Timur yang makmur dan mandiri sebagai kabupaten kepulauan dan bahari yang menjadi salah satu destinasi wisata dunia di Indonesia dengan kekuatan dan daya	BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA

RTRW KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2014-2034	RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2021-2026
saing yang tangguh berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	
<i>KEBIJAKAN PENATAAN RUANG</i>	<i>MISI</i>
1. Pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan <i>marine culture</i> dalam suatu sistem kawasan perdesaan yang terpadu 2. Pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang 3. Pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari di Bagian Barat Indonesia 4. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam memperluas aksesibilitas wilayah 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan 6. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat 7. Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung 8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara	1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja 3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Selain itu, penyusunan RPJMD tidak terlepas dari prioritas kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun Kabupaten Belitung Timur khususnya. Kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan dapat dilihat pada cerminan lima misi yang dimiliki provinsi dengan garis besar pada ekonomi lokal, daya saing SDM, reformasi birokrasi, pemerataan pembangunan, dan terakhir pembangunan berkelanjutan. Dokumen lain yang tidak kalah penting sebagai pedoman penyusunan RPJMD ini adalah RPJMN Tahun 2020–2024. Penjabaran RPJMN 2020-2024 memperhatikan tujuh agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Agenda pembangunan yang terdapat dalam RPJMN dapat diselaraskan dengan target-target pembangunan pada RPJMD, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan dokumen-dokumen lainnya (dokumen *non statutory*) yang berkaitan dengan target-target pembangunan daerah, antara lain (1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPK); (3) Rencana Induk Pembangunan Pertanian (RIPP); (4) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan; (5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata; serta dokumen *non statutory* lainnya.

Tabel 1.2 Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

RPJM NASIONAL 2020-2024	RPJMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022	RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2021- 2026
<i>VISI</i>	<i>VISI</i>	<i>VISI</i>
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi	BELITUNG BANGKIT DAN BERDAYA
<i>MISI</i>	<i>MISI</i>	<i>MISI</i>
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah 2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas 3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal	4. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik

RPJM NASIONAL 2020-2024	RPJMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022	RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2021- 2026
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	4. Meningkatkan kesehatan masyarakat 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup	5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja 6. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 merupakan periode keempat atau terakhir atas penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025. Selain RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi, dokumen RPJPD menjadi dokumen perencanaan yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Keselarasan RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

RPJPD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2005-2025	RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2021-2026
<i>VISI</i>	<i>VISI</i>
Unggul di Bidang Industri, Jasa, dan Pariwisata Berbasis Kelautan dan Pertanian	BELITUNG BANGKIT DAN BERDAYA
<i>MISI</i>	<i>MISI</i>
1. Menciptakan Kabupaten Belitung Timur unggul di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan	1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik

RPJPD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2005-2025	RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2021-2026
2. Menciptakan kapabilitas masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang tinggi 3. Menciptakan pelayanan pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang prima 4. Menciptakan suasana Kabupaten Belitung Timur yang tertib, aman, damai, adil, dan demokratis 5. Menciptakan stabilitas pembangunan ekonomi makro daerah yang berkelanjutan 6. Menciptakan prasarana dan sarana wilayah yang berdaya saing	2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja 3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Penyusunan Renstra OPD ini sebagai penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah, berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi OPD. Masing-masing OPD nantinya menyusun dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk sisa periode dari waktu lima tahun ke depan. Perencanaan yang ada dalam RPJMD Tahun 2021–2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dalam RKPD ini secara teknis dan operasional akan memuat prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Belitung Timur.

Selain itu, penyusunan RPJMD juga telah mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi serta kompensasi program dan kegiatan. KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam dokumen RPJMD. Dari 220 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 203 indikator dalam RPJMD telah dilaksanakan di mana pencapaian tersebut terdiri dari 102 indikator sudah tercapai, 71 indikator belum tercapai, serta 30 indikator tidak tersedia data. Dengan demikian penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 telah mempertimbangkan dan berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, maupun komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur secara konsisten dan berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Memberikan landasan dan pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pelaksanaan pembangunan daerah jangka waktu 2021–2026;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing–masing OPD sampai dengan tahun 2026 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi masing–masing;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lanjutan pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai evaluasi.

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Merumuskan gambaran keuangan daerah;
3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
4. Merumuskan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;
5. Merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
6. Merumuskan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
7. Merumuskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan tujuan di atas, hasil luaran (*output*) yang diharapkan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat gambaran kondisi umum daerah; gambaran keuangan daerah; visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada potensi dan permasalahan daerah serta isu – isu strategis baik isu daerah, provinsi, nasional maupun

internasional yang relevan serta dapat mempengaruhi dinamika perkembangan daerah ke depannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang dari penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi gambaran kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya serta prediksi pendapatan dan belanja terkait dengan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi permasalahan pembangunan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum sebelumnya.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang disusun dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program – program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

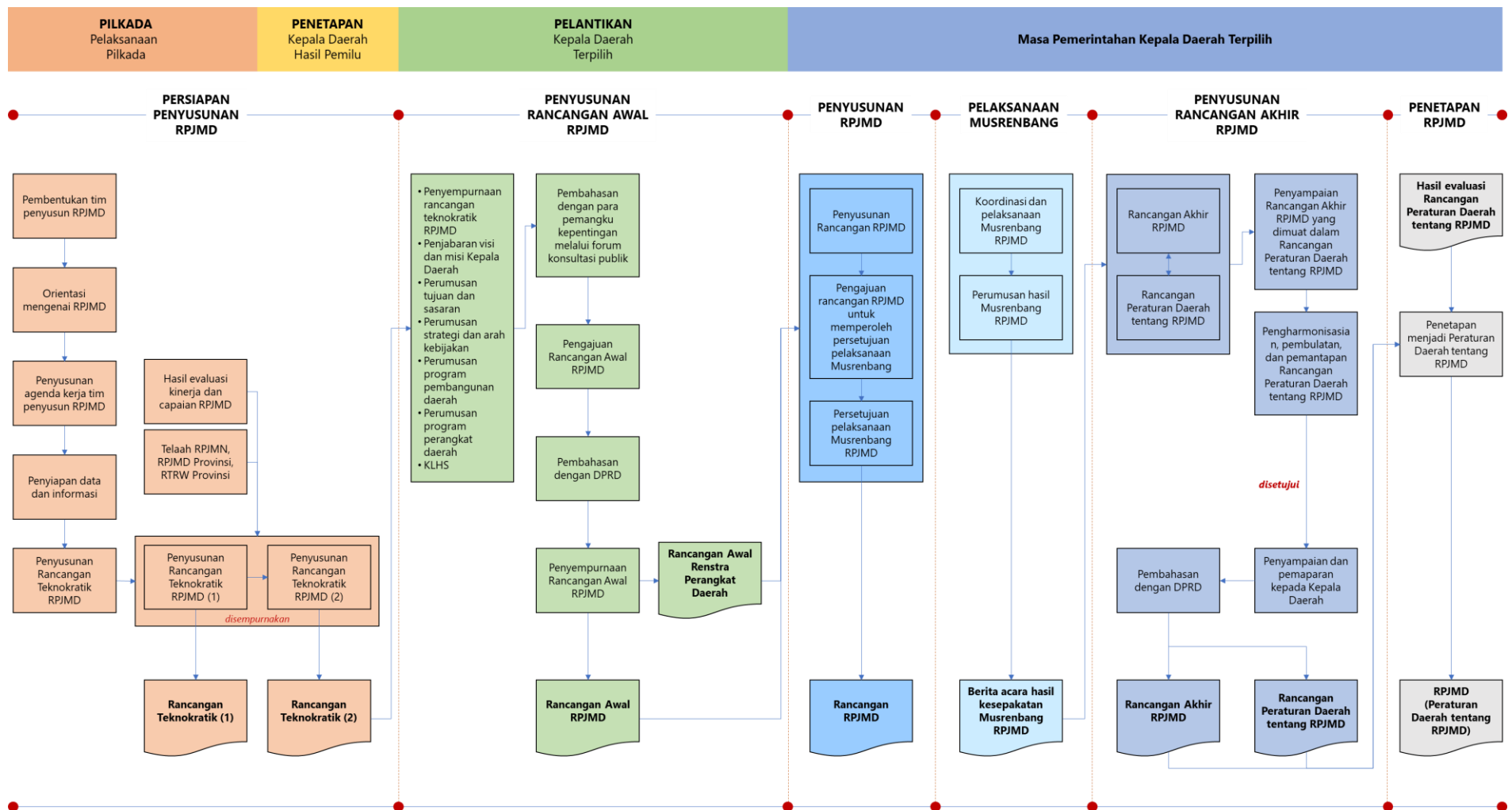
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan organisasi perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimodifikasi

Gambar 1.2 Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Belitung Timur adalah sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung dengan ibukota terletak di Manggar. Kabupaten Belitung Timur dibentuk pada tahun 2003 sebagai wilayah hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Wilayahnya sendiri memiliki luas sebesar 17.967,93 km² yang terdiri dari luas darat 2.506,90 km² dan luas wilayah laut 15.461,03 km². Kabupaten Belitung Timur termasuk kedalam wilayah kepulauan dengan 149 pulau besar dan kecil yang secara administratif terbagi menjadi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Simpang Pesak, dan Kecamatan Dendang dengan total 39 desa. Adapun batas-batas geografis Kabupaten Belitung Timur seperti pada **Gambar 2.1** di bawah.



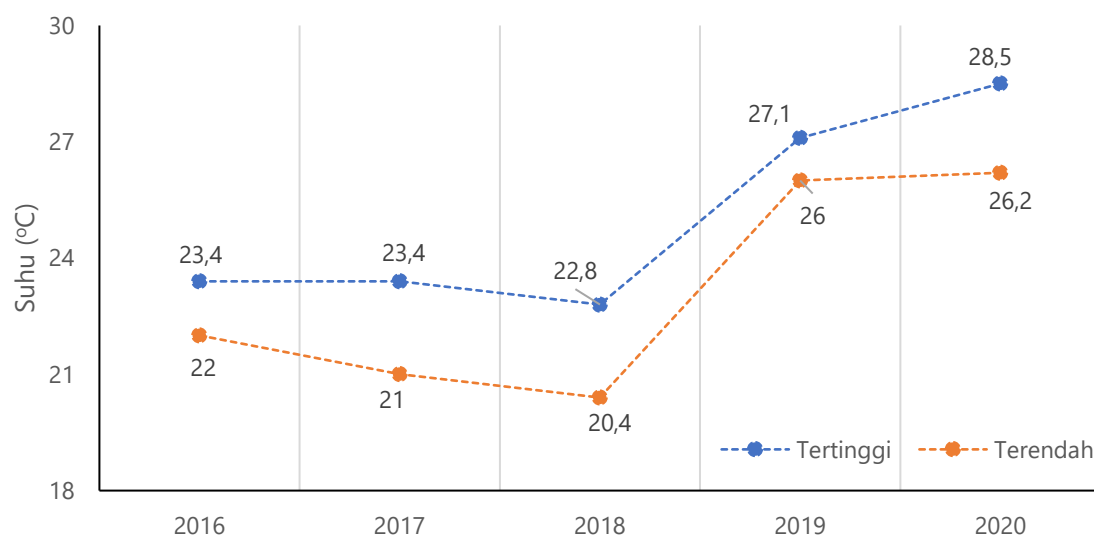
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Belitung Timur

Secara Geografis Kabupaten Belitung Timur terletak diantara $107^{\circ}45'$ - $108^{\circ}18'$ Bujur Timur dan $02^{\circ}30'$ - $03^{\circ}15'$ Lintang Selatan. Posisi geografis Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut, hal ini menyebabkan daerah ini kaya dengan pantai, yang mana ada 17 pantai yang indah, antara lain Pantai Nyiur Melambai, Pantai Punai, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Burung Mandi, dan lainnya. Selain itu, pengembangan lokasi-lokasi wisata baru pada kawasan pesisir maupun eks tambang juga mendukung proses pengembangan wilayah baik secara fisik maupun non - fisik. Hal ini juga berpotensi menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai destinasi wisata baru berkontribusi positif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Dengan kondisi geografis wilayah yang cenderung datar dengan akses serta konektivitas yang baik nantinya akan memperlancar proses pembangunan fisik yang dilaksanakan.

2.1.1.2 Klimatologi

Klimatologi Kabupaten Belitung Timur memiliki kondisi yang sama seperti halnya daerah-daerah di Indonesia umumnya dengan pergantian dua musim di sepanjang tahun yakni musim kemarau dan penghujan. Dari Bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara-Barat Laut menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan, dengan lebih dari 80 persen dari curah hujan tahunan turun pada periode ini. Perubahan arah angin ini juga mempengaruhi kondisi iklim, termasuk suhu udara di Kabupaten Belitung Timur. Berikut merupakan rata-rata suhu yang tercatat dalam Stasiun Meteorologi Tanjungpandan dalam kurun lima tahun terakhir:

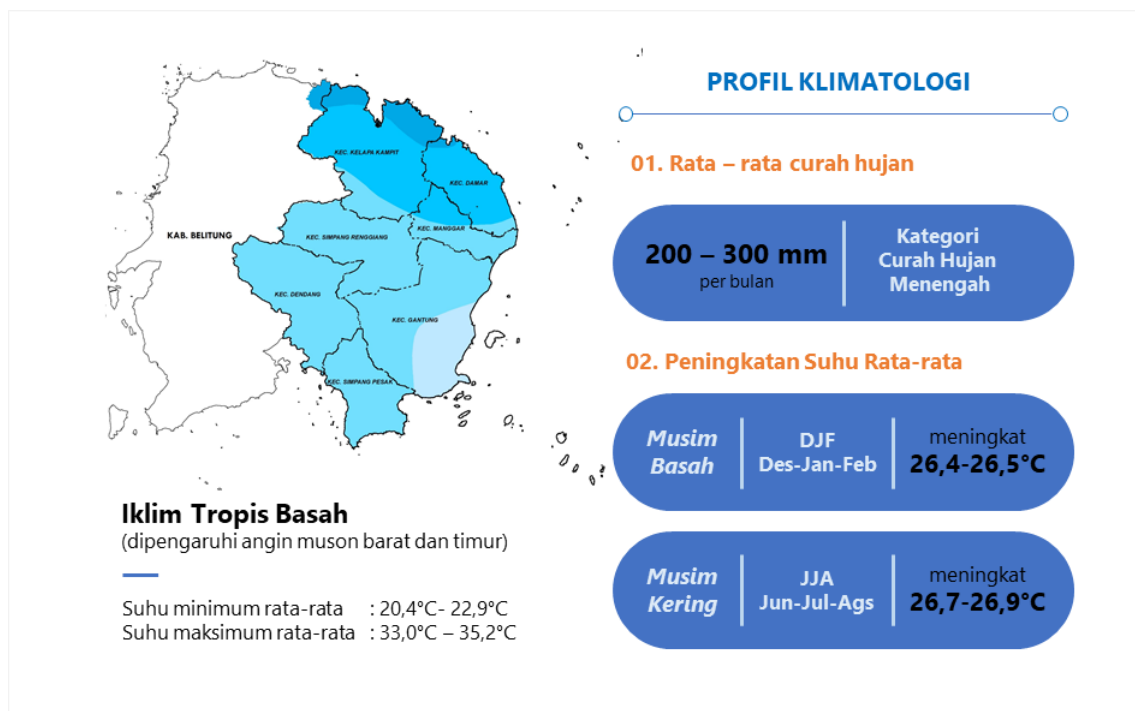


Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2017 - 2021

Gambar 2.2 Kondisi Klimatologi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2020

Dapat dilihat pada grafik diatas, rata-rata suhu tertinggi yang tercatat di Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir begitu juga rata-rata suhu terendahnya. Tren kenaikan ini kemungkinan akan berlanjut karena beberapa faktor salah satunya pemanasan global yang terjadi. Tren kenaikan suhu ini juga membawa dampak yang membahayakan bagi lingkungan dan juga masyarakat Kabupaten Belitung Timur antara lain potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih yang bertambah.

Sementara itu, untuk detail tahun 2020, suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Meteorologi Tanjungpandan menunjukkan kondisi yang selalu berubah dari 22,6°C pada Bulan Januari ke 20,4°C pada bulan September dan suhu maksimum rata-rata berubah dari 31,8 °C ke 35,2 °C. Kelembapan relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari maksimum 90 persen pada bulan Februari ke minimum 79 persen pada bulan September. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Meteorologi Tanjungpandan mencatat perubahan dari maksimum 7 m/s pada Bulan Januari sampai minimum 2 m/s pada November.



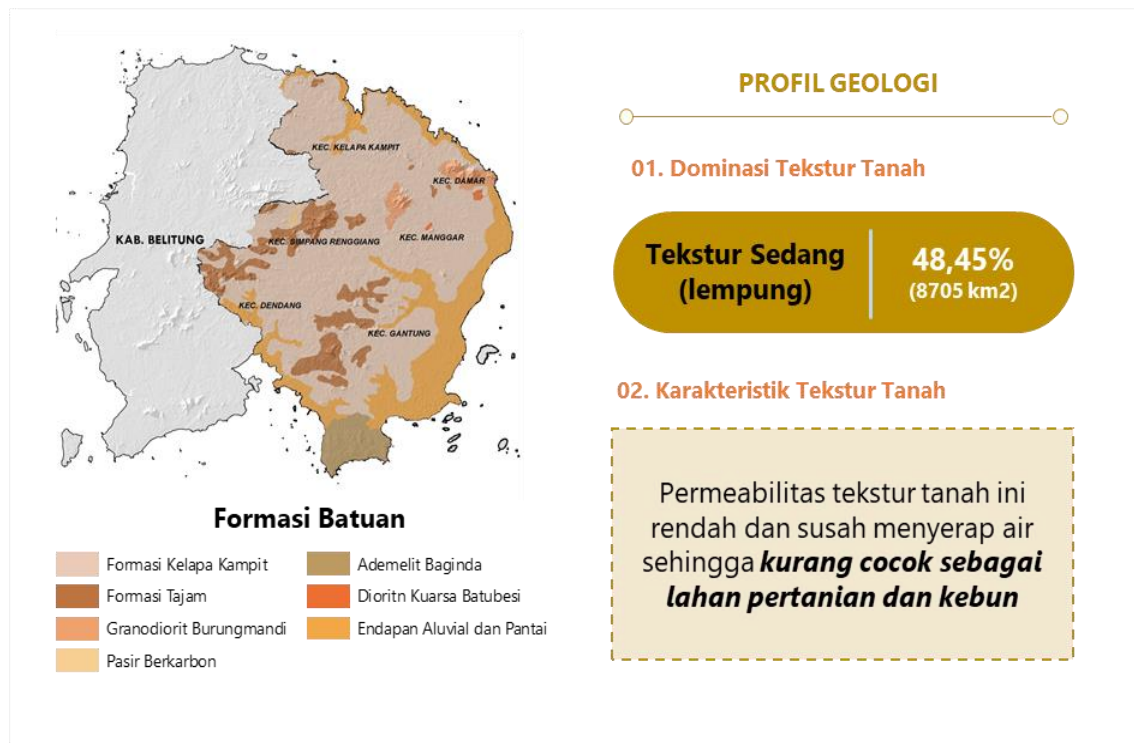
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 2.3 Kondisi Klimatologi Kabupaten Belitung Timur

2.1.1.3 Geologi

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kuarsa, batu granit, dan lain-lain seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 2.4** terkait formasi batuan. Pada bagian pesisir, jenis tanah didominasi oleh endapan aluvial yaitu endapan sekunder yang terkumpul dalam jumlah dan kadar yang tinggi melalui suatu proses konsentrasi alam yang letaknya sudah jauh dari batuan induknya dan

sudah sempat diangkut oleh sungai dan ombak laut. Dari segi tekstur tanah, Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung). Komposisi partikel bertekstur sedang (lempung) mencapai 48,45 persen, tekstur kasar 27,48 persen dan sisanya 24,12 persen bertekstur halus (debu).



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

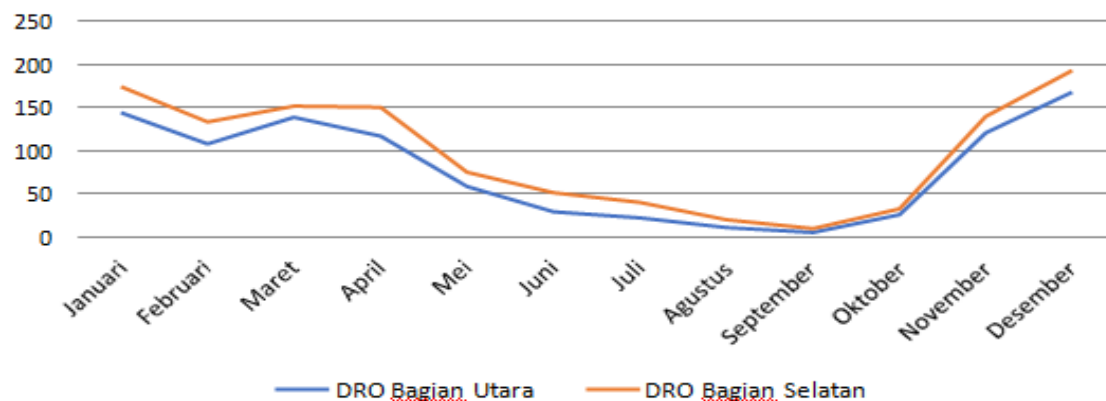
Gambar 2.4 Kondisi Geologi Kabupaten Belitung Timur

2.1.1.4 Topografi

Keadaan alam Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 m di atas permukaan laut dan sisanya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan. Keadaan topografi yang paling dominan ditemukan adalah ketinggian 25-100 m yaitu sebesar 68 persen dari luas wilayah. Kondisi topografi tersebut banyak ditemukan di Kecamatan Gantung dan Simpang Renggang. Sementara itu, untuk Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, Manggar didominasi oleh ketinggian tanah 0-10 m atau khas topografi pesisir pada umumnya. Pusat pemerintahan, perdagangan, dan juga pusat kota dengan segala fasilitasnya juga terletak pada kondisi ketinggian tanah tersebut. Kondisi wilayah yang cenderung homogen datar sangat menguntungkan bagi beberapa aktivitas seperti pengembangan kawasan pertanian, permukiman, dan lain sebagainya karena tidak adanya bentang alam yang membatasi perluasan aktivitas pembangunan.

2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan air meliputi kebutuhan air domestik, pertanian, dan perikanan. Hasil olah data menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Belitung Timur adalah 143.804.940 mm³/tahun, padahal kebutuhannya sudah mencapai 203.302.400 m³/tahun. Dengan membandingkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa status daya dukung air Kabupaten Belitung Timur adalah terlampaui atau defisit dengan nilai koefisien daya dukung airnya adalah 0.71.



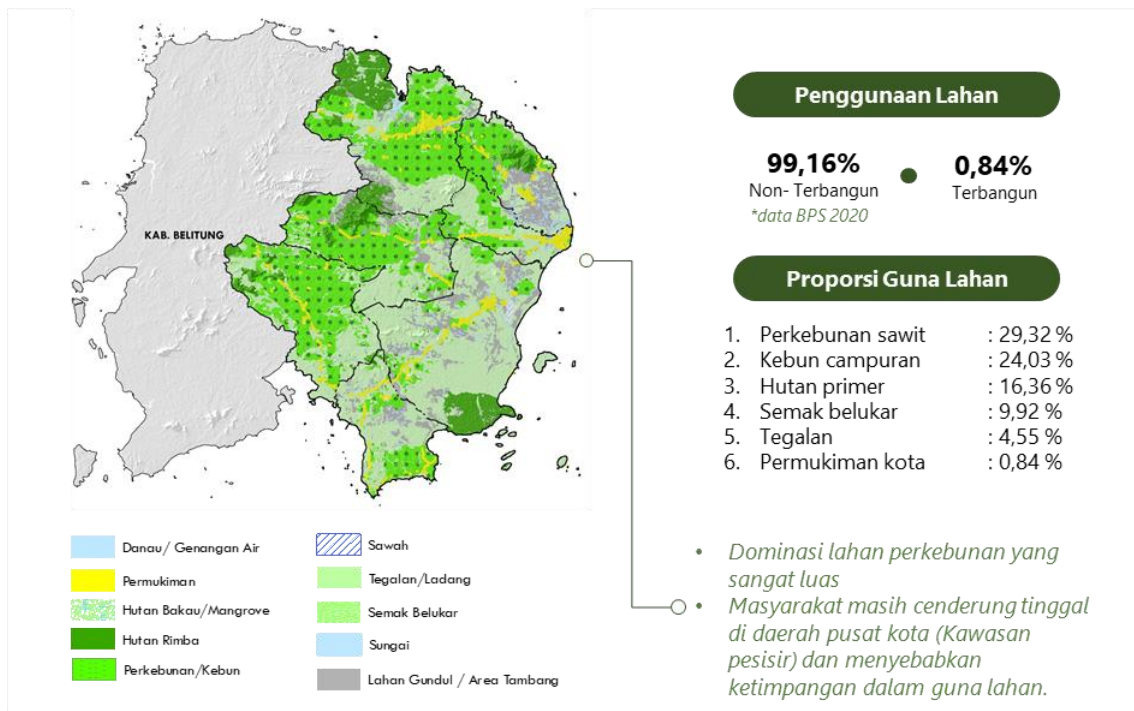
Sumber: Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kab. Belitung Timur, 2019

Gambar 2.5 Grafik Debit Run-off Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019

Grafik diatas menunjukkan neraca air bagian utara, terjadi surplus pada Bulan Januari-April dan Bulan Oktober-Desember. Nilai surplus tertinggi terjadi pada bulan Desember dan Januari sebesar 216 mm dan 181 mm, sedangkan nilai defisit terbesar terjadi pada Bulan Agustus sebesar 7 mm. Sementara itu, untuk bagian selatan, surplus terjadi pada Bulan Januari-April dan Oktober-Desember. Nilai surplus terbesar dicapai pada Bulan Desember dan Januari yaitu 247 mm dan 225 mm.

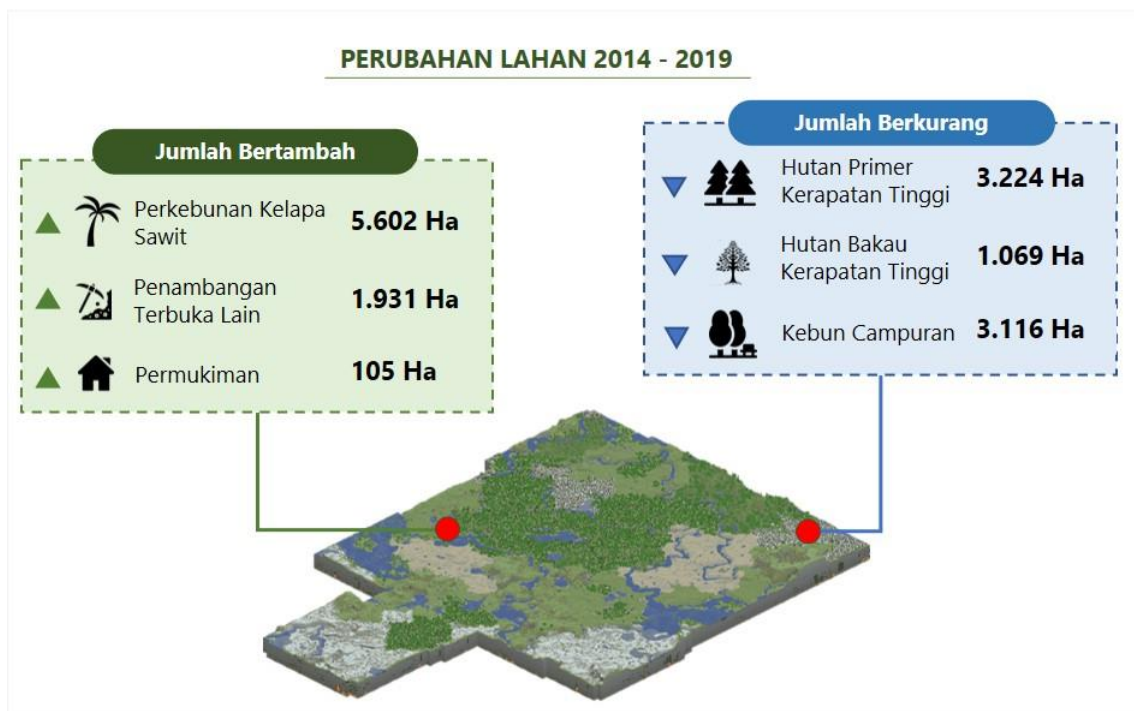
2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Belitung Timur terbagi menjadi lima jenis, yang ditinjau berdasarkan kondisi tutupan lahan. Penggunaan lahan terluas adalah perkebunan sawit, dengan luas mencapai 76.515,46 Ha atau 29,32 persen dari keseluruhan luas wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua juga masih berkaitan dengan perkebunan yaitu kebun campuran seluas 62.708,25 Ha atau 24,03 persen. Lahan terluas berikutnya berturut-turut yaitu hutan primer, semak belukar, dan juga area penambangan terbuka. Sementara itu, untuk lahan terbangun yang ada hanya seluas 2.198 Ha atau 0,84 persen dari keseluruhan luas wilayah, dan merupakan permukiman penduduk dengan pola linier mengikuti alur jalan. Detail penggunaan lahan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitong Timur, 2020

Gambar 2.6 Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Belitong Timur



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitong Timur, 2020

Gambar 2.7 Perubahan Lahan Kabupaten Belitong Timur

Di sisi lain, masifnya kegiatan pembangunan juga menyebabkan perubahan penggunaan lahan terjadi di Belitung Timur dalam kurun tahun 2014-2019. Perubahan lahan terbesar adalah bertambahnya luasan perkebunan sawit sebesar 5.602,02 Ha serta berkurangnya hutan primer dan hutan bakau masing-masing seluas 3.224 Ha dan 1.069 Ha pada kurun waktu tersebut. Adapun untuk permukiman pertambahannya sangat sedikit yaitu 105,51 Ha pada kurun waktu yang sama.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bahwa bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan atau nonalam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Belitung Timur meliputi:

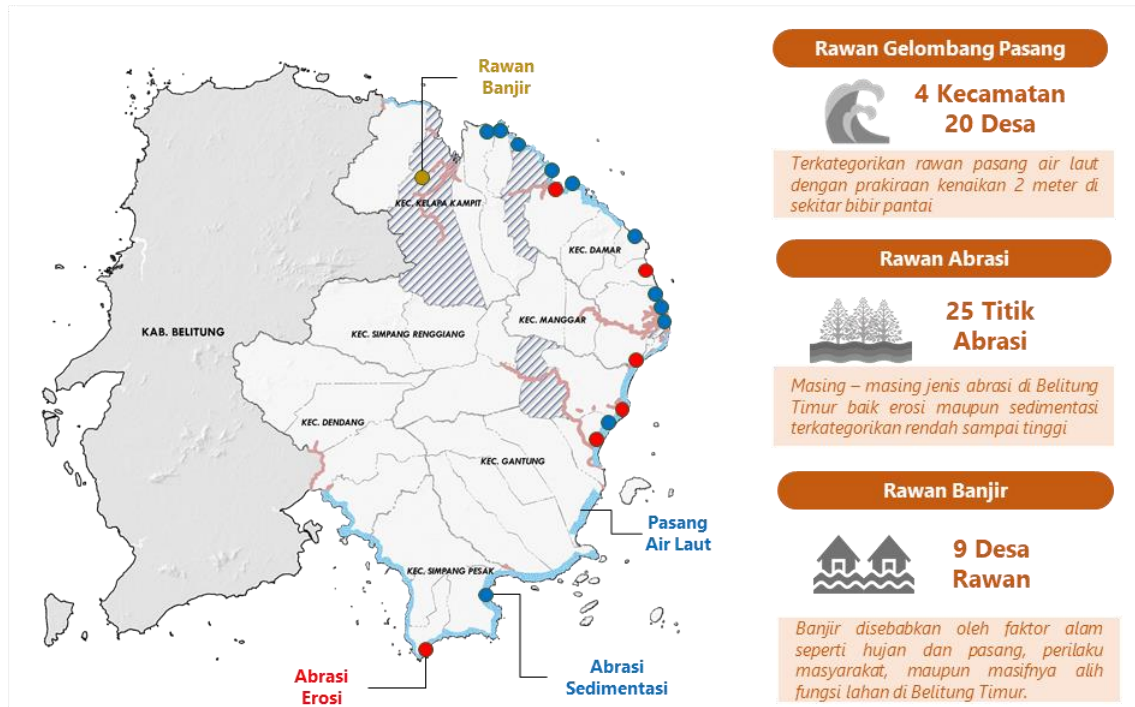
2.1.2.1 Kawasan Rawan Abrasi dan Gelombang Pasang

Adapun arahan kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Belitung Timur tersebar di pantai selatan dan timur, meliputi Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Cendil, Air Kelik, Mayang, dan Desa Pembaharuan); Kecamatan Dendang (Desa Batu Itam, Dendang, Simpang Pesak, dan Desa Tanjung Kelumpang); Kecamatan Gantung (Desa Gantung, Jangkar Asam, Lilangan, dan Desa Selingsing); dan Kecamatan Manggar (Desa Buku Limau, Kurnia Jaya, Lalang, Lalang Jaya, Mempaya, Mengkubang, Padang, Desa Sukamandi). Sedangkan kawasan dengan potensi terjadi abrasi meliputi seluruh kawasan pantai di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menyebutkan bahwa tingkat abrasi yang ada di Kabupaten Belitung Timur terkategori "Sedang". Oleh karena itu, proteksi kawasan pantai harus dilakukan melalui penanaman bakau atau tanaman pantai lainnya untuk mengurangi laju abrasi.

2.1.2.2 Kawasan Rawan Banjir

Bencana banjir merupakan salah satu masalah di Kabupaten Belitung Timur. Dari titik lokasi genangan dan banjir diketahui bahwa terdapat di enam titik kawasan rawan banjir meliputi kawasan Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, Buding, Mayang, dan Lenggang. Beberapa faktor penyebab terjadinya genangan yang teridentifikasi adalah faktor alamiah karena tingginya gelombang pasang air laut dan debit hujan yang turun; faktor pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase dan pembangunan fisik

sehingga menyebabkan penyumbatan dan kerusakan saluran drainase; serta adanya pengembangan wilayah kota yang mengubah tata guna lahan, mengakibatkan bertambahnya debit air di saluran.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 2.8 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Belitung Timur

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Belitung Timur khususnya terkait tata ruang memiliki tujuan umum yaitu untuk mewujudkan kemakmuran dan kemandirian daerah dengan pembangunan yang disesuaikan pada ciri kabupaten kepulauan dan bahari serta segala potensi yang dimiliki seperti perikanan, industri, dan pariwisata. Detail penjelasan terkait pengembangan wilayah mengacu pada Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 - 2034 sebagai berikut :

2.1.3.1 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan

atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah tersebut selanjutnya diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pusat pelayanan. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034, rencana pengembangan sistem pelayanan Kabupaten Belitung Timur, meliputi satu kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dua kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan lima kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Tabel 2.1 Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

PERKOTAAN	PUSAT KEGIATAN	FUNGSI PELAYANAN	
Kota Manggar	PKW	Melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota	• Pusat administrasi pemerintahan kabupaten • Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala kabupaten • Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten • Pusat pelayanan transportasi regional • Pusat pengolahan • Pusat pendidikan tinggi
• Kelapa Kampit • Gantung	PKL	Melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan	• Pusat administrasi pemerintahan kecamatan • Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala kawasan

PERKOTAAN	PUSAT KEGIATAN	FUNGSI PELAYANAN
		• Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan (beberapa kecamatan) • Pusat pelayanan transportasi skala kawasan/regional
• Simpang Renggang • Simpang Pesak • Damar • Buding • Dendang	PPL	Melayani kegiatan skala antar desa
		Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

2.1.3.2 Rencana Pola Ruang

Selain pengembangan struktur ruang, Kabupaten Belitung Timur juga memiliki rencana pola pemanfaatan ruang. Rencana pemanfaatan pola ruang dimaksudkan untuk mengatur alokasi dan lokasi pemanfaatan ruang untuk kepentingan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. **Kawasan lindung** terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

a. Kawasan hutan lindung

Rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Belitung Timur meliputi lahan seluas kurang lebih 46.033 ha, meliputi :

- HL Gunung Bantan di Desa Nyuruk;
- HL Sungai Pala di Desa Balok dan Dendang;
- HL Senunsur Sembulu I di Desa Lalang, Padang, Selinsing dan Gantung;
- HL Senunsur Sembulu II di Desa Batu Peny, Jangkar Asam, Limbungan dan Lilangan;
- HL Senunsur Sembulu (IIB, III, & IV) di Desa Batu Itam, Tanjung Kelumpang, Dukong, Simpang Pesak, Dendang dan Lilangan;
- HL Bringsing Pepapuyu di Desa Nyuruk dan Simpang Tiga;
- HL Gunung Sepang di Desa Buding, Mentawak, Mayang, Senyubuk, Desa Simpang Tiga, Desa Kelubi, Renggang, dan Air Madu;
- HL Gunung Kikarak di Desa Mentawak, Mayang dan Senyubuk;
- HL Buding Barat di Desa Cendil dan Buding;
- HL Buding Timur di Desa Buding, Pembaharuan, Senyubuk, Mentawak dan Mayang;

- HL Pantai Teluk Pring / Bukit Nayo di Desa Mempaya, Mengkubang, Burung Mandi, Mayang dan Air Kelik; dan
 - HL Burung Mandi di Desa Sukamandi, Desa Baru, dan Mekarjaya.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya
- Pengembangan kawasan ini diarahkan pada fungsi perlindungan wilayah atau yang memiliki keterkaitan kuat dengan fungsi hidrologis. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya seperti kawasan resapan air. Kawasan resapan air di kawasan perencanaan tersebar di seluruh kecamatan, terutama di Kota Manggar.
- c. Kawasan perlindungan setempat
- Kawasan perlindungan setempat meliputi daerah sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau.
- Kawasan sempadan pantai tersebar di wilayah pantai selatan dan timur Kabupaten Belitung Timur, berjarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
 - Kawasan sempadan sungai, ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Adapun kriteria kawasan sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya (atau sesuai peraturan yang berlaku) :
 1. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan :
 - Garis sempadan paling sedikit berjarak sepuluh meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan tiga meter;
 - Garis sempadan paling sedikit berjarak lima belas meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari tiga meter sampai dengan dua puluh meter; dan
 - Garis sempadan paling sedikit berjarak tiga puluh meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari dua puluh meter.
 2. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, terdiri atas:
 - Garis sempadan untuk sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

- Garis sempadan untuk sungai besar dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- 3. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak tiga meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- 4. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak lima meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- Kawasan sempadan kolong, kolong yang masuk kawasan lindung adalah kawasan sejauh 50-100 m dari bibir kolong. Rencana perlindungan kawasan sekitar kolong tersebar di seluruh kecamatan.
- Kawasan sekitar mata air, ditetapkan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Kawasan sekitar danau/situ/waduk, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air, seperti halnya kawasan resapan air, pemanfaatannya dapat berupa kawasan budidaya hutan, pertanian lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan.
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan terletak di Kecamatan Manggar, Kelapa Kampit, dan Gantung.
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, dan kawasan cagar budaya meliputi :

1. Kawasan pelestarian alam

Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Belitung Timur meliputi obyek wisata alam yang perlu dilindung, seperti Kecamatan Dendang (Gunung Mangkro dan Gunung Badau di Desa Nyuruk, dan pulau – pulau kecil); Kecamatan Dendang; Kecamatan Gantung (Pulau – pulau kecil); Kecamatan Kelapa Kampit (Gunung Lematang Panjang di Desa Air Kelik – Senyubuk, dan pulau-pulau kecil); serta Kecamatan Manggar (Gunung Malang Lepau di Desa Burung Mandi, dan pulau – pulau kecil).

2. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya terdapat di seluruh wilayah pesisir dan perairan laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan terumbu karang dengan tingkat penutupan karang hidup yang tinggi. Untuk wilayah Kabupaten Belitung Timur, kawasan ini tersebar pada seluruh pesisir laut wilayah Kabupaten Belitung Timur dan wilayah pulau-pulau kecil.

3. Kawasan pantai berhutan bakau

Kawasan perlindungan hutan bakau dimaksudkan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, di samping sebagai pelindung pantai, air pasang dan pengikisan air laut (abrasi) serta sebagai pelindung usaha budidaya di belakangnya. Kawasan pantai berhutan bakau tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung Timur kecuali Kecamatan Simpang Renggang.

4. Kawasan cagar budaya

Kawasan ini merupakan kawasan non hutan yang berfungsi untuk melindungi permukiman dan budaya tradisional setempat, meliputi Gosong Cina di Kecamatan Gantung dan Gunung Samak dan Kecamatan Manggar.

Kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan lainnya.

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Rencana kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Belitung Timur memiliki luas 57.539 ha, meliputi :

- HP Sungai Pala di Desa Nyuruk, Jangkang, dan Balok;
- HP Gunung Duren di Desa Nyuruk, Jangkang, Balok, Dendang, Simpang Pesak, Lilangan, Limbongan, Jangkar Asam, Lintang, Renggang, dan Simpang Tiga;
- HP Senunsur Sembulu di Desa Tanjung Kelumpang, Tanjung Batu Itam, Dukong, Simpang Pesak, Lilangan, Limbongan, Jangkar Asam, Batu Penyau, dan Gantung;
- HP Buding Barat di Desa Cendil dan Buding; dan
- HP Buding Timur di Desa Mentawak, Senyubuk, Pembaharuan, dan Mayang.

b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan budidaya pertanian adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian, didasarkan pada kondisi alami, manusia, dan buatan. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dikelompokkan pada peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian Kabupaten Belitung Timur, meliputi :

- Kawasan pertanian tanaman pangan seluas 3.042 ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung Timur.
- Kawasan pertanian hortikultura seluas 50.999 ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung Timur.

- Kawasan perkebunan seluas 44.442 ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung Timur.
 - Kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung Timur.
- c. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan perikanan yang dialokasikan di Kabupaten Belitung Timur meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan perikanan ini diperuntukkan untuk menampung kegiatan perikanan kolam atau pertambakan pada hamparan dengan luasan minimum sepuluh hektar.

Kawasan peruntukan perikanan didukung oleh adanya pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Manggar, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Gantung Kecamatan Gantung, PPI Desa Dendang Kecamatan Dendang dan PPI Selendang di Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit. Adapun rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan meliputi :

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap dikembangkan di seluruh wilayah yang potensial di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan jenisnya.
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan

Kawasan peruntukan budidaya perikanan Kabupaten Belitung Timur terbagi menjadi kawasan perikanan budidaya air tawar, kawasan perikanan budidaya air payau dan kawasan perikanan budidaya air laut baik di perairan umum maupun di laut. Rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar tersebar di seluruh kecamatan. Sementara itu, kawasan budidaya perikanan air payau dan air laut dikembangkan di perairan laut masing-masing kecamatan, kecuali Kecamatan Simpang Renggang. Rencana pengembangan peruntukan budidaya perikanan air laut meliputi :

1. Kecamatan Dendang meliputi Pelabuhan Dendang di Desa Dendang; serta Kawasan perikanan laut / nelayan tradisional di beberapa lokasi yaitu Tanjung Batu Air, Tanjung Punai, dan Tanjung Batu Itam Desa Batu Itam, Tanjung Kelumpang Desa Tanjung Kelumpang, dan di Desa Dukong.
2. Kecamatan Gantung meliputi Kawasan hatchery di sekitar muara Sungai Sembulu dan pesisir Teluk Sembulu di Desa Lilangan; serta Kawasan perikanan laut/nelayan tradisional di beberapa lokasi : Perkampungan Suku Sawang (Teluk Sekacang) Desa Lilangan/Limbungan, Kawasan di sekitar Dusun Gosong Cina Desa Jangkar Asam, dan Kawasan di sekitar Tanjung Modong Desa Selingsing.
3. Kecamatan Kelapa Kampit meliputi Kawasan perikanan laut/nelayan tradisional di beberapa lokasi seperti: Tanjung Batu Pulas/Gunung Mengguru

Desa Cendil, Selindang di Desa Buding, dan Tanjung Sengaran/Pantai Pring Desa Mayang.

4. Kecamatan Manggar yaitu Kawasan perikanan laut tradisional di beberapa lokasi di lepas pantai Kecamatan Manggar.

- Kawasan peruntukan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan Kabupaten Belitung Timur berada di Kecamatan Manggar, Gantung, Dendang, dan Kelapa Kampit.

d. Kawasan peruntukan pertambangan

Kegiatan penambangan terdiri dari penambangan base metal dan galian C. Potensi kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Belitung Timur tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kawasan pertambangan diarahkan (sesuai dengan Kuasa Pertambangan/KP dan Surat Izin Penambangan Daerah/SIPD) pada seluruh kecamatan. Luas rencana kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Belitung Timur seluas 33.707 hektar, terdiri dari 45.445 hektar kawasan pertambangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di darat, 30.075 hektar kawasan pertambangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di laut dan 7.439 hektar Wilayah Pertambangan Rakyat.

e. Kawasan peruntukan permukiman

Rencana pengembangan kawasan permukiman mencapai 14.802 hektar yang terdiri atas peruntukan pengembangan permukiman kawasan perkotaan dan pengembangan permukiman kawasan perdesaan. Pengembangan permukiman kawasan perkotaan diarahkan pada wilayah-wilayah yang secara eksistng sudah menjadi permukiman (permukiman swadaya) secara linear mengikuti perkembangan jaringan jalan dan tidak mengarah pada wilayah sempadan pantai dan tidak mengekspansi hutan lindung. Rencana pengembangan permukiman kawasan perkotaan di Kabupaten Belitung Timur diarahkan pada Kecamatan Manggar (Desa Baru, Desa Lalang, Desa Lalang Jaya, Desa Kurnia Jaya, Desa Padang, dan Desa Mekar Jaya), Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Pembaharuan, Desa Mentawak, Desa Senyubuk, dan Desa Mayang), dan Kecamatan Gantung (Desa Gantung dan Desa Lenggang).

Sementara itu, pengembangan permukiman kawasan pedesaan di Kabupaten Belitung Timur diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada atau sudah terbangun dan pada kawasan baru yang tumbuh secara linier dengan tetap memperhatikan keseimbangan kawasan peruntukan lainnya seperti sawah dan kawasan lindung. Rencana kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Belitung Timur meliputi Desa Buku Limau, Desa Kelubi, Desa Bentaian Jaya, Desa Buding, Desa Cendil, Desa Jangkar Asam, Desa Limbongan, Desa Batu Penyus, Desa Selinsing, Desa Lilangan, Desa Jangkang, Desa Dendang, Desa Balok, Desa Nyuruk, Desa Mengkubang, Desa Air Kelik, Desa Sukamandi, Desa Burung Mandi, Desa

Mempaya, Desa Renggiang, Desa Simpang Tiga, Desa Lintang, Desa Air Madu, Desa Simpang Pesak, Desa Dukong, Desa Tanjung Kelumpang, dan Desa Tanjung Batu Itam. Perluasan areal permukiman tetap diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan.

f. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan kawasan wisata alam. Kawasan wisata tersebut dibagi dalam tiga kawasan yaitu kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata budaya, dan kawasan pariwisata buatan.

Tabel 2.2 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

KAWASAN PARIWISATA ALAM	KAWASAN PARIWISATA BUDAYA	KAWASAN PARIWISATA BUATAN
• Pantai Genting • Gosong Cine • Pantai Burung Mandi • Pantai Nyiur Melambai • Pantai Bukit Batu • Pantai Serdang • Pantai Lalang • Pantai Sengaran • Pantai Tanjung Keluang • Kepulauan Memperak	• Kawasan Wisata Sastra Laskar Pelangi, Kecamatan Gantung • Kawasan Pariwisata Situs Bersejarah, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung • Kawasan Wisata Bangunan Bersejarah Peninggalan Belanda, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung • Kawasan Pariwisata Ziarah Kuil Kwan Im, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung • Wisata Ziarah Makam Keramat KA. Loeso, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung	Pengembangan obyek wisata Kawasan Sirkuit Pulau Dapor, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

g. Kawasan peruntukan industri

Rencana kawasan peruntukan industri dikembangkan di Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) dengan jenis industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Luas peruntukan lahan untuk Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) adalah 1.532 hektar. Pengembangan kawasan industri tersebut diarahkan pada Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar. Pengembangan pada Kecamatan Kelapa Kampit terdiri atas pengembangan KIAK dan Pelabuhan Teluk Asam di Desa Air Kelik. Sementara itu, pengembangan pada Kecamatan Damar meliputi pengembangan KIAK dan Pelabuhan Teluk Asam di Desa Mempaya.

h. Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya merupakan kawasan pertahanan dan keamanan negara yaitu kawasan latihan militer. Kawasan latihan militer tersebut berada di Kawasan AWR (*Air Weapon Range*) TNI AU, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit seluas 309 hektar.

2.1.3.3 Kawasan Strategis

Kawasan strategis dalam hal ini dimaksudkan sebagai kawasan yang mendapatkan peran dan fungsi khusus untuk mendukung pembangunan Kabupaten Belitung Timur. Kawasan strategis Kabupaten Belitung Timur terdiri dari kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya.

- a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kawasan Wisata Terpadu Sepanjang Pantai Burung Mandi-Nyiur Melambai, Kawasan Pengembangan *Hatchery* Perikanan Laut dan Wisata Bahari, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Kawasan Pengembangan PLTU dengan detail sebagai berikut :

- Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)

Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) direncanakan dikembangkan di sepanjang pantai bagian Utara dari Tanjung Pasiren hingga Tanjung Alam Paku. Kawasan Industri Terpadu di Desa Air Kelik (KIAK) merupakan kawasan perindustrian yang bergerak dalam bidang yang utamanya mendukung sektor perikanan dan kelautan (*Agro-Fishery-Industry*), termasuk di dalamnya adalah jenis industri pengemasan hasil perikanan (*Fish Processing Industry*) dan *Industrial Cold Storage* yang berfungsi sebagai pengendali keawetan dan kesegaran hasil perikanan selama masa persiapan pengiriman ke daerah luar, terutama untuk tujuan ekspor.

- Kawasan Wisata Terpadu Sepanjang Pantai Burung Mandi-Nyiur Melambai

Kawasan Wisata Terpadu Burung Mandi dikembangkan di pantai bagian utara Kabupaten Belitung Timur mulai dari Tanjung Burung Mandi hingga Pantai Nyiur Melambai. Atraksi wisata di kawasan ini antara lain meliputi wisata alam pantai, wisata budaya dan wisata keagamaan (kelenteng). Pengembangan kawasan ini didukung dengan pembangunan jaringan jalan sepanjang pantai bagian timur yang membentang dari Pantai Serdang hingga Tanjung Mudong.

- Kawasan Pengembangan *Hatchery* Perikanan Laut dan Wisata Bahari

Kawasan pengembangan *hatchery* dikembangkan di sekitar Teluk Sembulu. Kawasan ini diharapkan mampu menjadi sentra perikanan laut di Kabupaten Belitung Timur. Sementara itu, pengembangan potensi laut di kawasan lainnya

diarahkan pada tiga tipe tingkat eksploitasi, yakni zona eksploitasi terbatas, semi intensif dan intensif. Pada pengembangan zona terbatas, kegiatan perikanan tangkap dibatasi sementara wisata bahari dan kegiatan budi daya kelautan diprioritaskan.

- Kawasan Pelabuhan

Rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari tiga lokasi, yaitu Pelabuhan Teluk Asam, Pelabuhan ASDP Manggar-Ketapang, dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Rencana Pelabuhan Teluk Asam terletak di Teluk Asam, Desa Air Kelik, Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar. Pelabuhan di Teluk Asam ini sebagai pelabuhan samudera dan berfungsi untuk menampung kegiatan pengangkutan peti kemas. Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) berlokasi di bagian utara Kota Manggar, tepatnya di Sungai Manggar dan bersebelahan dengan Pelabuhan Manggar. Pelabuhan tersebut melayani rute Manggar-Ketapang. Rencana lokasi pembangunan PPP Manggar berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Manggar, sebagai fasilitas untuk melengkapi kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang mulai berkembang.

- Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Kawasan Kota Terpadu Mandiri dikembangkan di Kecamatan Gantung, meliputi Danau Nunjau dan UPT Danau Meranteh yang masuk ke dalam wilayah Desa Gantung dan Desa Selinsing. Pengembangan kawasan ini merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi yang sudah ada. Kawasan ini dikembangkan untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan rakyat, jasa dan perdagangan serta permukiman penduduk secara terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kawasan ini juga mendukung konsep pengembangan wilayah Kabupaten Belitung Timur berupa kawasan agropolitan. Luas pengembangan kawasan direncanakan sekitar 500 Ha.

- Kawasan pengembangan PLTU

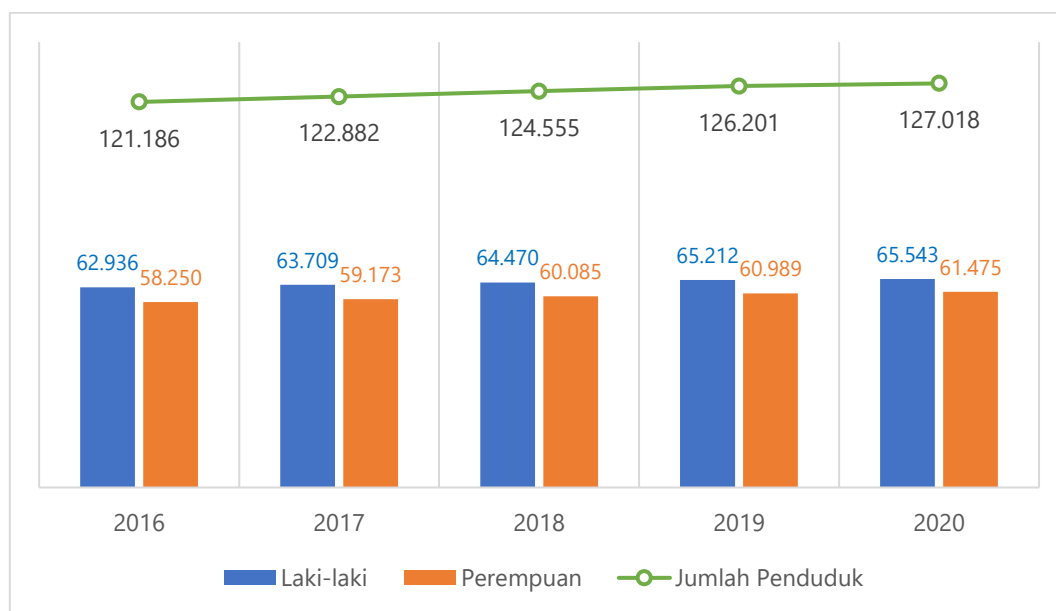
Pengembangan kawasan PLTU dimaksudkan untuk mendukung penyediaan energi alternatif di Kabupaten Belitung Timur. Kawasan ini berlokasi di Desa Mempaya, Kecamatan Damar berkapasitas 2x7,5 MW pengoperasian PLTU Mempaya memanfaatkan cangkang sawit sebagai bahan bakar utamanya. Luas kawasan ini direncanakan sekitar 27 Ha.

- b. Kawasan strategis pertumbuhan sosial budaya meliputi kawasan permukiman pantai, kawasan Desa Wisata Laskar Pelangi, kawasan pelestarian budaya Gunung Samak dan Gosong Cina. Kawasan permukiman pantai berada di beberapa lokasi mulai dari Desa Dukong sampai Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak. Pengembangan kawasan ini dimaksudkan sebagai bagian dari penataan kawasan permukiman pantai secara teratur sehingga mampu mendukung kegiatan

pengembangan wisata di sekitar kawasan tersebut. Kawasan Desa Wisata Laskar Pelangi berlokasi di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung dengan rencana luas kurang lebih 104 hektar. Kawasan Pelestarian Budaya Gunung Samak diarahkan pengembangannya secara terpadu dengan kawasan wisata alam pantai. Sementara itu, pengembangan Kawasan Gosong Cina dikembangkan sebagai bagian dari cagar budaya di Kabupaten Belitung Timur.

2.1.4 Kependudukan

Kondisi demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan sumber daya yang partisipasinya sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi demografi daerah umumnya menyangkut jumlah dan persebaran, pertumbuhan, dinamika serta komposisi lainnya. Dalam konteks kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur selalu meningkat dalam kurun waktu 2016-2020. Dalam jangka waktu tersebut, total rata-rata pertumbuhan penduduk juga tercatat turun sebesar 1,23 persen per tahun. Sebagai wilayah kepulauan, jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur tercatat sebanyak 127.018 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan penduduk sebesar 51 jiwa per km². Jumlah tersebut merupakan kepadatan paling rendah di antara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila dirinci maka terdapat pertambahan sebanyak 2.497 jiwa dari tahun sebelumnya yang tersebar di tujuh kecamatan. Adapun kondisi demografi Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh penduduk laki-laki dengan angka sex ratio sebesar 107 pada tahun 2020. Sedangkan jika dilihat dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Manggar, sementara wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Simpang Renggiang.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	LUAS (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN (JIWA/KM ²)
1.	Manggar	9	229	39.135	171
2.	Gantung	7	546,3	28.349	52
3.	Dendang	4	243,3	11.007	30
4.	Kelapa Kampit	6	498,5	19.367	39
5.	Damar	5	236,9	13.214	56
6.	Simpang Renggiang	4	390,7	7.512	19
7.	Simpang Pesak	4	362,2	8.434	35
JUMLAH		39	2.506,9	127.018	51

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2020

Tabel 2.4 Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

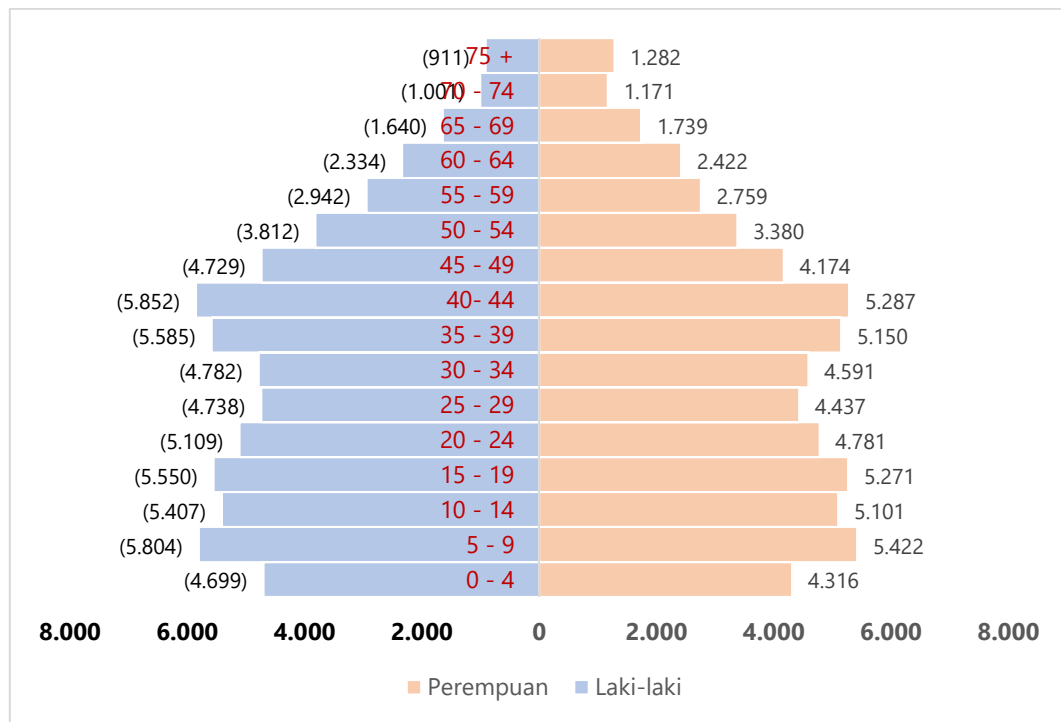
KECAMATAN	RUMAH TANGGA	KECAMATAN	RUMAH TANGGA
Manggar	13.297	Damar	4.488
Gantung	9.507	Simpang Renggiang	2.686
Dendang	3.532	Simpang Pesak	2.849
Kelapa Kampit	6.563	TOTAL	42.922

Sumber: Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020

Berdasarkan informasi di atas, Kecamatan Manggar seluas 229 km² merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Belitung Timur sebesar 39.353 jiwa yang juga sebagai wilayah terpadat dengan kepadatan mencapai 171,85 jiwa/km². Hal ini dikarenakan hampir semua aktivitas penting skala kabupaten dilaksanakan pada kecamatan ini sehingga terjadilah aglomerasi penduduk yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Adapun untuk kecamatan-kecamatan lain tingkat kepadatannya cenderung sangat rendah yang juga ditandai dengan keberadaan kawasan permukiman yang masih jarang.

Persoalan terkait persebaran penduduk dan kepadatan di Kabupaten Belitung Timur yang belum merata atau terkonsentrasi di satu wilayah harus segera dicarikan solusinya. Pemerataan jumlah penduduk ini berkaitan dengan standarisasi penyediaan fasilitas publik ketika masih banyak penduduk yang harus pergi ke wilayah lain untuk mendapatkan pelayanan dari fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerataan juga dapat

memperkecil kesenjangan pertumbuhan serta pembangunan antarwilayah yang terlihat sangat timpang antara Manggar dan kecamatan lainnya.



Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 2.10 Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

Di sisi lain, untuk komposisi penduduk detail yaitu jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk laki-laki, dengan *sex ratio* yang terbentuk sebesar 108 atau dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Belitung Timur terdapat 108 penduduk laki-laki. Jika dikelompokkan berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Belitung Timur masih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan porsi sebesar 69,08 persen atau sebanyak 89.521 jiwa, disusul dengan usia muda (0-14 tahun) sebesar 24,17 persen, dan usia tua (65+) sebesar 6,24 persen seperti pada **Gambar 2.10**. Dengan proporsi demikian maka *dependency ratio* yang terbentuk adalah 44,20 persen, setiap 100 orang usia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Kondisi ini tentu menguntungkan bagi wilayah karena jumlah penduduk produktif berlimpah dan akan berpengaruh positif terhadap berlangsungnya proses pembangunan yang tentunya membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang tidak sedikit dan tenaga yang besar.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 7,85 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan 1,79 persen atau sebesar 0,13 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 7,71 triliun rupiah. Perubahan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

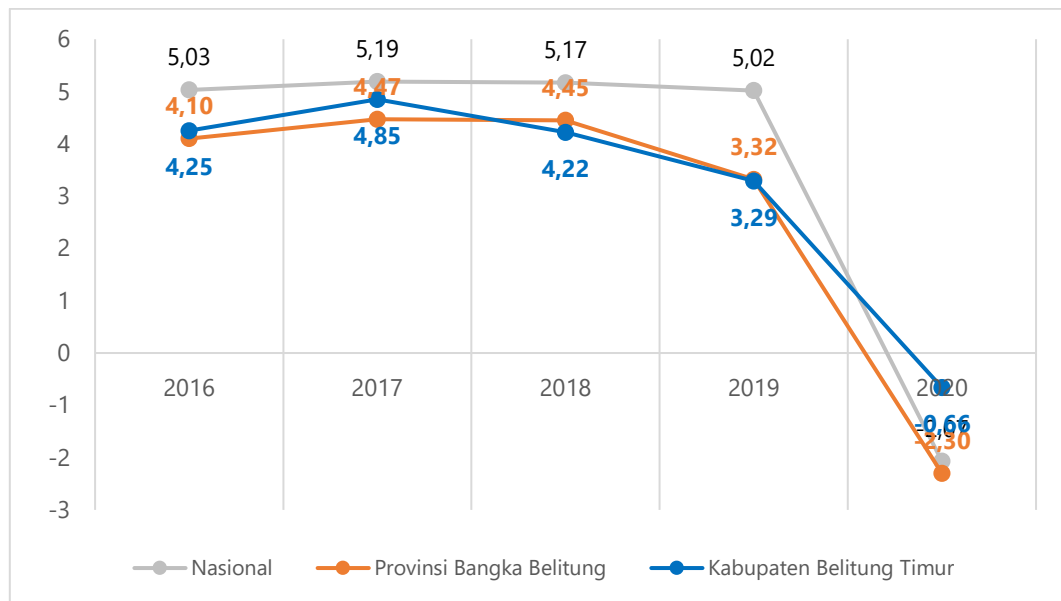
Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan, dari 5,50 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 5,46 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020, Belitung Timur mengalami kontraksi sebesar -0,66 persen atau berkurang sebesar 0,04 triliun rupiah. Penurunan terbesar terjadi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu sebesar 19 miliar dikarenakan berhentinya proses pelayanan akibat pandemi Covid-19.

Hampir semua sektor lapangan kerja di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan kinerja (kontraksi), tak terkecuali sektor pertambangan dan penggalan serta industri pengolahan yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Berkurangnya operasional pabrik-pabrik di Jawa maupun daerah lain yang membutuhkan timah sebagai bahan baku juga berpengaruh terhadap berkurangnya permintaan timah dari Kabupaten Belitung Timur. Fenomena ini jelas mengganggu keberlangsungan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan yang juga disertai penurunan harga timah dunia.

Dilihat dari perkembangan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung masih berada di bawah laju pertumbuhan nasional baik secara rata-rata maupun capaian setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan diartikan sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun tertentu.

Sejak tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung cenderung mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut mengalami kontraksi, bahkan pertumbuhan ekonomi provinsi berkontraksi cukup dalam yaitu sebesar -2,30 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional mengalami sedikit perlambatan, namun tidak cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan pada lapangan usaha yang kontribusinya besar terhadap perekonomian seperti Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Dari 17 sektor atau lapangan usaha yang ada, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi 10,12 persen dan diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,82 persen. Sementara empat kategori usaha lain yang mengalami pertumbuhan meskipun rendah adalah pengadaan listrik dan gas; jasa keuangan asuransi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta *real estate*. Sektor Informasi dan komunikasi masih bisa tumbuh sebesar 10,12 persen disebabkan perubahan perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19 di mana kegiatan Work From Home (WFH) bagi pekerja dan belajar dari rumah secara daring bagi pelajar menyebabkan permintaan pada sektor ini mengalami peningkatan signifikan. Sementara sebagian besar sub sektor mengalami perlambatan dikarenakan kebijakan *physical* dan *social distancing* yang berimbas pada operasional sektor-sektor tersebut.

Tabel 2.5 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

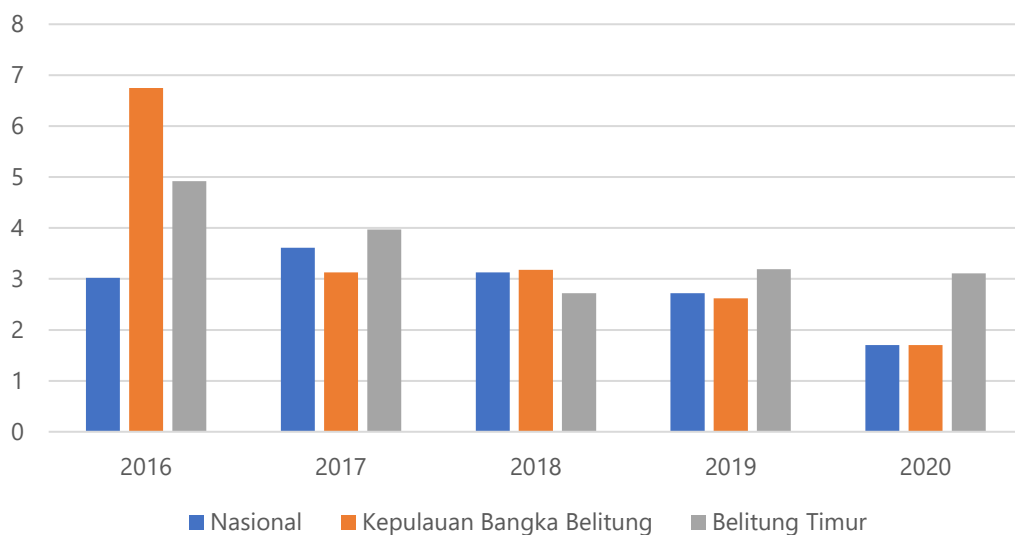
NO.	LAPANGAN USAHA	2016	PERSEN	2017	PERSEN	2018	PERSEN	2019	PERSEN	2020	PERSEN
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.231.901,60	4,88	1.235.665,40	0,31	1.281.838,80	3,73	1.326.420,70	3,48	1.403.662,50	5,82
B	Pertambangan dan Penggalian	908.899,20	1,39	980.436,20	7,87	982.415,60	0,20	975.812,50	-0,67	961.916,40	-1,42
C	Industri Pengolahan	930.183,10	3,76	1.018.538,90	9,50	1.060.917,40	4,16	1.090.445,30	2,78	1.085.072,70	-0,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.637,70	10,04	2.786,30	5,16	1.932,40	5,71	3.515,30	19,88	3.607,50	2,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	876,40	3,69	916,50	4,58	961,70	4,96	1.014,00	5,41	1.005,60	-0,79
F	Konstruksi	376.512,10	5,77	380.095,30	0,95	396.340,40	4,27	416.598,90	5,11	401.661,20	-3,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	494.900,30	3,97	530.403,10	7,17	565.876,80	6,69	578.434,30	2,22	527.652,50	-8,78
H	Transportasi dan Pergudangan	91.974,90	4,48	98.230,60	6,81	106.251,90	8,15	113.606,40	6,92	104.113,50	-8,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112.353,40	4,54	117.560,10	4,63	120.850,00	2,80	129.455,60	7,12	124.962,60	-3,47
J	Informasi dan Komunikasi	62.886,40	7,54	64.547,00	2,64	72.621,60	12,51	79.672,20	9,71	87.736,00	10,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	22.145,40	7,28	22.439,60	1,42	22.828,90	1,64	23.583,20	3,30	24.012,20	1,82
L	Real Estate	135.193,00	4,36	137.364,20	1,61	149.814,70	9,06	156.511,40	4,47	160.125,10	2,31
M,N	Jasa Perusahaan	13.778,70	5,25	13.982,00	1,48	15.559,70	11,29	16.160,30	3,86	14.218,30	-12,02
O	Administrasi Pemerintahan,	292.317,50	7,28	295.920,00	1,23	317.345,80	7,24	341.771,10	7,70	322.547,50	-5,62

NO.	LAPANGAN USAHA	2016	PERSEN	2017	PERSEN	2018	PERSEN	2019	PERSEN	2020	PERSEN
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
P	Jasa Pendidikan	110.818,70	8,40	119.534,50	7,86	129.854,10	8,63	139.121,20	7,14	135.217,20	-2,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.621,60	7,46	65.998,80	7,10	71.560,90	8,43	78.293,90	9,41	79.093,90	1,02
R,S,T	Jasa Lainnya	24.876,20	7,17	25.820,10	3,79	28.144,90	9,00	31.073,40	10,40	28.536,90	-8,16
	TOTAL PDRB	4.873.876,20		5.110.238,60		5.325.115,60		5.501.489,70		5.465.141,60	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Beberapa faktor yang memengaruhi inflasi di antaranya meningkatnya konsumsi, daya tarik masyarakat terhadap barang, ketersediaan stok. Pada tahun 2018, Belitung Timur dapat mengendalikan inflasi sebesar 2,72, angka tersebut di bawah angka provinsi sebesar 3,18 dan nasional sebesar 3,13. Untuk tahun 2019, angka inflasi provinsi dan nasional masing-masing pada angka 2,62 dan 2,72, sedangkan Belitung Timur lebih tinggi yaitu 3,19. Tahun 2020 inflasi Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 3,11 jauh di atas provinsi dan nasional yang keduanya tidak lebih dari 1,7.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.12 Laju Inflasi di Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

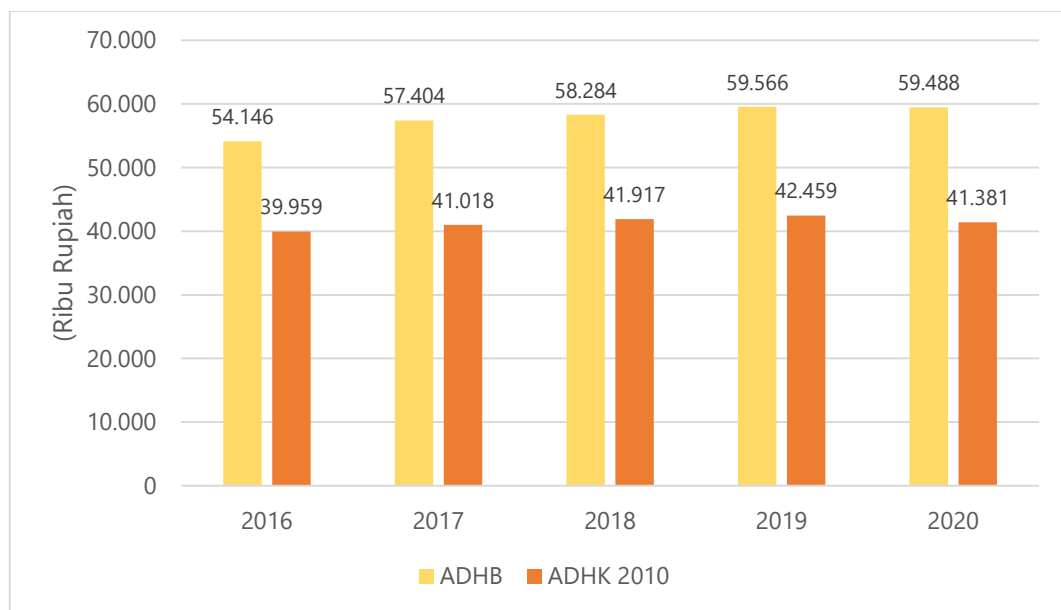
2.2.1.3 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan serta kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB per kapita juga merupakan salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan serta kemakmuran penduduk di suatu daerah. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, dari 54,15 juta

rupiah (2016) menjadi 59,57 juta rupiah (2019). Namun, pada tahun 2020 menurun menjadi 59,49 juta rupiah. Penurunan tersebut berkaitan dengan pandemi yang terjadi pada tahun tersebut.

PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Negara. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2016 sampai 2019 juga mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita atas dasar harga konstan tercatat sebesar 39,96 juta rupiah terus naik hingga 42,46 juta rupiah pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 41,38 juta rupiah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.13 PDRB per Kapita Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

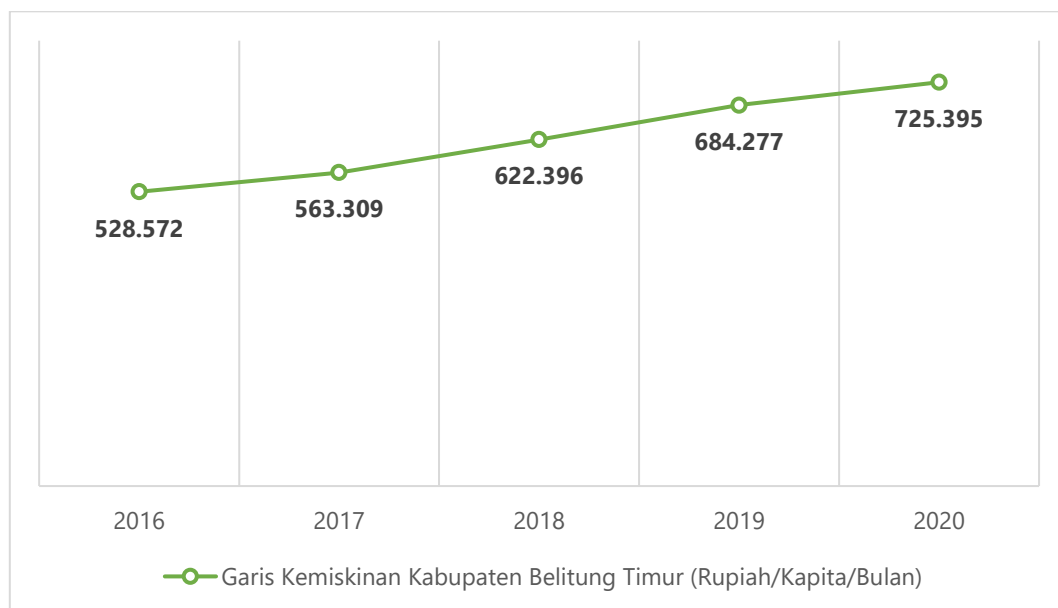
2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran umum untuk menunjukkan seberapa merata pendapatan atau kekayaan yang didistribusikan dalam suatu daerah secara menyeluruh. Indeks Gini memiliki nilai berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan tingkat distribusi yang sangat merata, sedangkan koefisien gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang sangat tidak merata atau ketimpangan yang terjadi secara sempurna. Capaian Indeks Gini Kabupaten Belitung Timur diasumsikan tidak berbeda jauh dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,270 dan meningkat menjadi 0,276 pada tahun 2020, atau <0,3 yang berarti masih masuk dalam kriteria ketimpangan rendah.

2.2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan multidimensional, karena banyaknya pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi yang disebut miskin, maka banyak definisi tentang kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), pada umumnya definisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah “kekurangan” dalam “kesejahteraan”. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi dengan suatu standar kehidupan yang “layak” tidak tercapai. Dalam menentukan standar kehidupan “layak”, BPS melakukan pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Dengan pendekatan ini kemudian ditentukan Garis Kemiskinan (yang merupakan gabungan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan), penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin. Cara penentuan penduduk miskin semacam ini disebut penentuan kemiskinan absolut.

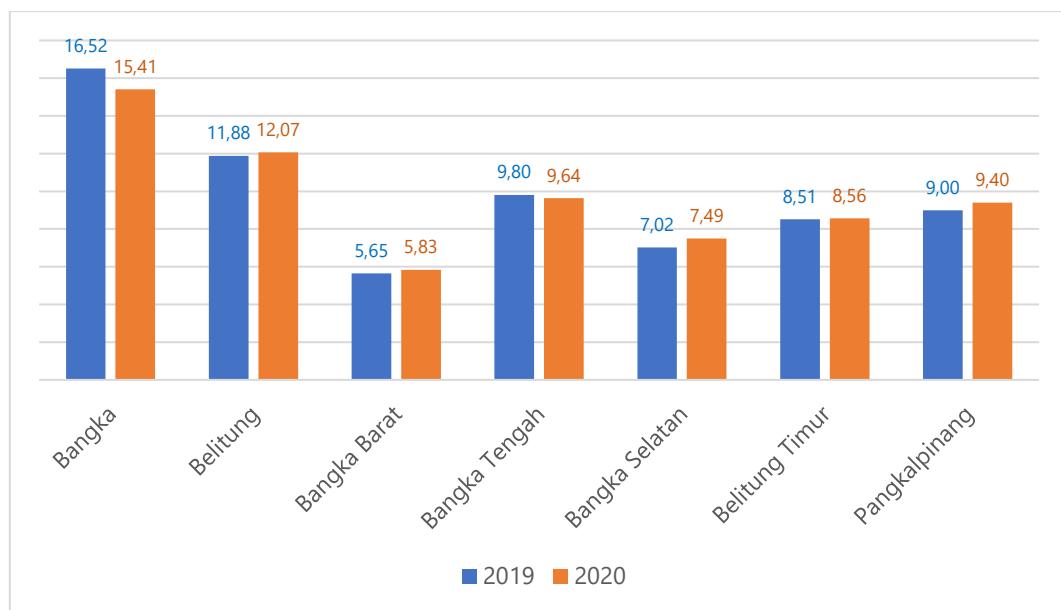


Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2021

Gambar 2.14 Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur menempati urutan tertinggi kelima di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adanya pandemi Covid-19 juga memberikan dampak besar berkaitan dengan kemiskinan penduduk yaitu berhentinya aktivitas perekonomian masyarakat dan pendapatan yang menurun. Dalam kurun waktu lima tahun, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Belitung Timur terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2020, garis kemiskinan Kabupaten Belitung Timur telah mencapai angka 725.395 rupiah/kapita/bulan, di mana angka tersebut sedikit lebih tinggi dari Provinsi

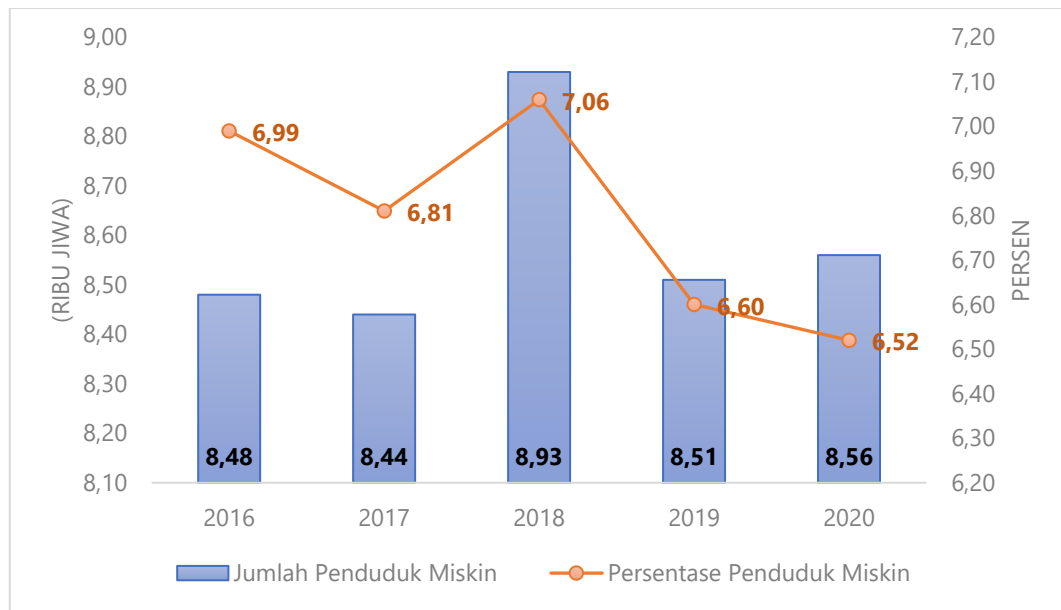
Kepulauan Bangka Belitung sebesar 721.455. Capaian ini meningkat dibanding tahun lalu karena beberapa faktor salah satunya pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat terhadap beberapa jenis komoditas makanan sedangkan suplai/produksi yang berkurang karena pandemi maupun kondisi cuaca. Di sisi lain, perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 8.930 jiwa atau bertambah 490 jiwa dibanding tahun 2017, kemudian turun menjadi 8.510 pada tahun 2019 dan kembali naik pada tahun 2020 sebesar 8.560 jiwa atau bertambah 50 orang yang terkategori sebagai penduduk miskin.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Gambar 2.15 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2020

Dilihat dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa sebagian kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan jumlah kemiskinan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari imbas adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin, Kabupaten Belitung Timur masih di atas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun di bawah nasional. Posisi relatif persentase penduduk miskin di Belitung Timur terhadap rata-rata provinsi pada tahun 2020 sebesar 6,52 persen sementara provinsi sebesar 4,53 persen dan rata-rata nasional sebesar 9,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masih menempati posisi tertinggi penduduk miskin secara proporsional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melambatnya penurunan proporsi kemiskinan di Belitung Timur lebih disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19.



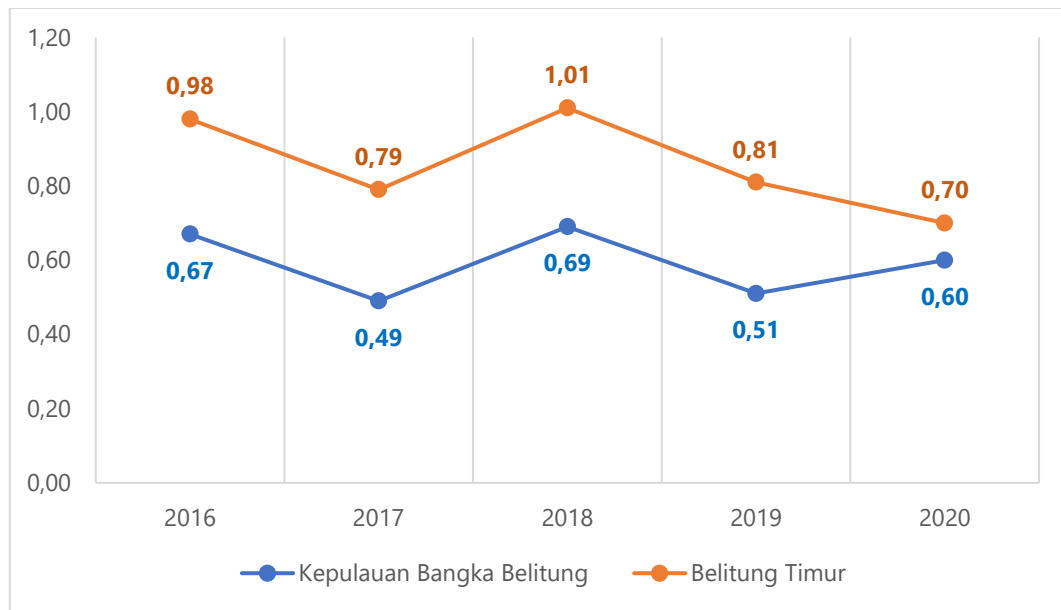
Sumber: BPS Kabupaten Belitong Timur, 2021

Gambar 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2020

a) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan (GK). Semakin tinggi nilai P1 menunjukkan semakin tinggi kesenjangan kemiskinan di wilayah tersebut. Semakin tinggi nilainya maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Belitong Timur berada di posisi ketiga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020 sebesar 0,70 persen menurun dari tahun 2019 di angka 0,81 persen, berada di bawah rata-rata nasional (1,75 persen) dan di atas rata-rata Provinsi (0,60 persen). Menurunnya kedalaman kemiskinan ini menunjukkan adanya penurunan kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Belitong Timur. Hal ini juga menunjukkan secara rata-rata penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan karena meningkatnya pendapatan perkapita penduduk miskin.

Keberlanjutan upaya menurunkan indeks kedalaman kemiskinan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melakukan strategi peningkatan pendapatan, menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil serta sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan dan sinergi strategi lintas sektor, lintas program dan lintas pemangku kepentingan akan menjadi kunci dari keberhasilan dalam penanganan kemiskinan.



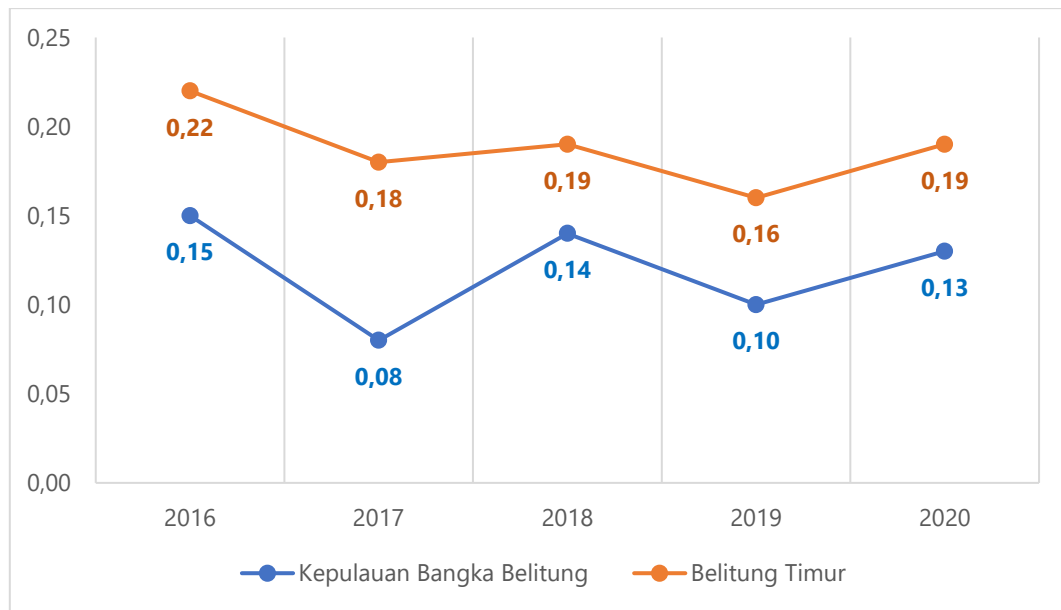
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 (data diolah)

Gambar 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

b) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan distribusi penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 menunjukkan semakin tinggi intensitas kemiskinan. Data berikut menunjukkan bahwa posisi relatif P2 Kabupaten Belitung Timur berada dibawah P2 nasional. Pada tahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Timur 0,19 berada di atas rata-rata Provinsi 0,17 dan berada di bawah Nasional 0,47%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur memiliki ketimpangan intensitas yang rendah.

Selama periode 2016 – 2020 perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung fluktuatif. Perkembangan Indeks P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin yang meningkat pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, sementara sebelumnya menurun dibandingkan tahun 2018. Artinya penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin Kabupaten Belitung Timur cenderung tidak stabil atau rentan terhadap kondisi perekonomian Belitung timur selama 5 tahun terakhir. Kebijakan intervensi yang tepat terhadap pembentuk P2 akan memudahkan menurunkan keparahan kemiskinan di kabupaten belitung Timur.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 (data diolah)

Gambar 2.18 Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

2.2.1.6 Angka Kriminalitas

Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2016-2019 cenderung meningkat dan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2019, terdapat 85 kasus kriminal, jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 80 kasus. Jumlah tindak pidana terbanyak terdapat di Polres Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2.6 Jumlah Tindak Pidana menurut Kepolisian Resor Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	WILAYAH KEPOLISIAN RESOR	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dendang	2	5	4	2	2
2.	Gantung	10	11	9	13	18
3.	Manggar	18	12	11	20	9
4.	Kelapa Kampit	6	2	4	7	5
5.	Polres	-	44	52	43	33
JUMLAH		36	74	80	85	67

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2020

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

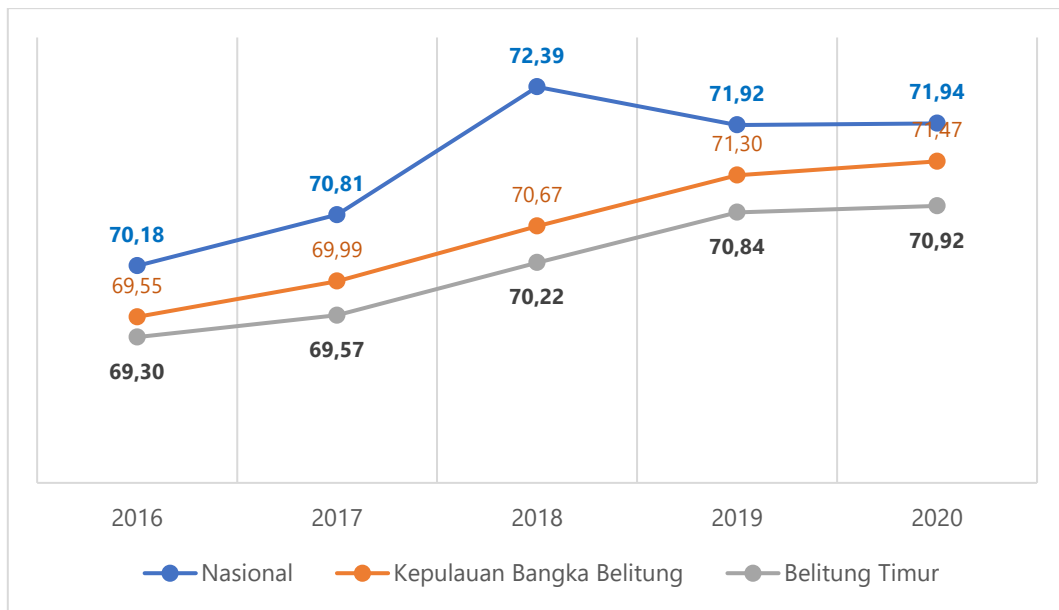
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia mempunyai batasan yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi, karena tujuan pembangunan manusia tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan penduduk, tetapi diarahkan kepada tercapainya produktivitas yang tinggi, yang diikuti dengan pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Dengan kata lain pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak.

Tujuan tersebut dapat dicapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan kemungkinan panjang umur; berpendidikan dan berketerampilan; serta mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Agar semua konsep yang luas dan menyeluruh yang merangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi, pendidikan sampai kebebasan demokratis dan kualitas hidup yang disebut pembangunan manusia tersebut dapat diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat dipantau dan diukur dengan mudah yang diterjemahkan ke dalam data statistik.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam hal ini, dibutuhkan keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pembangunan manusia. Ini dikarenakan, semakin tingginya IPM di suatu daerah mengindikasikan keberhasilan pembangunan manusia di daerah tersebut. Pembangunan ini harus beriringan ke dalam tiga aspek penting kehidupan yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga aspek penting ini perlu diperhatikan lagi sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat.

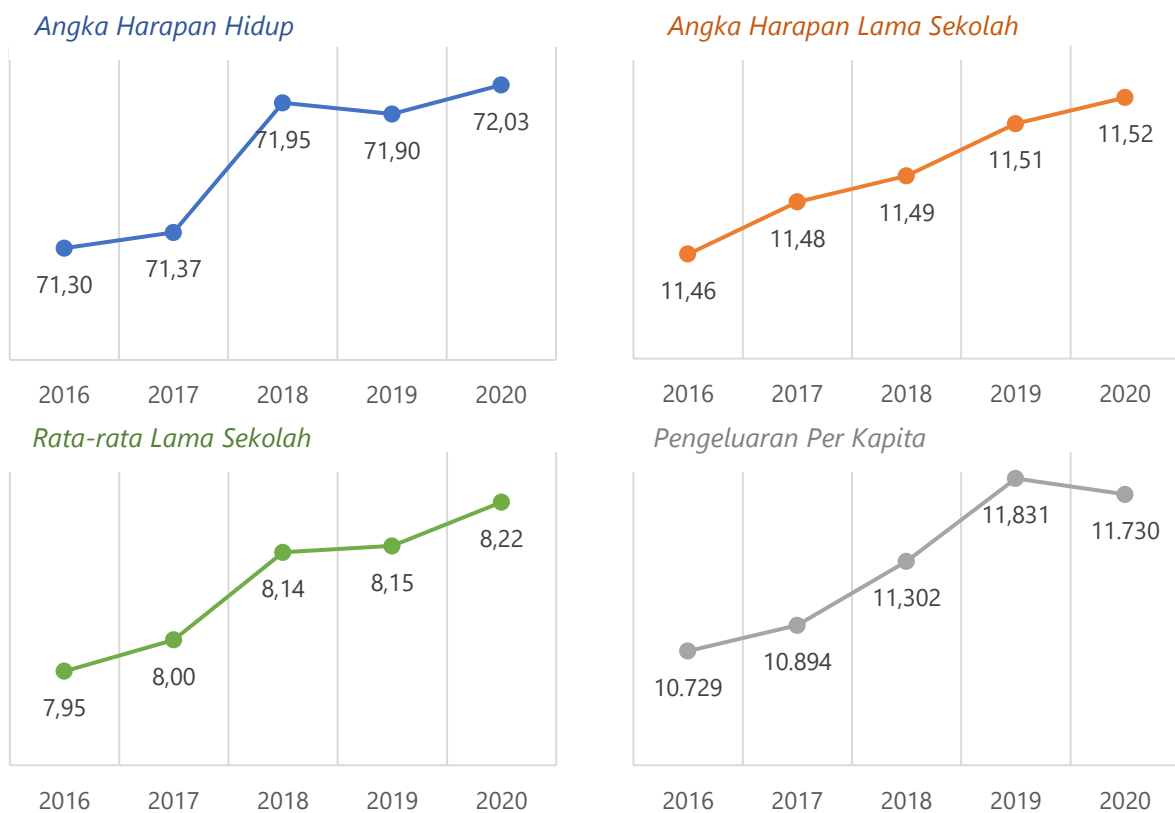
Secara rata-rata, pertumbuhan IPM Kabupaten Belitung Timur pada lima tahun terakhir sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 2,34 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Belitung Timur masih harus ditingkatkan lagi. Karena dengan klasifikasi daerah yang tidak jauh berbeda, Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung lebih baik rata-rata pertumbuhannya dibanding Kabupaten Belitung Timur dengan rata-rata pertumbuhan IPM masing-masing yaitu 3,61 persen dan 2,40 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengkaji kendala apa saja yang dihadapi di tiap aspek penyusun IPM. IPM Kabupaten Belitung Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan data capaian IPM tahun 2018-2020 Kabupaten Belitung Timur memiliki status capaian IPM pada kategori tinggi, meningkat dari tahun 2017 yang masih masuk kategori sedang.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.19 Perkembangan IPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Perkembangan komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.



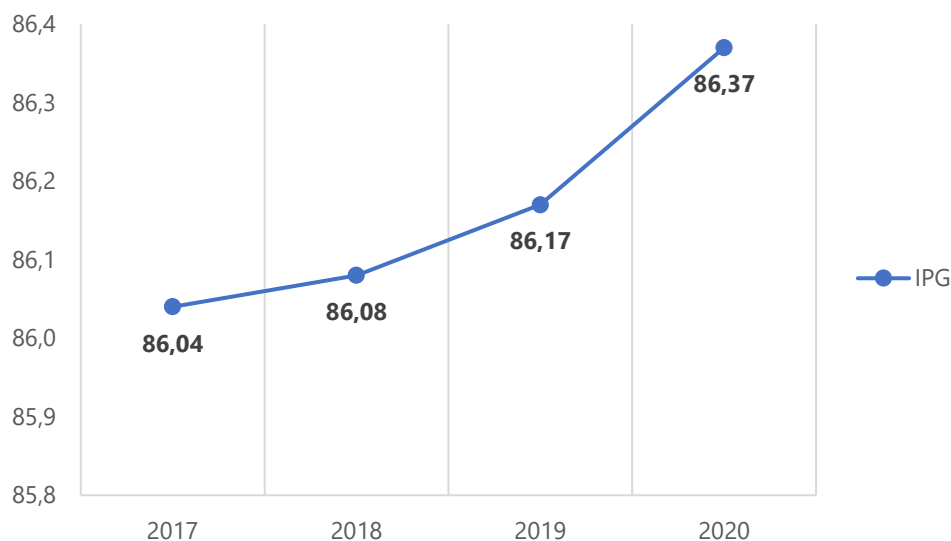
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.20 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Komponen penyusun IPM terdiri dari tiga aspek, yaitu dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup), dimensi pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan dimensi ekonomi (pengeluaran per kapita). Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Di Kabupaten Belitung Timur, AHH menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 71,30 tahun menjadi 72,03 tahun pada tahun 2020. Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, dari tahun 2016 yaitu sebesar 11,46 tahun menjadi 11,52 tahun pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah juga meningkat dari tahun 2016 sebesar 7,95 tahun menjadi 8,22 tahun pada tahun 2020. Pengeluaran per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp10.729,- meningkat menjadi Rp11.730,- pada tahun 2020.

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan 100. Pada kurun 2017-2020 capaian IPG Kabupaten Belitung Timur cenderung mengalami kenaikan tahun 2017 sebesar 86,04 dan meningkat menjadi 86,37 pada tahun 2020.

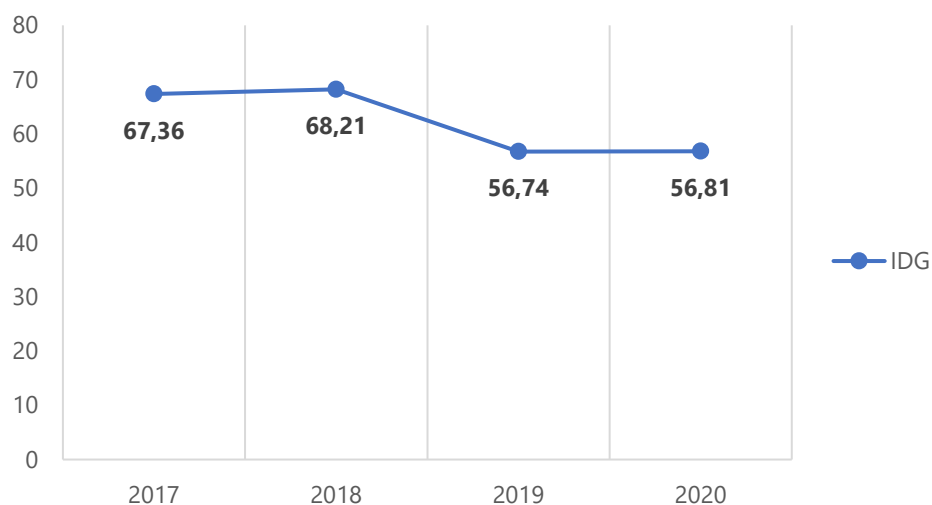


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2020

2.2.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Pada kurun waktu 2017-2020 Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan capaian IDG yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, capaian IDG Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 67,36, kemudian menjadi 56,81 di tahun 2020. Angka tersebut masih jauh di bawah capaian IDG nasional, yaitu sebesar 75,57 pada tahun 2020, namun berada di atas angka IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 53,03.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.22 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2020

2.2.2.4 Aspek Pendidikan

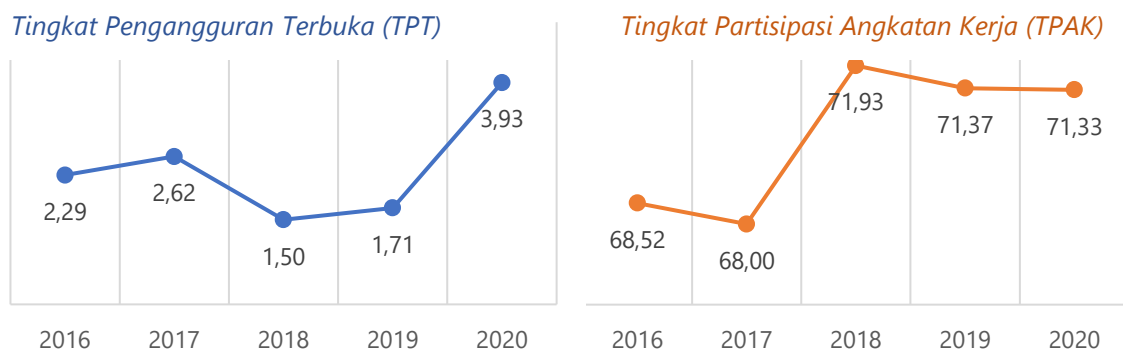
Aspek pendidikan dapat dilihat melalui harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni. Pada tahun 2020, komponen harapan lama sekolah adalah sebesar 11,52 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah yaitu 11,52 tahun. Angka Melek Huruf Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 adalah sebesar 98,79 persen. Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI adalah 109,58 persen, SMP/MTs sebesar 92,44 persen, dan SMA/SMK/MA yaitu 71,96 persen. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI sebesar 99,22 persen, SMP/MTs adalah 82,70 persen, dan SMA/SMK/MA yaitu 60,96 persen.

2.2.2.5 Aspek Kesehatan

Kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari aspek kesehatan, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian khusus selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Belitung Timur adalah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Pada tahun 2019, angka kematian ibu maternal sebesar 102, dan angka kematian bayi sebanyak 18 kasus. Tingginya angka kematian ibu sebagian besar disebabkan oleh pendarahan *postpartum* atau pendarahan saat melahirkan. Sementara itu, tingginya angka kematian bayi sebagian besar disebabkan oleh berat badan lahir rendah (BBLR) dan *afiksia* atau gangguan pengangkutan oksigen.

2.2.2.6 Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan berkaitan dengan tingkat pengangguran dan partisipasi kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin besar angka TPT di suatu daerah mengindikasikan terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi angka TPAK mengindikasikan semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang aktif secara ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Perkembangan TPT dan TPAK Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, TPT Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 2,29 persen, dan pada tahun 2020 menjadi 3,93 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja. Sementara itu, untuk TPAK Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2016 adalah sebesar 68,52, dan pada tahun

2020 menjadi 71,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja yang aktif secara ekonomi.

2.2.2.7 Pertanahan

Pemberian sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur menyerahkan 2.339 sertifikat tanah untuk masyarakat di 13 desa Kabupaten Belitung Timur. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan belum tercapainya kesepakatan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan kesenian di Kabupaten Belitung Timur cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Hal tersebut dilihat dari pengurangan jumlah kelompok/sanggar seni aktif yang terdapat di Kabupaten Belitung Timur secara signifikan. Pada tahun 2016, jumlah kelompok/sanggar seni aktif di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 57 kelompok, dan menjadi berjumlah 32 kelompok pada tahun 2020.

Tabel 2.7 Jumlah Kelompok dan Gedung Kesenian di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok/sanggar seni aktif	Kelompok	57	57	57	32	32
2.	Jumlah gedung kesenian	Gedung	7	7	8	8	8

Sumber : Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kabupaten Belitung Timur 2016-2020

Pada tahun 2017 Kabupaten Belitung Timur memiliki 23 organisasi olahraga, 200 klub olahraga, dan 8 gedung olahraga. Terjadi peningkatan pada jumlah organisasi dan klub olahraga di Kabupaten Belitung Timur dari tahun sebelumnya, yang masing-masing berjumlah 22 organisasi dan 156 klub olahraga. Sementara itu, untuk jumlah gedung tetap.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017).

Pembahasan aspek pelayanan umum meliputi capaian indikator kinerja setiap variabel yang terbagi ke dalam fokus layanan urusan wajib dan pilihan. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib pemerintah dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, sesuai yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Layanan urusan pemerintah wajib terbagi menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan langsung dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar (nonpelayanan dasar).

2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintah wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial sebagai berikut:

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki fungsi penting dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam pembangunan suatu wilayah. Pembangunan dalam pendidikan dapat menciptakan sumber daya yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, keahlian, maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengedepankan peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan formal maupun nonformal.

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka melek huruf	Persen	98,28	97,93	98,03	98,17	99,22
2.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,95	8,00	8,14	8,15	8,22
3.	Harapan lama sekolah	Tahun	11,46	11,48	11,49	11,51	11,52
4.	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	Persen	66,63	67,32	81,57	66,69	68,80
5.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S-1	Persen	78,54	91,46	92,31	88,9	85,83
6.	Sekolah yang terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan	Persen	95,0	96,5	99,23	99,05	-
7.	Persentase sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan	Persen	-	-	-	91,55	97,18
PAUD							

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
8.	Angka Partisipasi Kasar	Persen	83,71	89,3	59,42	61,52	55,42
9.	Angka Partisipasi Murni	Persen	57,5	61,25	45,17	58,13	55,42
Pendidikan Dasar SD/MI							
10.	Angka Partisipasi Kasar	Persen	114,40	115,79	108,67	109,36	109,58
11.	Angka Partisipasi Sekolah	Angka	0,09	0,07	0,2	0,3	0,01
12.	Angka Partisipasi Murni	Persen	100,00	99,88	98,46	98,43	99,22
13.	Nilai Rata-Rata Ujian Nasional	Angka	7,53	7,65	6,92	6,79	-
14.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	98	98	98	100	100
15.	Rasio Guru dan Murid	Orang	13	14	15	13	-
16.	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
17.	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	99,76	99,93	95,77	113,35	93,54
Pendidikan Menengah SMP/MTs							
18.	Angka Partisipasi Kasar	Persen	79,73	81,74	88,69	92,75	92,44
19.	Angka Partisipasi Sekolah	Angka	0,62	0,54	2,5	1,94	1,26
20.	Angka Partisipasi Murni	Persen	77,74	79,64	81,09	82,82	82,70
21.	Nilai Rata-Rata Ujian Nasional	Angka	6,05	6,25	5,15	7,28	-
22.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	96	97	98	99	100
23.	Rasio Guru dan Murid	Orang	17	17	22	16	-
24.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
25.	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	Persen	97,68	97,7	98,45	95,14	99,94
Pendidikan SMA							
26.	Angka Partisipasi Kasar	Persen	74,46	75,97	72,75	72,72	71,96
27.	Angka Partisipasi Murni	Persen	56,59	59,07	61,51	61,18	60,96
SPM							
28.	Warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD	Persen	-	61,25	45,17	61,36	68,94
29.	Warga negara usia 7-15 tahun yang	Persen	-	95,75	98,16	78,95	96,96

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
	berpartisipasi pada Pendidikan Dasar						
30.	Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan keaksaraan	Persen	-	-	-	10,4	36,82

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, 2020

1. Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya penduduk >15 tahun melek huruf, tahun 2020 sebesar 99,22 persen atau naik apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 98,17 persen.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah waktu yang dihabiskan oleh penduduk dari berbagai golongan usia untuk menempuh semua jenis pendidikan. Capaian angka rata-rata lama sekolah tahun 2020 adalah sebesar 8,22 naik apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 8,15. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, angka rata-rata lama sekolah secara konsisten menunjukkan capaian yang meningkat setiap tahunnya.

3. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah waktu yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada tahun 2020, capaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Belitung adalah sebesar 11,52 tahun, meningkat dari tahun 2019 dengan capaian sebesar 11,51. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,52 tahun atau setara dengan SMA kelas 3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Belitung Timur meningkat setiap tahunnya meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 12,05 tahun, hal ini harus didorong untuk lebih meningkatkan angka harapan lama sekolah agar meningkat lebih pesat pada tahun-tahun berikutnya.

4. Persentase guru yang bersertifikat pendidik

Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru/dosen sebagai tenaga profesional. Dari **Tabel 2.8** dapat dilihat pada tahun 2019 persentase jumlah guru di Kabupaten Belitung Timur yang telah bersertifikat pendidik mengalami peningkatan dari 66,69 persen (tahun 2019) menjadi 68,80 persen pada tahun 2020.

5. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S-1

Capaian persentase guru yang memenuhi kualifikasi D-IV atau S-1 di kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 adalah sebesar 85,83 persen, menurun dari capaian tahun 2019 sebesar 88,9 persen. Sejak tahun 2018, capaian ini cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017. Hal ini menjadi penting karena kualifikasi guru ini menjadi salah satu tolak ukur kualitas tenaga pendidik untuk menunjang peningkatan pendidikan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.

6. Sekolah yang terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah/lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program pada jalur pendidikan formal. Dari **Tabel 2.8**, dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 hingga 2019 lebih dari 99 persen Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Belitung Timur telah terakreditasi minimal B.

7. Persentase sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan

SPM Pendidikan adalah standar atau ketentuan yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Di Kabupaten Belitung Timur, persentase sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan telah mencapai lebih dari 90 persen. Pada tahun 2020, persentase sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan mencapai 97,18 persen, meningkat dari tahun 2019 dengan capaian sebesar 91,55 persen.

8. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan **Tabel 2.8**, APK PAUD pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 61,52 persen (tahun 2019) menjadi 55,42 persen (tahun 2020).

9. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD

Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia PAUD yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Berdasarkan **Tabel 2.8**, APM PAUD mengalami penurunan pada dua tahun terakhir dari 58,13 persen (tahun 2019) menjadi 55,42 persen (tahun 2020).

10. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu pendidikan SD (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Capaian APK SD di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen dibandingkan tahun 2019, menjadi sebesar 109,58 persen yang berarti persentase penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Belitung Timur yang bersekolah di tingkat SD sebanyak 109,58 persen. Perkembangan APK SD mengalami penurunan pada tahun 2017, namun rata-rata capaian tersebut masih lebih dari 100.

11. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SD terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang tersebut. Dari **Tabel 2.8**, diketahui bahwa APS SD mengalami penurunan dari 0,3 pada tahun 2019 menjadi 0,01 pada tahun 2020. Sedangkan dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 nilai APS SD cenderung mengalami peningkatan setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2017.

12. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

Angka Partisipasi Murni (APM) SD merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia SD yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Capaian APM SD di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan pada sejak tahun 2016, namun kembali meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian APM SD adalah 99,22 persen, artinya sekitar 99,22 persen penduduk di Kabupaten Belitung Timur yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD. Capaian tersebut meningkat sebesar 0,79 dari capaian pada tahun 2019 sebesar 98,43 persen.

13. Nilai rata-rata ujian nasional SD

Dari **Tabel 2.8**, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai ujian nasional pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Nilai rata-rata ujian nasional SD pada tahun 2018 sebesar 6,92 menjadi 6,79 pada tahun 2019.

14. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Pada tahun 2019 dan 2020, capaian persentase sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik telah mencapai 100 persen. Sekolah dengan kondisi bangunan yang baik tentu akan menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar yang aman, nyaman serta kondusif, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian keberhasilan kinerja pendidikan yang lainnya.

15. Rasio Guru dan Murid jenjang SD

Menurut BPS rasio guru dan murid adalah merupakan angka yang merupakan pembagian banyaknya murid dengan jumlah guru. Berdasarkan PP No. 74 tahun 2008, rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk SD 1:20. Berdasarkan data pada **Tabel 2.8**, perbandingan jumlah murid dengan guru pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018, yaitu 1:15 (2018) menjadi 1:13 (2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio guru dan murid untuk jenjang SD di Belitung Timur masih belum ideal.

16. Angka Kelulusan SD/MI

Angka Kelulusan SD/MI di Kabupaten Belitung secara konsisten menunjukkan capaian sebesar 100 persen, artinya seluruh siswa yang menempuh jenjang sekolah dasar mampu menamatkan pendidikannya hingga lulus Sekolah Dasar.

17. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019 angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs yaitu sebesar 113,35 persen menjadi 93,54 persen (tahun 2020).

18. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu pendidikan SMP (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Dari **Tabel 2.8**, dapat dilihat APK SMP pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, dari 92,75 persen (tahun 2019) menjadi 92,44 persen (tahun 2020). Capaian APK SMP pada tahun 2020 menggambarkan sebanyak 92,44 persen penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Belitung Timur bersekolah di tingkat SMP. Meski demikian, perkembangan APK SMP di Kabupaten cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019.

19. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SMP terhadap jumlah penduduk usia sekolah

yang sesuai dengan jenjang tersebut. Dari **Tabel 2.8**, diketahui bahwa APS SMP mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, yaitu dari 1,94 (tahun 2019) menjadi 1,26 (tahun 2020).

20. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia SMP yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya yaitu usia 13-15 tahun. Berdasarkan **Tabel 2.8**, APM SMP mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 82,70, artinya sekitar 88,70 persen penduduk di Kabupaten Belitung Timur yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP. Capaian tersebut menurun sebesar 0,12 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 82,82.

21. Nilai rata-rata ujian nasional SMP

Dari **Tabel 2.8**, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai ujian nasional SMP pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Nilai rata-rata ujian nasional SD pada tahun 2018 sebesar 5,15 menjadi 7,28 pada tahun 2019.

22. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Pada tahun 2020, capaian persentase sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik telah mencapai 100 persen. Sekolah dengan kondisi bangunan yang baik tentu akan menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar yang aman, nyaman serta kondusif, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian keberhasilan kinerja pendidikan yang lainnya.

23. Rasio Guru dan Murid jenjang SMP

Menurut BPS rasio guru dan murid adalah merupakan angka yang merupakan pembagian banyaknya murid dengan jumlah guru. Berdasarkan PP Nomor 74 tahun 2008 pasal 17, rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk SMP 1:20. Berdasarkan **Tabel 2.8**, perbandingan jumlah murid dengan guru pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Rasio guru murid tahun 2018 adalah 1:22, sedangkan tahun 2019 sebesar 1:16. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio guru dan murid untuk jenjang SMP di Kabupaten Belitung timur masih belum ideal.

24. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Belitung secara konsisten menunjukkan capaian sebesar 100 persen, artinya seluruh siswa yang menempuh jenjang sekolah dasar mampu menamatkan pendidikannya hingga lulus Sekolah Menengah Pertama.

25. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK

Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019 angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs yaitu sebesar 95,14 persen, menjadi 99,94 persen pada tahun 2020.

26. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA

Pada tahun 2020 APK SMA Kabupaten Belitung Timur sebesar 71,96 persen, artinya persentase penduduk berusia 16-18 tahun di Kabupaten Belitung Timur yang bersekolah di tingkat SMA sebanyak 71,96 persen. Perkembangan capaian APK SMA di Kabupaten Belitung Timur mengalami fluktuasi, dimana capaian tahun 2018-2020 cenderung mengalami penurunan setelah pada tahun 2016-2017 menunjukkan peningkatan yang cukup baik.

27. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA

Pada tahun 2020 APM SMA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 sebesar 60,96 persen, artinya sekitar 60,96 persen penduduk di Kabupaten Belitung Timur yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMA. Perkembangan capaian APM SMA di Kabupaten Belitung Timur mengalami fluktuasi, dimana capaian tahun 2019-2020 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016-2018.

28. Warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD

Pada tahun 2020, capaian penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada jenjang PAUD mencapai 68,94 persen. Capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang memiliki capaian sebesar 61,36 persen.

29. Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Dasar

Persentase penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Dasar yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2020 adalah sebesar 96,96 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 78,95 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk usia 7-15 tahun di Kabupaten Belitung Timur mampu berpartisipasi dan menempuh jenjang pendidikan dasar

30. Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan keaksaraan

Realisasi indikator penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan keaksaraan pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 36,82 persen. Indikator ini menggambarkan bahwa penduduk usia 7-18 tahun yang tidak dapat melanjutkan atau

menyelesaikan pendidikan formal namun tetap melanjutkan pendidikan melalui pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan non formal bagi warga masyarakat buta aksara untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Dengan demikian masyarakat tetap memiliki bekal pendidikan yang lebih baik.

2.3.1.2 *Urusan Kesehatan*

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama selain bidang pendidikan yang diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di antaranya pemerataan pelayanan kesehatan serta sarana prasarana memadai. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan kesehatan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2019.

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,30	71,37	71,52	71,90	72,03
2.	Persentase beredarnya makanan yang sehat di lingkungan masyarakat	Persen	30	0	50	50	33,3
3.	Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	Persen	80	81	82	84	100
4.	Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	60	70	80	85	95,77
5.	Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar	Persen	80	80	82	85	84,78
6.	Persentase tersedianya obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	68	70	72	75	95,93
7.	Persentase puskesmas yang terakreditasi	Persen	0	14	28	57	100
8.	Persentase Pusat Informasi Konsultasi (PIK) remaja yang dibina	Persen	52,77	55,55	55,55	55,55	-
9.	Persentase puskesmas yang melakukan	Persen	-	-	-	-	100

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
	pelayanan kesehatan remaja						
10.	Persentase desa ODF	Persen	0	12,82	28,21	51,28	61,54
11.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	87	0	92	94	71,3
12.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM)	Persen	95	95	95	96	89,03
13.	Angka Kematian Ibu	Angka	95,83	49,7	189,75	452,03	-
14.	Angka Kematian Bayi	Angka	6,71	8,95	13,28	11,55	-
15.	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,04	0,10	0,08	0,04	0,03
16.	Persentase penurunan penyakit menular	Persen	16	15,90	15,75	15,5	2,9
17.	Angka Kematian Balita	Angka	8,62	10,44	14,71	13,56	12,33
18.	Persentase anak usia 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	Persen	88	90	91	100	-
19.	Cakupan desa siaga aktif dengan strata madya dan purnama	Persen	50	55	60	65	87,17

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur, 2020

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan *Age Specific Rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 mencapai 72,03 tahun, artinya waktu perkiraan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir adalah 72,03 tahun. Perkembangan capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu tahun 2016-2020 secara konsisten menunjukkan peningkatan, hal ini juga

mengindikasikan indikator kesejahteraan masyarakat dalam aspek juga mengalami peningkatan.

2. Persentase beredarnya makanan yang sehat di lingkungan masyarakat

Persentase beredarnya makanan yang sehat di lingkungan masyarakat merupakan indikator pada program pengawasan obat dan makanan, urusan kesehatan. Indikator tersebut menunjukkan peredaran makanan yang sehat di lingkungan masyarakat. Pada Kabupaten Belitung Timur, capaian persentase beredarnya makanan yang sehat di lingkungan masyarakat mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu sebesar 50 persen turun menjadi 33,3 persen pada tahun 2020.

3. Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar

Cakupan puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar menunjukkan jumlah puskesmas yang pelayanannya sesuai dengan SPM. Pada tahun 2020, angka cakupan tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 100 persen. Hal tersebut berarti semakin banyak puskesmas di Kabupaten Belitung Timur yang pelayanannya sudah sesuai dengan SPM.

4. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan jumlah masyarakat yang sudah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Di Kabupaten Belitung Timur, angka cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional terus meningkat dari tahun 2016 sebesar 60 persen menjadi 95,77 persen, yang berarti hampir semua masyarakat Kabupaten Belitung Timur sudah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

5. Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar

Pelayanan kesehatan dasar merupakan hak setiap masyarakat, sehingga indikator untuk mengukur ketercapaian aspek tersebut diperlukan. Persentase masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar adalah indikator yang digunakan pada Kabupaten Belitung Timur, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, penurunan tersebut tidak signifikan, yaitu sebesar 0,22 persen.

6. Persentase tersedianya obat dan vaksin di puskesmas

Ketersediaan obat dan vaksin pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas merupakan hal yang krusial. Pada Kabupaten Belitung Timur, persentase tersedianya obat dan vaksin di puskesmas mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 68 persen menjadi 95,93 persen pada tahun 2020.

7. Persentase puskesmas yang terakreditasi

Persentase puskesmas yang terakreditasi menunjukkan jumlah puskesmas yang sudah memperoleh akreditasi. Pada tahun 2020, angka persentase tersebut di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan 100 persen. Hal tersebut berarti semua puskesmas di Kabupaten Belitung Timur sudah memperoleh akreditasi.

8. Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan remaja

Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan remaja merupakan indikator yang digunakan dalam program kesehatan anak dan remaja. Indikator tersebut baru digunakan pada tahun 2020, sehingga ketercapaiannya hanya dapat dilihat pada tahun tersebut, yaitu sebesar 100 persen. Hal tersebut berarti seluruh puskesmas di Kabupaten Belitung Timur melakukan pelayanan kesehatan remaja.

9. Persentase Desa ODF

Persentase Desa ODF menunjukkan jumlah desa yang telah bebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat. Indikator tersebut berpengaruh terhadap aspek kesehatan karena pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat akan berakibat pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Di Kabupaten Belitung Timur, persentase Desa ODF pada tahun 2020 adalah 61,54 persen. Hal tersebut berarti masih terdapat desa-desa di Kabupaten Belitung Timur yang belum bebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat.

10. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

Skrining kesehatan merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui potensi gangguan kesehatan atau penyakit tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah masyarakat di atas 60 tahun ke atas (lansia) mendapatkan skrining kesehatan yang sesuai dengan SPM sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kesehatan lansia. Di Kabupaten Belitung Timur, jumlah lansia yang mendapatkan layanan tes skrining kesehatan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 94 persen menjadi 71,3 persen.

11. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai SPM

Ibu hamil termasuk pada golongan rentan dalam masyarakat, sehingga memerlukan perhatian ekstra dalam pelayanan kesehatannya. Persentase ibu hamil di Kabupaten Belitung Timur yang mendapatkan pelayanan sesuai SPM pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 89,03 persen. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM.

12. Angka kematian ibu

Angka kematian ibu menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau 42 hari setelah terminasi kehamilan akibat kehamilan atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) juga menggambarkan status gizi dan tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu masa nifas. Pada tahun 2019, di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan angka kematian ibu sebesar 452,03 dengan jumlah 9 kematian ibu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Belitung Timur masih termasuk tinggi. Angka tersebut meningkat dari AKI tahun 2018 sebesar 189,75 per 100.000 kelahiran hidup.

13. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi menunjukkan probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah Kematian Bayi yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur sepanjang tahun 2019 berjumlah 23 kematian. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 adalah sebesar 11,55 per 1.000 kelahiran hidup, mengalami kenaikan dari AKB tahun 2018 sebesar 13,28 per 1.000 kelahiran hidup.

14. Persentase balita gizi buruk

Balita Gizi buruk didefinisikan sebagai anak usia di bawah 5 tahun (0 s/d 4 tahun 11 bulan) dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 (negative tiga) dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017, persentase balita gizi buruk adalah sebesar 0,10 dan terus menurun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 0,03 persen.

15. Persentase penurunan penyakit menular

Persentase penurunan penyakit menular merupakan indikator yang digunakan pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/tidak menular. Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan yang signifikan pada indikator tersebut, khususnya pada tahun 2020. Tahun 2019, persentase penurunan penyakit menular di Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 15,5 persen dan menjadi sebesar 2,9 persen pada tahun 2020.

16. Angka kematian balita

Angka kematian balita menunjukkan kematian balita usia 59 bulan (bayi dan anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu per 1.000 jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama. Angka kematian balita di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan pada tahun . Pada tahun

2016, angka kematian balita di Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 13,56 menurun menjadi sebesar 12,33 pada tahun 2020.

17. Persentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)

Anak-anak, terutama bayi dan balita, termasuk dalam golongan masyarakat rentan yang memerlukan perhatian ekstra dalam pelayanan kesehatannya. Persentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai SPM ditujukan untuk mengukur jumlah anak usia tersebut yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Di Kabupaten Belitung Timur, indikator ini mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, hingga mencapai angka 100 persen pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan seluruh anak usia 0-59 bulan yang berada di Kabupaten Belitung Timur sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai SPM.

18. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa untuk mengembangkan kesiapsiagaan masyarakat dalam memelihara kesehatannya secara mandiri. Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Belitung Timur terus meningkat atau bertambah dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, cakupan desa siaga aktif adalah sebesar 50 persen, kemudian menjadi 87,17 persen pada tahun 2020.

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang layak dan mampu melayani aktivitas masyarakat, serta pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Belitung Timur. Berikut merupakan hasil capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kapasitas jalan kabupaten	Km	-	4	8	13,662	13,662
2.	Pesentase tersedianya luasan RTH publik	Persen	14,59	14,59	15	18,48	-
3.	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	Persen	4,51	4,13	6	4,72	5,37

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	80,64	78,1	70,1	62,33	79,67
5.	Persentase kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan abrasi yang ditanggulangi	Persen	22	22	-	33,33	33,33
6.	Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air	Persen	100	100	100	77,78	77,78
7.	Ketaatan tata ruang	Persen	65	65	65	64,95	77,44
8.	Akses sanitasi masyarakat	Persen	64,58	62,88	81,02	89,35	93,36
9.	Akses air bersih masyarakat	Persen	74,41	81,12	83,89	86,41	87,67
10.	Akses air minum masyarakat	Persen	74,41	74,39	73,57	77,9	79,65
11.	Persentase keberadaan sumber air pada daerah rawan bencana sesuai dengan fungsi dan manfaatnya	Persen	-	-	-	50	50
12.	Persentase kawasan strategis daerah dengan infrastruktur baik	Persen	16	16	16	16	-
13.	Rasio jaringan irigasi	Persen	27,28	38,45	35	36,24	36,24

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur, 2020

1. Kapasitas jalan kabupaten

Kapasitas jalan kabupaten yang dimaksud pada indikator ini adalah panjang jalan yang dibangun (tidak menambahkan panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan) bukan arus maksimum melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Capaian indikator kinerja ini merupakan akumulasi setiap tahunnya, dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 adalah 13,662 km.

2. Persentase luasan RTH publik

Persentase ketersediaan RTH publik ini merupakan perbandingan dari luas taman-taman kecil, ruang terbuka publik, hutan kota, hutan lindung, dan luas wilayah saluran udara tegangan tinggi yang terletak di Desa Simpang Tiga, Kecamatan

Simpang Renggiang sampai Desa Padang, Kecamatan Manggar, dibandingkan dengan luas wilayah daratan Kabupaten Belitung Timur. Persentase ketersediaan RTH publik Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 adalah sebesar 46.319,19 ha dari 250.691 ha luas wilayah Kabupaten Belitung Timur atau 18,48 persen.

3. Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan

Jumlah IMB yang diterbitkan merupakan jumlah akumulatif dari tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah 2.053 dengan penambahan 163 IMB yang diterbitkan pada tahun 2019 (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, 2018). Jumlah bangunan gedung di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan data jenis bangunan yang ada tahun 2019 adalah 43.541. Pada tahun 2020, persentase IMB yang diterbitkan meningkat menjadi 5,37 persen.

4. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang ruas jalan kabupaten di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-377 Tahun 2015 Tentang Status Ruas Jalan Kabupaten adalah 480,88 km. Pada tahun 2020, realisasi capaian kinerja persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 79,67 persen, tidak berubah dari tahun sebelumnya.

5. Persentase kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan abrasi yang ditanggulangi

Wilayah Kabupaten Belitung Timur merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana. Beberapa jenis kejadian bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Belitung Timur yaitu abrasi pantai, banjir, dan tanah longsor. Titik wilayah yang rawan terhadap jenis kejadian bencana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wilayah rawan abrasi, meliputi:

- Pantai Mudong, meliputi Kecamatan Gantung dan Manggar.
- Pulau Buku Limau, Pulau Long, Pulau Sekunyit, Pulau Ketapang, Pulau Bulian, Pulau Batu, dan Pulau Pesemut.
- Muara Sungai Manggar sampai ke Pantai Kuala Tambak.

b. Wilayah Dusun Cunggu sepanjang Sungai Lenggang Kecamatan Gantung dan Pantai Punai

Pada tahun 2020, dari 12 titik wilayah rawan abrasi tersebut, hanya 4 titik wilayah/kawasan atau sekitar 33,33 persen yang ditanggulangi walaupun belum mencakup seluruh luasan wilayah yang dilindungi yaitu Pantai Mudong, Pantai Kuala Tambak, Dusun Cunggu sepanjang Sungai Lenggang dan Pantai Punai.

6. Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air

Kawasan rawan bencana banjir dan longsor merupakan salah satu masalah di Kabupaten Belitung Timur. Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan pengendalian daya rusak air diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja dalam penanganan banjir dan longsor tersebut. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 dan 2020 berada pada angka yang sama, yaitu 77,88 persen. Hasil tersebut diperoleh dari realisasi tujuh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, antara lain 6 pembangunan talud/saluran primer di Desa Lalang, Senyubok, Buding, Suka Mandi, Jangkar Asam dan Dendang, serta 1 pembangunan Talud Pice dan normalisasi Sungai Lenggang. Terdapat dua kegiatan yang tidak terealisasi, yaitu pembangunan talud saluran primer Tebat-Rasau dan pembangunan drainase primer eks Sawah Belakang Pasar Kecamatan Kelapa Kampit.

7. Ketaatan Tata Ruang

Penilaian terhadap RTRW merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemberian suatu opini nilai yang didasarkan data dan informasi yang objektif dan relevan mengenai RTRW dengan menggunakan metode/teknik tertentu. Penilaian ketaatan tata ruang pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,44 persen.

8. Akses sanitasi masyarakat

Persentase akses sanitasi masyarakat Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 (jamban sehat) adalah 89,35 persen, dengan membandingkan jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi layak dengan jumlah KK di Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2020, persentase akses sanitasi masyarakat meningkat menjadi 93,36 persen.

9. Akses air bersih dan air minum masyarakat

Persentase akses air bersih pada tahun 2020 meningkat menjadi 87,67 persen dari tahun 2019. Peningkatan akses ini diperoleh melalui persentase layanan SPAM IKK, PDAM, SPAM Perdesaan/Pamsimas, dan bukan jaringan perpipaan. Persentase akses air minum masyarakat juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 79,65 persen.

10. Persentase keberadaan sumber air pada daerah rawan bencana sesuai dengan fungsi dan manfaatnya

Keberadaan sumber air yang dimaksud adalah keberadaan sumber air pada suatu lokasi yang rawan kekeringan dan membutuhkan sumber air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik sebagai penyuplai kebutuhan air untuk irigasi sehingga dapat meningkatkan pertanian, pengendalian banjir, atau untuk memenuhi air

bersih masyarakat saat kemarau tiba. Hingga tahun 2019 (untuk Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya) Dinas Pekerjaan Umum telah membangun sebanyak tiga embung di Desa Dukong, Desa Nyuruk, Desa Lintang dan satu rehabilitasi pada daerah tangkapan sungai dan danau Desa Kurnia Jaya. Sementara itu, untuk Desa Aik Kelik, Kolong Minyak, Kolong Teratai dan Kolong MPB, belum dilaksanakan. Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 dan 2020 masih berada pada angka 50 persen. Hal tersebut berarti masih terdapat daerah rawan kekeringan yang belum terlayani sumber air bersih.

11. Persentase kawasan strategis daerah dengan infrastruktur baik

Capaian indikator kinerja persentase infrastruktur kawasan strategis daerah dengan infrastruktur baik dilihat berdasarkan perkembangan kawasan, konektivitas dan aksesibilitas jalan, infrastruktur penunjang, serta dinamika kebijakan yang ada. Pada tahun 2016-2019, persentase kawasan strategis daerah dengan infrastruktur daerah adalah sebesar 16 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum ada perubahan signifikan terkait pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis Kabupaten Belitung Timur.

Kawasan strategis di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kepentingan ekonomi, terdiri dari:

- 1) Kawasan Industri Air Kelik (KIAK)
- 2) Pelabuhan ASDP Manggar-Ketapang
- 3) Pelabuhan Dendang
- 4) Kawasan Kota Terpadu Mandiri
- 5) Pelabuhan Terpadu Teluk Asam
- 6) Pelabuhan Perikanan Pantai Manggar
- 7) Kawasan Wisata Terpadu Pantai Nyiur Melambai - Kuala Tambak-Burung Mandi
- 8) Kawasan Pengembangan Hatchery perikanan dan bahari Kecamatan Manggar
- 9) Kawasan Pengembangan Energi PLTU Kecamatan Damar
- 10) Kawasan Marina Bandoeng River
- 11) Kawasan Wisata Pantai Punai dan Kawasan Minapolitan

Dari 11 kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Belitung Timur, Kawasan Pelabuhan ASDP Manggar-Ketapang, Kawasan Kota Terpadu Mandiri, Pelabuhan Perikanan Pantai Manggar, Kawasan Pengembangan Energi PLTU Kecamatan Damar, Kawasan Wisata Pantai Punai dan Kawasan Wisata Terpadu Sepanjang

Pantai Nyiur Melambai-Kuala Tambak dan Burung Mandi memiliki infrastruktur jalan atau aksesibilitas yang baik.

Namun, untuk infrastruktur penunjang di enam kawasan tersebut, baru Kawasan Wisata Pantai Punai dan Kawasan Wisata Terpadu sepanjang Pantai Nyiur Melambai-Kuala Tambak-Burung Mandi yang memiliki infrastruktur penunjang yang memadai. Ada beberapa kawasan strategis yang sampai dengan saat ini belum ada perkembangannya seperti Kawasan Industri Aik Kelik, Kawasan Strategis yang sedang akan dimulai rencana pembangunannya seperti Pelabuhan Dendang, dan kawasan strategis yang sudah berkembang seperti kawasan strategis pariwisata.

12. Rasio jaringan irigasi

Capaian kinerja rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi kabupaten terhadap lahan budidaya pertanian, atau dengan kata lain ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pada tahun 2019 dan 2020, capaian kinerja rasio jaringan irigasi adalah sebesar 36,24 persen.

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman mulai dikelola secara efektif sejak tahun 2017 dengan dibentuknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Data dasar terkait urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih terbatas dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) baru disusun pada tahun 2018, sehingga tidak semua komponen data historis dimiliki. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	40,40	54,50	58,89	76,92	74,23
2.	Rasio rumah layak huni	Persen	89,82	131,05	105,16	-	-
3.	Luas kawasan kumuh	Ha	120,61	118,27	55,78	29,66	31,18
4.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	3,17	5,05	46,83	51,81	9,37
5.	Persentase permukiman yang tertata	Persen	96,41	96,48	99,12	99,20	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur, 2020

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Pada tahun 2020, jumlah rumah layak huni di Kabupaten Belitung Timur adalah sebanyak 23.635 unit. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah rumah layak huni pada tahun 2019, yaitu 24.439 unit. Berdasarkan jumlah tersebut, persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 74,23 persen.

2. Rasio rumah layak huni

Dalam kurun waktu tahun 2016-2018, angka rasio rumah layak huni di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2017 dan 2018, angka rasio rumah layak huni di Kabupaten Belitung Timur telah mencapai lebih dari 100 persen, naik secara signifikan dalam tiga tahun di mana tahun 2016 sebesar 89,82 persen. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang positif karena rumah yang layak huni menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan penduduk dilihat dari terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal layak yang dapat memberikan rasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera bagi penghuninya. Adanya bantuan perumahan dari provinsi melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah Tinggal Layak Huni (PK RTLH) dan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) turut berkontribusi dalam peningkatan penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Belitung Timur.

3. Luas kawasan kumuh

Luas kawasan kumuh di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan penurunan yang signifikan dari 120,61 ha pada tahun 2016 menjadi 29,66 ha pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh dibuktikan dengan penurunan luasan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Belitung.

4. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dihitung dengan menggunakan rasio luas permukiman kumuh yang telah ditangani terhadap total luas permukiman kumuh di Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2020, luas kawasan kumuh adalah 29,66 Ha. Pengurangan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2020 adalah 2,78 Ha, yang terdapat di Desa Baru, Kecamatan Manggar.

5. Persentase permukiman yang tertata

Dalam kurun waktu tahun 2016-2019, persentase permukiman yang tertata menunjukkan peningkatan capaian kinerja. Pada tahun 2019, persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Belitung Timur mencapai 99,20 persen. Peningkatan permukiman permukiman yang beiringan dengan penurunan kawasan kumuh sebagaimana data yang ditunjukkan pada Tabel 2.11 menunjukkan

capaian kinerja pemerintah daerah yang semakin baik pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

2.3.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diarahkan pada penegakan peraturan daerah, untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan. Berikut capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penegakan PERDA	Persen	80,51	98,46	43,75	43,75	43,75
2.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kali	70	80	85	75	75
3.	Jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, keindahan (K3) yang tertangani	Aksi/ Kasus	-	-	-	3	3
4.	Jumlah petugas perlindungan masyarakat	Orang	-	-	388	390	390
5.	Jumlah kendaraan patroli terpadu	Unit	3	5	5	5	5
6.	Tingkat persentase pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu	Persen	100	100	100	100	99,59
7.	Tingkat persentase menurunnya kasus konflik sosial	Persen	80	80	70	100	100
8.	Tingkat persentase kasus penyelenggaraan demokrasi	Persen	100	100	100	100	100
9.	Tingkat persentase perubahan perilaku	Persen	100	100	100	100	50

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
	terhadap bahaya napza						
10.	Terselenggaranya Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana melalui Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana, Mitigasi Penanggulangan Bencana dan Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Persen	-	-	80	85	0
11.	Meningkatkan Pelayanan di Bidang Penanggulangan Bencana melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	Persen	-	-	65,5	98,16	72,96
12.	Tersedianya logistik dan obat-obatan baik di kawasan rawan bencana maupun di kawasan tanggap darurat bencana	Persen	-	-	22,5	80,76	66,53

Sumber: Kesbangpol dan BPBD Kabupaten Belitung Timur, 2020

1. Persentase Penegakan Perda

Capaian indikator kinerja persentase penegakan perda dihitung berdasarkan jumlah penyelesaian penegakan perda dibagi jumlah pelanggaran perda dikali 100 persen. Pada tahun 2020, capaian indikator tersebut adalah sebesar 43,75 persen, tidak berubah sejak tahun 2018. Saat ini, Satpol PP Kabupaten Belitung Timur hanya dapat melakukan tindakan nonyustisi, untuk melakukan penindakan diperlukan pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja

Cakupan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2016 sampai dengan 2018 hanya empat kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Damar, Kelapa Kampit, dan Gantung, dengan pelaksanaan patroli dilakukan 85 kali. Pada tahun 2019, cakupan wilayah bertambah menjadi lima kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Simpang Renggang. Pada tahun 2020, bertambah satu kecamatan lagi yaitu Kecamatan Simpang Pesak. Pelaksanaan patroli pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebanyak 75 kali.

3. Jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, keindahan (K3) yang tertangani

Pada tahun 2019, terdapat enam kali penertiban dan tiga yang ditindaklanjuti. Penertiban tersebut terdiri dari penertiban TI rajuk di daerah Sungai Lenggang Kecamatan Gantung, penertiban tambang ilegal Sistem Tombak di wilayah Pantai Teropong, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, dan penertiban pada penambangan inkonvensional dengan cara suntik menggunakan robin di daerah POK Pice, Kecamatan Gantung. Pada tahun 2020, capaian indikator kinerja ini tidak berubah dari tahun 2019, yaitu terdapat tiga penertiban.

4. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat

Pada tahun 2020, dari 39 desa di Kabupaten Belitung Timur, masing-masing mempunyai 10 orang anggota Satlinmas. Total anggota Satlinmas di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 390 orang.

5. Jumlah Kendaraan Patroli

Pada tahun 2019, Satpol PP Kabupaten Belitung Timur memiliki 3 mobil patroli, 1 mobil patwal, 1 mobil dalmas dengan kondisi cukup baik. Pada tahun 2020, tidak terjadi penambahan kendaraan patroli di Kabupaten Belitung Timur, sehingga jumlahnya masih sama dengan tahun 2019, yaitu lima unit.

6. Tingkat persentase pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu

Tingkat persentase pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu dalam kurun waktu tahun 2016-2019 cukup baik, dilihat dari capaian kinerja sebesar 100 persen meskipun pada tahun terjadi sedikit penurunan dengan capaian sebesar 99,59 persen. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat, serta peran Forkopimda. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga mendukung penyelenggaraan pengawasan monitoring pelaksanaan pemilu.

7. Tingkat persentase menurunnya kasus konflik sosial

Tingkat kasus konflik sosial di masyarakat Kabupaten Belitung Timur sudah banyak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari angka persentase di tahun 2016-2018, yaitu dari 80 persen menjadi 70 persen. Pada tahun 2019 dan 2020, persentase kasus konflik sosial tersebut mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 100 persen.

8. Tingkat persentase kasus penyelenggaraan demokrasi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kesbangpol mencatat tidak ada kasus pelanggaran demokrasi yang menyebabkan capaian kinerja secara konsisten sebesar 100 persen. Pelaksanaan demokrasi tahun 2020 dari kegiatan pengawasan dan internal pilkada bupati dan wakil bupati, tidak ada kasus yang terjadi di 247

TPS se-kabupaten Belitung Timur. Masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya juga sudah mengikuti arahan dan ketentuan sesuai dengan protokol Kesehatan.

9. Tingkat persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza

Persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza menunjukkan konsistensi capaian kinerja yang baik pada tahun 2016-2019 sebesar 100 persen. Namun, capaian realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 50 persen dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang terhambat akibat pandemi Covid-19. Selama ini, tindakan penanggulangan terkait perubahan perilaku terhadap bahaya napza yang dilakukan berkisar pada sosialisasi ke berbagai tempat, seperti sekolah-sekolah di tujuh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Namun, hal tersebut belum dapat menurunkan angka persentase terhadap bahaya napza secara signifikan.

10. Terselenggaranya Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana melalui Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana, Mitigasi Penanggulangan Bencana dan Penyusunan Kajian Resiko Bencana

Capaian indikator pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 72,96, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 85 persen.

11. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Penanggulangan Bencana melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Kinerja pelayanan di bidang penanggulangan bencana pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 72,96 persen dari 98,16 persen pada tahun 2019.

12. Tersedianya logistik dan obat-obatan baik di kawasan rawan bencana maupun di kawasan tanggap darurat bencana

Capaian kinerja untuk indikator ketersediaan logistik dan obat-obatan di kawasan rawan bencana dan kawasan tanggap darurat bencana turut mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan capaian hanya sebesar 66,53 persen, lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 80,76.

Ketiga indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (poin 10-12) menunjukkan capaian realisasi kinerja yang menurun pada tahun 2020 dikarenakan terkendala pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal karena terjadi pergeseran anggaran.

2.3.1.6 Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan urusan yang memiliki kesinambungan secara langsung dengan masyarakat. Berikut merupakan capaian indikator kinerja untuk urusan sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.

Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	16,96	46,15	20,00	20,00	96,58
2.	Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Persen	19,01	13,89	15,00	15,00	100
3.	Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	2	0	0	0	0
4.	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	Persen	100	100	100	100	100
5.	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	Persen	100	100	100	100	100
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah	Persen	8,39	12,50	15,00	17,00	100

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
	menerima jaminan sosial						
7.	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan sosial (IKK)	Persen	-	61	64	78	96,58
8.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, 2020

1. Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 sebesar 20 persen dari 29.448 orang. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan dari persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut menjadi 96,58 persen atau 28.270 PMKS.
2. Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis dengan jumlah capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 100 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, PMKS yang menerima program Kelompok Usaha Bersama atau KUBE sebanyak 538 orang, dengan total 49 KUBE yang terbentuk dan setiap KUBE memiliki 10 orang anggota. PMKS yang menerima program Kelompok Usaha Bersama atau KUBE pada tahun 2020 sebanyak 80 Orang dengan total 49 KUBE dan mendapatkan pelatihan motivasi kube 2020 sebanyak 0 Orang, hal ini dikarenakan anggaran pada Tahun 2020 dipangkas atau *refocusing* akibat wabah penyakit Covid-19 sehingga kegiatan yang mendukung indikator tersebut tak berjalan sebagaimana yang ditargetkan.
3. Pada indikator persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial terjadi penurunan menjadi 0 persen sejak tahun 2017, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 kewenangan panti sosial dialihkan ke provinsi.
4. Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat memiliki capaian indikator kinerja sebesar 100 persen pada tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut berarti seluruh keluarga korban bencana sudah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Pada

tahun 2019, sebanyak 45 kepala keluarga dari 45 jumlah kepala keluarga yang ditangani.

5. Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap memiliki capaian kinerja sebesar 100 selama lima tahun terakhir (2016-2020). Capaian ini juga menunjukkan kesiapsiagaan Relawan Tagana yang selalu siap menangani bencana Yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur.
6. Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan capaian 17 persen pada tahun 2019. Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun sebanyak 7.618 orang dan yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 7.618. Pada tahun 2020, capaian indikator kinerja ini meningkat signifikan menjadi 100 persen, artinya seluruh penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial telah menerima jaminan sosial. Pencapaian kinerja ini turut didukung dengan bantuan yang bersumber dari APBD serta bantuan APBD provinsi dan APBN.
7. Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan sosial dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan peningkatan capaian kinerja secara konsisten. Pada tahun 2020 terdapat 28.270 PMKS yang menerima jaminan sosial, angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berjumlah 29.448 PMKS.
8. Capaian indikator persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2020 adalah 0 persen, hal ini dikarenakan WKSBM di Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk oleh Provinsi dengan jumlah sebanyak 4 unit, namun pemerintah daerah kabupaten hanya bertugas dalam melakukan monitoring keempat WKSBM tersebut.

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) meliputi bidang urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Timur sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Selain itu, perwujudan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan daerah akan ditekankan dalam penyelenggaraannya. Berikut ini merupakan capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	97,71	94,60	98,50	98,29	96,07
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68,52	68,00	71,93	71,37	71,33
3.	Sengketa pengusaha – pekerja per tahun	Persen	23,08	15,12	14,00	13,40	9,28
4.	Tingkat pengangguran	Persen	2,29	2,62	1,50	1,71	3,93

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio penduduk yang bekerja

Dalam kurun 2016-2020, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Belitung Timur cenderung fluktuatif dengan beberapa kali capaian naik dan turun. Pada tahun 2020, rasio penduduk yang bekerja mencapai 96,07 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya yaitu 98,29 persen. Peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja juga diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk yang menganggur. Dari 70.345 penduduk yang terkategori sebagai angkatan kerja, sebanyak 67.580 penduduk bekerja dan sebanyak 2.765 penduduk terkategori menganggur.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2019-2020 namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2019, TPAK Kabupaten Belitung Timur mencapai 71,37 persen, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 71,33 persen. Berdasarkan kondisi lapangan, penurunan TPAK ini menggambarkan bahwa tingkat kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja di Kabupaten Belitung Timur juga menurun.

3. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja atau perselisihan hubungan industrial Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 adalah sebesar 9,28 persen. Capaian indikator kinerja tersebut mengalami penurunan 4,12 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,40 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi hubungan industrial di Belitung Timur semakin kondusif dan menjadi salah satu poin pendukung dalam daya tarik investasi daerah.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, TPT mencapai 1,71 persen dan meningkat 2,22 persen menjadi 3,93 persen pada tahun 2020. Hal ini juga terjadi di hampir seluruh daerah sebagai dampak dari munculnya pandemi Covid-19 terhadap kenaikan pengangguran terbuka. Pembatasan aktivitas menyebabkan sektor perekonomian ikut terimbas sehingga pengusaha lokal melakukan efisiensi untuk menekan kerugian seperti merumahkan pekerja bahkan PHK. Meskipun mengalami kenaikan, TPT Kabupaten Belitung Timur masih menjadi yang terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.3.2.2 *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan, pencegahan, serta pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Disisi lain, upaya perlindungan terhadap anak difokuskan pada pemenuhan hak, pencegahan, pelayanan, dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Berikut merupakan capaian indikator kinerja untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.15 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	53,30	52,30	54,00	45,29	45,37
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	46,70	47,70	50,00	54,71	54,63
3.	Rasio KDRT	Persen	1 : 1.000	1 : 1.000	3 : 1.000	2 : 40.474	9 : 42.922
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	48,24	51,89	52,39	61,03	58,09

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2020 sebesar 45,37 persen. Capaian indikator kinerja tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 45,29 persen. Sementara itu, untuk angka partisipasi perempuan di lembaga swasta justru menurun 0,08 persen dari tahun 2019 menjadi 54,63 persen di tahun 2020. Peningkatan partisipasi perempuan pada lembaga swasta harus terus ditingkatkan yang saat ini penerimaannya masih didominasi oleh sektor usaha dan perdagangan seperti *online shop*, usaha rumahan skala kecil dan menengah, serta pertokoan atau ritel.
2. Rasio KDRT dapat dilihat berdasarkan jumlah kasus KDRT yang ada dibandingkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2019, Kasus KDRT di Kabupaten Belitung Timur terdata sebanyak dua kasus dari 40.474 rumah tangga. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi sembilan kasus dari 42.922 rumah tangga. Hal ini perlu ditekan lewat berbagai program untuk mewujudkan nol kasus KDRT baik kepada perempuan maupun anak.
3. Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 58,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 61,03 persen. Penurunan tingkat partisipasi sebesar 2,94 persen juga berkaitan erat dengan banyaknya PHK atau perumahan pegawai yang dilakukan sebagai dampak pandemi.
4. Persentase realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2020 mencapai 100 persen. Advokasi merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Belitung Timur juga sudah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang dibentuk oleh Bidang Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak.

2.3.2.3 Urusan Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan mencakup ketersediaan pangan di Kabupaten Belitung Timur. Ketahanan pangan terwujud apabila ketersediaan pangan tergolong cukup, baik jumlah mutu, keamanan, pemerataan dan keterjangkauan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai peran dan kewajiban dalam menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi lewat penyelenggaraan urusan pangan. Berikut merupakan capaian indikator kinerja untuk urusan pangan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan pangan utama	Kg/tahun/ 1.000 penduduk	115.217,70	83.142,71	95.939,00	104.643,00	100.910,00
2.	Persentase ketersediaan pangan utama	Persen	87,44	61,51	69,19	73,57	69,16

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, 2020

Sama seperti daerah lain, pangan utama penduduk Kabupaten Belitung Timur adalah beras yang ketersediaannya dipengaruhi oleh kebutuhan/tingkat konsumsi masyarakatnya. Ketersediaan pangan utama pada tahun 2020 tercatat sebesar 100.910 kg/tahun/1.000 penduduk atau mengalami penurunan sebesar 3.267 kg/tahun/1.000 penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak diartikan sebagai kekurangan ketersediaan pangan utama (beras) namun lebih ke penurunan konsumsi pangan dari 92,90 kg/kapita menjadi 86,4 kg/kapita dan akhirnya berimbas langsung pada jumlah kebutuhan dan ketersediaan pangan Kabupaten Belitung Timur.

Di sisi lain, meskipun tingkat konsumsi beras masyarakat Belitung Timur mengalami penurunan, namun skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan indikator keberagaman atau kualitas konsumsi pangan justru mengalami peningkatan dari 77,6 di tahun 2019 menjadi 84,6 di tahun 2020 dibandingkan dengan skor PPH Ideal sebesar 100. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi penurunan tingkat konsumsi beras yang merupakan pangan pokok sumber karbohidrat utama di Kabupaten Belitung Timur, namun kualitas konsumsi pangan justru mengalami peningkatan. Sejalan dengan Program Diversifikasi Pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal yang bertujuan untuk membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman untuk hidup sehat, aktif dan produktif, maka hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik, pemenuhan sumber karbohidrat tidak hanya bergantung/berasal dari beras saja, namun bisa berasal dari sumber pangan lokal lainnya.

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Capaian kinerja urusan pertanahan berdasarkan data terbaru yang tersedia dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur yaitu tahun 2019 sebagai berikut:

1. Luas lahan bersertifikat

Data akumulasi per tahun terkait luas lahan bersertifikat yang ada di Kabupaten Belitung Timur dihitung per meter persegi sampai dengan tahun 2019 adalah seluas 98.933.464 m².

2. Penanganan sengketa tanah garapan

Pada tahun 2019 jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani melalui mediasi dibandingkan dengan jumlah pengaduan sengketa tanah garapan adalah sebesar nol persen.

3. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya

Luas tanah di Kabupaten Belitung Timur yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ada pada izin lokasi pada tahun 2019 adalah seluas 3.747.853 m². Capaian luasan ini juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan keseluruhan izin lokasi yang diterbitkan.

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup mengacu pada perlindungan lingkungan hidup dan penanganan pencemaran lingkungan. Beberapa fokus dalam penyelenggaraan ini adalah kualitas udara, air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan, serta keanekaragaman hayati. Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.

Tabel 2.17 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penanganan sampah	Persen	50,00	50,40	56,82	60,14	65,04
2.	Indeks Kualitas Air	Persen	-	-	49,17	54,50	50,83
3.	Indeks Kualitas Udara	Persen	-	-	97,48	97,48	97,92
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	-	-	58,51	58,20	58,20
5.	Persentase ketersediaan data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup	Persen	37,50	37,50	37,50	62,50	75,00

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
6.	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap aturan lingkungan hidup	Persen	90,00	90,00	90,00	88,00	68,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase penanganan sampah

Persentase penanganan sampah di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 65,04 persen atau meningkat 4,9 persen dari tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan penanganan sampah di Kabupaten Belitung Timur semakin baik meskipun belum mencapai penanganan yang optimal yaitu 100 persen. Belum optimalnya penanganan sampah menandakan masihnya banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan seperti di sungai maupun lokasi-lokasi lainnya.

2. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan tiga komponen yang dibutuhkan dalam menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sehingga perubahan kondisi pada tiga komponen tersebut akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di suatu daerah. Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan menjadi 50,83 persen, Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan menjadi 97,92 persen, sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan tetap sebesar 58,20 persen. Penurunan pada kualitas air disebabkan oleh limbah domestik seperti air bekas deterjen yang sudah mencemari beberapa sungai di Kabupaten Belitung Timur.

3. Persentase ketersediaan data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup

Indikator ini merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam penyusunan dokumen tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2019, dari delapan dokumen yang direncanakan sudah direalisasikan sebanyak lima dokumen sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 62,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar 50 persen. Pada tahun 2020, capaian kinerja tersebut meningkat lagi menjadi 75 persen.

4. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap aturan lingkungan hidup

Setelah melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap lima puluh perusahaan dan kegiatan usaha yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur

selama tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan lingkungan hidup di Belitung Timur mencapai angka 90 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan sistem pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta masih melakukan proses pemenuhan dan kelengkapan dokumen berkaitan dengan aturan lingkungan hidup. Pada tahun 2020, capaian kinerja ini justru turun sebanyak 28 persen atau menjadi 68 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak penanggung jawab usaha yang kurang memperhatikan dan mematuhi aturan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur.

2.3.2.6 *Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	4,33	2,56	1,37	1,22	1,93
2.	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	100,51	101,24	103,01	98,97	96,15
3.	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,27	91,61	92,94	98,19	97,14
4.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,34	96,44	97,13	95,62	89,47
5.	Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	105,27	105,93	107,61	103,65	87,38
6.	Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	59,99	33,30	36,45	64,45	71,23
7.	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholders	Persen	100	93,75	94,12	100	100
8.	Jenis inovasi pelayanan	Persen	100	150	133,33	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada tahun 2020, cakupan kepemilikan KK mencapai 96,15 persen dari keseluruhan jumlah kepala keluarga di Belitung Timur sebesar 41.269. Untuk penerbitan KTP elektronik, sebanyak 88.581 dari 91.193 penduduk atau 97,14 persen juga sudah memiliki KTP. Kedua cakupan kepemilikan mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu penurunan 1,05 persen untuk cakupan kepemilikan KTP dan penurunan 2,82 persen untuk cakupan kepemilikan KK. Beberapa upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempercepat tercapainya 100 persen kepemilikan adalah melalui pelayanan reguler, pelayanan keliling, dan juga pelayanan 5 in 1 di KUA.

2. Cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian

Kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 89,47 persen atau sebanyak 112.896 dari 126.178 penduduk. Untuk akta kematian, capaiannya sebesar 87,38 persen, dengan 5.616 laporan kematian sudah diterbitkan aktanya dari 6.427 laporan kematian yang masuk sampai tahun 2020. Kedua penerbitan akta ini juga mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya yaitu 6,1 persen untuk akta kelahiran dan 19,27 persen untuk akta kematian. Beberapa inovasi pelayanan juga terus dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target penerbitan akta sebesar 100 persen.

3. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak

Target pelayanan Identitas Anak (KIA) adalah anak usia 0 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Dalam kurun waktu tahun 2017-2020, kinerja pelayanan KIA menunjukkan peningkatan capaian di mana kinerja pelayanan KIA telah mencapai 71,23 persen pada tahun 2020. Ketercapaian ini menunjukkan peningkatan yang adanya peningkatandari tahun sebelumnya yaitu yang baru mencapai angka 64,45 persen. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah melalui iatan KIA on School dan juga kegiatan Penerapan Kartu Identitas Anak, serta yang tak kalah pentingnya juga karena kesadaran masyarakat untuk mendapatkan KIA bagi anak-anak mereka melalui pelayanan rutin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dilihat dari persebaran persentase kepemilikan KIA di antara 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur, Kecamatan Kelapa Kampit merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan KIA terkecil sebesar 52,78 pada tahun 2020, sedangkan wilayah dengan persentase kepemilikan KIA terbesar adalah Kecamatan Damar dengan capaian sebesar 79,13 persen.

4. Persentase pemanfaatan data oleh stakeholders

Persentase pemanfaatan data oleh stakeholders diartikan sebagai persentase stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan melakukan Perjanjian Kerja Sama. Stakeholder yang dimaksud antara lain: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kecamatan, RSUD, Pengadilan Agama dan KUA.

5. Jenis inovasi pelayanan

Inovasi merupakan solusi pelayanan dengan prinsip efektif dan efisien dimana pelayanan yang diberikan mampu memberikan dampak yang cukup signifikan dan mejangkau seluruh masyarakat, sehingga dengan adanya inovasi tersebut masyarakat memperoleh kemudahan akses layanan. Sampai dengan tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan 9 inovasi pelayanan, yaitu:

a) Gawai Penganten

Inovasi pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan "Gawai Penganten" Mulai dilaksanakan dari tahun 2017 melalui 2 metode :

- Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dari rumah ke rumah bagi penduduk Belitung Timur yang beragama selain Islam yang pada data base kependudukan berstatus kawin, tetapi belum memiliki akta kawin.
- Pelayanan Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Baru menikah Langsung di Rumah Ibadah.

Dalam Kegiatan pencatatan perkawinan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur bekerjasama dengan Petugas Register di Desa dan pengurus rumah ibadah/rohaniawan

b) Dukcapil Door to Door

Dukcapil Door to Door merupakan pengembangan dari kegiatan pelayanan jemput bola yang diperuntukkan bagi penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran, untuk kelancaran kegiatan ini dibentuk tim petugas lapangan yang bekerja sama dengan petugas registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Desa turun langsung ke rumah penduduk sesuai dengan data penduduk yang tidak memiliki Akta kelahiran sekaligus mendata Kartu Keluarga Penduduk yang mengalami perubahan. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada tahun 2018 dengan target tiga kecamatan, yaitu Dendang, Simpang Pesak dan Gantung sebanyak 1000 kutipan, tahun 2019 dengan target di tiga kecamatan, yaitu Simpang Renggang, Simpang Pesak dan Damar. Pada Tahun 2020 dengan fokus satu kecamatan, yaitu kecamatan Manggar. Adapun dana yang digunakan pada kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Timur yaitu pada kegiatan Percepatan Kepemilikan Kata Kelahiran.

c) 5 In one KUA / Peleser Manggar Yuk

Layanan ini sebelumnya diberi nama Layanan Adminduk “three in one” di KUA Manggar. 5 In one KUA/Peleser Manggar Yuk adalah jenis berupa Perjanjian Kerja Sama dengan KUA Manggar dan MOU dengan Kementerian Agama untuk pelayanan bagi pasangan pengantin yang menikah di KUA Manggar sehingga mereka akan langsung mendapat Kartu Keluarga baru dan KTP-el dengan status menikah. Inovasi ini merupakan kegiatan non DPA dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 di KUA Kecamatan Manggar. Untuk tahun 2018, kegiatan ini tidak terbatas hanya di Kecamatan Manggar, akan tetapi sudah dilaksanakan juga di enam kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu Kecamatan Gantung, Simpang Renggang, Dendang, Simpang Pesak, Kelapa Kampit dan Damar. Dengan demikian, sampai akhir tahun 2020 ini kegiatan yang diberi nama 5 In one KUA/Peleser Manggar Yuk sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

d) Ketarap Tunu Pedas

Merupakan kemudahan penerbitan dokumen bagi penduduk berkebutuhan khusus, dalam pelayanannya petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung mendatangi penduduk tersebut untuk memberikan pelayanan berdasarkan laporan ataupun informasi yang didapatkan dari Dinas Sosial ataupun langsung dari masyarakat.

e) Si Ranjak KIA On School

Inovasi ini berupa pelayanan pembuatan KIA serta cetak KIA langsung di sekolah, sehingga anak yang belum langsung bisa mendapatkan KIA tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

f) KTP-el Bujang Dayang

KTP-el Bujang Dayang merupakan jenis inovasi pelayanan berupa perekaman KTP-el ke sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini ke sekolah menengah atas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana DAK Tahun 2019, yaitu dalam bentuk kegiatan Pelayanan Keliling yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018.

g) Simadu Beltim

Merupakan pemanfaatan data siswa baru untuk pemutakhiran data pendidikan akhir usia sekolah

h) Dukcapil Merona

Dukcapil Melawan Corona merupakan Inovasi layanan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dimana layanan adminduk secara Online Via Whats App

i) Selina

Inovasi Layanan Kios Adminduk di desa, diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak memiliki HP android dan mempunyai kesulitan dalam proses pembuatan dokumen adminduk baku persyaratan dan jarak tempuh dibantu oleh petugas adminduk di Desa sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil.

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Desa yang menyusun RKPDes pertahun	Desa	39	39	39	39	39
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan	Kelompok	4	4	4	4	4
3.	Jumlah PKK aktif	PKK	47	47	47	47	47
4.	Jumlah Posyandu aktif	Posyandu	133	133	133	133	134
5.	Persentase aparatur desa yang meningkat kapasitasnya	Persen	93,60	93,60	100	100	100
6.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	4	4	4	4	4
7.	Profil desa sesuai standar	Desa	27	33	39	39	39
8.	Persentase penyusunan dan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100
9.	BUMDes yang terbentuk	BUMDes	11	27	37	37	39
10.	Posyantek aktif	Kecamatan	2	2	3	3	2

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah desa di Kabupaten Belitung Timur yang menyusun RKPDes setiap tahun sebanyak 39 desa yang berarti seluruh desa telah melakukan penyusunan. Dokumen tersebut merupakan dokumen wajib yang akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam penyusunan APBDes.
2. Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK aktif jumlahnya konsisten dari tahun ke tahun. Jumlah kelompok binaan LPM sebanyak empat kelompok, sedangkan jumlah PKK aktif di Kabupaten Belitung Timur tetap berjumlah 47 PKK.
3. Jumlah posyandu aktif pada dua tahun terakhir (2019 dan 2020) berjumlah 134 posyandu. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar satu unit. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan unit posyandu baru yang berlokasi di Desa Mengkubang.
4. Persentase aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya adalah sebesar 100 persen. Keterlibatan aktif aparatur pemerintahan desa dalam kegiatan-kegiatan pelatihan mempengaruhi capaian pada indikator ini. Salah satu contohnya adalah keikutsertaan pemerintah desa dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebanyak 312 peserta undangan dari 39 desa yang terdiri dari aparatur pemerintah desa hadir, mulai dari sekretaris desa, bendahara, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan, dan ketua TPK tiap desa.
5. Ketersediaan dokumen profil desa sesuai standar pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 39 dokumen. Hal tersebut berarti seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur sudah memiliki dokumen profil desa yang sesuai standar.
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui kegiatan asistensi penyusunan APBDes. Kegiatan tersebut meliputi pendampingan, monitoring, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keuangan desa. Selama tahun 2016-2020, asistensi penyusunan APBDes selalu terealisasi sebesar 100 persen untuk semua desa di Belitung Timur.
7. BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang berbadan hukum dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat, sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang terdapat pada desa tersebut. Tujuan dibentuknya BUMDes antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Di Kabupaten Belitung Timur, pembentukan BUMDes dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah BUMDes yang terbentuk pada tahun 2016 sebanyak 11 dan pada tahun 2020 menjadi 39 BUMDes. Dengan demikian, target

capaian BUMDes yang terbentuk pada tahun 2020 sudah tercapai, atau terealisasi sebesar 100 persen.

8. Jumlah posyantek di Kabupaten Belitung Timur sampai saat ini berjumlah dua unit. Target pada tahun 2020 jumlah posyantek meningkat menjadi empat unit namun tidak dapat terealisasi karena adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu, capaian untuk indikator ini adalah 50 persen.

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan dan perencanaan keluarga berencana. Intervensi tersebut nantinya akan berdampak pada perubahan kuantitas penduduk yang ditandai oleh perubahan jumlah, struktur, komposisi, dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Berikut merupakan capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020.

Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
2.	Persentase wanita dengan usia kawin <21 tahun	Persen	58	57,5	57,95	57,89	57,93
3.	Cakupan pasangan usia subur peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	Persen	60	70	72	75	85,81

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur, 2020

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi jumlah keluarga yang ada di suatu wilayah. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 sebesar 1-2 anak, capaian tersebut tidak berubah sejak tahun 2016. Tercapainya kinerja ini tidak lepas dari beberapa program yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti Program Keluarga Berencana (KB) dan Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

2. Persentase wanita dengan usia kawin <21 tahun

Batasan usia pernikahan bagi wanita menurut BKKBN adalah 21 tahun. Hal tersebut didasarkan pada ilmu kesehatan yang menyebutkan bahwa umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis bagi wanita adalah 20-25 tahun. Wanita yang menikah dalam usia kurang dari batasan usia tersebut dinilai kurang matang, baik secara psikologis maupun biologis. Di Kabupaten Belitung Timur, persentase wanita dengan usia kawin kurang dari 21 tahun pada tahun 2020 mencapai 57,93 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 57,89 persen.

3. Cakupan pasangan usia subur peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera

Cakupan pasangan usia subur peserta KB yang merupakan anggota peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 mencapai 85,81 persen. Capaian indikator tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 75 persen.

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan pada umumnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi seperti pembangunan jalan, terminal, dan pelabuhan. Pembangunan ini berfungsi untuk mempermudah pergerakan dan pendistribusian orang dan barang sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan perhubungan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.21 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jiwa	17.165	5.829	6.720	65.317	65.317
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Persen	1.869	1.746	1.704	1.525	1.525
3.	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan darat	Angka	1/0/1	1/0/1	1/0/1	1/0/1	1/0/1
4.	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,11	0,29	0,1	0,02	0,17
5.	Kepemilikan KIR angkutan umum	Angka	114	36	38	21	21

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
6.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum/KIR	Menit	35	35	35	35	35
7.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rupiah	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
8.	Pemasangan rambu lalu lintas darat	Unit	36	220	220	220	220
9.	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	Persen	-	-	-	18,15	18,15
10.	Persentase angkutan umum laik jalan	Persen	68,42	47,22	50,00	47,36	16,66
11.	Persentase pembangunan kawasan pelabuhan di wilayah Kabupaten Belitung Timur	Persen	100	100	100	33,33	33,33

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan perhubungan dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Secara keseluruhan, jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016-2018, jumlah penumpang angkutan umum hanya dihitung berdasarkan jumlah penumpang yang masuk dan keluar terminal. Pada tahun 2019 dan 2020, peningkatan sampai 65.317 penumpang terjadinya karena adanya bantuan bus sekolah dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beroperasi di Kecamatan Kelapa Kampit sehingga jumlah penumpang angkutan umum ikut bertambah.

2. Jumlah uji KIR angkutan umum

Sejak tahun 2016-2020, jumlah uji KIR angkutan umum terus mengalami penurunan. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2019 dan 2020 dengan hanya 1.525 kendaraan yang melakukan pengujian. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melakukan uji KIR serta banyaknya kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan berupaya untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan dan KIR Keliling di enam kecamatan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pengujian.

3. Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis

Kabupaten Belitung Timur mempunyai satu pelabuhan yaitu Pelabuhan Penyeberangan ASDP Manggar yang melayani jalur pelayaran Manggar (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)-Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat). Selain itu, Kabupaten Belitung Timur juga memiliki satu terminal yang berada di ibukota kabupaten, yaitu Terminal Manggar dengan status pelayanan tipe C. Namun sejak tahun 2013, Pelabuhan ASDP Manggar tidak lagi beroperasi karena terjadinya pendangkalan alur Sungai Manggar sehingga menyulitkan kapal-kapal besar untuk masuk.

4. Persentase layanan angkutan darat

Rasio angkutan darat pada tahun 2016 sebesar 0,11 dan mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,29. Namun angka rasio tersebut justru mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,1 dan pada tahun 2019 mencapai 0,02. Pada tahun 2020 persentase layanan angkutan darat mulai mengalami peningkatan sehingga menjadi 0,17.

5. Kepemilikan KIR angkutan umum

Berdasarkan data selama empat tahun terakhir, kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Belitung Timur terus mengalami penurunan. Penurunan yang sangat signifikan terjadi tahun 2017, yaitu sebesar 108 kendaraan. Pada tahun 2016 jumlah kepemilikan KIR angkutan umum berjumlah 144 kendaraan, kemudian menjadi 36 kendaraan di tahun 2017. Angka kepemilikan KIR terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 yang hanya berjumlah 21 kendaraan.

6. Lama pengujian kelayakan angkutan umum / KIR

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor per unit kendaraan adalah sekitar 35 menit dalam keadaan normal. Penambahan waktu pemeriksaan kendaraan disesuaikan dengan penambahan alat uji kelayakan kendaraan.

7. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum tidak mengalami perubahan dari tahun 2016-2020 yaitu sebesar Rp91.000. Penetapan biaya pengujian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas

Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas pada tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 220 unit. Rambu-rambu lalu lintas tersebut tersebar di tiga kecamatan Kabupaten Belitung Timur yaitu Kecamatan Manggar sebanyak 116 unit, Kecamatan Kelapa Kampit sebanyak 69 unit, dan Kecamatan Gantung sebanyak 35 unit.

9. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas

Angka persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas Kabupaten Belitung Timur tidak mengalami penurunan atau peningkatan pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan belum ada perubahan signifikan dari kelengkapan jalan, seperti marka jalan, rambu-rambu, serta penerangan jalan.

10. Persentase angkutan umum yang laik jalan

Persentase angkutan umum laik jalan di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 persentase angkutan umum laik jalan tersebut memiliki persentase sebesar 47,36 persen, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 16,66 persen.

11. Persentase pembangunan kawasan pelabuhan di wilayah Kabupaten Belitung Timur

Persentase pembangunan kawasan pelabuhan di wilayah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 mencapai 33,33 persen. Capaian indikator tersebut masih belum sesuai dengan target yang disebabkan karena pandemi Covid-19 sehingga beberapa pembangunan daerah harus tertunda.

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Belitung Timur secara umum berkaitan dengan pelayanan informasi publik dan penyediaan infrastruktur berbasis teknologi informatika untuk menunjang kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan. Di masa depan, *e-government* akan berperan penting dalam pengambilan keputusan dan merubah paradigma pemerintahan yang saat ini identik dengan *paper-based administration*. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.22 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks SPBE	Nilai	-	-	1,8	2,59	3,15
2.	IKM terhadap pelayanan informasi publik	Persen	-	-	-	76,94	76,94
3.	Jumlah aparatur desa dan masyarkat yang memiliki kemampuan TIK	Orang	0	115	100	0	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE di Kabupaten Belitung Timur menggunakan metode pengukuran tingkat kematangan yang dilakukan melalui evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal. Indeks SPBE yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 2,2 dan berdasarkan evaluasi mandiri diperoleh nilai 3,15. Nilai evaluasi mandiri ini bisa lebih rendah dibandingkan hasil evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Capaian berdasarkan evaluasi mandiri ini juga meningkat dibanding tahun 2018 dan 2019 yang hanya mencapai 1,80 dan 2,59.

2. IKM terhadap pelayanan informasi publik

Penilaian IKM terhadap pelayanan informasi publik di Kabupaten Belitung Timur baru dimulai pada akhir tahun 2019. Hal ini dikarenakan perangkat Badan Publik PPID Utama masih dalam tahap persiapan karena khususnya dalam pembentukan DIP dan DIK. Di akhir tahun 2019, DIP PPID pembantu sudah tersusun sehingga pada tahun 2020 pelayanan informasi publik dapat berjalan optimal. Capaian IKM terhadap pelayanan informasi publik di Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 sebesar 76,94 persen.

3. Jumlah aparatur desa dan masyarakat yang memiliki kemampuan TIK

Jumlah aparatur desa dan masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang memiliki kemampuan TIK terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah aparatur desa dan masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang memiliki kemampuan TIK sebanyak 115 orang. Pada tahun 2018, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 100 orang.

2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha mikro kecil menengah berfokus pada peningkatan kelembagaan dan usaha koperasi agar lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelaku usaha. Hal ini tentu menjadi tantangan utama pemerintah di tengah pengaruh ekonomi global yang terus berlangsung lewat kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dikeluarkan. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase koperasi aktif	Persen	54,37	56,19	57,41	60,34	62,90
2.	Persentase koperasi sehat	Persen	12,50	12,50	12,50	9,76	-
3.	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,57	0,97	6,17	15,52	1,83
4.	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Persen	0,13	0,05	0,05	0,28	0,34

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase koperasi aktif

Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif di Kabupaten Belitung Timur sebesar 62,90 persen. Capaian ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 60,34 persen. Jumlah koperasi aktif juga bertambah menjadi 124 unit atau meningkat delapan unit dibandingkan tahun 2019. Koperasi tersebut merupakan koperasi produsen yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan bentuk kerja sama kebun plasma yang bermitra dengan perusahaan sawit.

2. Persentase koperasi sehat

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008, kesehatan koperasi simpan-pinjam dan usaha simpan-pinjam adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dapat dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Pada dasarnya penilaian kesehatan koperasi menyangkut lima aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Kesehatan koperasi di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 9,76 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 12,50 persen. Pada tahun 2020, capaian untuk koperasi sehat tidak tersedia (NA) karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi di Kabupaten Belitung Timur tidak dapat dilaksanakan.

3. Persentase usaha mikro yang naik kelas

Persentase usaha mikro yang naik kelas tahun 2020 adalah sebesar 1,83 persen. Angka tersebut mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019 yang memiliki angka sebesar 15,52 persen. Hal tersebut didukung oleh data perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.24 Jumlah UMKM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	SKALA USAHA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mikro	Unit	9.931	10.028	10.692	11.014	12.061
2.	Kecil	Unit	206	211	272	322	328
3.	Menengah	Unit	21	21	21	21	21
Jumlah			10.158	10.260	10.985	11.357	12.410

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, 2020

Jumlah usaha kecil di Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 adalah sebanyak 328 unit atau bertambah enam unit dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 322 unit. Selain itu, jumlah usaha mikro di Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 adalah sebesar 12.061 unit, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 11.014 unit. Berdasarkan data tersebut, realisasi usaha mikro yang naik kelas dapat dihitung dari perkembangan usaha kecil. Target persentase usaha mikro yang naik kelas pada tahun 2020 adalah sebesar 6,21 persen, sehingga pada tahun tersebut realisasi capaian target hanya sebesar 29,47 persen.

4. Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha

Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha pada tahun 2020 adalah sebesar 0,34 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,28 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan pendampingan perizinan bagi usaha mikro kecil di Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, izin usaha mikro juga menjadi salah satu persyaratan dalam program pembiayaan baik melalui bank maupun program perkuatan permodalan bagi koperasi usaha mikro kecil.

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Kebijakan pada urusan penanaman modal diarahkan pada penyediaan regulasi dan kebijakan yang bersifat pro investasi. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.25 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah total investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	7	9	8	-	-
2.	Jumlah total nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	211.051.631.894	472.918.842.124	150.898.690.033	165.551.513.989	-

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah penerbitan izin	Jumlah izin	966	827	801	829	873
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan PTSP	Nilai	81,90	77,96	78,20	84,57	83,50
5.	Persentase penambahan investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	-	-	-	21,67	24,66
6.	Rata-rata lama proses penyelesaian perizinan	Hari	<5 (3,88)	<5 (3,00)	<5 (4,85)	4	3

Sumber: DPMPSTPP Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah investor berskala nasional

Jumlah investor berskala nasional merupakan akumulasi investor yang berinvestasi atau menambah investasinya serta melaporkan kegiatan realisasi investasinya dalam laporan kegiatan penanaman modal dari periode sebelumnya. Jumlah investor pada tahun 2018 di Kabupaten Belitung Timur sebesar delapan investor atau berkurang satu investor dibanding tahun sebelumnya.

2. Jumlah total investasi

Bedasarkan nilai investasi, tahun 2018 dan 2019 investasi di Kabupaten Belitung Timur masih didominasi oleh sektor industri. Secara jumlah investor, sektor industri hanya berada pada posisi empat, namun dalam hal nilai investasi maka sektor ini lebih besar nilainya dibanding investasi sektor pertambangan, perkebunan dan perhotelan. Jika dilihat lebih rinci nilai terbesar investasi sektor industri berasal dari investor jenis usaha perkebunan, yaitu pabrik pengolahan minyak sawit. Capaian untuk kinerja ini pada tahun 2020 masih belum tersedia sehingga tidak dapat dipublikasikan.

3. Jumlah penerbitan izin

Perizinan terdiri dari dua jenis, yaitu perizinan jasa usaha/perizinan usaha serta perizinan tertentu/perizinan dasar dan non perizinan. Untuk perizinan jasa usaha/perizinan usaha didominasi oleh jenis perizinan SIUP (Surat Izin Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan reklame. Sementara itu, jenis perizinan tertentu/perizinan dasar dan nonperizinan didominasi oleh jenis IMB dan izin mendirikan/perpanjangan/daftar ulang PAUD. Pada tahun 2020, jumlah perizinan di Kabupaten Belitung Timur mencapai 873 izin atau meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya yaitu 829 izin. Peningkatan jumlah ini

didukung kemudahan proses perizinan melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*) dan Si CANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik).

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan PTSP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. IKM layanan PTSP Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 mencapai nilai 86,23 persen dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan BAIK. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 84,57, dan telah melewati target yang ditetapkan yaitu 83,50.

5. Persentase penambahan investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal baik PMA maupun PMDN yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penambahan investor yang merealisasikan investasinya berdasarkan LKPM tersebut di Kabupaten Belitung Timur meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, penambahan investor tersebut sebesar 21,67 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga menjadi 24,66 persen.

6. Rata-rata lama proses penyelesaian perizinan

Rata-rata lama proses penyelesaian perizinan merupakan rata-rata lamanya suatu perizinan selesai. Lama proses perizinan dimulai dari berkas pemohon yang diterima oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di bagian pendaftaran sampai dengan terbitnya izin. Lama proses perizinan tersebut dihitung selama berkas pemohon ada di PTSP. Rata-rata lama proses penyelesaian perizinan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penambahan jumlah investor. Semakin cepat proses penyelesaian perizinan, akan menjadi nilai tambah bagi investor. Proses penyelesaian perizinan di Kabupaten Belitung Timur pada dua terakhir mengalami percepatan. Pada tahun 2019 rata-rata lama proses penyelesaian perizinan adalah empat hari. Sementara itu, pada tahun 2020, rata-rata lama proses penyelesaian perizinan mencapai tiga hari.

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mendorong peningkatan peran serta pemuda agar dapat berkontribusi pada kegiatan pembangunan daerah baik kegiatan yang berbasis ekonomi maupun nonekonomi. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.26 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan pemuda	Kegiatan	6	9	-	-	-
2.	Jumlah organisasi kepemudaan	Organisasi	22	21	-	-	-
3.	Jumlah klub olahraga	Klub	156	200	-	-	-
4.	Jumlah gedung olahraga	Unit	8	8	-	-	-
5.	Jumlah lapangan olahraga	Lapangan	145	170	-	-	-
6.	Jumlah peningkatan / revitalisasi / rehabilitasi sarana prasarana pemuda olahraga	Unit	24	52	-	-	-
7.	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	22	23	-	-	-
8.	Jumlah gelanggang / balai remaja	Unit	1	1	-	-	-
9.	Persentase organisasi pemuda yang aktif *	Persen	-	-	51,61	90,32	93,55
10.	Persentase Pemuda pelopor *	Persen	-	-	77,20	60,00	53,57
11.	Persentase wirausaha muda *	Persen	-	-	60,02	92,01	44,88
12.	Jumlah prestasi olahraga *	Cabor	-	-	15	5	-
13.	Jumlah pembinaan olahraga	Cabor	-	-	-	-	25
14.	Jumlah atlet yang berprestasi *	Orang	-	-	150	54	0
15.	Jumlah emas *	Medali	-	-	45	25	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator kinerja ini digunakan untuk meningkatkan dan mendorong keaktifan berorganisasi khususnya organisasi kepemudaan. Capaian kinerja dari indikator tersebut pada tahun 2019 sebesar 60 persen dengan jumlah organisasi aktif sebanyak 18 organisasi kepemudaan dari 30 organisasi yang sudah terdaftar. Pada tahun 2020, organisasi pemuda yang aktif di Belitung Timur mengalami peningkatan sekitar 33,5 persen dengan jumlah organisasi yang aktif di tahun 2020 sebanyak 28 organisasi dari 30 organisasi yang terdaftar secara sah.

2. Persentase pemuda pelopor

Capaian kinerja persentase pemuda pelopor di tahun 2019 sebesar 78,04 persen dengan jumlah pemuda pelopor yang terdata dari beberapa sektor kepeloporan kepemudaan berjumlah 398 orang (dari target sebanyak 430 orang). Pada tahun 2020 capaian ini justru mengalami penurunan menjadi 53,57 persen. Sektor pemuda pelopor meliputi pemuda yang memelopori sektor usaha mandiri, pemuda yang memelopori sektor keorganisasian pemuda, dan pemuda yang memelopori bidang olahraga.

3. Persentase wirausaha muda

Upaya peningkatan wirausaha muda pemula harus terus ditingkatkan. Persentase wirausaha muda pada tahun 2018 adalah 60,02 persen. Pada tahun 2019, persentase wirausaha muda tersebut meningkat menjadi 92,01 persen sehingga ada peningkatan sebesar 31,99 persen dari capaian sebelumnya. Sementara itu, untuk realisasi pada tahun 2020, persentase wirausaha muda mengalami penurunan yang signifikan menjadi 44,88 persen. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi yang melemah akibat dampak dari pandemi Covid-19.

4. Jumlah prestasi olahraga

Jumlah prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2018 berasal dari 15 cabang olahraga. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 menjadi lima cabang olahraga.

5. Jumlah pembinaan olahraga

Pembinaan olahraga difokuskan pada cabang olahraga prestasi dan tradisional sehingga diharapkan dapat menjadi cabang unggulan di tingkat provinsi dan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional. Capaian kinerja pada indikator tersebut di tahun 2020 adalah 25 cabang olahraga yang merupakan hasil kerjasama antara KONI dan Dispora Kabupaten Belitung Timur.

6. Jumlah atlet yang berprestasi

Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2018 di Kabupaten Belitung Timur sejumlah 154 atlet. Terkait dengan target tersebut, ada dua acara penyelenggaraan olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan oleh provinsi yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah IX, PORPROV V, dan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi pada tahun 2018. Dari keikutsertaan dalam acara tersebut realisasi jumlah atlet berprestasi pada tahun 2018 sebanyak 145 orang. Pada tahun 2019 jumlah atlet berprestasi sebanyak 41 orang dari 7 cabang olahraga dan atlet cabang olahraga tradisional sebanyak 3 orang dari 4 cabang olahraga. Cabang olahraga yang mempunyai prestasi pada tahun 2019 saat mengikuti kejuaraan yaitu:

a. Jumlah atlet cabang olahraga prestasi

- Atletik sejumlah 12 orang;
- Renang sejumlah 2 orang;
- Karate sejumlah 3 orang;
- Voli Pasir sejumlah 2 orang;
- Taekwondo sejumlah 15 orang; dan
- Senam sejumlah 7 orang.

b. Jumlah atlet cabang olahraga tradisional

- Bakiak sejumlah 3 orang

Capaian untuk tahun 2020 tidak tersedia karena kegiatan kejuaraan olahraga baik tingkat nasional maupun daerah yang ditiadakan akibat pandemi Covid-19.

7. Jumlah Emas

Peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Belitung Timur ditunjukkan oleh perolehan medali emas untuk beberapa cabang olahraga di tingkat provinsi maupun nasional. Perolehan medali emas pada tahun 2018 dari beberapa penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebanyak 45 medali emas, terdiri dari:

a. Pekan Olahraga Daerah (POPDA) IX Tahun 2018

- Cabang olahraga atletik = 9 medali emas; dan
- Cabang olahraga pencak silat = 1 medali emas.

b. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) V Tahun 2018

- Cabang olahraga atletik = 8 medali emas;
- Cabang olahraga pencak silat = 3 medali emas;
- Cabang olahraga taekwondo = 4 medali emas;
- Cabang olahraga catur = 4 medali emas;

- Cabang olahraga senam = 3 medali emas;
- Cabang olahraga tenis meja = 1 medali emas;
- Cabang olahraga panjat tebing = 7 medali emas;
- Cabang olahraga bilyar = 1 medali emas;
- Cabang olahraga renang = 3 medali emas; dan
- Cabang olahraga balap = 1 medali emas.

Perolehan medali emas tahun 2019 dari beberapa penyelenggaraan kejuaraan olahraga adalah 25 medali emas, terdiri dari:

- a. Kejuaraan Olahraga Daerah (Kejurda) Tahun 2019 Tingkat Pelajar se-Provinsi Babel
 - Cabang olahraga atletik = 10 medali emas;
 - Cabang olahraga taekwondo = 5 medali emas;
 - Cabang olahraga senam = 5 medali emas;
 - Cabang olahraga renang = 2 medali emas; dan
 - Cabang olahraga karate = 1 medali emas.
- b. Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Tahun 2019
- c. Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - Cabang olahraga atletik = 1 medali emas
- d. Kejuaraan Taekwondo Hamadang *Championship* Internasional = 1 medali emas.

Capaian untuk tahun 2020 tidak tersedia karena kegiatan kejuaraan olahraga baik tingkat nasional maupun daerah yang ditiadakan akibat pandemi Covid-19.

2.3.2.14 *Urusan Statistik*

Statistik merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan statistik Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.27 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase ketersediaan data	Persen	-	-	-	57,14	57,14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur, 2020

Perhitungan ini menggunakan rumusan jumlah publikasi statistik sektoral yang dijadikan referensi oleh pemerintah daerah dibagi jumlah publikasi statistik sektoral yang diterbitkan pada tahun berkenaan. Jumlah bidang urusan pemerintah daerah yang seharusnya dikelola sebagai data bidang urusan statistik sektoral adalah sebanyak 35 bidang urusan meliputi 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar, 15 urusan wajib nonpelayanan dasar (tidak termasuk urusan persandian dan statistik), 8 urusan pilihan, dan 6 fungsi penunjang. Dari 35 bidang urusan pemerintah daerah yang seharusnya dipublikasi sebagai data statistik sektoral, baru 20 bidang urusan yang telah dikelola dan dipublikasikan sebagai data statistik sektoral. Secara persentase, pada tahun 2020 baru 57,14 persen bidang urusan yang dipublikasi sebagai data statistik sektoral di Kabupaten Belitung Timur.

2.3.2.15 Urusan Persandian

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang salah satunya yaitu urusan persandian berada satu rumpun dengan urusan statistik. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, Urusan Persandian dan Statistik digabung dengan Urusan Komunikasi dan Informatika di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam satu bidang yang bernama Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik terdapat pada bagian ke 9 Pasal 33. Sebelum disatukan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, persandian berada di Sekretariat Daerah pada sub-bagian yang bernama Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Pada tanggal 3 Januari 2017 terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika yang masuk pada tipe B yang terdiri dari empat Urusan yaitu Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta tiga Bidang yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Penyelenggaraan *E-Government* dan Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik.

Tabel 2.28 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks kematangan keamanan informasi***	Persen	-	-	-	-	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur, 2020

Realisasi urusan persandian pada tahun 2020 adalah 0 atau tidak dapat tercapai. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid – 19 di Kabupaten Belitung Timur sehingga kegiatan pendukung capaian indikator tersebut belum dapat terlaksana.

2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan pada pelestarian kebudayaan daerah yang dimiliki baik fisik maupun nonfisik, serta pengembangan dan pengelolaan keragaman budaya melalui peningkatan apresiasi terhadap kegiatan maupun pelaku seni budaya. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.29 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah <i>event</i> seni dan budaya	Kegiatan	3	3	3	3	3
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	7	7	8	9	-
3.	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	23	215	628	628	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan *event* seni dan budaya

Penyelenggaraan *event* seni dan budaya merupakan agenda rutin, yang terjadwal sepanjang tahun guna mendukung kegiatan kepariwisataan. Kegiatan atraksi seni dan budaya merupakan acara yang menampilkan gelar seni yang berlokasi pada

beberapa destinasi dan objek wisata di Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2020, capaian penyelenggaraan *event* seni dan budaya tidak dapat mencapai target yang ditentukan karena adanya peraturan pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 jumlah *event* seni dan budaya di Kabupaten Belitung Timur berjumlah tiga kegiatan.

2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 berjumlah sembilan unit berupa bangunan pementasan dan panggung hiburan.

3. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2016 sebanyak 628 buah, terdiri dari situs dan Bangunan Cagar Budaya (BCB) sebanyak 15 buah, benda sejarah sebanyak 446 buah, benda sejarah koleksi Museum Buding 128 buah, benda cagar budaya yang terdapat di Museum Buding sejumlah 39 unit barang. Sampai tahun 2020, belum terjadi peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yaitu masih berjumlah 628 buah.

2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan meliputi pengembangan perpustakaan daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perpustakaan daerah. Berikut capaian indikator kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah perpustakaan	Persen	100,00	100,00	100,00	33,00	-
2.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	19,00	154,00	126,00	138,00	86,11
3.	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	95,00	97,00	97,00	96,00	-
4.	Persentase jumlah perpustakaan desa	Persen	83,00	70,00	61,00	63,00	63,00

Sumber: Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan perpustakaan dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah perpustakaan daerah

Pencapaian indikator kinerja jumlah perpustakaan daerah pada tahun 2016-2018 tercapai 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, capaian indikator justru mengalami penurunan menjadi 33 persen, dari target capaian kinerja sebanyak tiga unit dan hanya terealisasi sebanyak satu unit. Hingga tahun 2020, belum direncanakan penambahan gedung untuk Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur, baik melalui dana APBD maupun APBN. Perpustakaan Daerah juga meliputi layanan perpustakaan "Taman Bacaan" di Kecamatan Manggar, Kecamatan Kelapa Kampit, "Rumah Pintar" di Kecamatan Gantung, dan perpustakaan keliling sebanyak dua unit.

2. Persentase pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016-2019 berdasarkan data yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur telah melebihi target capaian sebanyak >15.000 orang. Di sisi lain, persentase pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 atau hanya mencapai 86,11 persen. Hal tersebut berkaitan dengan ditutupnya layanan perpustakaan akibat pandemi Covid-19.

3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2016-2019 rata-rata mengalami peningkatan, sesuai target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2019, terdapat penurunan jumlah koleksi karena telah dilaksanakan pembenahan koleksi buku sesuai dengan data yang terintegrasi dengan Simda Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. Koleksi buku diperoleh melalui APBD Kabupaten Belitung Timur dan hibah dari Perpustakaan Nasional RI.

4. Jumlah perpustakaan desa

Perpustakaan desa diperuntukkan bagi masyarakat dan dikelola oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi. Perpustakaan desa/kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Jumlah perpustakaan desa pada tahun 2018 masih sama dengan jumlah perpustakaan desa pada tiga tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 19 unit. Pada tahun 2019, terdapat penambahan 1 unit perpustakaan di Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar. Capaian kinerja indikator sampai dengan tahun 2020 sebesar 63 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 35 unit (teralisasi sebanyak 20 unit). Pembentukan perpustakaan desa

dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan kehidupan masyarakat. Keterbatasan anggaran bagi desa untuk alokasi pendanaan pembangunan perpustakaan desa menyebabkan tidak semua desa yang ada di Kabupaten Belitung Timur memiliki perpustakaan desa.

2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis penyelenggaraan pemerintahan. Kearsipan, bank data ataupun dokumen merupakan salah satu instansi yang memiliki fungsi yang cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan dokumen kearsipan yang dimiliki kabupaten. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan kearsipan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengelolaan arsip secara baku	Persen	18,00	24,00	31,00	47,00	-
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	73,00	80,00	86,00	92,00	94,00
3.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	26,00	38,00	41,00	72,00	81,00

Sumber: Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan kearsipan dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan arsip secara baku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 3 huruf f tujuan kearsipan nasional adalah menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan dan memberdayakan urusan kearsipan dengan merumuskan teknik pembinaan dan pengembangan ke semua OPD, perorangan dan swasta, melaksanakan akuisisi, dan pengolahan terhadap semua arsip yang diserahkan maupun melakukan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan arsip.

Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, sedangkan untuk pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah. Kriteria pengelolaan arsip secara baku di antaranya memiliki SDM kearsipan, telah melaksanakan pengelolaan arsip aktif, penataan arsip inaktif dan memiliki sarana dan prasarana kearsipan. Capaian indikator kinerja penerapan pengelolaan arsip secara baku sampai dengan tahun 2019 mencapai 47 persen. Capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 31 persen.

2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Capaian indikator kinerja peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2020 terealisasi sebanyak 40 orang dari target 45 orang atau persentase capaian 94,00 persen. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dengan mengundang narasumber dari Arsip Nasional RI dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Lembaga Kearsipan Tingkat Provinsi. Peserta merupakan arsiparis dan pejabat eselon III/IV yang membawahi unit kearsipan OPD.

Tingkat pertumbuhan arsip di instansi membawa konsekuensi logis terkait penyediaan ruang simpan, sarana kearsipan, tenaga pengelola, waktu dan biaya. Semakin banyak arsip yang harus dikelola maka akan semakin besar biaya, waktu, tenaga, tempat, dan sarana yang diperlukan. Selain itu, jumlah arsip juga akan mempengaruhi tingkat kecepatan dalam penemuan kembali arsip. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan mengenai pengelolaan arsip kepada OPD dan desa berupa kegiatan pemantauan dan monitoring pengelolaan arsip OPD serta melalui kegiatan pembenahan arsip OPD yang melibatkan seluruh arsiparis se-Kabupaten Belitung Timur.

3. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sampai dengan tahun 2020, yaitu 26 perangkat daerah dari 32 perangkat daerah atau terealisasi sebesar 81 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 72 persen. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang makna dan kondisi SDM kearsipan sehingga tidak terbangun pemahaman tentang peran penting arsip bagi penunjang administrasi sehari-hari di lingkungan pemerintahan dan dalam pelaksanaan pembangunan.

2.3.3 Fokus Urusan Pilihan

Urusan pilihan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2016-2020 meliputi urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian.

2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan dan tingkat konsumsi ikan merupakan salah satu upaya mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020, dengan sasaran meningkatnya PDRB sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi perikanan	Ton	39.691	34.906	42.896	44.109	40.216
2.	Produksi perikanan tangkap	Ton	39.593	34.853	42.826	43.982	40.079
3.	Produksi perikanan budidaya	Ton	98	53	70	127	137
4.	Produksi pengolahan ikan	Ton	-	-	-	-	24.741
5.	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	47,64	44,6	48,25	50,37	-

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi perikanan tangkap hanya mencapai 40.079 ton atau menurun sekitar 3.810 ton dibanding tahun 2019. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan tingkat kebutuhan atau permintaan terhadap bahan baku ikan, pola penangkapan yang berubah karena cuaca yang sulit diprediksi, sarana prasarana nelayan lokal yang kurang memadai, dan persaingan dengan nelayan dari daerah lain yang memiliki teknologi yang lebih baik.

2. Produksi perikanan budidaya

Potensi perikanan budidaya sebesar 37.000 Ha dan dari total potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 223.701 m². Pada tahun 2019, target produksi perikanan budidaya adalah 111,28 ton dan terealisasi sebanyak 127 ton atau 114,53 persen.

Produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2020 menjadi 137 ton. Hal tersebut mengindikasikan adanya potensi produksi perikanan budidaya yang dapat dikembangkan dan mendukung sektor perekonomian daerah. Selain itu, kapasitas hasil budidaya juga semakin meningkat dari jumlah jenis ikan yang dibudidaya sampai dengan kapasitas tebar dalam memanfaatkan potensi yang ada, seperti pemanfaatan kolong eks tambang serta potensi budidaya ikan laut seperti kerapu. Banyaknya permintaan komoditas ikan air tawar juga merupakan peluang usaha bagi masyarakat dalam mewujudkan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Belitung Timur.

3. Konsumsi Ikan per tahun

Dalam upaya meningkatkan produksi perikanan tidak lepas dari sistem pengolahan ikan yang inovatif dan berkelanjutan, hal ini sangat penting guna menciptakan peluang usaha baru dan menambah produk olahan ikan yang variatif guna meningkatkan jumlah konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Timur, indikator Dinas Perikanan terkait konsumsi ikan pada tahun 2020 adalah 50,37 kg/kapita/tahun dengan jumlah penduduk 125.598 jiwa. Pertumbuhan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang sangat signifikan tidak lepas dari program kegiatan pada Dinas Perikanan yang terus melakukan pembinaan dan peningkatan sarana – prasarana pengolahan bagi masyarakat. Sebagai perbandingan, pada tahun 2017, jumlah produksi pengolahan ikan sebesar 1.817.175 kg dari jumlah total UPI sebanyak 137 unit. Pada tahun 2018, mengalami penurunan jumlah produksi menjadi 1.658.266 kg dari 299 unit.

4. Produksi Pengolahan Ikan

Produksi pengolahan ikan adalah kegiatan untuk memproduksi atau menghasilkan produk olahan dengan bahan baku ikan. Beberapa contoh produk olahan ikan seperti *fish stick*, nugget, bakso ikan, empek-empek, otak-otak, abon ikan dan kerupuk. Produksi pengolahan ikan pada tahun 2020 mencapai 24.741,89 Ton atau melebihi target yang ditentukan yaitu 21.000 Ton. Beberapa faktor peningkatan produksi pengolahan antara lain adanya bantuan sarana – prasarana produksi, perbaikan kualitas kemasan, serta sosialisasi, kerjasama, dan promosi dengan bantuan media sosial sehingga meningkatkan daya tarik masyarakat.

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata Kabupaten Belitung Timur mengarah kepada pengembangan sektor pariwisata untuk mendukung perekonomian daerah. Pariwisata menjadi sektor penting yang harus lebih dikembangkan karena perekonomian Belitung Timur masih ditopang oleh pertambangan, pertanian, dan perikanan, sedangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya cukup melimpah. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan pariwisata Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah destinasi unggulan kecamatan	Destinasi	5	7	6	6	17
2.	Jumlah kawasan strategi kabupaten	Kawasan	1	2	2	2	2
3.	Jumlah objek wisata	Objek	66	68	71	69	-
4.	Jumlah potensi wisata	Objek	68	103	100	24	-
5.	Jumlah jasa usaha pariwisata	Jasa Usaha	150	164	520	166	-
6.	Jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina	Jasa Usaha	4	78	80	53	-
7.	Jumlah pelaku jasa pariwisata yang bersertifikasi	Jasa Usaha	10	0	0	0	-
8.	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	232.871	250.326	344.098	279.486	70.420
9.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1	1	1
10.	PAD sektor Pariwisata	Persen	1,59	1,48	0,36	1,58	-
11.	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	232.871	250.326	344.098	279.486	70.420
12.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1	1	1
13.	PAD sektor Pariwisata	Persen	1,59	1,48	0,36	1,58	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, 2020

Pada urusan pariwisata, di tahun 2020, Kabupaten Belitung Timur telah menambah 11 destinasi unggulan yang tersebar di beberapa kecamatan, sedangkan untuk kawasan strategis kabupaten jumlahnya tidak berubah yaitu 2 kawasan. Penambahan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan potensi wisata khususnya wisata alam sehingga masyarakat sekitar juga dapat diberdayakan. Meskipun demikian beberapa kinerja seperti pembinaan jasa pariwisata mengalami penurunan yang harus diantisipasi untuk menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Disisi lain, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 279.486 kunjungan, menurun hingga menjadi 70.420 kunjungan pada tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang kemudian berdampak besar, salah satunya bagi sektor pariwisata lokal. Pembatasan transportasi dan penutupan operasional tempat wisata membuat wisatawan dari luar daerah tidak dapat berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur sehingga mengurangi kunjungan juga perputaran uang dari aktivitas wisata.

2.3.3.3 Urusan Pertanian

Pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, peningkatan produksi dan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sebagai stimulator dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial pertanian. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan pertanian Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi)	Ton	6.394	5.961	7.031	6.200	6.738
2.	Jumlah produksi komoditi unggulan tanaman hortikultura (cabe)	Ton	213	1.430	171	185	784
3.	Jumlah produksi komoditi unggulan tanaman perkebunan (karet)	Ton	626,11	690	1000	770	863
4.	Jumlah produk komoditi unggulan tanaman perkebunan (lada)	Ton	1.629,69	1.359	1.900	2.140	2.431
5.	Jumlah populasi ternak (sapi)	Ekor	1.666	1.462	1.535	1.558	1.679

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan pertanian dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah produksi komoditas strategis tanaman pangan (padi)

Produksi padi mengalami peningkatan jumlah produksi dari tahun 2019 sebanyak 6.200 ton menjadi 6.738 ton pada tahun 2020. Dari sisi target produksi yang ingin dicapai maka produksi padi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 9.491 ton. Belum tercapainya tingkat produksi dikarenakan faktor cuaca yang berpengaruh dalam penyediaan air irigasi saat musim kemarau. Hal tersebut kemudian berdampak pada tanaman padi yang mengalami kekeringan dan gagal panen. Tercatat seluas 86 hektar

tanaman padi mengalami gagal panen dari 126 hektar yang ditanam pada bulan April 2019 dan sisa 46 hektar yang dapat dipanen meskipun tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Dampak kekeringan yang panjang juga menyebabkan musim tanam di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur mengalami penundaan. Pada tahun-tahun sebelumnya petani sudah memulai musim tanam pada bulan Agustus, namun pada tahun ini musim tanam baru dimulai pada bulan Desember 2019 dan bahkan di beberapa lokasi persawahan baru dimulai pada bulan Januari 2020. Hal ini disebabkan terutama oleh musim hujan yang baru turun pada bulan November 2019 akhir.

2. Jumlah produksi komoditi unggulan tanaman hortikultura (cabe)

Tanaman cabe merupakan komoditas yang cukup penting dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ketersediaan komoditas ini di pasaran bahkan mampu memicu tingkat inflasi di suatu daerah tidak terkecuali di Belitung Timur. Pada tahun 2020, produksi cabe tercatat sebanyak 784,55 ton atau meningkat secara signifikan dari tahun 2019 yang hanya sebesar 185 ton. Dengan angka produksi tersebut maka produksi komoditas ini sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 350 ton.

3. Jumlah produksi komoditi unggulan tanaman perkebunan (karet)

Produksi tanaman karet pada tahun 2020 hanya mencapai 863 ton dari yang ditargetkan sebesar 1.151 ton. Hal ini menunjukkan bahwa produksi tanaman karet belum mencapai target, salah satunya disebabkan harga karet yang murah sehingga banyak petani yang tidak memanen karetnya. Selain itu, adanya musim gugur pada tanaman karet mengakibatkan produktivitas tanaman karet mencapai 0,84 ton/Ha dalam wujud produksi berupa karet kering atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019.

4. Jumlah produksi komoditi unggulan tanaman perkebunan (lada)

Produksi tanaman lada pada tahun 2020 mencapai 2.431 ton dari yang ditarget sebesar 3.474 ton. Target tersebut tidak tercapai karena terdapat penurunan harga lada putih kering sehingga minat petani berkurang walaupun pemerintah sudah membantu berupa bantuan bibit lada dan saprodi. Selain itu, permasalahan yang dihadapi dalam budidaya lada yaitu munculnya penyakit kuning dan pangkal batang busuk, serta pengaruh musim kemarau panjang sehingga banyak kebun yang mengalami kekeringan dan tanaman lada yang mati. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 70 persen atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 yaitu 72 persen.

5. Jumlah populasi ternak besar (sapi)

Populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur dihitung berdasarkan hasil pendataan ternak sapi yang dilaksanakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 1 September setiap tahunnya, pada tahun 2020 mencapai 1.679 ekor dari target 1.940 ekor atau sebesar 86,55 persen. Capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 82,87 persen. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2019, capaian kinerja jumlah populasi ternak sapi belum mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingginya kasus gangguan reproduksi pada sapi-sapi betina masa produktif, tingginya angka *sevice per conception* (*S/C ratio*), dan rendahnya angka kebuntingan pada ternak sapi. Rendahnya jumlah pengadaan bibit sapi betina produktif yang disiapkan sebagai calon induk juga menyebabkan peningkatan populasi ternak sapi berjalan lambat dibandingkan dengan target yang diharapkan.

2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan mengarah kepada perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan perdagangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ekspor bersih pedagang	US\$	122.869.741	154.848.047	154.743.053	178.644.355	-
2.	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	Pedagang	548	360	616	699	-
3.	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	Persen	10,15	10,38	10,63	10,48	9,65
4.	Persentase bahan pokok strategis dengan harga yang terjangkau	Persen	-	-	-	63,64	54,55
5.	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	Persen	-	-	-	-	76,69
6.	Persentase Barang dalam kemasan	Persen	-	-	-	-	62,42

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
	tertutup (BDKT) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan jumlah BDKT yang diuji						

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Pandan, Bidang Perdagangan DPMPTSP Kab. Belitung Timur, dan Badan Pusat Statistik Kab. Belitung Timur (Belitung Timur dalam Angka Tahun 2020)

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan perindustrian dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekspor bersih perdagangan

Berdasarkan data yang tercatat dan tersedia yaitu tahun 2019 di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Pandan, nilai ekspor dan impor Kabupaten Belitung Timur sebesar US\$ 178.644.355,66 dan didominasi oleh ekspor perusahaan perkebunan sawit. Nilai ekspor tahun 2019 tercatat sebesar US\$ 179.737.356,59, sedangkan nilai impor sebesar US\$ 1.093.000,93. Peranan pemerintah daerah dalam menunjang ekspor Kabupaten Belitung adalah membantu menerbitkan sertifikat berupa Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) sebagai hasil dari peralatan perusahaan yang telah diuji melalui proses tera/tera ulang. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk melakukan tera/tera ulang sendiri sehingga mulai 2019 proses tersebut sudah dilakukan melalui Unit Metrologi Legal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur. Sebelumnya perusahaan yang ingin melakukan tera/tera ulang harus mengundang tim dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal ini merupakan jumlah pedagang yang terdata dan rutin membayar retribusi. Pedagang tersebut berada di Pasar Kecamatan Manggar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, dan Kecamatan Damar. Pada tahun 2020, terdapat 669 pedagang informal di empat pasar tradisional tersebut atau meningkat sebanyak 54 pedagang dari tahun 2018 yang berjumlah 614 pedagang. Pedagang informal ini merupakan pedagang yang menempati kios dan los plank pada masing-masing pasar tersebut. Jumlah terbesar pedagang berada di Pasar Tradisional Kecamatan Manggar sebanyak 303 pedagang, diikuti Pasar Kelapa Kampit sebanyak 162 pedagang. Pedagang kios dan losplank ini merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 893.394.000,- pada tahun 2019.

3. Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2020 adalah penyumbang PDRB Kabupaten Belitung Timur terbesar keempat setelah pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, dan pertambangan sebesar 9,65 persen. Peranan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan dalam meningkatkan PDRB sektor perdagangan yaitu dengan memfasilitasi pedagang eceran sektor informal yang ada di pasar tradisional di Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Gantung.

4. Persentase bahan pokok strategis dengan harga yang terjangkau

Selama tahun 2020 bahan pokok strategis yang harga rata-ratanya cenderung sama dengan HET ada 6 (enam) jenis yaitu Beras, Mentega, Susu, Jagung, Gas, Garam Yodium. Terjadi penurunan nilai kinerja pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar 8,9 persen. Penurunan ini dikarenakan pada bahan pokok strategis khususnya gula pasir, pada tahun 2019 masuk kategori bahan pokok dengan harga terjangkau, sementara pada tahun 2020 harga gula pasir mengalami kenaikan, diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga tahun 2020 gula pasir masuk kategori barang dengan harga tidak terjangkau (harga rata-rata eceran melebihi HET). Kenaikan harga gula terjadi pada skala nasional, dikarenakan produksi gula pada tahun 2019 menurun, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan stok untuk tahun 2020 berakibat harga eceran gula pasir melonjak.

5. Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah

Tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan realisasi jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah dibandingkan tahun 2019 sebanyak 34 unit UTTP. Realisasi alat UTTP yang bertanda tera sah tahun 2019 sebanyak 780 unit, tahun 2020 berjumlah 814 unit UTTP. Untuk capaian indikator kinerja diperoleh sebesar 62,42 persen. Sementara target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 80 persen, sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 78,03 persen. Belum maksimalnya capaian kinerja pada tahun 2020 dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk petugas tera untuk melakukan kegiatan pelayanan tera secara *door to door*.

2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Pembangunan urusan perindustrian diarahkan untuk menumbuhkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri dan usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Berikut merupakan capaian indikator kinerja urusan perindustrian Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertumbuhan Industri	Persen	11	12,21	1,24	9,96	5,73
2.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	33	31	35	30	30
3.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan Harga Konstan	Persen	19,08	19,93	19,90	19,77	19,85
4.	Jumlah sentra IKM yang di fasilitasi	Sentra	0	1	3	4	-
5.	Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh IKM	Orang	3.604	4.284	4.766	4.588	-

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan urusan perindustrian dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan industri

Pada tahun 2019 Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Belitung Timur berjumlah 2.862 industri. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 3.062 industri. Meskipun jumlah IKM Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan, namun angka pertumbuhan industrinya mengalami penurunan. Angka pertumbuhan industri tahun 2019 sebesar 9,96 persen, sedangkan tahun 2020 hanya sebesar 5,73 persen. Target capaian angka pertumbuhan industri tahun 2020 adalah sebesar 1,30 persen sehingga angka tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja oleh IKM selalu meningkat pada kurun 2016 – 2018 namun menurun 178 orang di tahun setelahnya.

2. Cakupan bina kelompok pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok yang mendapat binaan atau bantuan pemerintah daerah pada tahun 2020 sebanyak 30 kelompok. Pembinaan kelompok yang dilaksanakan meliputi kegiatan pelatihan, penyuluhan, konsultasi, serta fasilitasi. Pelatihan yang dilakukan pada tahun 2019 meliputi pelatihan untuk kelompok pengrajin tenun serta pengrajin keramik.

3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan Harga Konstan

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan Harga Konstan pada tahun 2020 sebesar 19,85 persen, dengan perolehan angka PDRB sektor pengolahan sebesar 1.088.129 (dalam juta rupiah). Total angka PDRB sebesar 5.503.991 (dalam juta rupiah).

4. Jumlah sentra IKM yang di fasilitasi

Perkembangan jumlah sentra IKM yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait menunjukkan peningkatan capaian dalam kurun waktu 2016 hingga 2020. Pada tahun 2019 jumlah sentra IKM yang di fasilitasi mencapai 4 sentra, meningkat secara konsisten setiap tahun 2017.

5. Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh IKM

Seiring dengan pertumbuhan IKM yang ada di Kabupaten Belitung Timur, hal ini menjadi salah satu peluang kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2019, diketahui terdapat 4.588 tenaga kerja yang mampu terserap dalam kegiatan ekonomi berbasis IKM. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018, akan tetapi keberadaan IKM tersebut memiliki potensi dan peluang yang baik untuk menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal.

2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang meliputi administrasi pemerintahan; pengawasan; perencanaan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan.

2.3.4.1 Administrasi Pemerintahan

Fungsi penunjang administrasi pemerintahan berfokus pada penilaian penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkup wilayah Kabupaten Belitung Timur. Berikut merupakan capaian kinerja administrasi pemerintahan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Fungsi Administrasi Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100
2.	Persentase kebijakan di bidang sosial kesejahteraan sosial yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100
3.	Persentase pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	82

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	98
5.	Persentase kebijakan perekonomian yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100
6.	Persentase kegiatan pembangunan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100
7.	Persentase jumlah layanan pengadaan	Persen	100	100	100	100	100
8.	Persentase SDM yang berkualitas dan profesional dibidang PBJ	Persen	100	100	100	100	100
9.	Persentase Penataan Hukum	Persen	80	85	87	90	68,98
10.	Persentase realisasi penetapan peraturan perundang-undangan	Persen	80	80	83	85	87,00
11.	Persentase OPD yang tepat ukuran dan kaya fungsi	Persen	40	100	100	100	79,49
12.	Persentase OPD Tata Laksana Yang Optimal	Persen	60	100	100	100	56,82
13.	Persentase OPD dengan IKM Baik	Persen	50	100	100	100	56,82
14.	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Persen	100	100	100	100	78,79
15.	Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan perencanaan	Persen	0	0	0	100	100
16.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Nilai	50,60	57,70	63,47	65,18	66,02
17.	Persentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Timur yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	Kategori	ST	T	ST	T	T

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2020

Beberapa capaian penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kinerja yang maksimal sebesar 100%, namun terdapat beberapa penurunan khususnya bagian kesejahteraan rakyat, bagian hukum, bagian organisasi, dan bagian umum dilihat dari capaian kinerjanya. Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan refocusing anggaran dan penundaan atau peniadaan beberapa kegiatan di tahun 2020 sehingga capaiannya menjadi tidak optimal. Terkait nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Berdasarkan publikasi tahun 2017 diketahui bahwa LAKIP Kabupaten Belitung Timur mendapat kategori CC, dengan nilai 57,70. Sedangkan terkait persentase aspek dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Timur yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi. Berdasarkan hasil EKPPD pada tahun 2020 Kabupaten Belitung Timur mendapatkan kategori prestasi “Tinggi” atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD 2019.

2.3.4.2 Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan berfokus pada pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkup wilayah Kabupaten Belitung Timur. Berikut merupakan capaian indikator kinerja fungsi pengawasan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Fungsi Pengawasan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK	Persen	40	46	51,01	54,29	-
2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat	Persen	48,26	40,27	20,91	50	70,86
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	2	2	2	2	2
4.	Level Maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	-
5.	Jumlah OPD yang berpredikat WBK	OPD	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kabupaten Belitung Timur 2016 – 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan fungsi pengawasan dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK dan Inspektorat
Pada fungsi pengawasan, salah satu indikator yang digunakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah persentase penyelesaian

tindak lanjut. Indikator tersebut merupakan indikator keberhasilan dan kepatuhan daerah dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil temuan atau rekomendasi temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2019, persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK untuk Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 54,29 persen, sedangkan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan inspektorat sebesar 50,00 persen. Pada tahun 2020, persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan inspektorat mengalami peningkatan menjadi 70,86 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

2. Level Kapabilitas APIP

Model Kapabilitas Pengawasan Intern (*Internal Audit Capability Model/IA-CM*) yaitu suatu kerangka kerja untuk mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan dalam pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu level 1 (*Initial*), level 2 (*Infrastructure*), level 3 (*Integrated*), level 4 (*Managed*), dan level 5 (*Optimizing*). Penilaian yang dilakukan selama kurun 2016-2019, memberikan nilai level 2 kepada Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian oleh BPKP sehingga kapabilitas masih sama yaitu di level 2.

3. Level Maturitas SPIP

Level maturitas APIP mengidentifikasi tingkat kematangan dan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan SPIP serta memberi rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintahan daerah. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi lima unsur SPIP, antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Level maturitas SPIP terdiri dari enam tingkat, antara lain:

- a. Tingkat 0, untuk Pemerintah Daerah yang sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian *intern*,
- b. Tingkat 1 (Rintisan),
- c. Tingkat 2 (Berkembang),
- d. Tingkat 3 (Terdefinisi),
- e. Tingkat 4 (Terkelola dan terukur), dan
- f. Tingkat 5 (Optimum), bagi instansi yang telah menerapkan pengendalian *intern* yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Dalam kurun 2016-2019 maturitas SPIP berada pada level 2, sedangkan di tahun 2020 target Kabupaten Belitung Timur naik menjadi level 3 namun belum terealisasi karena BPKP belum melakukan penilaian.

4. Jumlah OPD yang berpredikat WBK

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi antara lain penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi, dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut maka dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM. Penetapan Satker sebagai WBK dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker-satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan. Sampai tahun 2020, jumlah OPD yang berpredikat WBK masih belum tercapai karena ada *pandemi* Covid-19 sehingga dilakukan penghapusan kegiatan. Adapun OPD di Kabupaten Belitung Timur yang ditargetkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan yang saat ini telah melakukan pencanangan zona integritas.

2.3.4.3 Perencanaan

Target kinerja pada fungsi perencanaan mengarah kepada ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis. Berikut merupakan capaian kinerja fungsi perencanaan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Fungsi Perencanaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase konsistensi program/ Keselarasan antar dokumen	Persen	90,00	80,75	93,18	89,87	96,24

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
	Perencanaan (RPJMD dengan RKPD)						
2.	Persentase konsistensi program antar dokumen Perencanaan (RKPD dengan KUA-PPAS)	Persen	84,00	102,40	97,07	97,13	-
3.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Persen	NA	35,07	68,14	-	-
4.	Persentase kehadiran kelompok masyarakat dalam proses perencanaan/Persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan	Jumlah	100,00	100,00	100,00	88,89	-
5.	Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan	Jumlah	9	9	9	9	-
6.	Realisasi rata-rata capaian kinerja hasil monitoring dan evaluasi terhadap RKPD / Persentase rata-rata capaian program terhadap RKPD	Persen	90,21	95,49	94,28	95,20	94,17
7.	Realisasi capaian belanja hasil monitoring dan evaluasi	Persen	88,74	86,50	82,87	86,43	-
8.	Persentase alokasi anggaran OPD yang mendukung program kemiskinan	Persen	9,18	11,49	20,47	89,55	-
9.	Persentase program OPD yang mendukung pro poor dan pro job	Persen	7,96	8,42	22,11	23,36	-
10.	Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan Renstra	Persen	85,00	80,75	93,18	89,87	96,24

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan fungsi perencanaan dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase konsistensi/keselarasan program antar dokumen perencanaan (RPJMD-RKPD)

Terkait pencapaian indikator keselarasan program RPJMD dengan RKPD pada tahun 2016 sebesar 90 persen, sedangkan tahun 2017 jumlah program RKPD sebanyak 172 program dan program RPJMD sebanyak 213 program sehingga realisasinya 80,75 persen. Pada tahun 2018, jumlah program yang tertuang dalam RKPD berjumlah 205 program, sedangkan dalam RPJMD sebanyak 220 program sehingga terealisasi sebesar 93,18 persen. Realisasi tahun 2019 sebesar 89,87 persen, dengan jumlah program RPJMD sebanyak 227 program dan RKPD sebanyak 204 program. Pada tahun 2020, realisasi capaian kinerja indikator keselarasan program RPJMD dengan RKPD sebesar 96,24 persen dengan program RKPD berjumlah 205 program dan RPJMD berjumlah 213 program.

2. Persentase konsistensi program antar dokumen Perencanaan (RKPD dengan KUA-PPAS)

Pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek setiap tahun. RKPD disusun sebagai penjabaran dari arah kebijakan tahunan selama lima tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada kurun waktu 2016-2019 konsistensi program perencanaan cenderung fluktuatif dengan capaian tahun 2019 sebesar 97,13 persen dan capaian tertinggi sebesar 102,40 persen pada tahun 2017.

3. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat melalui usulan yang disampaikan pada rencana pembangunan kecamatan dan pelaksanaan forum perangkat daerah yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahun 2017, dari 958 usulan, terakomodasi sebanyak 336 usulan atau 35,07 persen. Pada tahun 2018, terdapat 995 usulan masyarakat dan diakomodir sebanyak 678 usulan atau terealisasi sebesar 68,14 persen. Sementara itu, data akomodasi usulan masyarakat dalam RKPD 2019 dan 2020 tidak tersedia.

4. Persentase kehadiran kelompok masyarakat dalam proses perencanaan / persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat dilihat dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan wahana publik yang membawa *stakeholder* memahami isu dan permasalahan daerah untuk mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Pada pelaksanaan Musrenbang kabupaten tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, terdapat sembilan unsur yang diundang dan berpartisipasi dalam proses perencanaan meliputi DPRD, instansi vertikal, LSM, BUMD, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pengusaha/swasta, organisasi masyarakat (asosiasi – asosiasi yang berada di Kabupaten Belitung Timur, organisasi kepemudaan, keagamaan, profesi, dan lain-lain) serta perbankan, sehingga realisasi capaian indikator terealisasi sebesar 100 persen. Pada tahun 2019, terdapat satu perwakilan yang tidak hadir yaitu perwakilan DPRD sehingga realisasi capaian kinerjanya hanya sebesar 88,89 persen.

5. Jumlah *stakeholder* yang menyampaikan usulan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah *stakeholder* yang menyampaikan usulan melalui pelaksanaan forum musrenbang. Usulan-usulan yang disampaikan bukan hanya usulan program namun juga masukan atau saran terhadap pemecahan permasalahan daerah. Semakin banyak usulan yang masuk maka perencanaan pembangunan akan semakin memperhatikan usulan masyarakat yang diselaraskan dengan prioritas daerah sehingga tercipta harmonisasi perencanaan pembangunan. Jumlah *stakeholder* yang menyampaikan usulan dan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan musrenbang mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 terdiri dari sembilan unsur meliputi DPRD, instansi vertikal, LSM, BUMD, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pengusaha/swasta, organisasi masyarakat dan perbankan sehingga realisasinya 100 persen.

6. Realisasi rata-rata capaian kinerja hasil monitoring dan evaluasi terhadap RKPD/persentase rata-rata capaian program terhadap RKPD

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah dua fungsi manajemen yang berkaitan. Monitoring dilakukan untuk pengawasan dan pengendalian untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap suatu kegiatan yang sedang berjalan dalam satu tahun anggaran. Adapun evaluasi dilakukan sebagai penilaian terhadap hasil dari kegiatan agar dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi adalah mata rantai yang tidak terpisahkan dari serangkaian siklus penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hasil yang didapat dari proses monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan bahan umpan balik (feed back) dalam penyusunan perencanaan di masa yang akan datang agar lebih terarah terhadap program/kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana jangka panjang, menengah dan tahunan sehingga stakeholder dapat secara tepat memperbaiki langkah-langkah berikutnya, baik dari kebijakan, penganggaran, maupun sasaran programnya. Pengukuran kinerja ini merupakan persentase rata-rata capaian program terhadap RKPD yang bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD tahun berjalan dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun nasional.

Realisasi rata-rata capaian program seluruh perangkat daerah terhadap RKPD pada tahun berkenaan dapat diakses melalui aplikasi *e-monev* dengan capaian indikator sebesar 90,21 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017, capaian indikator sebesar 95,49 persen, tahun 2018 sebesar 94,28 persen, tahun 2019 sebesar 95,20 persen, dan tahun 2020 sebesar 94,17 persen.

7. Realisasi capaian belanja hasil monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen pemerintahan yang harus dilakukan untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan anggaran suatu program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD, sehingga dilaporkan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh setiap PA/KPA. Realisasi capaian belanja hasil monitoring dan evaluasi adalah evaluasi terhadap hasil fisik dan keuangan OPD yang penginputannya melalui aplikasi *e-monev*. Pada tahun 2016, penyerapan untuk belanja langsung sebesar 88,74 persen, dengan target APBD sebesar Rp507.072.773.626,00 terealisasi sebesar Rp450.000.634.286,00. Pada tahun 2017, target APBD sebesar Rp405.266.915.351,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp350.561.512.427,00 atau 86,50 persen. Adapun pada tahun 2018 penyerapan untuk belanja langsung sebesar 82,84 persen dengan target APBD sebesar Rp506.185.334.969,00 terealisasi sebesar Rp419.328.692.180,00. Realisasi penyerapan tahun 2020 untuk belanja langsung sebesar 86,81 persen dengan target APBD Rp377.098.127.349,00 dengan realisasi sebesar Rp327.355.934.039,00.

8. Persentase alokasi anggaran OPD yang mendukung program kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Salah satu upaya menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah daerah mengupayakan untuk mengalokasikan anggaran yang mendukung

program kemiskinan. Pada tahun 2016, jumlah anggaran yang mendukung program kemiskinan sebesar Rp46.583.859.313,00, sedangkan jumlah total anggaran daerah sebesar Rp507.072.773.626,00 atau terealisasi sebesar 9,18 persen. Pada tahun 2017, anggaran yang mendukung program kemiskinan sebesar Rp46.583.859.313,00 atau sebesar 11,49 persen dari total anggaran daerah sebesar Rp405.266.915.351,00. Pada tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 8,97 persen, anggaran yang mendukung program kemiskinan sebesar Rp103.595.017.070,00 dari anggaran daerah sebesar Rp506.185.334.969,00 atau sebesar 20,47 persen. Bertambahnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk program kemiskinan merupakan salah satu indikator bahwa kebijakan pemerintah daerah telah berpihak kepada penduduk miskin (*pro-poor*).

9. Persentase program OPD yang mendukung *pro-poor* dan *pro-job*

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur tidak hanya ditekankan pada meningkatnya pengalokasian anggaran yang berbasiskan *pro-poor* akan tetapi ketepatan sasaran program serta perlunya peran aktif seluruh *stakeholder* dapat mendorong dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, program-program pemerintah harus lebih memprioritaskan pada program yang mampu meningkatkan perekonomian penduduk miskin di tiga sektor terbesar yang meliputi perkebunan, pertambangan dan perikanan tangkap dengan menggerakkan seluruh *stakeholder* untuk berperan aktif. Selain itu perlu adanya diseminasi data BDT kepada seluruh *stakeholder* berdasarkan karakteristik program-program intervensi, penguatan regulasi pemanfaatan BDT dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan dan memperkuat peran TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Adapun capaian kinerja pada indikator program OPD yang mendukung *pro-poor* dan *pro-job* di tahun 2016 sebesar 7,96 persen dengan program OPD yang mendukung *pro-poor* dan *pro-job* sebanyak 30 program dari total 377 program yang dilaksanakan oleh OPD. Pada tahun 2017, program OPD yang mendukung *pro-poor* dan *pro-job* sebanyak 32 program dari total 380 program yang dilaksanakan oleh seluruh OPD sehingga realisasinya sebesar 8,42 persen. Pada tahun 2018, program OPD yang mendukung *pro-poor* dan *pro-job* sebanyak 44 program dari total 199 program yang dilaksanakan sehingga realisasinya sebesar 22,11 persen. Capaian tersebut naik pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 23,36 persen.

10. Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan RKPD

Penyusunan renja didasarkan pada penelaahan terhadap rancangan awal RKPD dan dokumen Renstra. Keterkaitan dokumen Renja dengan RKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam renja memuat keselarasan program/kegiatan antara dokumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Pemerintah Daerah. Adapun capaian indikator pada tahun 2019 sebesar 100 persen dengan jumlah program RKPD dan renja sebanyak 204 program. Pada 2020,

capaian indikator juga mencapai angka 100 persen.

11. Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan Renstra

Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dan merupakan acuan dalam penyusunan Renja. Dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi, misi, program, kegiatan, kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Sehingga indikator keselarasan program antara dokumen Renja dengan Renstra merupakan salah satu indikator kinerja yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian indikator pada tahun 2019 adalah sebesar 89,87 persen dengan jumlah program di renja sebanyak 204 program dan jumlah program di renstra sebanyak 227 program. Pada tahun 2020, capaian indikator tersebut mencapai 96,24 persen.

2.3.4.4 Keuangan

Fungsi keuangan berfokus pada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan capaian indikator kinerja fungsi perencanaan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketepatan waktu penetapan persetujuan bersama APBD	Tepat/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Ketepatan waktu penetapan persetujuan bersama Perubahan APBD	Tepat/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tepat/ Tidak	Tidak Tepat	Tidak Tepat	Tidak Tepat	Tidak Tepat	-
4.	Persentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target	Persen	-	-	85,00	90,00	80,00

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	Persen	-	-	85,00	85,00	95,00
6.	Persentase Aset Tanah Pemda yang Bersertifikat	Persen	57,00	61,50	66,00	46,75	41,00
7.	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	Persen	69,00	76,00	87,00	94,50	99,00
8.	Persentase Pencapaian Pajak Daerah	Persen	92,37	125,22	107,20	103,00	124,38
9.	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	45,53	61,97	69,84	59,25	53,16
10.	Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah	Persen	5,45	8,05	9,14	7,63	5,86
11.	Persentase Sumber Pajak Daerah yang didata per tahun	Persen	21,52	11,64	16,94	27,46	12,59
12.	Persentase data wajib pajak PBB P2 yang dimutakhirkan	Persen	40,47	36,80	40,70	70,52	19,63
13.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan fungsi keuangan dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penetapan APBD

Penetapan Perda APBD tahun 2020 tercapai tepat waktu sesuai target yang ingin dicapai. Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan Tanggal 30 Desember 2019. Pencapaian ini telah memenuhi target/sesuai dengan Bagian Ketiga Pasal 116 ayat 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa "Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya". Untuk mendukung proses penyusunan Perda APBD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dengan anggaran yang disusun sebesar Rp792.814.534.724,47 dan terealisasi sebesar Rp893.323.904.419,90 atau sebesar 112,68 persen dari pagu anggaran

yang ditetapkan. Pencapaian target ini tentunya tidak terlepas dari adanya kerjasama yang saling mendukung dan koordinasi intensif antara SKPKD, seluruh OPD dan tim TAPD dalam penyusunan APBD.

2. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tercapai tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. Sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 disebutkan dalam pasal 11 ayat 3 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Seluruh proses yang dilalui dan tahapan demi tahapan yang dilaksanakan untuk penyusunan LKPD Kabupaten Belitung Timur bisa terlaksana dengan baik dan lancar tidak terlepas dari kerjasama dengan seluruh OPD dalam menyampaikan data-data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen ini.

3. Persentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target

Pengelolaan anggaran daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, semuanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman pengelolaan keuangan daerah yang digunakan adalah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Guna mendukung capaian kinerja untuk penyerapan keuangan daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan Daerah dengan anggaran Belanja yang disusun sebesar Rp791.508.077.912,47 dengan realisasi sebesar Rp640.648.204.001,18 atau sebesar 80,94 persen. Adapun terhadap target capaian kinerja sebesar 90 persen sehingga persentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target "tidak tercapai". Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang capaian realisasinya sebesar 70,29 persen dan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan realisasi sebesar 32,33 persen. Secara umum kondisi tersebut tidak memiliki kendala, namun karena terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang dialami Kabupaten Belitung Timur maka pelaksanaan kegiatannya menjadi tidak optimal.

4. Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbitan SP2D yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tercapai "tepat waktu" sampai tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pada tahun 2020, jumlah realisasi SP2D yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sejumlah 5.206 SP2D atau dari target sebesar 4.932 SP2D yang terdiri dari 3.500 SP2D Belanja Langsung (BL) dan 1.432 SP2D Belanja Tidak Langsung (BTL).

5. Persentase Pencapaian Pajak Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang lain adalah pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah berupa pajak daerah yang telah ditetapkan sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Perubahan yang dilakukan adalah beberapa pasal di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang diubah dan dihapus. Untuk tahun 2020, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur tercapai sebesar Rp758.285.441.130,94 atau 94,48 persen.

Jika dilihat berdasarkan data, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Daerah yaitu sebesar 115,42 persen. Sementara itu, pajak daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp58.519.124.050,59 dari target sebesar Rp47.050.000.000,00 atau 124,38 persen. Pada tahun 2020, terjadi penurunan target dan realisasi, jika dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi sebesar Rp65.914.998.890,64 atau 103,77 persen. Penurunan ini tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid-19, sehingga terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan semula mengalami realokasi atau *refocusing* anggaran.

6. Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD

Target capaian yang ditetapkan di dalam Renstra Perubahan Tahun 2016-2021, khususnya persentase pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah (PAD) ditetapkan sebesar 53,16 persen atau turun 6,09 persen dari capaian tahun 2019. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp102.152.458.253,04 atau 115,42 persen dari target sebesar Rp88.507.836.791,22 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp58.519.124.050,59 dari target sebesar Rp47.050.000.000,00 atau 124,38 persen.

7. Persentase Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di Kabupaten Belitung Timur, tahun 2020, penerimaan pajak daerah sebesar Rp58.519.124.050,59 atau 124,38 persen, meningkat dari tahun 2019 dengan realisasi sebesar 106,09 persen. Penerimaan Pajak Daerah berasal dari sumber-sumber pajak daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sejak Kabupaten Belitung Timur dibentuk. Kontributor terbesar dalam pajak daerah berasal dari Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi sebesar Rp48.064.454.376,75 atau 127,17 persen; Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp5.546.234.161,39 atau 101,91 persen; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan realisasi sebesar Rp2.454.482.370,00 atau 103,19 persen; dan selebihnya berasal dari sumber – sumber pajak daerah lain seperti Pajak Hotel dengan realisasi sebesar Rp65.238.000 atau 146,85 persen, Pajak Reklame dengan sebesar Rp283.796.470 atau 152,52 persen, Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar Rp28.786.500 atau 182,93 persen, dan lain – sebagainya.

Adapun persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Daerah Tahun 2020 mempunyai realisasi sebesar Rp65.914.998.890,64 atau 103,77 persen. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2019, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan penerimaan keuangan di beberapa daerah.

8. Persentase Sumber Pajak Daerah yang didata per tahun

Persentase sumber pajak daerah yang diperoleh dari data yang diolah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 12,59 persen dari jumlah 5.473 objek pajak. Untuk mendukung capaian kinerja ini, dilaksanakan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp149.400.000,00 dan terserap sebesar Rp138.294.500,00 atau sebesar 92,57 persen.

9. Persentase data wajib pajak PBB P2 yang dimutakhirkan

Pemutakhiran Data Wajib Pajak PBB P2 adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan perubahan dan atau pergantian nama atau lokasi atau lain-lain yang berkenaan dengan Objek Pajak Data wajib pajak PBB P2 yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Tahun 2020 sebesar 19,63 persen atau 10.069 OP PBB. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 wajib pajak PBB P2 yang dimutakhirkan sebanyak 70,52 persen, realisasi terlihat “sangat menurun” pada tahun 2020, hal tersebut disebabkan data yang dimutakhirkan tersebut tidak mengalami perubahan dan atau pergantian data wajib pajak sehingga data wajib pajak masih menggunakan data wajib pajak yang sudah ada.

10. Persentase aset tanah Pemda yang dapat disertifikatkan

Berdasarkan indikator jumlah aset tanah pemda yang dapat disertifikatkan, capaian pada tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur sebesar 41 persen atau menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 46,74 persen. Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan usulan proses peningkatan status tanah ke BPN untuk ditetapkan menjadi sertifikat. Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam menunjang pengelolaan aset/kekayaan daerah

adalah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset Barang/Daerah dengan pagu anggaran yang disusun sebesar Rp314.600.000,00, terserap sebesar Rp146.943.030,00 atau sebesar 36,75 persen, dan Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun dengan anggaran sebesar Rp75.200.000,00 terealisasi sebesar Rp46.817.600,00 atau sebesar 62,26 persen.

11. Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan

Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Tahun Anggaran 2020 untuk penyelenggaraan pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebesar 99,0 persen. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping peningkatan pelayanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang. Pemanfaatan disebut sebagai pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dapat berupa sewa, pinjam pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah, dan Bangun Guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Tanggungjawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti yang mendukung angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko secara material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian *intern* yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetap bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian *intern* Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

Timur naik statusnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Adapun tanggungjawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

2.3.4.5 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah program yang disusun dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian.

Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
A. Kepegawaian							
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen	143	100	100	100	-
2.	Persentase jabatan struktural yang diisi oleh aparatur yang telah memenuhi syarat kepangkatan/golongan	Persen	66,94	91	86	87,4	-
3.	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	-
4.	Persentase pengukuran kinerja pegawai berbasis web	Persen	70	70	78	82	-
5.	Persentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	0	0	100	51	15,64
6.	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan diklat dalam jabatannya	Persen	100	96	125	118	81,85

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
B.	Pendidikan dan Pelatihan						
1.	Persentase pejabat struktural mempunyai sertifikat barang/jasa	Persen	0	8	17	21	-
2.	Persentase aparatur yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan	Persen	100	97,56	97,73	100	-
3.	Tersedianya balai diklat kabupaten	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4.	Presentase PNS jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan dan Jabatan Fungsional yang sudah mengikuti ujian kompetensi	Persen	130	121	109	93	86,37

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Belitung Timur, 2020

A. Fungsi Kepegawaian

1. Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin

a. Tahun 2016

PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian pada tahun 2016 ditargetkan 0,26 persen dari total seluruh PNS sebanyak 2.737 orang, atau sebanyak tujuh kasus dari tujuh orang yang mendapat hukuman disiplin. Realisasi sebesar 0,37 persen, atau sepuluh kasus dari sepuluh orang. Terdapat 10 kasus PNS yang mendapat hukuman disiplin sehingga capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar 143 persen.

b. Tahun 2017

PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian pada tahun 2017 ditargetkan 0,11 persen dari total seluruh PNS sebanyak 2.688 orang, atau sebanyak tiga orang yang mendapat hukuman disiplin. Terdapat 3 PNS yang mendapat hukuman disiplin sehingga capaian kinerja 2017 sebesar 100 persen.

c. Tahun 2018

PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian pada tahun 2018 ditargetkan 0,15 persen dari total seluruh PNS sebanyak 2.604 orang, atau sebanyak empat kasus. Terdapat 4 PNS yang mendapat hukuman disiplin sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100 persen.

- d. Tahun 2019

PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian pada tahun 2019 ditargetkan 0,8 persen dari total seluruh PNS sebanyak 2.761 orang. Terdapat 22 kasus PNS yang mendapat hukuman disiplin sehingga capaian kinerja 2019 sebesar 100 persen.
- 2. Persentase jabatan struktural yang diisi oleh aparatur yang telah memenuhi syarat kepangkatan/golongan
 - a. Tahun 2016

Pada tahun 2016, ditargetkan sebesar 100 persen dari 493 jabatan dengan realisasi sebesar 66,94 persen dari 330 jabatan. Sehingga, masih terdapat 163 jabatan yang kosong.
 - b. Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan awal penyelenggaraan perangkat daerah hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penempatan PNS ke dalam jabatan Struktural berdasarkan SOTK OPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2017. Pada tahun 2017, ditargetkan sebesar 100 persen dari 493 Jabatan, dengan realisasi sebesar 91 persen dari 451 jabatan. Dengan demikian masih terdapat 42 jabatan struktural yang kosong.
 - c. Tahun 2018

Realisasi penempatan PNS sesuai dengan peta jabatan mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasi yang dicapai 86 persen dan masih terdapat 71 jabatan struktural yang kosong.
 - d. Tahun 2019

Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 100 persen dari 493 jabatan dengan realisasi sebesar 87,4 persen di mana masih terdapat 62 jabatan struktural yang kosong.
- 3. Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian

Pada Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 telah di-*update* data kepegawaiannya dalam sistem informasi kepegawaian.
- 4. Persentase Pengukuran Kinerja Pegawai Berbasis *Web*
 - a. Tahun 2016

Persentase pengukuran kinerja pegawai pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100 persen dari total PNS 2.737 orang dengan realisasi sebesar 70 persen.

- b. Tahun 2017

Persentase pengukuran kinerja pegawai pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100 persen dari total PNS 2.688 orang dengan realisasi sebesar 70 persen.
- c. Tahun 2018

Persentase pengukuran kinerja pegawai pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 100 persen dari total PNS 2.604 orang dengan realisasi sebesar 78 persen.
- d. Tahun 2019

Persentase pengukuran kinerja pegawai pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100 persen dari total PNS 2.761 orang dengan realisasi sebesar 82 persen.
- 5. Persentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian
 - a. Tahun 2016 dan 2017

Capaian kinerja pada tahun 2016 dan 2017 pada indikator sasaran Presentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian ini adalah sebesar 0 persen dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 kegiatan ini ada pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur kecuali Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-hari Tertentu dengan target capaian juga sebesar 0 persen.
 - b. Tahun 2018

Capaian kinerja pada tahun 2018 pada indikator sasaran Presentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian ini adalah sebesar 100 persen.
 - c. Tahun 2019

Capaian kinerja pada tahun 2019 pada indikator sasaran Presentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian ini adalah sebesar 51 persen.
 - d. Tahun 2020

Capaian kinerja pada tahun 2020 ditargetkan 100 persen dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur, namun pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar 15,64 persen.
- 6. Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan diklat dalam jabatannya

Capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2016-2019 pada indikator sasaran Presentase PNS yang telah memenuhi persyaratan diklat dalam jabatannya mengalami perkembangan yang fluktuatif, di mana kinerja pada tahun 2019 memiliki capaian 118 persen. Pada tahun 2020, capaian pada indikator ini mengalami penurunan hanya mencapai 81,85 persen dari target sebesar 95 persen.

B. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

1. Persentase pejabat struktural mempunyai sertifikat barang/jasa

a. Tahun 2016

Pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan ujian sertifikasi barang/jasa, Jumlah pejabat struktural yang mempunyai sertifikat barang/jasa sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 67 pejabat struktural mempunyai sertifikat barang/jasa.

b. Tahun 2017

Jumlah pejabat struktural lulus Ujian sertifikat barang/jasa tahun 2017 menargetkan 100 persen (384 orang). Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 8 persen.

c. Tahun 2018

Jumlah pejabat struktural lulus Ujian sertifikat barang/jasa tahun 2018 menargetkan 100 persen (349 orang). Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 17 persen.

d. Tahun 2019

Jumlah pejabat struktural lulus Ujian sertifikat barang/jasa tahun 2018 menargetkan 100 persen (343 orang). Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 21persen.

2. Persentase aparatur yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan

a. Tahun 2016

Capaian kinerja untuk indikator ini ditargetkan sebesar 100 persen (40 Pejabat Struktural) dari Peserta Diklat Penjejangan Struktural PIM II sebanyak 3 Orang, PIM III sebanyak 15 Orang dan PIM IV sebanyak 22 Orang), realiasi yang dicapai sebesar 100 persen (40 Peserta Pejabat Struktural) yang telah lulus Diklat PIM II sebanyak 3 Orang, PIM III sebanyak 15 Orang dan PIM IV sebanyak 22 Orang), sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 100 persen.

b. Tahun 2017

Capaian kinerja untuk indikator ini ditargetkan sebesar 100 persen (41 Pejabat Struktural) dari Peserta Diklat Penjejangan Struktural PIM II sebanyak 4 Orang, PIM III sebanyak 15 Orang dan PIM IV sebanyak 22 Orang), realiasi yang dicapai sebesar 98 persen (40 Peserta Pejabat Struktural) yang telah lulus Diklat PIM II sebanyak 4 Orang, PIM III sebanyak 15 Orang dan PIM IV sebanyak 21 Orang), dengan total 40 Orang, 1 Orang Peserta Diklat PIM IV mengundurkan diri dikarenakan terkena bencana alam, sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 97,56 persen.

c. Tahun 2018

Capaian kinerja untuk indikator ini ditargetkan sebesar 100 persen (44 Pejabat Struktural) dari Peserta Diklat Penjejjangan Struktural PIM II sebanyak 5 Orang, PIM III sebanyak 6 Orang dan PIM IV sebanyak 33 Orang), realiasi yang dicapai sebesar 98 persen (43 Peserta Pejabat Struktural) yang telah lulus Diklat PIM II sebanyak 5 Orang, PIM III sebanyak 6 Orang dan PIM IV sebanyak 32 Orang) dengan total 43 Orang, sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 97,73 persen.

d. Tahun 2019

Capaian kinerja untuk indikator ini ditargetkan sebesar 100 persen (40 Pejabat Struktural) dari Peserta Diklat Penjejjangan Struktural PIM II sebanyak 2 Orang, PIM III sebanyak 5 Orang dan PIM IV sebanyak 33 Orang), realiasi yang dicapai sebesar 100 persen (40 Peserta Pejabat Struktural yang telah lulus Diklat PIM II sebanyak 2 Orang, PIM III sebanyak 5 Orang dan PIM IV sebanyak 33 Orang). sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 100 persen.

3. Tersedianya balai diklat kabupaten

Pada Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 tidak ditargetkan untuk pembangunan Balai Diklat di Kabupaten Belitung Timur.

4. Presentase PNS jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan dan Jabatan Fungsional yang sudah mengikuti ujian kompetensi

a. Tahun 2016

Capaian kinerja pada tahun 2016 pada indikator sasaran Presentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian ini adalah sebesar 130 persen, dengan target sebesar 65 persen dan Realisasi sebesar 85 persen.

b. Tahun 2017

Capaian kinerja pada tahun 2017 pada indikator sasaran Presentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian ini adalah sebesar 121 persen, dengan target sebesar 75 persen dan Realisasi sebesar 91 persen.

c. Tahun 2018

Capaian kinerja pada tahun 2018 pada indikator sasaran Presentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian ini adalah sebesar 109 persen, dengan target sebesar 84 persen dan Realisasi sebesar 91 persen.

d. Tahun 2019

Capaian kinerja pada tahun 2019 pada indikator sasaran Presentase aparatur yang terpenuhi pelayanan administrasi kepegawaian ini adalah sebesar 93 persen, dengan target sebesar 88 persen dan Realisasi sebesar 82 persen.

e. Tahun 2020

Capaian pada indikator presentase PNS jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan dan Jabatan Fungsional yang sudah mengikuti ujian kompetensi sejak tahun 2016 terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020, capaian indikator ini adalah sebesar 86,37, menurun dari tahun-tahun sebelumnya di mana pada tahun 2016 mampu mencapai 130 persen.

2.3.4.6 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan mengarah kepada pelaksanaan penelitian dan pengembangan guna mendukung kinerja pemerintah daerah. Berikut capaian indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan kelitbangan	Persen	-	100,00	97,00	93,00	-
2.	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

Capaian-capaian penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan kelitbangan

Dengan ditetapkan nya Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selain melaksanakan fungsi urusan perencanaan juga melaksanakan fungsi urusan penelitian dan pengembangan daerah. Capaian indikator kinerja Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk kebutuhan kelitbangan dapat disajikan mulai tahun 2017.

Publikasi data pembangunan daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen

rencana pembangunan daerah secara elektronik. Data SIPD terdiri dari delapan kelompok data (data umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik/hukum/keamanan dan insidensial), 31 jenis data dan 5.266 elemen data. Pada tahun 2018, dari 5.266 elemen data yang harus di input oleh perangkat daerah yang terisi dan diperbaharui sebanyak 5.108 elemen data sehingga realisasinya sebesar 97 persen dan mengalami penurunan sebesar 3 persen dari 2017. Menurunnya realisasi capaian indikator data dan informasi untuk kebutuhan kelitbangan dikarenakan masih adanya perangkat daerah yang belum melengkapi atau memperbaharui data sesuai dengan urusan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Adapun pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 93 persen. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan data dalam SIPD yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga dari 241 elemen data hanya terisi sebanyak 225 elemen atau terealisasi sebesar 93 persen.

2. Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*

Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* merupakan jumlah kajian kelitbangan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti pihak terkait terhadap jumlah kajian kelitbangan atau rekomendasi yang dihasilkan. Kajian kelitbangan yang telah disusun periode 2017-2020 meliputi empat kajian yaitu *Masterplan* Perikanan, Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah, Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Rencana Induk Pembangunan Pertanian. *Masterplan* Perikanan dan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah disusun pada tahun 2017 namun baru ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah pada tahun 2018. Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah selesai disusun pada tahun 2018 dan hasil rekomendasi kajian tersebut akan ditindaklanjuti pada tahun 2019-2023. Sementara itu, pada tahun 2019 tersusun Rencana Induk Pembangunan Pertanian, sehingga jumlah kajian kelitbangan yang dihasilkan berjumlah empat kajian dan telah ditindaklanjuti melalui program/kegiatan pada Perangkat Daerah teknis sesuai dengan hasil rekomendasi pada hasil kajian kelitbangan tersebut sehingga realisasinya 100 persen.

Hasil rekomendasi dari kajian *Masterplan* Perikanan tahun 2018 tertuang dalam program prioritas yang berisi lima program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Tindak lanjut dari Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45-345 Tahun 2018 tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung dan terjabarkan dalam lima program dan 12 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan. Rencana Induk Pembangunan Pertanian ditindaklanjuti tahun 2020 oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan enam program dan 12 kegiatan serta Bappelitbangda dengan satu

program dan dua kegiatan. Realisasi indikator persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* sebesar 100 persen. Kajian kelitbangan yang telah disusun dipergunakan untuk mendorong pembangunan daerah agar lebih terarah dan ketersediaan hasil kajian kelitbangan dapat berperan dalam kebijakan strategis daerah.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang didasarkan pada potensi, ciri khas dan keunggulan suatu daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat daya saing daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep kabupaten/kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan kesejahteraan disuatu daerah pada periode tertentu adalah pertumbuhan ekonomi.

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat berdasarkan tingkat pendapatan. Masyarakat yang memiliki pendapatan lebih besar, secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibandingkan masyarakat yang memiliki pendapatan lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan asumsi masyarakat yang memiliki pengeluaran besar mempunyai pendapatan yang besar. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita di Kabupaten Belitung Timur digunakan untuk menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah. Adapun angka rata-rata konsumsi pengeluaran per Kapita sebulan (Rupiah) pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	KELOMPOK PENGELUARAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kelompok Makanan	Rupiah	595.924	804.071	729.477	822.908	871.257
2.	Kelompok Bukan Makanan	Rupiah	610.456	688.235	679.292	855.459	805.001
JUMLAH			1.206.380	1.492.306	1.408.769	1.678.367	1.676.258

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2020

Pengeluaran konsumsi rumah tangga digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok makanan/pangan dan bukan makanan/non pangan. Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Belitung Timur dalam sebulan selama tahun 2016-2020 cenderung bervariasi. Peningkatan pengeluaran terjadi pada tahun 2016-2017 dan 2018-2019. Sementara itu, penurunan terjadi pada tahun 2017-2018 dan 2019-2020, meskipun penurunan tersebut tidak signifikan. Pengeluaran masyarakat Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun tersebut, secara umum didominasi oleh bahan makanan/pangan. Pada tahun 2016 dan 2019 pengeluaran untuk kelompok bukan makanan/non pangan lebih besar dari kelompok bahan makanan/pangan. Komposisi pengeluaran pada kelompok bukan makanan/non pangan yang lebih besar dari kelompok bahan makanan/pangan mengindikasikan adanya pergeseran konsumsi rumah tangga dari makanan ke bukan makanan. Hal tersebut dapat diartikan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung Timur, dengan asumsi jika kebutuhan makanan yang dianggap sebagai kebutuhan pokok telah terpenuhi, maka kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi bukan makanan.

**Tabel 2.44 Persentase Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan menurut Kelompok Makanan/
Pangan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020**

NO.	KOMODITAS PANGAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Padi-padian	Persen	6,54	5,27	6,16	4,74	4,99
2.	Umbi-umbian	Persen	0,35	0,44	0,26	0,32	0,44
3.	Ikan / udang / cumi / kerang	Persen	6,42	6,56	7,35	6,24	6,92
4.	Daging	Persen	2,12	2,42	2,27	1,98	2,29
5.	Telur dan Susu	Persen	3,47	3,27	3,58	3,14	3,68
6.	Sayur-sayuran	Persen	3,83	5,19	4,00	3,45	4,44
7.	Kacang-kacangan	Persen	0,72	0,88	0,61	0,59	0,66
8.	Buah-buahan	Persen	1,36	2,81	1,80	2,64	2,39
9.	Minyak dan Kelapa	Persen	1,31	1,19	1,15	0,95	1,09
10.	Bahan minuman	Persen	1,71	1,76	1,65	1,40	1,56
11.	Bumbu-bumbuan	Persen	1,08	1,22	1,18	1,09	1,30
12.	Konsumsi lainnya	Persen	1,37	1,31	1,26	1,13	1,23
13.	Makanan dan minuman jadi	Persen	11,34	13,60	12,72	13,73	12,64
14.	Rokok	Persen	7,78	7,96	7,80	7,64	8,33
Jumlah makanan		Persen	49,40	53,88	51,78	49,03	51,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2020

Persentase pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Belitung Timur dalam sebulan untuk kelompok makanan/pangan paling besar adalah makanan dan minuman jadi. Sementara itu, persentase paling kecil adalah umbi-umbian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Belitung Timur lebih banyak mengonsumsi makanan dan minuman jadi dan dalam kemasan. Perubahan gaya hidup (lebih banyak orang makan di luar), peningkatan pendapatan, dan urbanisasi dapat menjadi faktor pendorong tingginya konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman jadi. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 untuk konsumsi makanan dan minuman jadi dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat cenderung mengurangi konsumsi makanan dan minuman di luar.

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan terdiri dari beberapa komponen, antara lain perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka komoditas dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; komoditas tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; serta keperluan pesta dan upacara. Berikut merupakan data rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan menurut kelompok bukan makanan masyarakat Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.45 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan/Non Pangan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	KELOMPOK NON PANGAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	Rupiah	353.471	366.753	376.468	458.591	462.580
2.	Aneka Komoditas dan Jasa	Rupiah	107.638	155.832	108.487	144.088	134.510
3.	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	Rupiah	40.555	40.424	45.569	46.415	46.850
4.	Komoditas Tahan Lama	Rupiah	62.233	63.679	98.459	138.308	91.212
5.	Pajak, Pungutan dan Asuransi	Rupiah	33.575	47.310	37.167	51.327	53.638
6.	Keperluan Pesta dan Upacara Kenduri	Rupiah	12.984	14.237	13.142	16.730	16.212
Jumlah Bukan Makanan			610.456	688.235	679.292	855.459	805.002

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2020

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa proporsi konsumsi atau pengeluaran kelompok bukan makanan/non pangan masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang paling besar adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan urbanisasi dan keinginan untuk memperbaiki kondisi hidup.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat berkaitan erat dengan perekonomian daerah. Fasilitas infrastruktur wilayah mendukung aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian, ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur wilayah akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi suatu daerah. Lebih jauh lagi, keberadaan infrastruktur wilayah akan mempengaruhi daya saing suatu daerah.

2.4.2.1 Infrastruktur

Sebagai wilayah pemekaran, Kabupaten Belitung Timur berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur wilayah, khususnya pada bidang perhubungan. Jalan dan jembatan sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Berikut merupakan gambaran kondisi infrastruktur wilayah berupa jalan dan jembatan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2018-2019.

Tabel 2.46 Kondisi Jalan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jalan kondisi baik	Km	355,73	218,52	141,48	374,59	-
2.	Panjang jalan kondisi sedang	Km	19,84	118,60	158,23	95,24	-
3.	Panjang jalan kondisi rusak	Km	21,14	65,17	92,74	11,05	-
4.	Panjang jalan kondisi rusak berat	Km	84,17	78,59	88,43	86,72	-
4.	Panjang jalan aspal	Km	410,16	413,50	418,69	418,69	-
5.	Panjang jalan kerikil	Km	2,56	17,43	16,09	16,09	-
6.	Panjang jalan tanah	Km	72,30	49,95	46,10	46,10	-
PANJANG JALAN		Km	480,88	480,88	480,88	480,88	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2020

Kondisi jalan di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Secara umum, jalan di Kabupaten Belitung Timur berada dalam kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari panjang jalan dalam kondisi baik yang mendominasi. Namun, pada tahun 2018, terdapat penurunan panjang jalan dalam kondisi baik dan peningkatan pada panjang jalan dalam kondisi sedang. Jika dilihat dari jenis materialnya (aspal, kerikil, tanah), jalan di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh jalan aspal. Selama tahun 2016-2020, panjang jalan

aspal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi pembangunan jalan selama lima tahun tersebut.

3.4.2.2 Penataan Ruang

Pengembangan wilayah Kabupaten Belitung Timur dilakukan berdasarkan kebijakan penataan ruang, dengan mempertimbangkan potensi dari masing-masing wilayah. Beberapa kebijakan terkait pengembangan wilayah di Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

- a. Pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu kawasan perdesaan yang terpadu;
- b. Pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang;
- c. Pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil di setiap kecamatan, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari, industri perikanan, serta mempermudah jangkauan pelayanan publik dan penguatan struktur ekonomi bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam aksesibilitas wilayah; dan
- e. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan yang telah dan berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

- a. Kawasan Perkantoran Terpadu, Permukiman, dan Perdagangan di Desa Padang dengan luas 500 Ha. Wilayah yang sudah dikembangkan sebesar 50 Ha, sedangkan sisanya sebesar 450 Ha masih dalam proses penyusunan *masterplan* kawasan;
- b. Kawasan Industri Air Kelik di Kecamatan Damar dengan luas 1.532 Ha;
- c. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Gantung dan Manggardengan luas 3.402 Ha;
- d. Kawasan Desa Wisata Sejuta Pelangi di Kecamatan Gantung dengan luas 120 Ha;
- e. Kawasan Pelabuhan Dendang di Kecamatan Dendang;
- f. Kawasan Wisata Kuala Tambak di Kecamatan Damar;
- g. Kawasan Wisata Pantai Punai di Kecamatan Simpang Pesak; dan
- h. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Manggar.

3.4.2.3 Perhotelan dan Restoran

Perhotelan dan restoran merupakan fasilitas yang mendukung sektor pariwisata. Perkembangannya berpengaruh terhadap kemajuan sektor pariwisata dan pendapatan daerah. Berdasarkan data dari BPS, Kabupaten Belitung Timur memiliki 1 hotel bintang dan 21 hotel non bintang yang sebagian besar berada di Kecamatan Manggar dan Gantung. Adapun untuk restoran/rumah makan, terdapat 58 unit restoran/rumah makan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung Timur.

3.4.2.4 Ketersediaan Air Minum

Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kondisi air minum dan air bersih berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga penyediaannya merupakan hal yang krusial. Beberapa sumber air bersih yang terdapat di Kabupaten Belitung Timur, antara lain PDAM, sumur bor, dan sumur gali milik masyarakat. Berikut merupakan data persentase akses masyarakat terhadap air bersih dan air minum Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.

Tabel 2.47 Persentase Akses Air Bersih dan Air Minum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Akses air bersih masyarakat	Persen	74,41	81,12	83,89	86,41	87,67
2.	Akses air minum masyarakat	Persen	74,41	74,39	73,57	77,9	79,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belitung Timur, 2020

Persentase akses masyarakat terhadap air bersih terus meningkat selama tahun 2016-2020, hingga pada tahun 2020 mencapai 87,67 persen. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum dapat mengakses air bersih. Hal yang sama juga terjadi pada akses masyarakat terhadap air minum. Pada tiga tahun terakhir (2018-2020), persentase akses masyarakat terhadap air minum meningkat secara signifikan. Namun, kondisi tersebut masih belum sempurna, karena masih terdapat masyarakat yang belum dapat mengakses air minum layak.

3.4.2.5 Komunikasi dan Informatika

Perkembangan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Belitung Timur cukup lengkap. Terdapat sejumlah fasilitas telekomunikasi seperti telepon, internet, penyiaran radio dan televisi, kantor pos, dan lain-lain. Selain media komunikasi elektronik, juga terdapat media komunikasi cetak seperti koran dan majalah. Untuk pengiriman barang atau surat, selain melalui kantor pos, juga terdapat jasa ekspedisi yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung Timur.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Kriminalitas

Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan iklim berinvestasi yang baik salah satunya adalah minimnya angka kriminalitas di suatu wilayah. Semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanamkan investasi di daerah tersebut.

Tabel 2.48 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kepolisian Resor Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	WILAYAH KEPOLISIAN RESOR	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dendang	100	80	125	50	3
2.	Gantung	100	73	122	100	17
3.	Manggar	61	67	73	30	5
4.	Kelapa Kampit	67	200	100	43	7
5.	Polres	-	72,7	90,3	83,7	36

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2020

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa persentase penyelesaian tindak pidana di Polres Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2017-2019 cukup tinggi, yaitu berada di atas 70 persen. Pada tahun 2017 menuju 2018, persentase penyelesaian tindak pidana meningkat secara signifikan. Pada tahun 2018 ke 2019, persentase tersebut cenderung menurun. Meskipun demikian, angka persentase penyelesaian tindak pidana pada tahun 2019 masih cukup tinggi yaitu sebesar 83,7 persen.

2.4.3.2 Perizinan Usaha

Pelayanan perizinan di Kabupaten Belitung Timur saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan pelayanan melalui *Online Singgle Submission* (OSS). Berikut merupakan jumlah penerbitan izin di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.49 Jumlah Penerbitan Izin Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	JENIS PERIZINAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perizinan jasa usaha/ perizinan usaha	576	465	550	622	531
2.	Perizinan tertentu/ perizinan dasar dan non perizinan	390	362	251	207	342
JUMLAH		966	827	801	829	873

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur, 2020

2.4.3.3 Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah. Pajak daerah terdiri atas beberapa komponen, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut merupakan data pajak daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan komponen tersebut tahun 2016-2020.

Tabel 2.50 Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pajak Hotel	133.016.500,00	120.503.000,00	141.787.000,00	183.366.500,00	65.238.000,00
2.	Pajak Restoran	931.232.165,00	1.038.531.540,00	1.202.998.955,00	1.378.259.613,00	933.718.531,00
3.	Pajak Hiburan	73.155.500,00	88.815.250,00	171.229.500,00	89.357.950,00	28.766.500,00
4.	Pajak Reklame	427.346.975,00	358.680.125,00	347.249.917,00	200.529.050,00	283.796.470,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.849.245.021,37	4.483.130.487,62	5.104.438.067,97	5.425.248.885,39	5.546.234.161,39
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.706.991.206,29	46.866.957.861,00	58.335.339.716,25	55.338.316.928,25	48.064.454.376,75
7.	Pajak Parkir	3.986.700,00	5.434.500,00	12.873.000,00	18.353.700,00	3.754.200,00
8.	Pajak Air Tanah	4.144.136,00	0,00	0,00	62.528,00	2.724.904,00
9.	Pajak Sarang Burung Walet	79.635.000,00	108.076.000,00	92.860.000,00	115.840.000,00	78.477.000,00
10.	Pajak BPHTB	2.760.002.985,50	2.957.178.607,00	6.350.032.441,00	840.876.405,00	1.057.477.537,45

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan	2.173.477.085,00	2.157.235.517,00	2.215.390.179,00	2.324.787.331,00	2.454.482.370,00
PAJAK DAERAH		41.142.233.274,16	58.184.542.888	73.974.198.776	65.914.998.891	58.519.124.051

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2020

Berdasarkan data pajak daerah tersebut, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak terbesar adalah dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Selama tahun 2016-2020, pertumbuhan pajak daerah bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan hampir di setiap komponen pajak, yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Rasio Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kualitas tenaga kerja di suatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja. Berikut merupakan jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020.

Tabel 2.51 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	MANGGAR	GANTUNG	DENDANG	KELAPA KAMPIT	DAMAR	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG PESAK	TOTAL
1.	Tidak/belum sekolah	6.273	5.798	1.909	3.231	2.385	1.257	1.910	22.763
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	7.287	4.955	2.592	3.122	1.905	1.470	1.277	22.608
3.	SD/ sederajat	9.723	7.594	3.848	4.754	4.039	2.667	2.998	35.623
4.	SLTP/ sederajat	5.695	4.091	1.135	2.944	2.095	1.122	1.108	18.190
5.	SLTA/ sederajat	7.797	4.626	898	3.904	2.152	779	906	21.062
6.	Diploma I/II	306	211	37	154	77	24	40	849
7.	Akademi/ Diploma III/ S.Muda	760	280	53	245	139	46	49	1.572
8.	Diploma IV/ Strata I	1.498	599	107	556	249	73	130	3.212
9.	Strata II	66	18	0	14	6	2	1	107
10.	Strata III	2	0	0	1	1	1	0	5
JUMLAH		39.407	28.172	10.579	18.925	13.048	7.441	8.419	125.991

Sumber: Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 Semester I

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung Timur merupakan lulusan SD/ sederajat. Jumlah penduduk yang tidak atau belum sekolah dan tidak tamat SD/ sederajat menempati urutan kedua dan ketiga terbesar di Kabupaten Belitung Timur. Hal tersebut menjadi tantangan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur.

2.4.2.2 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Penduduk yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan menunjukkan persebaran penduduk menurut lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan terakhir. Data tersebut diperoleh melalui data BPS Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020.

Tabel 2.52 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020

NO.	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	≤ SD	SMP	SMA	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH
1.	Pertanian	14.406	5.167	3.627	0	23.200
2.	Industri Pengolahan	8.030	4.904	5.266	1.161	19.361
3.	Jasa	6.981	4.060	9.000	4.978	25.019
JUMLAH		29.417	14.131	17.893	6.139	67.580

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2020

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Belitung Timur yang bekerja didominasi oleh lulusan SD, dan sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, penduduk Kabupaten Belitung Timur lebih banyak bekerja pada sektor jasa yang didominasi oleh lulusan SMA.

2.4.2.3 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan

tidak produktif lagi. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Kabupaten Belitung Timur sebesar 40,87, artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.5 Integrasi Dokumen RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.5.1 Aspek Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD

Integrasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan RPJMD dapat dilihat melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) yang terkandung dalam masing-masing bab. Integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD dapat dilihat melalui tabel kerja analisis pembangunan berkelanjutan berikut.

Tabel 2.53 Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan

BAB/ SUBBAB	OUTLINE RPJMD		PERLU ISIAN		KONSEP INTEGRASI SDGS DALAM RPJMD	KETERANGAN
			YA	TIDAK		
Bab 1	Pendahuluan					
1.1	Latar Belakang		Ya		a) Memasukkan skenario pembangunan daerah yang berbasis berkelanjutan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta hasil KLHS yang menggunakan analisis pembangunan berkelanjutan. b) Memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah	
1.2	Dasar Hukum	Penyusunan		Tidak		
1.3	Hubungan Dokumen	Antar		Tidak		
1.4	Maksud dan Tujuan			Tidak		
1.5	Sistematika Penulisan			Tidak		
Bab 2	Gambaran Umum Kondisi Daerah					
2.1	Aspek Geografi dan Demografi		Ya		a) Memasukkan permasalahan/ tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi geografis dan demografis yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	

BAB/ SUBBAB	OUTLINE RPJMD	PERLU ISIAN		KONSEP INTEGRASI SDGS DALAM RPJMD	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
				b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi geografis dan demografis eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungan-nya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek geografi dan demografi	
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Ya		a) Memasukkan permasalahan/ tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi kesejahteraan masyarakat eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungan-nya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek kesejahteraan masyarakat	
2.3	Aspek Umum Pelayanan	Ya		a) Memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan pemberian	

BAB/ SUBBAB	OUTLINE RPJMD	PERLU ISIAN		KONSEP INTEGRASI SDGS DALAM RPJMD	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
				layanan umum kepada masyarakat b) Memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan c) Memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek pelayanan umum	
Bab 3	Gambaran Keuangan Daerah				
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu		Tidak		
3.3	Kerangka Pendanaan		Tidak		
Bab 4	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah				
4.1	Permasalahan Pembangunan	Ya		a) Memberikan analisis atas permasalahan utama pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur; peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi;	

BAB/ SUBBAB	OUTLINE RPJMD	PERLU ISIAN		KONSEP INTEGRASI SDGS DALAM RPJMD	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
				perubahan iklim; sumberdaya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan b) Memasukkan hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari permasalahan pembangunan di daerah	
4.2	Isu Strategis	Ya		a) Menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumberdaya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat,	

BAB/ SUBBAB	OUTLINE RPJMD		PERLU ISIAN		KONSEP INTEGRASI SDGS DALAM RPJMD	KETERANGAN
			YA	TIDAK		
					kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan b) Memasukkan isu utama hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari isu strategis dalam pembangunan di daerah	
Bab 5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran					
5.1	Visi		Ya		Disesuaikan dengan visi kepala daerah. Memastikan asas pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan salah satu visi kepala daerah terpilih, jika dari semua visinya belum ada yang menyebutkan pembangunan berkelanjutan.	
5.2	Misi		Ya		Disesuaikan dengan visi kepala daerah dan penjabaran misinya oleh tim penyusun dokren daerah. Memastikan dokren daerah sudah mencakup program sebagai penjabaran misi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.	
5.3	Tujuan dan Sasaran		Ya		Memastikan dokren daerah sudah mencakup pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	
Bab 6	Strategi, Kebijakan Program Pembangunan Daerah	Arah dan				
6.1	Strategi		Ya		Menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan	

BAB/ SUBBAB	OUTLINE RPJMD	PERLU ISIAN		KONSEP INTEGRASI SDGS DALAM RPJMD	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
				mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	Ya		Menjelaskan serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan dibuat oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumberdaya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan juga dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
6.3	Program Pembangunan Daerah	Ya		a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan	

BAB/ SUBBAB	OUTLINE RPJMD	PERLU ISIAN		KONSEP INTEGRASI SDGS DALAM RPJMD	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
				inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumberdaya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program yang diagendakan. b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari program pembangunan di daerah disertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja.	
Bab 7	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah				

BAB/ SUBBAB	OUTLINE RPJMD	PERLU ISIAN		KONSEP INTEGRASI SDGS DALAM RPJMD	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
				a) Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumberdaya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program yang diagendakan. b) Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan	
	Program Daerah	Perangkat	Ya		

BAB/ SUBBAB	OUTLINE RPJMD	PERLU ISIAN		KONSEP INTEGRASI SDGS DALAM RPJMD	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
				berkelanjutan sebagai bagian dari program perangkat daerah, disertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja.	
				c) Memasukkan indikasi pendanaan bagi pelaksanaan program perangkat daerah	
Bab 8	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tidak		
Bab 9	Penutup		Tidak		

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.5.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) merupakan komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut ditujukan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan. Berdasarkan pendekatan nilai indeks jasa ekosistem terhadap DDTLH Kabupaten Belitng Timur, hasil analisis terbagi menjadi empat klasifikasi jasa lingkungan dan 20 profil jasa lingkungan. Berikut merupakan tabel klasifikasi dan jasa lingkungan Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2.54 Klasifikasi Jasa Lingkungan terhadap DDTLH Kabupaten Belitung Timur

NO.	KLASIFIKASI JASA LINGKUNGAN	JASA LINGKUNGAN
1.	Klasifikasi Fungsi Penyediaan (Provisioning)	1. Jasa Penyediaan Pangan 2. Jasa Penyediaan Air Bersih 3. Jasa Penyediaan Serat 4. Penyediaan Energi 5. Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik
2.	Klasifikasi Fungsi Pengaturan (Regulating)	6. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim 7. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Pengendali Banjir 8. Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam 9. Jasa Lingkungan Pemurnian Air

NO.	KLASIFIKASI JASA LINGKUNGAN	JASA LINGKUNGAN
		10. Jasa Lingkungan Pengolahan dan Penguraian Limbah
		11. Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara
		12. Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination)
		13. Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit
3.	Klasifikasi Fungsi Pengaturan (Cultural)	14. Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup
		15. Jasa Lingkungan Rekreasi dan Ekoturisme
		16. Jasa Lingkungan Estetika Alam
4.	Klasifikasi Fungsi Pendukung (Supporting)	17. Jasa Lingkungan Biodiversitas
		18. Jasa Lingkungan Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan
		19. Jasa Ekosistem Siklus Hara
		20. Jasa Lingkungan Produksi Primer

Sumber: Laporan DDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2018

1. Jasa Penyediaan Pangan

Jasa penyediaan bahan pangan mengacu pada manfaat lingkungan sebagai penyedia bahan pangan atau segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik tumbuhan maupun hewan yang diperuntukkan bagi konsumsi pangan manusia. Berdasarkan hasil analisis indeks jasa lingkungan penyediaan pangan, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam kategori sedang, yaitu sebesar 102.467,04 Ha atau 39,33 persen dari luas seluruh wilayah. Wilayah dalam kategori sedang tersebut tersebar secara merata di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur, Kecamatan Kelapa Kampit merupakan kecamatan dengan wilayah dalam kategori sedang terluas (29,75 persen).

2. Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih

Jasa lingkungan penyediaan air bersih mengacu kepada ketersediaan air bersih atau sumberdaya air (aquifer maupun permukaan) di suatu wilayah yang diperuntukkan bagi konsumsi air bersih manusia. Konsumsi air minum masyarakat Kabupaten Belitung Timur berasal dari air isi ulang/kemasan yang diproduksi oleh perusahaan air minum Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan fungsi penyediaan air bersih, sebagian besar wilayah di Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam wilayah penyediaan air bersih kategori rendah, yaitu seluas 156.480,49 Ha (60,06 persen).

3. Jasa Lingkungan Penyediaan Serat

Jasa penyediaan serat mengacu pada manfaat lingkungan sebagai penyedia serat atau segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tumbuhan) yang diperuntukkan bagi konsumsi serat manusia. Berdasarkan analisis indeks jasa

lingkungan penyediaan serat, sebagian besar wilayah di Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam wilayah penyediaan serat kategori tinggi, yaitu seluas 191.094,27 Ha (73,34 persen).

4. Jasa Lingkungan Penyediaan Energi

Jasa penyediaan energi mengacu pada manfaat lingkungan sebagai penyedia energi atau segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya alam yang diperuntukkan bagi konsumsi energi manusia. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 menunjukkan bahwa minyak tanah merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Selain minyak tanah, masyarakat Kabupaten Belitung Timur menggunakan elpiji/bluegaz, kayu bakar dan listrik sebagai sumber bahan bakar untuk memasak. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan penyediaan energi, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam penyediaan energi kategori tinggi, yaitu seluas 121.665,2 Ha atau 46,69 persen dari luas seluruh wilayah.

5. Jasa Lingkungan Penyediaan Sumberdaya Genetik

Jasa penyediaan sumberdaya genetik mengacu pada manfaat lingkungan sebagai penyedia sumberdaya genetik yang bervariasi dan harus dijaga kelestariannya. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan penyediaan sumberdaya genetik, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam penyediaan sumberdaya genetik kategori tinggi, yaitu seluas 117.173,55 Ha atau 44,97 persen dari luas seluruh wilayah.

6. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Jasa lingkungan pengaturan iklim mengacu pada pengaruh iklim di suatu wilayah yang harus terjamin keseimbangannya demi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan pengaturan iklim, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam pengaturan iklim kategori sedang, yaitu seluas 86.857,5 Ha atau 33,34 persen dari luas seluruh wilayah.

7. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Pengendalian Banjir

Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan pengendalian banjir berkaitan dengan tutupan lahan di suatu wilayah. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan pengendalian banjir, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam pengaturan tata aliran air dan pengendalian banjir kategori sedang, yaitu seluas 121.513,9 Ha atau 46,64 persen dari luas seluruh wilayah.

8. Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga berkaitan dengan tutupan lahan dan ekosistem di suatu wilayah. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam, Kabupaten

Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam pencegahan dan perlindungan dari bencana alam kategori sedang, yaitu seluas 116.949,13 Ha atau 44,88 persen dari luas seluruh wilayah.

9. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air

Jasa lingkungan pengaturan pemurnian air mengacu pada manfaat lingkungan sebagai pengaturan pemurnian air yang ditujukan bagi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan pengaturan pemurnian air, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam pengaturan pemurnian air kategori sedang, yaitu seluas 142.140,34 Ha atau 54,55 persen dari luas seluruh wilayah.

10. Jasa Lingkungan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Jasa lingkungan pengolahan dan penguraian limbah mengacu pada manfaat lingkungan sebagai pengaturan pemurnian air yang ditujukan bagi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan pengaturan pemurnian air, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam pengaturan pemurnian air kategori sedang, yaitu seluas 142.140,34 Ha atau 54,55 persen dari luas seluruh wilayah.

11. Jasa Lingkungan Pemeliharaan Kualitas Udara

Jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara mengacu pada manfaat lingkungan sebagai pemeliharaan kualitas udara yang ditujukan bagi kelangsungan hidup manusia. Jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara berkaitan dengan tutupan lahan di suatu wilayah. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam pemeliharaan kualitas udara kategori sedang, yaitu seluas 120.484,44 Ha atau 46,24 persen dari luas seluruh wilayah.

12. Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami

Jasa lingkungan pengaturan penyerbukan alami mengacu pada manfaat lingkungan sebagai pengaturan penyerbukan alami yang ditujukan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Jasa lingkungan pengaturan penyerbukan alami berkaitan dengan ekosistem dan tata ruang di suatu wilayah. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan pengaturan penyerbukan alami, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam pengaturan penyerbukan alami kategori tinggi, yaitu seluas 194.881,28 Ha atau 74,79 persen dari luas seluruh wilayah.

13. Jasa Lingkungan Pengendalian Hama dan Penyakit

Jasa lingkungan pengendalian hama dan penyakit mengacu pada manfaat lingkungan sebagai pengendalian hama dan penyakit yang ditujukan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan

pengendalian hama dan penyakit, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam pengendalian hama dan penyakit kategori tinggi, yaitu seluas 169.441,91 Ha atau 65,03 persen dari luas seluruh wilayah.

14. Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup mengacu pada manfaat lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan tempat tinggal dan ruang hidup, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam tempat tinggal dan ruang hidup kategori sedang, yaitu seluas 149.146,79 Ha atau 57,24 persen dari luas seluruh wilayah.

15. Jasa Lingkungan Rekreasi dan Ekoturisme

Jasa lingkungan rekreasi dan ekoturisme mengacu pada manfaat lingkungan sebagai tempat rekreasi dan ekoturisme yang ditujukan bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan rekreasi dan ekoturisme, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam rekreasi dan ekoturisme kategori rendah, yaitu seluas 148.412,47 Ha atau 56,96 persen dari luas seluruh wilayah.

16. Jasa Lingkungan Estetika Alam

Jasa lingkungan estetika alam mengacu pada manfaat lingkungan sebagai estetika alam yang ditujukan bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan estetika alam, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam estetika alam kategori rendah, yaitu seluas 144.830,6 Ha atau 55,58 persen dari luas seluruh wilayah.

17. Jasa Lingkungan Biodiversitas

Jasa lingkungan biodiversitas mengacu pada manfaat lingkungan untuk menjaga biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan biodiversitas, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam biodiversitas kategori tinggi, yaitu seluas 137.580,02 Ha atau 52,8 persen dari luas seluruh wilayah.

18. Jasa Lingkungan Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah

Jasa lingkungan pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah mengacu pada manfaat lingkungan untuk pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah yang ditujukan bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah kategori sedang, yaitu seluas 113.576,28 Ha atau 43,59 persen dari luas seluruh wilayah.

19. Jasa Lingkungan Siklus Hara

Jasa lingkungan siklus hara mengacu pada manfaat lingkungan sebagai tempat berlangsungnya siklus hara yang ditujukan bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan siklus hara, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam siklus hara kategori rendah, yaitu seluas 88.118,72 Ha atau 33,82 persen dari luas seluruh wilayah.

20. Jasa Lingkungan Produksi Primer

Jasa lingkungan produksi primer mengacu pada manfaat lingkungan sebagai tempat berlangsungnya produksi primer yang ditujukan bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan analisis indeks jasa lingkungan produksi primer, Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh wilayah yang termasuk dalam produksi primer kategori tinggi, yaitu seluas 137.580,02 Ha atau 52,8 persen dari luas seluruh wilayah.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua bagian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang saling terkait dan harus saling bersinergi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Ketersediaan sumber daya yang dimaksud mencakup ketersediaan sumber-sumber pendanaan pembangunan yang kemudian diwujudkan dalam penganggaran pembangunan. Perencanaan kegiatan pembangunan yang baik yang sejalan dengan sistem penganggaran yang tepat akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pembangunan. Sebagai bagian dalam perencanaan penganggaran pembangunan, salah satu tahap penting yang harus dilakukan adalah analisis keuangan daerah. Analisis keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai atau mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam melakukan analisis keuangan daerah, hal yang perlu dicermati adalah kondisi keuangan daerah baik kinerja keuangan daerah pada masa lalu maupun kebijakan yang melandasinya, karena hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prediksi kemampuan daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan dalam lima tahun yang akan datang.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta menyelesaikan permasalahan isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Mencermati dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sekaligus untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Belitung Timur harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi serta selaras dengan visi-misi Kepala Daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, provinsi dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Melihat dampak yang ditimbulkan penyebaran Covid-19 terhadap kondisi perekonomian, tentu akan mempengaruhi perekonomian daerah maupun nasional secara umum. Namun sejak diberlakukan *new normal* perlahan-lahan kondisi perekonomian berangsur membaik sehingga diperkirakan perekonomian Kabupaten Belitung Timur tahun

mulai tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dan perbaikan yang lebih kuat dari tahun 2021.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global

Dinamika ekonomi global dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh adanya pergeseran dalam perekonomian perekonomian global tidak hanya terkait dengan perilaku struktur perekonomian tetapi juga berhubungan respon kebijakan. Pergeseran tersebut dipicu beberapa hal, antara lain: kebijakan antiglobalisasi yang mendahulukan kepentingan ekonomi dalam negeri (*inward looking policy*) meluas di banyak negara, volatilitas arus modal dunia meningkat sehingga memicu tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia, peran digital makin luas di berbagai kegiatan ekonomi pada sektor riil dan sektor keuangan, serta perilaku dan hubungan antar agen ekonomi terus berubah sejalan dengan revolusi digital dalam kegiatan ekonomi yang meningkat pesat (Laporan Perekonomian Indoensia 2019, Bank Indonesia).

Optimisme perbaikan ekonomi global tahun 2020 pada akhirnya harus tertahan pasca meluasnya Covid-19 ke berbagai negara. Pada Triwulan I 2020, dunia mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19 yang memaksa berbagai negara mengurangi aktivitas ekonomi dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tertekan. Tingkat penularan virus Covid-19 yang cepat telah menyebar hampir di seluruh negara di dunia menyebabkan pandemi global dalam dalam waktu relatif singkat mengubah arah pembangunan global dari optimisme perbaikan ekonomi pada tahun 2020 menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan.

Pertumbuhan beberapa negara baik negara maju maupun berkembang mengalami kontraksi, dan sebagian lainnya masih tumbuh positif meskipun di bawah pertumbuhan normal. Perekonomian Tiongkok mengalami kontraksi hingga 6,8 persen, sedangkan Jepang mengalami kontraksi ekonomi sebesar 3,4 persen. Sementara itu, perekonomian Amerika Serikat masih tumbuh sebesar 0,3 persen. Menurut IMF 2021, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat didorong oleh distribusi vaksin dan stimulus yang besar. Namun masih sangat bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Proyeksi ekonomi global diproyeksi akan tumbuh sebesar 5,5% (IMF) dan 4,0% (World Bank).

Tabel 3.1 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global

	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021	RISIKO KE BAWAH
IMF	-3,5%	5,5%	Deviasi: -0,75%
WORLD BANK	-4,3%	4,0%	1,6%

Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat dan mengancam kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai langkah cepat. Salah satu langkah kebijakan yang diambil hampir di seluruh negara adalah pelarangan atau pembatasan perjalanan, penutupan perbatasan serta memperketat lalu lintas manusia antar wilayah/negara. Dalam skala domestik, beberapa negara memberlakukan kebijakan *lockdown* yaitu penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis. Tidak hanya itu, kebijakan stimulus yang luar biasa juga kebijakan-kebijakan lain yang ekspansif ditempuh oleh berbagai negara sebagai respon untuk mengurangi dampak yang semakin besar. Dampak pandemi Covid-19 yang bersifat multidimensi memerlukan upaya penyelesaian melalui kebijakan-kebijakan yang terintegrasi, baik untuk mengatasi masalah kesehatan, kemanusiaan, maupun pelemahan ekonomi. Masalah kesehatan dan kemanusiaan di tengah menurunnya kinerja perekonomian mendorong kebijakan stimulus fiskal harus dilakukan segera untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat dan berlanjutnya sisi produksi.

Pandemi Covid-19 menciptakan kondisi luar biasa (*extraordinary*) dan sulit diperkirakan karena belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian. Kondisi ketidakpastian ekstrim yang ditimbulkan karena pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan dalam melakukan proyeksi pertumbuhan. Besarnya dampak perekonomian yang sulit diprediksi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi eskalasi penyebaran Covid-19, intensitas dan efektivitas langkah penanganan Covid-19, disrupsi pada sisi supply, dampak rambatan ke sektor keuangan, perubahan pola konsumsi dan perilaku, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan kemajuan penanganan Covid-19 dan dampak stimulus kebijakan, kinerja perekonomian global mulai membaik pada Semester II 2020. Meski sempat memburuk, prospek ekonomi global diperkirakan akan membaik seiring dengan pemulihan ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara di Kawasan Eropa. Akan tetapi, prospek yang membaik ini tentu masih tergantung pada pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, kebijakan *lockdown* atau pembatasan aktivitas masyarakat serta perkembangan varian baru. Adapun kondisi

Pada tahun 2021, perekonomian global diperkirakan akan mengalami perbaikan dari 2020 walaupun masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Volume perdagangan diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2021. Perdagangan global akan didorong oleh pemulihan ekonomi dan ekspor China yang terlihat di awal tahun 2021. Peningkatan ekspor China didorong oleh tingginya permintaan pasar global terhadap *medical equipment and supplies* (masker, obat-obatan, alat Kesehatan, dll), peralatan elektronik untuk bekerja dan belajar jarak jauh. Negara maju diperkirakan masih mengalami kontraksi pada triwulan I-2021 kemudian akan tumbuh positif di triwulan II-2021. Hal tersebut didorong oleh *base effect*, relaksasi lockdown, distribusi vaksin, dan alokasi stimulus. Sementara itu, Arus Investasi Global akan tumbuh tahun 2021, tetapi dalam nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-rata dekade sebelum pandemi.

Trend investasi global ke depan akan lebih cenderung pada sektor kesehatan, pendidikan, proyek infrastruktur yang high return serta proyek investasi yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi rendah karbon. Sementara itu, sektor pariwisata merupakan sektor yang dinilai akan pulih paling lambat dan diperkirakan baru akan mencapai tingkat pasca krisis pada 2023. Hal ini disebabkan karena masih berlangsungnya travel restrictions, masih lambatnya penanganan virus di beberapa negara, kekawatiran konsumen atas keamanan kesehatan serta masih lemahnya daya beli masyarakat global dan pergeseran consumer preference.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Nasional

Tahun 2020, menjadi tahun yang berat bagi perekonomian hampir di semua negara termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah mengalami perlambatan. Perlambatan yang cukup signifikan terjadi di seluruh komponen pengeluaran maupun lapangan usaha. Konsumsi rumah tangga menjadi komponen yang paling terdampak, sedangkan kinerja ekspor dan impor juga mengalami penurunan seiring dengan aktivitas perdagangan antar negara yang terhambat. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi nasional tercatat berada pada angka -2,07%, berkontraksi cukup dalam akibat adanya pandemi Covid-19.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDB Nasional (y-o-y) Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2020

NO.	PDB PENGUNAAN	2019					2020				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	2,83	-5,52	-4,05	-3,61	-2,63
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	16,96	15,28	7,40	3,53	10,62	-5,01	-7,82	-1,97	-2,14	-4,29
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,25	8,23	0,99	0,50	3,26	3,77	-6,90	9,76	1,76	1,94
4.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,03	4,55	4,21	4,08	4,45	1,70	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95
5.	Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-1,46	-1,84	0,12	-0,38	-0,86	0,36	-12,02	-11,66	-7,21	-7,70
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-6,47	-6,73	-8,34	-7,90	-7,39	-3,62	-18,29	-23,00	-13,52	-14,71
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,06	5,05	5,01	4,96	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07

Sumber: BPS, 2021

Dilihat dari pertumbuhan per lapangan usaha, transportasi dan akomodasi menjadi sektor (lapangan usaha) yang berkontraksi paling dalam. Hal ini dikarenakan aktivitas pada kedua sektor ini sangat dipengaruhi oleh mobilitas baik orang maupun barang. Sementara itu lapangan usaha yang mampu bertahan dan tumbuh positif pada tahun 2020 diantaranya: sektor pertanian, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, jasa keuangan, serta jasa pendidikan. Sepanjang tahun 2020, sektor dengan kontribusi terbesar yakni industri pengolahan, berkontraksi sebesar 2,9 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDB Nasional (y-o-y) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020

NO.	PDB LAPANGAN USAHA	2019					2020				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,79	5,28	3,07	4,25	3,61	0,01	2,20	2,16	2,59	1,75
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,32	-0,71	2,34	0,94	1,22	0,45	-2,72	-4,28	-1,20	-1,95
C.	Industri Pengolahan	3,85	3,52	4,14	3,67	3,80	2,06	-6,18	-4,34	-3,14	-2,93
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,12	2,20	3,75	6,01	4,04	3,85	-5,46	-2,44	-5,01	-2,34
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,95	8,34	4,85	5,38	6,83	4,38	4,44	5,94	4,98	4,94
F.	Konstruksi	5,91	5,69	5,65	5,79	5,76	2,90	-5,39	-4,52	-5,67	-3,26
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,21	4,61	4,40	4,22	4,60	1,57	-7,59	-5,05	-3,64	-3,72
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,43	5,86	6,65	7,55	6,39	1,30	-30,80	-16,71	-13,42	-15,04
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	5,53	5,39	6,36	5,79	1,94	-21,97	-11,81	-8,88	-10,22
J.	Informasi dan Komunikasi	9,06	9,60	9,24	9,78	9,42	9,82	10,85	10,72	10,91	10,58
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,23	4,50	6,16	8,51	6,61	10,63	1,06	-0,95	2,37	3,25
L.	Real Estate	5,41	5,73	6,00	5,88	5,76	3,81	2,31	1,96	1,25	2,32
M,N.	Jasa Perusahaan	10,36	9,94	10,22	10,49	10,25	5,39	-12,09	-7,61	-7,02	-5,44

NO.	PDB LAPANGAN USAHA	2019					2020				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,40	8,86	1,85	2,04	4,65	3,15	-3,21	1,82	-1,55	-0,03
P.	Jasa Pendidikan	5,65	6,32	7,83	5,44	6,30	5,87	1,19	2,41	1,36	2,63
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,66	9,15	9,20	7,83	8,69	10,39	3,71	15,29	16,54	11,60
R,S,T,U.	Jasa lainnya	9,99	10,74	10,73	10,80	10,57	7,09	-12,60	-5,55	-4,84	-4,10
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,06	5,05	5,01	4,96	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07

Sumber: BPS, 2021

Tidak hanya ekonomi, pandemi COVID-19 menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial dan kesejahteraan yang harus diatasi. Sama seperti halnya negara-negara yang memberlakukan pembatasan perjalanan dan aktivitas publik, Indonesia memberlakukan kebijakan serupa yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah penanganan COVID-19. Langkah penanganan COVID-19 yang diambil pemerintah tersebut terbilang cukup *extraordinary* dan menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup tajam. Tekanan terjadi pada sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*). Sejumlah sektor usaha mengalami guncangan pasokan dan permintaan sekaligus. Beberapa sektor yang terdampak langsung antara lain pariwisata, transportasi dan perdagangan. Sektor informal juga diperkirakan terkena dampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Penurunan aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakhir pada penurunan pendapatan masyarakat yang kemudian berimplikasi pada tingkat konsumsi. Dari sisi penawaran, aktivitas produksi juga terhambat seiring dengan rantai pasokan dan aliran distribusi yang terganggu. Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi pada tahun 2020 serta tantangan fundamental pembangunan nasional jangka menengah, maka strategi dan arah kebijakan fiskal dan ekonomi makro harus terarah dan cukup fleksibel dalam mengantisipasi ketidakpastian yang masih terjadi dalam rangka mempercepat pemulihan pasca pandemi.

3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah

Produk Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Kuantitas barang dan jasa tersebut tergantung dari hasil potensi dengan cara memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal

dan teknologi, serta antusiasme dalam kewirausahaan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

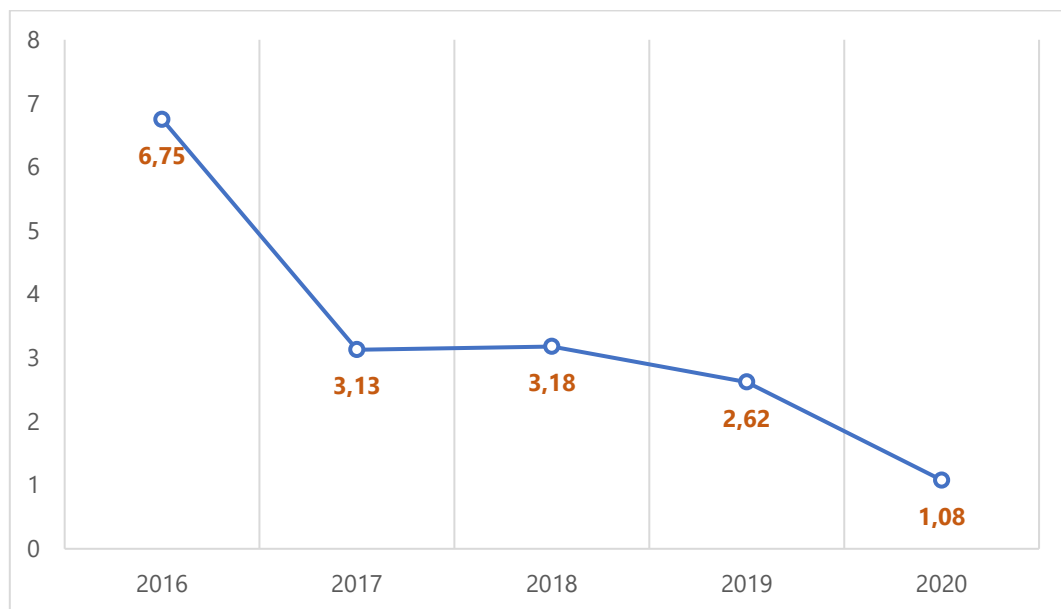
Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah mengalami perlambatan. Pada awal pandemi (Triwulan I 2020), penyebaran COVID-19 turut berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami perlambatan khususnya dari sisi penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor komoditas. Kinerja lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan permintaan logam timah global sehingga berdampak pada penurunan harga komoditas. Namun di sisi lain, lapangan usaha pertanian menunjukkan peningkatan kinerja khususnya perkebunan kelapa sawit yang didorong oleh faktor cuaca dan harga komoditas yang relatif masih baik yang berhasil menahan perekonomian Bangka Belitung dari kontraksi yang lebih dalam. Sementara itu, dari sisi pengeluaran kondisi ekonomi baik global, nasional, dan Bangka Belitung yang kurang stabil selama penyebaran pandemic COVID-19 menyebabkan investor menunda dan membatalkan rencana investasi sehingga kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkontraksi. Meski demikian, konsumsi rumah tangga tercatat masih tumbuh positif dan ekspor luar negeri mengalami peningkatan kinerja meskipun masih terkontraksi.

Selain itu, efek yang dirasakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut hasil analisis dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020, 6 dari setiap 10 pelaku usaha cenderung mengalami penurunan pendapatan sebesar 62,78% pada triwulan III-2020, 40 dari setiap 100 pelaku usaha mengaku mengalami penurunan pendapatan berkisar 30 - 40% dibanding triwulan II-2020.

Sektor usaha yang paling terdampak Covid-19 pada triwulan III-2020 adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 71,43 persen, diikuti dengan industri pengolahan sebesar 69,85 persen serta jasa lainnya sebesar 66,67 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami dampak yang tidak signifikan atau lebih kecil meliputi konstruksi, pertambangan dan penggalian sebesar 3,33 persen, transportasi dan pergudangan 30,00 persen dan yang terakhir *real estate* sebesar 5,56 persen.

Nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 75,53 triliun rupiah. Secara keseluruhan, nilai PDRB mengalami penurunan sebesar 0,35 persen dibanding tahun 2019 menjadi 75,80 triliun rupiah. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK dimana pada tahun 2020 perekonomian Bangka Belitung terkontraksi dengan capaian sebesar 2,30 persen, lebih rendah apabila dibandingkan capaian pada tahun 2019 sebesar 3,32 persen. Penurunan pertumbuhan terjadi di hampir semua lapangan usaha kecuali pertanian, kehutanan, dan perikanan, pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, dan *real estate*. Di antara keempat lapangan usaha tersebut, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami pertumbuhan paling besar yaitu sebesar 5,46 persen.

Sedangkan dilihat dari inflasi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat mengalami inflasi sebesar 1,82% (y-o-y) pada Triwulan I 2020, menurun dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang mengalami inflasi sebesar 2,62% (y-o-y). Penurunan tekanan inflasi pada Triwulan I 2020 disebabkan oleh rendahnya tekanan inflasi hampir diseluruh komoditas pembentuk kelompok barang terutama kelompok transportasi. Kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 3,72% (y-o-y) dikarenakan terjadi penurunan permintaan angkutan udara dan laut akibat dampak pengurangan operasional bandara dan pelabuhan untuk orang sebagai upaya penanganan COVID-19. Laju inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan angka gabungan dua kota yaitu Pangkalpinang dan Tanjungpandan. Pola pergerakan laju inflasi serta deflasi tetap mengikuti pola musiman yaitu terjadi kenaikan di awal and akhir tahun sebagai dampak liburan serta cuaca di perairan yang membatasi persediaan ikan segar, serta dari bulan Ramadhan hingga Idul Fitri dimana tingkat konsumsi masyarakat meningkat menyebabkan peningkatan harga dari barang dan jasa dari berbagai komoditas hingga mendorong laju inflasi.



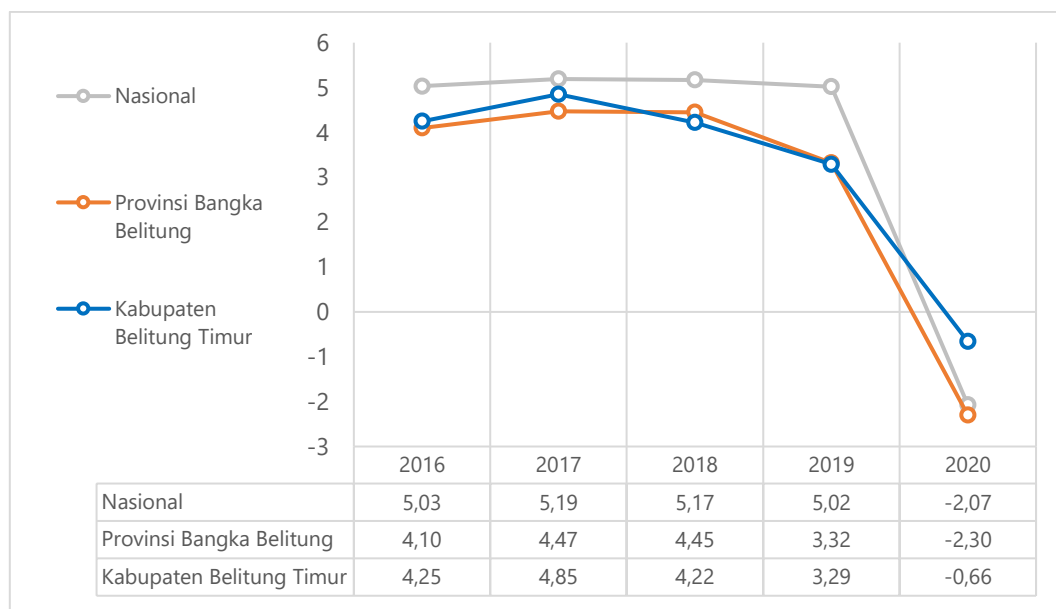
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2021

Gambar 3.1 Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Setelah satu tahun pandemi, jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan 2020, kinerja perekonomian Bangka Belitung mulai menunjukkan perbaikan meskipun masih terkontraksi dan belum normal. Pada awal 2021, perekonomian Bangka Belitung mencatatkan pertumbuhan positif meski masih di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tercatat mengalami perbaikan yaitu menjadi 0,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 1,04% (y-o-y). Perkembangan tersebut didorong terutama oleh kinerja sektor eksternal yang mengalami peningkatan sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang semakin baik sehingga turut

mendorong peningkatan volume perdagangan global termasuk ekspor barang dan jasa komoditas strategis Bangka Belitung. Sejalan dengan kondisi tersebut, inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga meningkat menjadi sebesar 2,06% (y-o-y) pada triwulan I 2021 dibandingkan triwulan IV 2020 yang tercatat sebesar 1,08% (y-o-y). Prospek perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh lebih kuat dibandingkan tahun 2020, didorong dengan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah dan investasi yang membaik serta meningkatnya ekspor luar negeri sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas unggulan Bangka Belitung. Akan tetapi, prospek yang membaik ini tentu masih tergantung pada upaya penanganan pandemi COVID-19 di Bangka Belitung maupun secara nasional, termasuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat serta perkembangan varian baru virus Covid-19.

Sedangkan dilihat dari kondisi perekonomian Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur sebesar 3,29 persen, dan mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -0,66 persen pada tahun 2020, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda dan memberikan dampak bagi perekonomian Kabupaten Belitung Timur. Meski demikian pada tahun 2021 dan tahun 2022 kondisi pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mulai mengalami pertumbuhan yang positif dan lebih kuat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2021

Gambar 3.2 Perkembangan Perekonomian Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur

Sementara dari sisi inflasi, tingkat Inflasi Kabupaten Belitung Timur tahun kalender Desember 2020 sebesar 3,11 persen, dan pada Desember 2020 Manggar mengalami inflasi sebesar 1,90 persen dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 10,45. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan sebagian indeks kelompok pengeluaran. Inflasi tahun 2021 dan 2022 diperkirakan berada di kisaran angka 2 – 4 persen, sejalan dengan proyeksi inflasi Bank Indonesia di kisaran sasaran 3 ± 1 persen di tahun 2021 mendatang. Proyeksi tersebut masih dilingkupi ketidakpastian, ada sejumlah resiko yang perlu diwaspadai sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, resiko bisa terjadi dari kesinambungan pasokan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu. Untuk itu, sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna mengendalikan inflasi sesuai kisaran target.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan meningkat. Pada Maret 2020 indikator ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan nilai Gini Ratio untuk daerah perkotaan mencapai sebesar 0,276, mengalami kenaikan jika dibanding kondisi September 2019 sebesar 0,272 dan mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2019 sebesar 0,278. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 adalah sebesar 0,220, mengalami penurunan dibanding capaian Gini Ratio September 2019 sebesar 0,223 maupun Maret 2019 sebesar 0,230. Selain Gini ratio, ukuran lain yang sering digunakan untuk menilai ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu “tinggi” jika angkanya di bawah 12 persen, “sedang” jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta “rendah” jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2020, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 24,20 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 23,30 persen, sementara untuk daerah perdesaan sebesar 25,65 persen, yang berarti baik di perkotaan maupun di perdesaan masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

3.1.4 Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah

Untuk mencapai perekonomian yang ideal yaitu suatu kondisi dimana perekonomian terus menerus tumbuh disertai dengan stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur disamping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan derajat kehidupan berdemokrasi. Semua tujuan tersebut diimplementasikan dengan melanjutkan kegiatan – kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan yang akan mempercepat terlaksananya pencapaian tujuan tersebut.

Diharapkan pelaksanaan pembangunan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2020 hingga pertengahan 2021, maka tantangan pokok sehubungan dengan perekonomian daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor prioritas yang mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat pandemi COVID-19 yang melanda secara global;
2. Mendorong pertumbuhan UMKM dalam perekonomian daerah mengingat sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemik COVID 19;
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat;
4. Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja;
5. Keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang masih perlu ditingkatkan;
6. Mendorong investasi pada bidang hilirisasi produk pertanian dan perikanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi;
7. Rentannya landasan perekonomian untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan;
8. Pengendalian angka inflasi;
9. Semakin kompleksnya permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan;
10. Masih rendahnya realisasi vaksin COVID-19;
11. Beberapa program strategis yang sudah direncanakan tidak berjalan akibat adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belitung Timur baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dan berdasarkan forecasting, kondisi perekonomian mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -0,66 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan, dari 5,50 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 5,46 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020, Belitung Timur mengalami kontraksi sebesar -0,66 persen atau berkurang sebesar 0,04 triliun rupiah. Penurunan PDRB ini disebabkan oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, dan tidak lepas dari dampak terjadinya pandemi covid-19.

Berdasarkan data PDRB, terdapat beberapa kategori yang mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020. Kategori PDRB Pertambangan dan Penggalian, Jasa Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, serta Jasa Lainnya mengalami kontraksi. Terdapat tiga kategori yang

mengalami kontraksi nilai ekonomi paling besar yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 1,07 persen bisa terjadi dikarenakan efek dari pandemi Covid-19, diikuti dengan Kategori Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,53 persen, lalu Jasa Konstruksi sebesar 0,39 persen.

Selain mengalami kontraksi, distribusi persentase PDRB juga mengalami kenaikan pada tahun 2019 hingga 2020, seperti Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi serta Real Estate. Kenaikan tertinggi terdapat pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,97 persen diikuti dengan Industri Pengolahan sebesar 0,23 persen.

Kategori PDRB lainnya tidak mengalami penurunan maupun peningkatan berdasarkan nilai perbandingan pada tahun 2019 ke 2020, seperti kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Berikut disajikan Peranan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Belitung Timur:

Tingkat Inflasi Kabupaten Belitung Timur tahun kalender Desember 2020 sebesar 3,11 persen, dan pada Desember 2020 Manggar mengalami inflasi sebesar 1,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 10,45. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan sebagian indeks kelompok pengeluaran. Inflasi tahun 2021 dan 2022 diperkirakan berada di kisaran angka 2 – 4 persen, sejalan dengan proyeksi inflasi Bank Indonesia di kisaran sasaran 3 ± 1 persen di tahun 2021 mendatang. Proyeksi tersebut masih dilingkupi ketidakpastian, ada sejumlah resiko yang perlu diwaspadai sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, resiko bisa terjadi dari kesinambungan pasokan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu. Untuk itu, sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna mengendalikan inflasi sesuai kisaran target.

Mencermati kompleksitas dan skala hambatan dan tantangan yang dihadapi serta strategis pembangunan daerah, maka pencapaian sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur secara umum diarahkan pada 2 model intervensi kebijakan, yaitu i) intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat spesifik terkait dengan pencapaian pembangunan jangka pendek; ii) intervensi kebijakan ekonomi dengan bauran sosial yang bersifat sensitif untuk penanganan dan pemulihan ekonomi pasca COVID 19.

Tabel 3.4 Intervensi Kebijakan Penanganan Covid-19

Intervensi Kebijakan Sensitif terkait Penanganan Covid-19	Intervensi Kebijakan Spesifik terkait Penanganan Covid-19
1. Memperkuat sektor kesehatan mulai dari level pemerintahan terkecil.	1. Optimalisasi potensi wilayah
2. Memperkuat Sistem Jaring Pengaman Sosial secara terpadu, terarah dan terintegrasi.	2. Optimalisasi pengembangan sector pariwisata
	3. Optimalisasi pengembangan sector perikanan

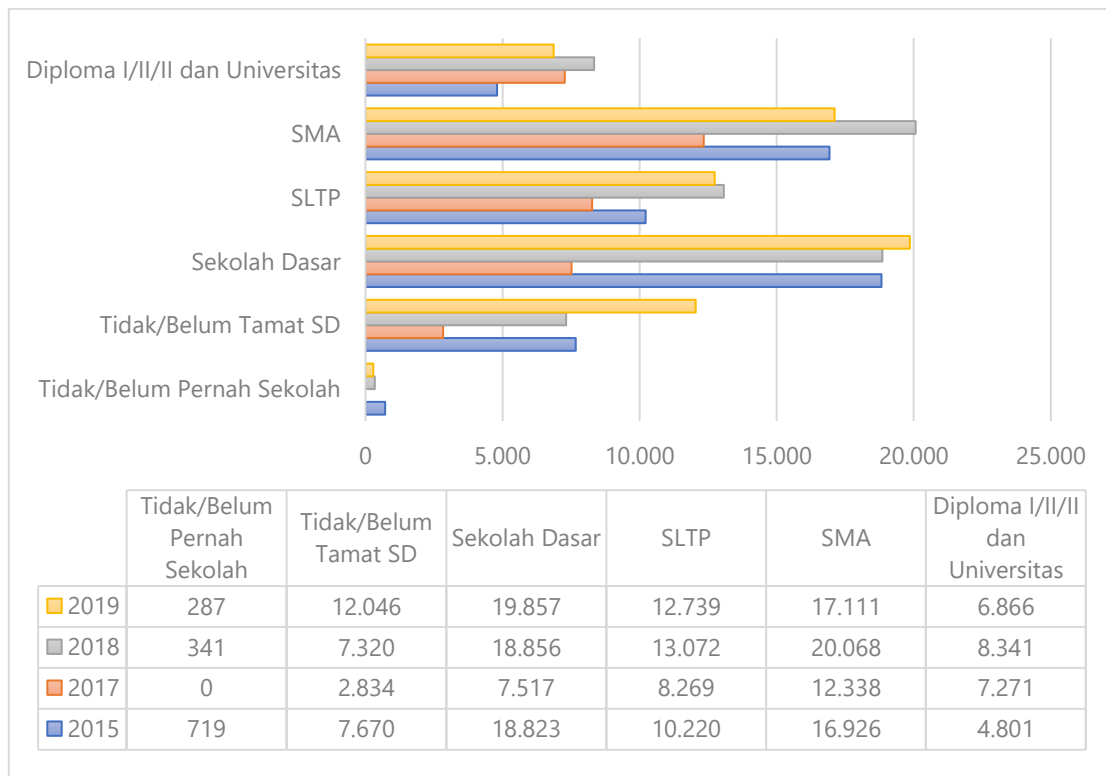
Intervensi Kebijakan Sensitif terkait Penanganan Covid-19	Intervensi Kebijakan Spesifik terkait Penanganan Covid-19
3. Mendorong pemulihan sektor usaha yang terdampak akibat COVID 19 melalui bantuan tunai maupun pemberian pinjaman daerah 4. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan dampak COVID-19	4. Optimalisasi pengembangan sector petanian 5. Optimalisasi pengembangan sector industri pengolahan 6. Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian daerah 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat 8. Peningkatan kompetensi tenaga kerja masyarakat 9. Penumbuhan dan peningkatan semangat kewirausahaan bagi pemuda 10. Mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan 11. Mendorong investasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan 12. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi sektor prioritas 13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana 14. Peningkatan Ketahanan Pangan 15. Pengendalian Inflasi Daerah 16. Peningkatan kerjasama dan seinerji pembangunan antar daerah 17. Mempercepat realisasi belanja pemerintah 18. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal 19. Peningkatan kapasitas layanan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) 20. Peningkatan inovasi daerah

3.1.5 Kondisi Ketenagakerjaan

Pandemi Covid-19 juga berimplikasi terhadap masalah ketenagakerjaan, di mana terjadi peningkatan angka pengangguran. Permasalahan yang sangat penting terkait dengan angkatan kerja Belitung Timur selain meningkatnya jumlah (kuantitas) pengangguran adalah terkait kualitas angkatan kerja yang dilihat dari kualifikasi pendidikan dan keterampilan. Data Sakernas (2020) menunjukkan bahwa secara pendidikan angkatan kerja Belitung Timur masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) sebesar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ternyata yang tidak tamat sekolah dasar masih cukup banyak.

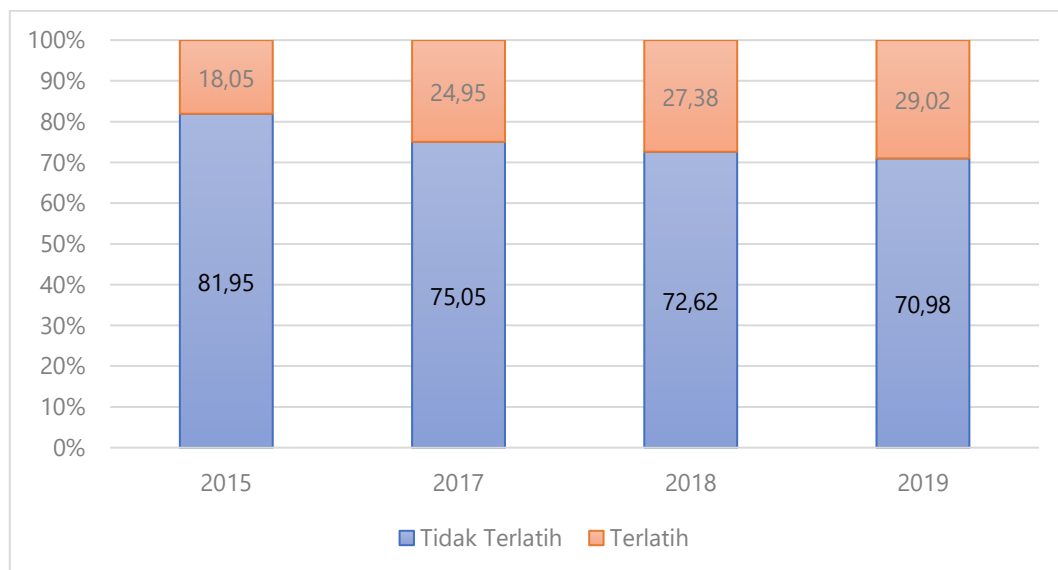
Selain dilihat dari segi kuantitas, kualitas tenaga kerja menjadi penting yang perhatikan dalam kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung. Sesuai data yang disajikan dalam gambar diagram berikut diketahui bahwa angkatan kerja yang tidak terlatih masih cukup besar yaitu hampir 71%. Hal ini menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Era digital dan pandemi Covid-19 ini merupakan tantangan dan peluang yang harus diatasi agar sumber daya

manusia Kabupaten Belitung timur khususnya penduduk angkatan kerja menjadi kekuatan bagi pembangunan di Belitung Timur.



Sumber: Sakernas, 2020 (diolah)

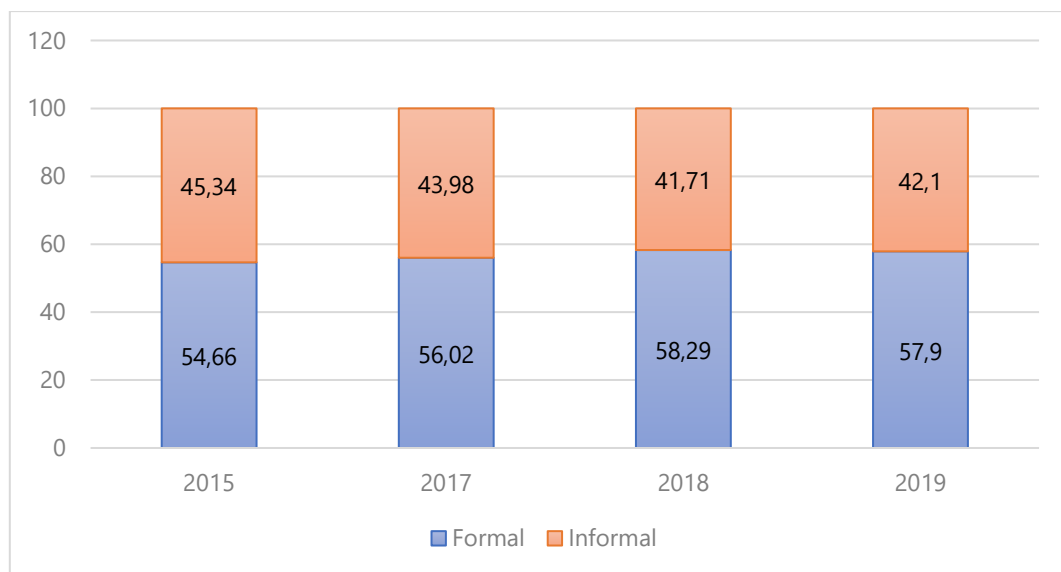
Gambar 3.3 Penduduk Kabupaten Belitung Timur Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja selama seminggu yang lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015-2019



Sumber: Sakernas, 2020 (diolah)

Gambar 3.4 Angkatan Kerja Terbuka Berdasarkan Kualifikasi Keterampilan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2019

Gambar berikut menunjukkan angkatan kerja Kabupaten Belitung Timur yang terserap di sektor formal. Berdasarkan data pada gambar diagram di bawah, menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja pada sektor formal lebih besar dari penduduk yang bekerja di sektor informal. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya motivasi masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. Data ini juga menunjukkan bahwa penduduk Angkatan kerja memandang sektor formal lebih menjanjikan walaupun dengan rendahnya keterampilan (*low skill*) yang dimiliki.



Sumber: Sakernas, 2020 (diolah)

Gambar 3.5 Angkatan Kerja Terbuka Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2019

3.2 Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan.

Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan audit dan untuk mendapatkan opini. Laporan keuangan tahun 2019 yang diaudit pada tahun 2020 merupakan pertama kali bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Dengan capaian tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat terus mempertahankan prestasi dengan menunjukkan peningkatan kinerja yang semakin membaik dalam RPJMD periode 2021-2026.

4.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Perkembangan kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan dan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja keuangan daerah berkaitan erat dengan dua aspek utama yaitu kinerja pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta kondisi neraca daerah. Penyusunan APBD dalam pembangunan suatu daerah bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya daerah yang tersedia sehingga ketersediaan sumber daya yang dimiliki daerah dapat dialokasikan secara tepat dan efisien sesuai kebijakan pemerintah daerah. Dengan melihat kinerja keuangan (APBD) pada periode sebelumnya, akan dapat diketahui bagaimana kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah sehingga dapat diketahui bagaimana kemandirian keuangan daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Tabel 3.5** berikut.

Tabel 3.5 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH	DANA PERIMBANGAN	KETERANGAN FISKAL
2016	754.649.989.634,95	90.361.562.416,57	11,97%	601.305.490.787,00	79,68%
2017	738.225.627.728,63	109.657.373.539,57	14,85%	554.464.898.167,00	75,11%
2018	824.439.488.088,16	109.456.286.246,75	13,28%	622.466.388.030,00	75,50%
2019	886.766.991.999,43	111.247.802.604,87	12,55%	664.882.063.775,00	74,98%
2020	776.425.372.456,94	102.159.584.856,04	13,16%	565.494.791.946,00	72,83%

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

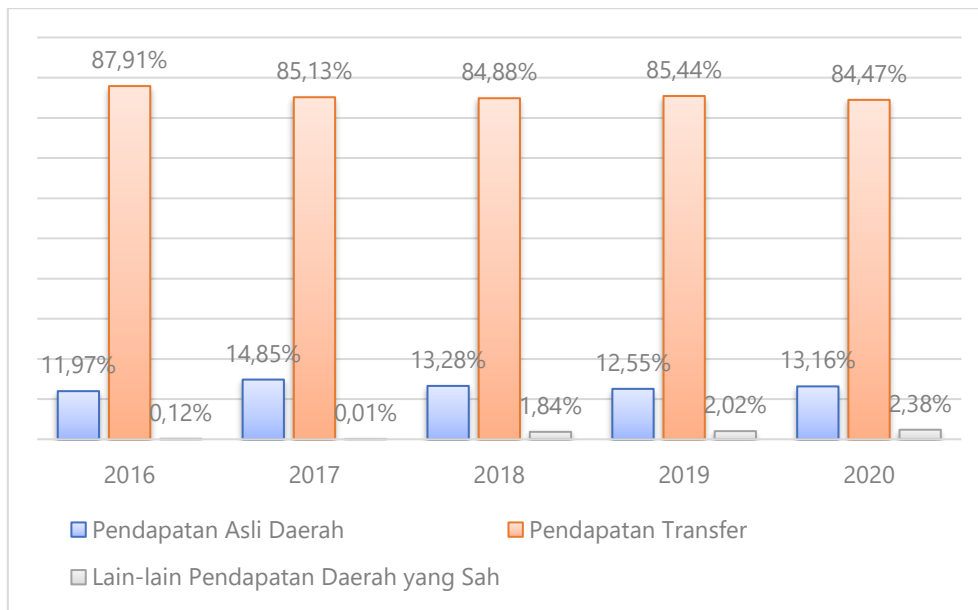
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa capaian derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Belitung Timur masih berada di bawah 15 persen. Di sisi lain, proporsi dana transfer dari pusat khususnya Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah menunjukkan nilai yang cukup tinggi, artinya bahwa daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada penerimaan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatan pembangunan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah secara rinci mencakup:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diatur sebagai bagian pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Selain dana perimbangan, komponen pendapatan lainnya yang juga dikelompokkan dalam jenis pendapatan transfer pemerintah pusat antara lain: dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sedangkan, bagian pendapatan transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dengan melihat komponen-komponen pendapatan daerah tersebut akan dapat diketahui kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmark*). Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai kebutuhan belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Belitung Timur masuk kategori sangat rendah pada tahun 2020. Kategori ini sama dengan kategori yang diraih oleh Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2019.



Ket. *) Data Realisasi APBD TA 2020, *anaudited*

Sumber: BPKPD Kab. Belitong Timur, data diolah Kembali, 2021

Gambar 3.6 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2020

Sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Belitong Timur berasal dari Pendapatan Transfer khususnya Dana Perimbangan, diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan **Gambar 3.6** terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 11,97 persen. Jumlah tersebut meningkat menjadi 13,16 persen pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemandirian daerah dari tahun 2016 ke tahun 2020 meskipun tidak signifikan. Walaupun menunjukkan tren peningkatan, namun pada tahun-tahun tertentu masih fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan penerimaan PAD serta transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi ekonomi dan keuangan negara mengalami penurunan serta mempengaruhi penerimaan pendapatan di mana daerah diwajibkan melakukan *refocusing* anggaran dengan prioritas penanganan pandemi. Melihat kondisi tersebut, upaya pengelolaan dan pengoptimalan potensi PAD perlu ditingkatkan sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian daerah.

Pada tahun 2016, Dana Perimbangan memiliki kontribusi sebesar 79,68 persen dari total pendapatan daerah. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan kontribusi hanya sebesar 72,83 persen. Hal tersebut tidak berarti bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Belitong Timur terhadap pendanaan dari pemerintah pusat berkurang. Namun kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya disebabkan karena penurunan penerimaan dari pemerintah pusat akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya dana yang ditransfer kepada pemerintah daerah. Di sisi lain, apabila Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2020 dapat dipertahankan, maka potensi penerimaan dana perimbangan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) akan terbuka lebar. Hal ini akan meningkatkan potensi penerimaan bagi daerah menjadi semakin besar.

Selanjutnya, proporsi untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 0,12 persen yang bersumber dari pendapatan hibah. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 2,38 persen pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah selain dari PAD dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan. Dalam perencanaan keuangan daerah untuk lima tahun mendatang, pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi penerimaan dari sumber-sumber selain PAD maupun dana perimbangan dan mendorong kemandirian fiskal dalam mendanai kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Jika dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target (anggaran) pendapatan, secara rata-rata realisasi pendapatan daerah terhadap target dalam kurun waktu 2016-2020 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan di mana realisasi masih di bawah 100 persen meskipun pada tahun 2019 capaian realisasi pendapatan mampu mencapai lebih dari 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan pendapatan untuk mendanai kegiatan pembangunan belum optimal.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KELEBIHAN / KEKURANGAN
2016	780.822.730.784,96	754.649.989.634,95	96,65%	(26.172.741.150)
2017	748.665.907.268,67	738.225.627.728,63	98,61%	(10.440.279.540)
2018	836.819.716.175,07	824.439.488.088,16	98,52%	(12.380.228.087)
2019	871.122.006.873,97	886.766.991.999,43	101,80%	15.644.985.125
2020	802.621.408.433,04	776.425.372.456,94	96,76%	(26.114.242.193)

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur mengalami rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 1,16 persen. Berdasarkan **Tabel 3.6**, realisasi pendapatan daerah untuk periode 2017-2019 menunjukkan tren peningkatan. Namun, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (*year on year*). Hal ini dipengaruhi kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi sehingga sangat mempengaruhi potensi dan realisasi penerimaan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang bersumber dari Dana Perimbangan. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 802.621.408.433,04 pada 2020, realisasi hanya tercapai sebesar 96,74 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 886.766.991.999,43, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar 12,43 persen karena adanya pandemi COVID-19.

Peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur tidak terlepas dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2016-2019 menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,66 persen. Namun pada tahun 2020, sama seperti halnya realisasi pendapatan daerah yang mengalami penurunan, realisasi Pendapatan Asli Daerah turut mengalami penurunan karena dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi potensi dan realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 102.159.584.856,04 atau lebih kecil dari penerimaan pada tahun 2019 sebesar Rp 111.247.802.604,87.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KELEBIHAN / KEKURANGAN
2016	82.951.866.712,96	90.361.562.416,57	108,93%	7.409.695.703,61
2017	105.027.625.196,67	109.657.373.539,57	104,41%	4.629.748.342,90
2018	102.114.692.175,07	109.456.286.246,75	107,19%	7.341.594.071,68
2019	108.496.528.959,97	111.247.802.604,87	102,54%	2.751.273.644,90
2020	88.654.270.991,22	102.159.584.856,04	115,23%	13.505.313.864,82

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Penerimaan pendapatan daerah selain bersumber dari PAD juga bersumber dari Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Komponen Dana Perimbangan pada periode 2016-2019 menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017. Penurunan realisasi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 juga terjadi pada komponen Dana Perimbangan. Pada tahun 2020 realisasi Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 565.494.791.946,00, nilai tersebut menurun dari yang ditargetkan sebesar Rp 597.808.186.349,00. Hal ini sesuai dengan alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan juga realisasi penerimaan pemerintah pusat yang berdampak terhadap penerimaan pendapatan ke pemerintah daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, realisasi dana perimbangan mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 0,91 persen.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KELEBIHAN / KEKURANGAN
2016	623.652.244.000,00	601.305.490.787,00	96,42%	(22.346.753.213,00)
2017	582.517.944.000,00	554.464.898.167,00	95,18%	(28.053.045.833,00)
2018	635.693.104.000,00	622.466.388.030,00	97,92%	(13.226.715.970,00)
2019	668.172.852.514,00	664.882.063.775,00	99,51%	(3.290.788.739,00)
2020	597.808.186.349,00	565.494.791.946,00	94,59%	(32.313.394.403,00)

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Adapun untuk realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama periode 2016-2020 menunjukkan adanya tren peningkatan. Pada tahun 2016, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 62.982.936.431,38 dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 108.770.995.655,00. Realisasi lain-lain PAD yang Sah dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 15,10 persen.

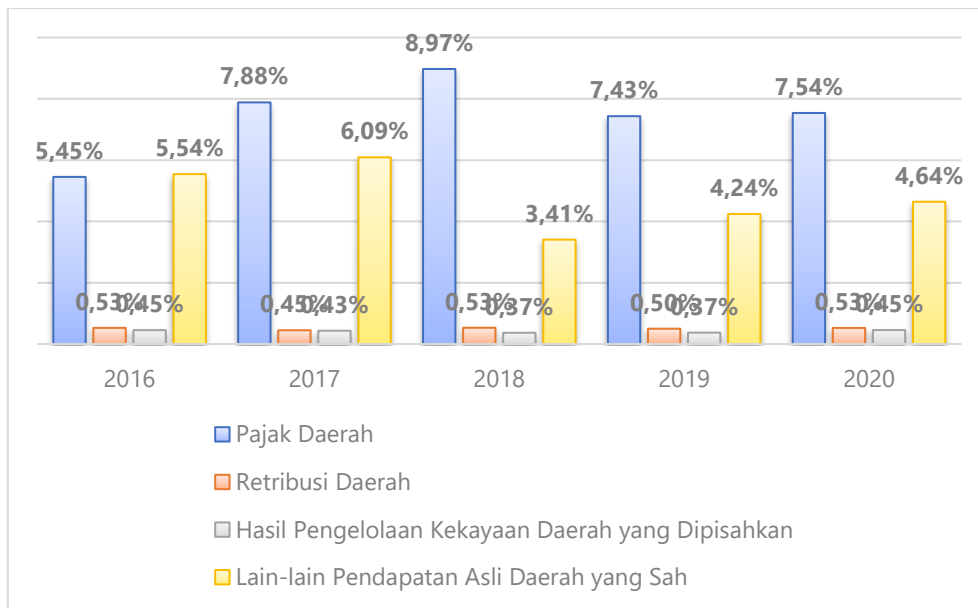
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KELEBIHAN / KEKURANGAN
2016	3.500.000.000,00	877.650.000,00	25,08%	(2.622.350.000,00)
2017	1.000.000.000,00	106.250.000,00	10,63%	(893.750.000,00)
2018	15.993.600.000,00	15.164.020.000,00	94,81%	(829.580.000,00)
2019	18.404.400.000,00	17.899.972.236,61	97,26%	(504.427.763,39)
2020	18.487.700.000,00	18.465.098.506,49	99,88%	(22.601.494)

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

A.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 30 sampai dengan 33, ada empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang Sah.



*) Data Realisasi APBD TA 2020, unaudited

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah kembali, 2021

Gambar 3.7 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

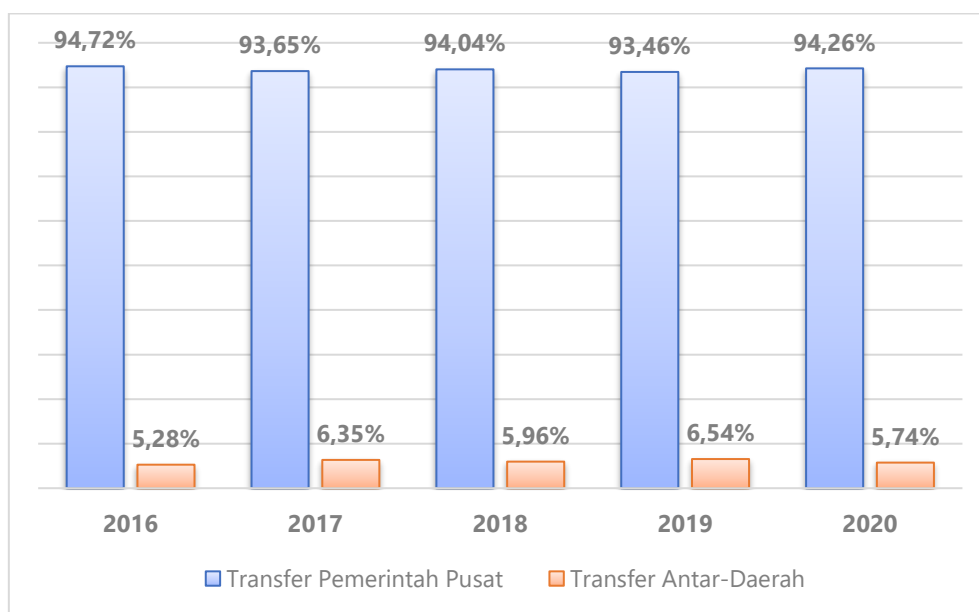
Pajak Daerah mempunyai kontribusi yang cenderung terus meningkat dibandingkan dengan sumber PAD yang lainnya seperti penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah pada tahun 2016 menyumbang PAD sebesar Rp 41.142.233.274,16 dari total PAD sebesar Rp 90.361.562.416,57 atau berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 45,53 persen. Pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 58.519.124.050,59 dari total PAD sebesar Rp 102.159.584.856,04 atau berkontribusi sebesar 57,28 persen dari total PAD. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, maka rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 11,61 persen.

Jika dilihat dari komponen lain yaitu retribusi, kontribusi retribusi Daerah terhadap PAD relatif stabil pada kurun waktu 2016-2020 meskipun sedikit menurun pada tahun 2019 dan 2020. Retribusi daerah pada tahun 2016 berkontribusi terhadap PAD sebesar 4,40 persen. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi retribusi terhadap PAD adalah sebesar 3,99 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, retribusi daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD memiliki besaran yang relatif stabil selama kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki kontribusi sebesar 3,78 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pada tahun 2020 besaran kontribusi menurun menjadi 3,45 persen. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD selama kurun waktu 2016-2020, diketahui rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 1,04 persen.

Komponen penyumbang PAD Kabupaten Belitung Timur terbesar setelah pajak adalah lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD yang Sah terhadap total PAD memiliki kontribusi cenderung fluktuatif selama periode 2016-2020. Besaran kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD pada tahun 2016 adalah sebesar 46,29 persen. Sedangkan pada tahun 2020, kontribusi lain-lain PAD yang Sah menurun menjadi 35,27 persen terhadap total PAD. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, maka Lain-lain PAD yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -0,08 persen.

A.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Komponen transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sedangkan transfer antar pemerintah daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.



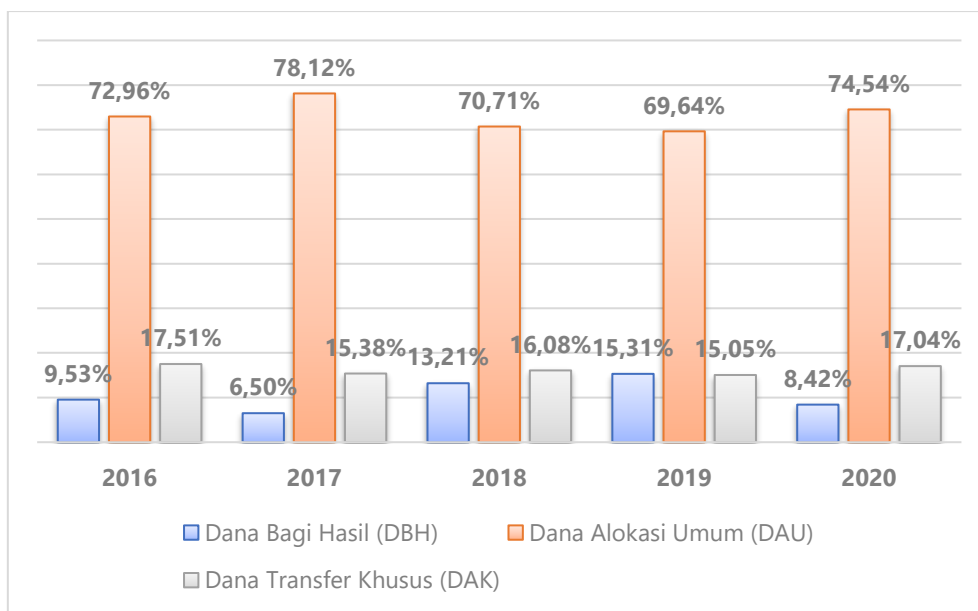
*) Data Realisasi APBD TA 2020, unaudited

Sumber : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah Kembali, 2021

Gambar 3.8 Proporsi Transfer Pemerintah Pusat dan Antar-Daerah terhadap Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Komposisi Dana Perimbangan

selama tahun 2016-2020 tertinggi berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi sebesar 70-78,12 persen, diikuti dengan Dana Alokasi Khusus dengan kontribusi sebesar 15,05-17,51 persen serta Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dengan kontribusi sebesar 6,5-15,31 persen (**Gambar 3.9**). Berdasarkan data realisasi selama lima tahun terakhir, penerimaan Dana Perimbangan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, terutama di tahun 2020 dimana Indonesia bersama dengan negara lainnya mengalami pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya sejumlah kebijakan keuangan yang diterbitkan. Salah satu kebijakan keuangan pemerintah pusat yang berimbas ke Kabupaten Belitung Timur adalah adanya rasionalisasi penerimaan Dana Perimbangan sebesar kurang lebih 10 persen. Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2020, sampai dengan akhir tahun mengalami penurunan sebagai dampak dari adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.



*) Data Realisasi APBD TA 2020, unaudited

Sumber : BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah Kembali, 2021

Gambar 3.9 Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Dilihat dari perkembangan masing-masing komponen, penerimaan Dana Bagi Hasil terhadap total pendapatan daerah memiliki kontribusi yang cenderung fluktuatif dalam rentang waktu 2016-2020. Pada tahun 2016 Dana Bagi Hasil berkontribusi terhadap Dana Perimbangan sebesar 9,53 persen, namun pada tahun 2020, realisasi dana bagi hasil hanya berkontribusi sebesar 8,42 persen dari total dana perimbangan. Dilihat dari tingkat pertumbuhan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Dana Perimbangan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,41 persen.

Dana Alokasi Umum mempunyai kontribusi yang cenderung meningkat dalam rentang waktu 2016-2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan karena adanya penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berdampak ke daerah akibat adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2016, Dana Alokasi Umum memiliki kontribusi terhadap Dana Perimbangan 72,96 persen, sedangkan kontribusi pada tahun 2020 mencapai 74,54 persen. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dari tahun 2016 hingga 2020, penerimaan Dana Alokasi Umum memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -0,85 persen. Adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19, menyebabkan penerimaan DAU mengalami penurunan sebesar 8,96 persen dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2019. Berdasarkan PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur mengalami pemotongan alokasi DAU sebesar 14 milyar.

Komposisi Dana Perimbangan yang terakhir adalah Dana Alokasi Khusus. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Dalam realisasinya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak berjalan optimal. Pada tahun 2016 Dana Alokasi Khusus berkontribusi sebesar 17,51 persen terhadap total Dana Perimbangan, sedangkan pada tahun 2020, realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus memiliki kontribusi mencapai sebesar 17,04 persen. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, penerimaan Dana Alokasi Khusus memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -1,34 persen.

Dalam bagian Transfer Pemerintah Pusat juga terdapat komponen dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, perkembangan dana penyesuaian dan otonomi menunjukkan adanya tren peningkatan. Pada tahun 2016, dana yang diterima sebesar Rp 27.099.065.000,00 atau 4,31 persen dari total penerimaan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara pada tahun 2020, realisasi penerimaan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 8,53 persen dari total Transfer Pemerintah Pusat. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, maka rata-rata pertumbuhan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus selama lima tahun terakhir adalah sebesar 18,4 persen.

Komponen lain dalam Pendapatan Transfer selain Transfer Pemerintah Pusat adalah Transfer Antar Daerah. Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi hasil yang diperoleh dari pajak provinsi mempunyai kontribusi yang fluktuatif selama kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp 15.781.503.111,38 atau 2,38 persen terhadap total Pendapatan Transfer. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp 35.472.913.941,90 atau berkontribusi sebesar 5,41 persen dari total Pendapatan Transfer. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, maka rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 37,53 persen.

Bantuan keuangan dari provinsi juga merupakan salah satu komponen Transfer Antar Daerah. Bantuan keuangan dari provinsi selama lima tahun terakhir memiliki perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016, bantuan keuangan yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp 19.224.718.320,00 atau 2,90 persen dari total Pendapatan Transfer. Pada tahun 2020, realisasi bantuan keuangan tersebut mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 2.194.800.000,00. Sedangkan rata-rata pertumbuhan bantuan keuangan dari provinsi dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 6,51 persen.

A.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen lain dalam pendapatan Transfer adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pendapatan hibah memiliki kontribusi yang cenderung fluktuatif dalam rentang waktu 2016-2020. Peningkatan pendapatan hibah bersumber dari penerimaan dana BOS APBN yang bersifat *earmark*. Sementara itu, untuk penerimaan hibah dari sumbangan pihak ketiga nilainya tidak signifikan dan penerimaannya sudah dihentikan dalam beberapa tahun terakhir karena berkenaan dengan regulasi terhadap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak boleh mengikat. Pada tahun 2016, hibah yang diterima dari sumbangan pihak ketiga sebesar Rp 877.650.000,00 atau sebesar 0,12 persen terhadap total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan hibah meningkat menjadi Rp18.465.098.506,49 setelah adanya penerimaan hibah BOS APBN. Penambahan pos penerimaan dana hibah BOS APBN sejak tahun 2018 menyebabkan terjadinya pertumbuhan penerimaan pendapatan hibah sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan hibah terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mencapai sebesar 3.526,33 persen.

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
A.	PENDAPATAN DAERAH	754.649.989.634,95	738.225.627.728,63	824.439.488.088,16	886.766.991.999,43	776.507.166.240,43	1,16%
1.	Pendapatan Asli Daerah	90.361.562.416,57	109.657.373.539,57	109.456.286.246,75	111.247.802.604,87	102.159.584.856,04	3,66%
1.1.	Pajak Daerah	41.142.233.274,16	58.184.542.887,62	73.974.198.776,22	65.914.998.890,64	58.519.124.050,59	11,61%
1.2.	Retribusi Daerah	3.973.362.829,68	3.313.249.717,13	4.376.000.772,00	4.429.253.111,00	4.079.465.546,00	2,20%
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.418.085.907,96	3.201.397.365,67	3.026.753.743,26	3.293.903.356,97	3.528.730.864,06	1,04%
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.827.880.404,77	44.958.183.569,15	28.079.332.955,27	37.609.647.246,26	36.032.264.395,39	-0,08%
2.	Pendapatan Transfer	663.410.777.218,38	628.462.004.189,06	699.819.181.841,41	757.619.217.157,95	655.882.482.877,90	0,23%
2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	628.404.555.787,00	588.553.622.167,00	658.084.708.030,00	708.037.642.775,00	618.214.768.936,00	0,09%
2.1.1.	Dana Perimbangan	601.305.490.787,00	554.464.898.167,00	622.466.388.030,00	664.882.063.775,00	565.494.791.946,00	-0,91%
2.1.1.1.	Dana Transfer Umum	496.026.403.426,00	469.180.183.020,00	522.386.615.515,00	564.788.703.299,00	469.121.841.821,00	-0,72%
2.1.1.1.a	Dana Bagi Hasil (DBH)	57.320.285.426,00	36.018.959.020,00	82.215.733.068,00	101.783.076.299,00	47.589.894.821,00	15,41%
2.1.1.1.b	Dana Alokasi Umum (DAU)	438.706.118.000,00	433.161.224.000,00	440.170.882.447,00	463.005.627.000,00	421.531.947.000,00	-0,85%
2.1.1.2.	Dana Transfer Khusus (DAK)	105.279.087.361,00	85.284.715.147,00	100.079.772.515,00	100.093.360.476,00	96.372.950.125,00	-1,34%
2.1.2.	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
2.1.3.	Dana Otonomi Khusus	27.099.065.000,00	34.088.724.000,00	35.618.320.000,00	43.155.579.000,00	52.719.976.990,00	18,40%
2.1.4.	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Transfer Antar-Daerah	35.006.221.431,38	39.908.382.022,06	41.734.473.811,41	49.581.574.382,95	37.667.713.941,90	3,34%
2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	15.781.503.111,38	34.881.082.022,06	26.008.799.251,11	46.249.679.682,95	35.472.913.941,90	37,53%
2.2.2.	Bantuan Keuangan	19.224.718.320,00	5.027.300.000,00	15.725.674.560,30	3.331.894.700,00	2.194.800.000,00	6,50%
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	877.650.000,00	106.250.000,00	15.164.020.000,00	17.899.972.236,61	18.465.098.506,49	3526,33%
3.1.	Hibah	877.650.000,00	106.250.000,00	15.164.020.000,00	17.899.972.236,61	18.465.098.506,49	3526,33%
3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021

B. Belanja Daerah

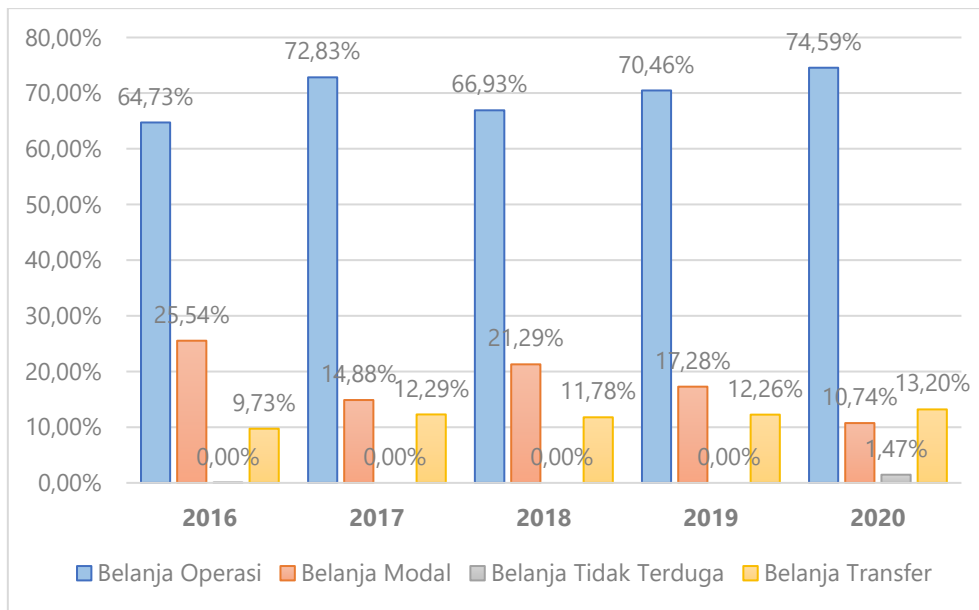
Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan pada struktur belanja yang terletak pada klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Berikut adalah perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Belitung timur dalam lima tahun terakhir

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KELEBIHAN / KEKURANGAN
2016	900.647.291.121	832.040.979.352	92,38%	(68.606.311.769)
2017	794.561.200.346	719.697.936.249	90,58%	(74.863.264.097)
2018	908.308.443.632	815.705.531.388	89,80%	(92.602.912.244)
2019	950.992.810.832	865.889.382.198	91,05%	(85.103.428.634)
2020	903.134.343.928	774.244.794.302	85,73%	(128.889.549.626)

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021

Dalam kurun waktu 2016-2019, perkembangan belanja daerah Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren angka yang meningkat, kecuali pada tahun 2017 yang juga mengalami rasionalisasi penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2016 total Belanja Daerah sebesar Rp. 832.040.979.351,83 dan meningkat menjadi sebesar Rp 865.889.382.198,07 pada tahun 2019. Namun realisasi belanja pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 128.889.549.626 atau sebesar 10,58 dari tahun 2019 sebagai dampak dari adanya *refocusing* anggaran karena adanya kondisi pandemi covid-19 yang berdampak terhadap pendapatan daerah sehingga beberapa kali dilakukan *refocusing* terhadap belanja daerah. Proporsi belanja secara rinci disajikan pada grafik berikut.

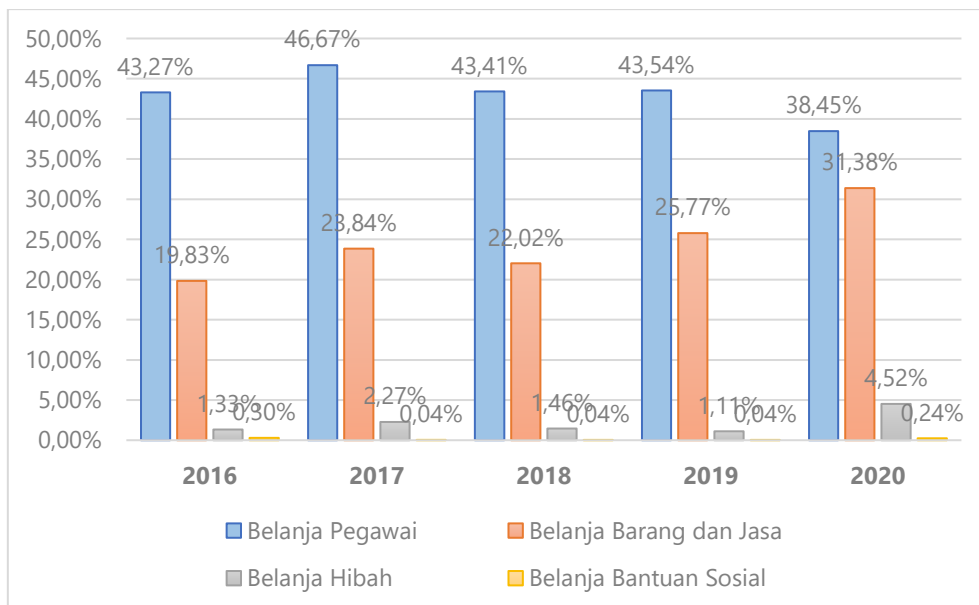


*) Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, Unaudited

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah Kembali, 2021

Gambar 3.10 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Dilihat dari komponen pembentuk belanja daerah, belanja operasi memiliki proporsi paling besar pembentuk belanja daerah di Kabupaten Belitung Timur. Tidak hanya itu, belanja operasi selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,97 persen. Adapun subkomponen yang memiliki proporsi terbesar dalam belanja operasi adalah belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Pada tahun 2020 realisasi belanja pegawai mencapai Rp 297.732.346.486,00 serta belanja barang dan jasa dengan realisasi sebesar Rp 242.934.476.957,49.



*) Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, Unaudited

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah Kembali, 2021

Gambar 3.11 Proporsi dalam Belanja Operasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

Berdasarkan diagram di atas, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja operasi pada tahun 2016 adalah sebesar 43,27 persen dan mengalami penurunan menjadi 38,45 persen pada tahun 2020. Setelah belanja pegawai, belanja barang dan jasa merupakan penyumbang terbesar kedua dalam belanja daerah Kabupaten Belitung Timur. Dilihat dari proporsi belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2016 mencapai angka 25,54 persen dan menurun cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 10,74 persen. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kembali persentase penganggaran belanja modal pada perencanaan keuangan daerah dalam lima tahun mendatang.

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belitung Timur cenderung mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016, total penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur lebih kecil dari total belanja daerah sehingga terjadi defisit. Sedangkan, pada tahun 2017 hingga 2020 terjadi surplus dalam penganggaran daerah Kabupaten Belitung Timur. Kondisi surplus dan defisit yang terjadi dalam kurun tahun 2016-2020 berpengaruh terhadap pembiayaan daerah di Kabupaten Belitung Timur yang juga mengalami kondisi fluktuatif selama lima tahun terakhir.

Pada APBD Tahun Anggaran 2021, belanja Daerah diproyeksikan terus meningkat dengan asumsi bahwa keadaan ekonomi nasional dan daerah serta dunia usaha mulai pulih sehingga secara perlahan pendapatan daerah dari berbagai sumber, baik yang berasal dari PAD maupun dana transfer dari pemerintah pusat turut membaik sehingga mampu mendanai belanja daerah sampai pada tahun terakhir RPJMD. Meski demikian tidak menutup kemungkinan bahwa belanja daerah tersebut diperkirakan masih akan menurun karena adanya kebijakan *refocusing* kembali untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2021.

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
B.	BELANJA DAERAH	832.040.979.351,83	719.697.936.248,86	815.705.531.387,94	865.889.382.198,07	774.244.794.301,96	-1,15%
1.	Belanja Operasi	538.598.558.167,52	524.123.451.654,68	545.930.993.785,43	610.108.647.123,88	577.536.945.350,49	1,97%
1.1.	Belanja Pegawai	360.058.091.340,37	335.855.177.923,00	354.138.552.135,00	376.999.170.511,97	297.732.346.486,00	-3,96%
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.984.225.827,15	171.599.542.731,68	179.608.336.650,43	223.178.534.117,91	242.934.476.957,49	10,45%
1.3.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00%
1.4.	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00%
1.5.	Belanja Hibah	11.093.435.000,00	16.354.731.000,00	11.881.105.000,00	9.626.442.494,00	34.995.071.907,00	66,16%
1.6.	Belanja Bantuan Sosial	2.462.806.000,00	314.000.000,00	303.000.000,00	304.500.000,00	1.875.050.000,00	106,38%
2.	Belanja Modal	212.473.699.247,33	107.105.745.023,27	173.681.140.534,33	149.642.796.105,00	83.174.500.800,18	-11,42%
3.	Belanja Tidak Terduga	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	11.352.850.247,00	
4.	Belanja Transfer	80.965.871.936,98	88.468.739.570,91	96.093.397.068,18	106.137.938.969,19	102.180.497.904,29	6,15%
4.1.	Belanja Bagi Hasil	4.279.655.838,98	5.614.723.970,91	7.867.898.268,22	7.065.749.319,19	6.355.126.598,29	12,77%
4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	76.686.216.098,00	82.854.015.600,00	88.225.498.799,96	99.072.189.650,00	95.825.371.306,00	5,89%
	PENDAPATAN DAERAH	754.649.989.634,95	738.225.627.728,63	824.439.488.088,16	886.766.991.999,43	776.507.166.240,43	1,16%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(77.390.989.717)	18.527.691.480	8.733.956.700	20.877.609.801	2.262.371.938	

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Piutang Daerah, dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga, Dana Talangan, Pemberian Pinjaman Dana Bergulir; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Sumber utama penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belitung Timur berasal dari SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2016, penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp. 120.476.377.554,28 dan pada tahun 2020, sampai dengan akhir tahun realisasi penerimaan pembiayaan menjadi Rp 101.622.093.648,43. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belitung Timur mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,57 persen selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KELEBIHAN / KEKURANGAN
2016	120.829.535.901,28	120.476.377.554,28	99,71%	(353.158.347)
2017	45.896.387.837,40	44.198.721.345,40	96,30%	(1.697.666.492)
2018	73.204.923.263,85	72.933.763.365,85	99,63%	(271.159.898)
2019	80.651.928.247,07	80.670.920.747,07	100,02%	18.992.500
2020	101.622.093.648,43	101.450.833.948,43	99,83%	(171.259.700)

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Sedangkan pada komponen pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Belitung Timur, umumnya digunakan untuk pemberian pinjaman daerah dan pembayaran utang jangka pendek lainnya. Pengeluaran pembiayaan daerah di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2016, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp 671.000.000,00. Pada tahun 2020, sampai dengan akhir tahun diketahui tidak ada realisasi pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KELEBIHAN / KEKURANGAN
2016	1.004.975.565,27	1.000.000.000,00	99,50%	(4.975.565)
2017	1.094.760,27	0,00	0,00%	(1.094.760)
2018	1.716.195.807,27	1.715.791.819,00	99,98%	(403.988)
2019	781.124.289,00	671.000.000,00	85,90%	(110.124.289)
2020	1.112.723.953,00	2.599.664,00	0,23%	(1.110.124.289)

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Besaran SILPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SILPA terhadap Total Belanja Daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SILPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada dasarnya mengindikasikan kurang efektifnya perencanaan atau pelaksanaan program/kegiatan di daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 realisasi penerimaan SiLPA tahun sebelumnya mengalami fluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan dari sebesar Rp. 117.129.535.901,28 pada tahun 2016 menjadi Rp. 100.877.530.548,43 pada tahun 2020. Realisasi SILPA tahun sebelumnya tersebut menjadi sumber penerimaan pembiayaan utama pada APBD tahun berikutnya.

Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 (*unaudited*), SiLPA tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 103.654.779.442,72. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 2.777.248.894,29. Persentase SiLPA *anaudited* terhadap jumlah anggaran belanja daerah pada tahun 2020 adalah sebesar 11,48 %. Persentase SiLPA *anaudited* terhadap jumlah realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2020 adalah sebesar 13,39 %. Hal ini berarti bahwa realisasi SiLPA lebih besar dari yang dianggarkan. Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada **Tabel 3.15** berikut.

Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.476.377.554,28	44.198.721.345,40	72.933.763.365,85	80.670.920.747,07	101.450.833.948,43	9,52%
3.1.1	Penggunaan SILPA	117.129.535.901,28	42.085.387.837,40	71.762.987.663,85	79.951.928.247,07	100.877.530.548,43	11,01%
3.1.2	Penerimaan Kembali Piutang	3.346.841.653,00	2.113.333.508,00	1.170.775.702,00	718.992.500,00	573.303.400,00	-35,08%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	1.715.791.819,00	671.000.000,00	2.599.664,00	-86,84%
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	
3.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0	1.500.000.000,00	671.000.000,00	0	
3.2.3	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	215.791.819,00	0	0	
3.2.4	Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0	2.599.664,00	
3.2.5	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	119.476.377.554,28	44.198.721.345,40	71.217.971.546,85	79.999.920.747,07	101.448.234.284,43	9,32%
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	42.085.387.837,40	62.726.412.825,17	79.951.928.247,07	100.877.530.548,43	103.710.606.222,90	26,37%

Ket. *) Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, Unaudited

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah Kembali, 2021

3.2.2 Neraca Daerah

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dana. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, dapat berupa: Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lainnya dan Persediaan. Kewajiban mencakup kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi /diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, dan kewajiban jangka panjang yang harus dipenuhi /diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sementara itu Ekuitas Dana Investasi mencerminkan Ekuitas Pemerintah Kabupaten yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.

Neraca daerah menjelaskan posisi kekayaan daerah dengan menghitung nilai aset pemerintah daerah dikurangi dengan kewajiban sehingga diperoleh ekuitas (kekayaan bersih dari pemerintah daerah). Analisa likuiditas dan analisis solvabilitas yang dapat dilakukan berdasarkan perkembangan neraca daerah. Analisa likuiditas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya, terutama untuk memenuhi kewajiban lancar yang dibiayai oleh aset lancarnya. Analisa solvabilitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo. Berikut hasil analisis likuiditas Kabupaten Belitung Timur:

Tabel 3.16 Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Belitung Timur

RATIO	RUMUS	2016	2017	2018	2019	2020
Ratio Lancar	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	14,01	21,37	19,29	25,19	21,81
Ratio Quick (Quick Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	11,580	18,997	16,870	22,611	19,715
Rasio total hutang terhadap total asset	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	0,00348	0,00323	0,00435	0,00380	0,00421

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Beltim, data diolah kembali, 2021

Dari **Tabel 3.16** di atas, dapat dilihat bahwa tingkat likuiditas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sepanjang tahun 2016-2019, kecuali pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya sesegera mungkin, terutama untuk memenuhi hutang lancar yang dibiayai oleh aset lancarnya semakin baik dari tahun ke tahun. Namun, dari berbagai literatur tidak disebutkan Batasan rasio likuiditas yang ideal. Sedangkan hasil analisis rasio solvabilitas dapat dilihat pada **Tabel 3.17** berikut.

Tabel 3.17 Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Belitung Timur

URAIAN	PERHITUNGAN	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio A	(Kas dan setara kas + investasi jangka pendek)/ kewajiban lancar	8,23	16,18	12,57	16,69	15,76
Rasio B	(Kas dan setara kas + investasi jangka pendek + piutang)/ kewajiban lancar	11,58	18,99	16,69	28,67	20,12

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Beltim, data diolah kembali, 2021

Tabel 3.18 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2019

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
1.	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	32.243.440.619,82	52.802.264.743,04	53.349.535.912,19	49.829.364.914,73	48.467.207.846,82	13,87%
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.002.889,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00%
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	30.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00%
1.1.4	Kas di BLUD	9.015.304.595,85	914.861.834,08	3.188.858.841,13	4.111.773.489,97	6.482.212.712,55	61,33%
1.1.6	Kas JKN	827.166.525,00	528.286.528,00	0,00	0,00	0,00	-36,13%
1.1.7	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	496.202.317,00	457.142.469,60	561.962.782,60	7,53%
1.1.8	Kas di Bendahara BOS	0,00	386.518.752,75	279.202.820,89	1.328.624.576,27	255.541.978,89	89,11%
1.1.9	Kas Lainnya	3.977.024,00	320.000,00	18.614.352,00	0,00	25.627.373,18	1841,68%
1.1.10	Setara kas	0,00	17.427.751.326,00	22.939.999.298,00	45.452.143.889,00	48.172.393.952,00	45,25%
1.1.11	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.12	Piutang Pendapatan	21.455.087.351,77	16.955.491.750,99	32.737.665.498,71	37.986.019.884,82	31.496.592.692,92	17,76%
1.1.13	Piutang Lainnya	0,00	43.414.100,00	49.243.100,00	653.824.200,00	0,00	380,39%
1.1.14	Penyelisih Piutang Lainnya	-4.295.709.562,39	-4.428.929.318,43	-5.288.835.685,85	-2.763.889.849,20	-5.931.122.415,08	22,34%
1.1.15	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.16	Persediaan	12.426.400.386,42	10.575.739.804,29	15.469.534.348,97	15.649.084.793,85	13.770.281.903,67	5,13%
	JUMLAH ASET LANCAR	71.676.699.829,47	95.205.719.520,72	123.240.020.803,04	152.704.175.438,04	143.300.698.827,55	20,01%

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	1.165.954.500,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	1.165.954.500,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	47.347.453.151,00	39.472.978.508,05	38.364.454.469,92	36.743.514.013,22	35.872.384.289,00	-6,51%
1.2.4	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	47.347.453.151,00	39.472.978.508,05	38.364.454.469,92	36.743.514.013,22	35.872.384.289,00	-6,51%
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	47.347.453.151,00	39.472.978.508,05	39.530.408.969,92	36.743.514.013,22	35.872.384.289,00	-6,48%
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	188.424.148.005,00	187.538.817.353,00	260.049.516.301,91	304.388.788.301,91	303.048.137.301,91	13,70%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	284.533.634.661,57	285.276.739.529,44	320.651.356.192,55	355.953.817.161,55	402.465.800.343,87	9,18%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	562.894.664.995,81	549.858.920.846,34	596.866.630.269,48	634.077.970.640,48	657.677.754.647,06	4,05%

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	887.135.265.001,81	922.376.516.898,85	1.013.547.665.449,43	1.115.196.383.285,43	1.148.232.492.286,43	6,71%
1.3.5	Aset Tetap lainnya	32.628.356.014,88	31.626.076.328,88	34.238.064.140,88	37.557.656.541,88	24.372.805.231,39	-5,06%
1.3.6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	10.164.883.027,00	1.279.828.027,00	4.831.490.920,61	8.258.963.088,00	8.742.294.588,00	66,72%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-669.967.636.799,50	-753.847.217.305,59	-928.536.830.156,63	-1.053.978.013.907,06	-1.171.547.753.703,14	15,09%
	JUMLAH ASET TETAP	1.295.813.314.906,57	1.224.109.681.677,92	1.301.647.893.118,23	1.401.455.565.112,19	1.372.991.530.695,52	1,61%
1.4	DANA CADANGAN						
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	ASET LAINNYA						
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	3.126.460.300,00	3.126.460.300,00	0,00	2.780.230.859,90	2.110.004.622,44	-41,37%
1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	969.408.873,00	969.408.873,00	2.951.899.858,45	0,00	0,00	102,25%
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.919.893.440,00	14.931.563.706,00	0,00	0,00	0,00	15,57%
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	3.838.563.148,00	362.973.002,00	251.376.739,00	340.818.546,00	373.399.065,00	-19,04%
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.6	Aset Lain-lain	36.584.352.348,88	1.553.736.907,00	1.486.786.907,00	1.486.786.907,00	4.243.791.701,17	21,34%

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH ASET LAINNYA	57.438.678.109,88	20.944.142.788,00	4.690.063.504,45	4.607.836.312,90	6.727.195.388,61	-24,23%
	JUMLAH ASET DAERAH	1.472.276.145.996,92	1.379.732.522.494,69	1.469.108.386.395,64	1.595.511.090.876,35	1.558.891.809.200,68	1,63%
2.	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Utang Perhitungan Fihal Ketiga (PFK)	5.071.784,27	216.195.807,27	18.614.352,00	2.599.664,00	85.610.130,00	1794,60%
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5	Utang Beban	2.654.092.332,74	3.092.087.466,32	2.900.330.587,82	3.441.640.651,00	3.604.632.937,17	8,43%
2.1.6	Pendapatan Diterima di Muka	360.761.151,00	309.646.648,97	199.998.678,52	92.747.518,40	106.177.239,59	-22,18%
2.1.7	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.985.935.845,00	726.251.410,00	2.565.424.309,40	2.414.275.787,40	2.773.803.006,40	49,70%
2.1.9	Pendapatan yang Ditangguhkan	432.032,00	522.335,00	265.082,00	0,00	0,00	-14,17%

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
2.1.10	Utang kepada Pihak Ketiga	110.124.289,00	110.124.289,00	703.803.450,00	110.124.289,00	0,00	88,69%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.116.417.434,01	4.454.827.956,56	6.388.436.459,74	6.061.387.909,80	6.570.223.313,16	8,44%
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.2	Utang Jangka Panjang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.116.417.434,01	4.454.827.956,56	6.388.436.459,74	6.061.387.909,80	6.570.223.313,16	8,44%
3.	EKUITAS DANA						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR						
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)						
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan						
3.1.3	Cadangan Piutang						
3.1.4	Cadangan Persediaan						

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek						
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR						
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI						
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang						
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap						
3.2.3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya						
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek						
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI						
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN						
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan						
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN						

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUM- BUHAN (%)
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.467.159.728.562,91	1.375.277.694.537,80	1.462.719.949.935,90	1.589.449.702.966,55	1.552.321.585.887,52	1,61%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.472.276.145.996,92	1.379.732.522.494,36	1.469.108.386.395,64	1.595.511.090.876,35	1.558.891.809.200,68	1,63%

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2021

3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Belitung Timur

Dalam analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu dipahami antara lain mencakup proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pada bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Perkembangan proporsi pemenuhan kebutuhan belanja aparatur di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada **Tabel 3.19** berikut.

Tabel 3.19 Kebutuhan Belanja Aparatur Kabupaten Belitung Timur

TAHUN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (Rp)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (Rp)	PERSENTASE (%)
2017	371.594.785.242,00	710.661.361.410,18	52,29%
2018	400.626.905.885,50	817.421.323.206,94	49,01%
2019	454.524.904.384,20	861.623.080.198,07	52,75%

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019, telah mengupayakan pemenuhan kebutuhan aparatur dengan persentase kurang lebih 50 persen. Dengan demikian berbagai pemenuhan untuk kebutuhan aparatur telah dilakukan secara optimal mungkin untuk mendukung aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.3.2 Analisis Pembiayaan

Nilai defisit riil yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur setiap tahun selalu bervariasi (fluktuatif). Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan Kembali pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diantaranya berasal dari penyertaan modal, pemberian pinjaman maupun pembayaran hutang. Setiap tahun, pemerintah daerah selalu berupaya agar semua pendapatan dan belanja daerah dapat direalisasikan dengan melakukan perhitungan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan secara hati-hati. Dengan demikian, diharapkan semua rencana keuangan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan secara optimal dengan dukungan ketersediaan anggaran yang memadai. Data tersebut selengkapnya tersaji dalam **Tabel 3.20**, **Tabel 3.21**, dan **Tabel 3.22** berikut.

Tabel 3.20 Perhitungan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Belitung Timur

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	754.649.989.634,95	738.225.627.728,63	824.439.488.088,16	886.766.991.999,43	776.507.166.240,43
	Dikurangi Realisasi					
2.	Belanja Daerah	832.040.979.351,83	719.697.936.248,86	815.705.531.387,94	865.889.382.198,07	774.244.794.301,96
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	0,00	1.715.791.819,00	671.000.000,00	2.599.664,00
	DEFISIT RIIL	(78.390.989.716,88)	18.527.691.479,77	7.018.164.881,22	20.206.609.801,36	2.259.772.274,47

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah, 2021

Tabel 3.21 Komposisi Penerimaan Pembiayaan sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2019

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA)	117.129.535.901,28	42.085.387.837,40	71.762.987.663,85	79.951.928.247,07	100.877.530.548,43
2.	Pencairan Dana Cadangan					
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.346.841.653,00	2.113.333.508,00	1.170.775.702,00	718.992.500,00	573.303.400,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah					
7.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir					
	TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.476.377.554,28	44.198.721.345,40	72.933.763.365,85	80.670.920.747,07	101.450.833.948,43

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah, 2021

Tabel 3.22 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2019

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SiLPA	117.129.535.901,28	42.085.387.837,40	71.762.987.663,85	79.951.928.247,07	100.877.530.548,43
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	13.213.618.164,86	7.409.695.703,61	4.629.748.342,90	7.341.594.071,68	
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan					
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	139.137.061.127,88	68.258.128.987,41	82.203.267.203,89	92.332.156.333,98	
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan					
7.	Kegiatan Lanjutan					

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, data diolah

3.4 Kerangka Pendanaan

3.4.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih terus berlangsung, dan dampaknya yang diperkirakan masih akan dialami hingga beberapa tahun mendatang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha mengalami kondisi yang sulit. Namun demikian, untuk memberikan panduan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka kerangka pendanaan disusun dengan berbagai asumsi yang akan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan, baik faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa asumsi yang digunakan dalam menetapkan kerangka pendanaan ini diantaranya adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dengan didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sampai saat ini sedang dilakukan pengkajian untuk dibentuk Satuan Kerja Perangkat Kerja tersendiri yang akan mengelola pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi para aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemungutan dan pelayanan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah serta peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang dan berbagai upaya lainnya.
3. Meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kas daerah untuk menghasilkan pendapatan giro dan deposito dan meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya untuk lain-lain PAD yang Sah.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendapatkan reward berupa insentif bagi pemerintah daerah.

Perhitungan proyeksi pendapatan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur tahun 2021–2026, didasarkan pada berbagai pertimbangan dan asumsi. Pertimbangan dan asumsi tersebut diantaranya meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, potensi pendapatan, kebijakan dari pemerintah (pusat dan provinsi). Perhitungannya dilakukan secara rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Realisasi pendapatan daerah beberapa tahun terakhir serta kondisi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha serta pandemi COVID-19 saat ini merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah.

Pada **Tabel 3.23** dapat dilihat bahwa pendapatan daerah diprediksikan akan mengalami peningkatan. Asumsi yang digunakan menggunakan dua periodisasi, yaitu periode 2022-2023 dan periode 2024-2026. Periode 2022-2023 diasumsikan sebagai periode pemulihan ekonomi yang diliputi oleh ketidakpastian sehingga asumsi kenaikan lebih kecil dibandingkan periode 2024-2026 yang diprediksikan pertumbuhan ekonomi mulai membaik dan stabil. Berikut penjelasannya :

A. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Dalam melakukan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi serta pertumbuhan penduduk. Ketiga asumsi tersebut menjadi dasar dalam menentukan besaran pertumbuhan untuk menghitung proyeksi PAD lima tahun yang akan datang. Secara lebih rinci, asumsi dalam menghitung proyeksi PAD dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan pajak daerah pada tahun 2021-2023 diasumsikan mengalami kenaikan. Pada tahun 2024-2026, penerimaan pajak daerah diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 4-7 persen. Sumber-sumber pajak daerah yang selama ini sangat signifikan menyumbang PAD yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan memerlukan waktu untuk kembali tumbuh sehingga potensi penerimaan pajak yang berasal dari sektor usaha lainnya seperti PBB dan BPHTB, reklame dan sebagainya perlu didorong agar dapat tumbuh seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan penduduk di Belitung Timur;
- 2) Pendapatan retribusi daerah pada tahun 2021-2023 diasumsikan mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 4-7 persen pada tahun 2024-2026. Asumsi ini didasarkan pada kondisi bahwa sumber-sumber retribusi yang baru tidak bertambah secara signifikan;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diasumsikan meningkat meskipun tidak signifikan, karena tidak ada kepastian rencana penyertaan modal pada perbankan atau BUMD sehingga *share* saham tidak dapat dihitung potensi devidennya;
- 4) Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2022 diprediksi mengalami penurunan dari tahun 2021 dikarenakan adanya kebijakan perubahan akun Dana Kapitasi JKN yang tidak lagi menjadi komponen dalam Lain-lain PAD yang Sah. Meski demikian, dalam lima tahun mendatang, proyeksi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah diasumsikan mengalami kenaikan. Hal ini mengingat bahwa jenis penerimaan ini sangat bergantung pada kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan kemampuan dalam mengelola kas daerah maupun deposito daerah serta pengelolaan aset daerah yang dapat menghasilkan PAD. Dalam

rangka meningkatkan penerimaan melalui lain-lain PAD yang sah, salah satu hal yang akan didorong adalah kemandirian BLUD sehingga diharapkan akan mengurangi ketergantungan BLUD terhadap APBD.

B. Proyeksi Pendapatan Transfer

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur didominasi pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dengan persentase lebih dari 70 persen. Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah yang bersumber pendapatan transfer pemerintah pusat tersebut. Secara umum, beberapa kondisi yang dijadikan sebagai asumsi dasar dalam melakukan perhitungan proyeksi pendapatan transfer seperti adanya penambahan pegawai (ASN) serta perbaikan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah diprediksi akan mempengaruhi penerimaan pendapatan transfer ke daerah. Adanya pengadaan atau penambahan pegawai (ASN) diprediksi meningkatkan penerimaan pendapatan transfer khususnya melalui DAU. Selain itu, peningkatan pelayanan dan kinerja yang semakin baik diprediksi dapat mendorong peningkatan penerimaan pendapatan transfer. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan adanya sebuah roadmap pengembangan keuangan daerah yang dapat membantu daerah mengelola, meningkatkan serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Secara lebih rinci, asumsi dalam menghitung proyeksi Pendapatan Transfer dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah lainnya diasumsikan meningkat dengan prasyarat kondisi perekonomian nasional dan daerah berangsur pulih dan menunjukkan perkembangan yang positif;
- 2) Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2023-2026 diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 7 persen.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2023-2026 diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 3 persen, sedangkan proyeksi tahun 2022 disamakan alokasi dari pemerintah pusat tahun 2021.
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2023-2026 diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 7 persen, sedangkan proyeksi tahun 2022 disamakan alokasi dari pemerintah pusat tahun 2021.
- 5) Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2022-2026 diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 5 persen, dengan asumsi bahwa kinerja perangkat daerah juga harus ditingkatkan.
- 6) Proyeksi Dana Desa tahun 2022-2026 disamakan dengan realisasi tahun 2021.

- 7) Pendapatan Bagi Hasil dari provinsi pada tahun 2022-2026 diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 3 persen. (*menyesuaikan masukan dari provinsi sebesar 2-3 persen).
- 8) Bantuan Keuangan pada tahun 2023-2026 diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 10 persen.
- 9) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diasumsikan meningkat melalui dana hibah dan dana kapitasi JKN.
- 10) Dana Hibah pada tahun pada tahun 2023-2024 diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 2 persen, pada tahun 2025-2026 naik sebesar 4 persen. Asumsi ini didasarkan pada adanya pertumbuhan penduduk yang memasuki usia sekolah sehingga diprediksi akan terjadi peningkatan penerimaan Dana Hibah BOS.
- 11) Pendapatan daerah pada tahun 2022-2026 dapat lebih ditingkatkan dengan asumsi bahwa kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah yang terpisah dari pengelolaan keuangan dan aset beserta pendukungnya dapat segera diwujudkan.

Tabel 3.23 Hasil Perhitungan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO.	URAIAN	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.	PENDAPATAN DAERAH	824.969.616.431	861.049.399.794	891.399.836.564	924.415.410.324	961.277.102.674	1.002.387.654.915
1.	Pendapatan Asli Daerah	113.255.190.270	109.123.252.038	110.468.603.294	113.218.730.741	117.773.806.692	125.130.615.340
1.1.	Pajak Daerah	65.358.744.794	67.459.084.344	68.785.353.100	71.536.767.224	75.113.605.585	80.371.557.976
1.2.	Retribusi Daerah	4.946.107.500	4.950.000.000	4.966.107.500	5.164.751.800	5.422.989.390	5.802.598.647
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.361.467.234	3.918.728.952	3.918.728.952	3.718.797.975	3.718.797.975	3.718.797.975
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.588.870.742	32.795.438.742	32.798.413.742	32.798.413.742	33.518.413.742	35.237.660.742
2.	Pendapatan Transfer	694.814.276.161	728.025.997.756	756.524.078.771	786.441.381.993	817.860.233.513	850.868.254.607
2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	653.351.093.000	682.418.919.100	709.345.787.755	737.624.442.247	767.333.155.574	798.555.171.330
2.1.1.	Dana Perimbangan	588.933.063.000	617.145.747.000	643.174.716.450	670.510.576.776	699.229.356.231	729.411.941.419
2.1.1.1.	Dana Transfer Umum	472.603.805.000	486.352.533.000	503.225.977.470	520.765.426.068	539.002.044.972	557.968.718.373
2.1.1.1.a	Dana Bagi Hasil (DBH)	57.071.712.000	57.071.712.000	61.066.731.840	65.341.403.069	69.915.301.284	74.809.372.373
2.1.1.1.b	Dana Alokasi Umum (DAU)	415.532.093.000	429.280.821.000	442.159.245.630	455.424.022.999	469.086.743.689	483.159.346.000
2.1.1.2.	Dana Transfer Khusus (DAK)	116.329.258.000	130.793.214.000	139.948.738.980	149.745.150.709	160.227.311.258	171.443.223.046
2.1.2.	Dana Insentif Daerah	17.102.842.000	17.957.984.100	18.855.883.305	19.798.677.470	20.788.611.344	21.828.041.911
2.1.3.	Dana Desa	47.315.188.000	47.315.188.000	47.315.188.000	47.315.188.000	47.315.188.000	47.315.188.000

NO.	URAIAN	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.	Transfer Antar-Daerah	41.463.183.161	45.607.078.656	47.178.291.016	48.816.939.746	50.527.077.938	52.313.083.276
2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	41.463.183.161	42.707.078.656	43.988.291.016	45.307.939.746	46.667.177.938	48.067.193.276
2.2.2.	Bantuan Keuangan	0	2.900.000.000	3.190.000.000	3.509.000.000	3.859.900.000	4.245.890.000
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.900.150.000	23.900.150.000	24.407.154.500	24.755.297.590	25.643.062.470	26.388.784.968
3.1.	Hibah	16.900.150.000	16.900.150.000	17.407.154.500	17.755.297.590	18.643.062.470	19.388.784.968
3.2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000

3.4.2 Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Perhitungan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 didasarkan pada realisasi belanja beberapa tahun terakhir, termasuk rencana belanja tahun 2020. Perubahan proyeksi belanja ini juga didasarkan atas kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan untuk membiayai segala jenis belanja tersebut. Selain itu, belanja juga dihitung berdasarkan kebutuhan untuk mendanai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Belitung Timur. Kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih terus berlangsung dan tidak dapat dipastikan sampai kapan selesai membuat pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja untuk penanganan pandemi tersebut, baik untuk sektor kesehatan, bantuan sosial maupun pemulihan ekonomi disamping mengalokasikan belanja untuk mendanai pencapaian visi dan misi bupati terpilih.

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Secara umum, belanja diproyeksikan mengalami peningkatan pada periode 2021-2026. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi belanja daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial diperkirakan secara total akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, belanja pegawai diperkirakan meningkat seiring dengan kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), P3K, Pegawai Tidak Tetap/tenaga kontrak/sejenisnya. Belanja hibah diperkirakan tetap dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sementara itu untuk belanja bantuan sosial diprediksi akan meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun.
- 2) Belanja Modal untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya diproyeksikan akan bertambah secara bertahap setiap tahun. Penambahan belanja modal ini diperlukan untuk pengadaan aset yang baru maupun rehabilitasi aset agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi aparatur dan publik dalam pelaksanaan pembangunan di Belitung Timur.
- 3) Belanja tidak terduga diproyeksikan tetap. Nilai belanja tidak terduga tersebut diasumsikan tetap mulai tahun 2022 sampai dengan 2026.
- 4) Belanja transfer yang terdiri atas transfer bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya mengikuti target dan realisasi pajak dan retribusi daerah serta porsi pembagian sesuai alokasi dan regulasi yang mengatur transfer bantuan keuangan. Nilai belanja bantuan keuangan ke desa dari pajak dan retribusi daerah mengikuti target dan realisasi pajak dan retribusi daerah tersebut.

Tabel 3.24 Hasil Perhitungan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO.	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B.	BELANJA						
1.1	Belanja Operasi	694.418.965.831,00	704.384.884.898,59	714.500.292.752,19	744.767.431.723,60	735.188.577.779,58	745.766.041.026,40
1.1.1	Belanja Pegawai	345.227.897.741,00	350.406.316.207,12	355.662.410.950,22	360.997.347.114,48	366.412.307.321,19	371.908.491.931,01
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	319.166.706.765,00	323.954.207.366,48	328.813.520.476,97	333.745.723.284,13	338.751.909.133,39	343.833.187.770,39
1.1.3	Belanja Hibah	25.702.736.325,00	25.702.736.325,00	25.702.736.325,00	45.702.736.325,00	25.702.736.325,00	25.702.736.325,00
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00
1.2	Belanja Modal	142.713.222.089,00	144.853.920.420,34	147.026.729.226,64	151.437.531.103,44	155.980.657.036,54	160.660.076.747,64
1.3	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.4	Belanja Transfer	101.596.530.929,00	103.191.349.734,40	105.012.931.807,00	107.061.882.509,17	109.269.051.994,77	111.729.475.499,65
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.028.935.229,00	7.240.908.434,40	7.375.146.060,00	7.670.151.902,40	8.053.659.497,52	8.617.415.662,35
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	94.567.595.700,00	95.950.441.300,00	97.637.785.747,00	99.391.730.606,77	101.215.392.497,25	103.112.059.837,30
	TOTAL BELANJA DAERAH	939.228.718.849,00	953.430.155.053,33	967.539.953.785,83	1.004.266.845.336,21	1.001.438.286.810,89	1.019.155.593.273,68
	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.259.102.418)	(92.380.755.260)	(76.140.117.222)	(79.851.435.013)	(40.161.184.136)	(16.767.938.358)

3.4.3 Kebijakan Belanja dan Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA (siswa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya) dan penerimaan kembali pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bersumber dari penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, pemberian pinjaman daerah dan pembayaran hutang jangka pendek lainnya.

Proyeksi pembiayaan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitong Timur tahun 2021–2026 didasarkan pada realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan beberapa tahun terakhir, termasuk juga rencana pembiayaan tahun 2021. Perubahan proyeksi pembiayaan ini juga didasarkan atas perencanaan untuk menutup defisit murni sebagai selisih kurang atas pendapatan terhadap belanja. Perhitungan SILPA sebagai komponen terbesar dari penerimaan pembiayaan diproyeksikan secara hati-hati agar nilai riil akhir tahun tidak akan jauh berbeda dengan penganggaran.

Tabel 3.25 Hasil Perhitungan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO.	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114.259.202.418,00	92.880.755.259,77	81.640.117.221,60	85.351.435.012,69	40.661.184.136,39	17.267.938.358,21
7.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.657.385.318,00	92.380.755.259,77	81.140.117.221,60	84.851.435.012,69	40.161.184.136,39	16.767.938.358,21
7.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.601.817.100,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
7.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
7.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	114.259.202.418,00	92.380.755.259,77	76.140.117.221,60	79.851.435.012,69	40.161.184.136,39	16.767.938.358,21
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB IV

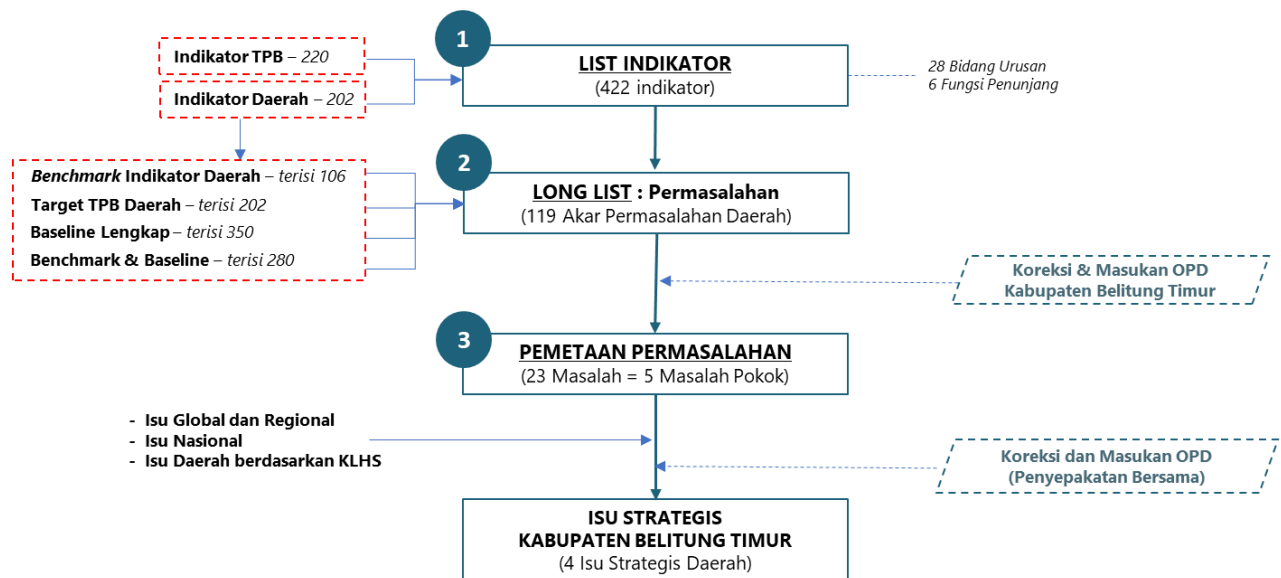
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu strategis merupakan sebuah cara untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan pembangunan disertai isu relevan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD. Isu strategis diartikan sebagai tantangan atau peluang yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam sebuah perencanaan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Analisis ini juga berperan dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang dinilai tidak ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi dalam masyarakat yang dinilai belum ideal.

Secara umum, perumusan permasalahan dan perumusan isu strategis daerah merupakan proses yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak hanya berdasarkan data statistik, perumusan ini juga mengharuskan adanya akomodasi terhadap masukan – masukan dan juga kesepakatan antarpihak khususnya OPD yang menangani urusan terkait secara langsung. Hal ini bertujuan agar rumusan tersebut dapat terverifikasi sehingga *valid* secara data maupun empirik di lapangan.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan daerah dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan kedetailannya yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah dan diselesaikan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Masalah merupakan pendetailan dari masalah pokok sehingga substansi dan redaksinya lebih spesifik, pemecahannya melalui strategi pembangunan. Terakhir yaitu akar masalah yang merupakan penyebab rinci dari sebuah masalah serta pemecahannya melalui arah kebijakan umum.

Tahapan runtut perumusan permasalahan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan secara detail pada **Gambar 4.1**. Perumusan akar masalah dimulai dari mengumpulkan beberapa indikator kinerja baik dalam LKPJ maupun indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam KLHS. Keseluruhan indikator detail tersebut yang tidak sesuai *benchmark* maupun tidak mencapai target maka disimpulkan terdapat *gap* sehingga menjadi sebuah akar permasalahan yang akan dijelaskan per urusan daerah pada sub bab selanjutnya. Dari 119 akar permasalahan dikerucutkan menjadi 23 rumusan masalah yang sifatnya lebih makro dan akhirnya menjadi 5 masalah pokok pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur. Dari proses tersebut maka didapatkan rumusan masalah yang koheren di setiap levelnya dengan harapan rumusan misi sampai dengan arah kebijakan pembangunan sebagai solusi atau penyelesaian tiap masalah juga koheren dan tepat sasaran seperti terangkum pada **Tabel 4.1**.



Sumber: LKPJ & KLHS Kabupaten Belitong Timur, 2020

Gambar 4.1 Alur Keterkaitan Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Belitong Timur

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan kondisi capaian indikator kinerja pada semua urusan pemerintah daerah, termasuk yang termuat dalam dokumen RPJMD, RKPD, LPPD, dan LKPJ. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD sehingga akan menghasilkan fakta yang aktual.

Berdasarkan **Tabel 4.1**, terdapat lima masalah pokok daerah yaitu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, daya saing dan pengembangan potensi ekonomi, pelayanan dan akses infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta yang terakhir kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat. Setiap masalah pokok memiliki masalah dan akar masalah tersendiri yang akan dibahas per urusan penyelenggaraan daerah sehingga lebih mudah dalam pemetaan dan juga penyelesaiannya. Adapun penjelasan detail lima masalah pokok, masalah, dan juga akar masalah pembangunan Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut:

4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Masalah pokok ini merupakan gabungan dari beberapa masalah terkait pengelolaan keuangan daerah; perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; pelayanan publik; kepegawaian dan kelembagaan, dan lain sebagainya seperti yang terangkum dalam **Tabel 4.1**. Permasalahan ini harus diatasi oleh

pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab terselenggaranya pemerintahan berdasarkan prinsip pemerintahan baik dan bersih (*good governance* dan *clean goverment*) dalam kurun waktu lima tahun kedepan yang juga digalakkan oleh pemerintahan pusat.

Berbagai indikator serta *benchmark* dari beberapa sumber kajian baik tingkat global, nasional, LKPJ, maupun KLHS digunakan dalam tahap ini untuk mengukur capaian serta merumuskan permasalahan. Dari beberapa indikator yang digunakan, terdapat 24 akar masalah dikelompokkan menjadi sembilan poin berdasarkan urusan daerah dengan detail sebagai berikut:

A. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang hampir terjadi pada semua penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang belum mencapai 100 persen. Pada tahun 2020, cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Belitung Timur justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (97,14 persen atau turun 1,05 persen), kepemilikan Kartu Keluarga (96,15 persen atau turun 2,82 persen), kepemilikan akta kelahiran (89,47 persen turun 6,15 persen), serta kepemilikan akta kematian (87,47 persen atau turun 16,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya). Meskipun beberapa capaiannya sudah tergolong tinggi yaitu diatas 96 persen namun perlu ditingkatkan lagi agar mencapai standar minimal yang ditetapkan. Selain itu, pengelolaan arsip kependudukan juga belum semuanya terkelola secara digital dikarenakan keterbatasan infrastruktur.

B. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika yaitu keterbatasan infrastruktur kaitannya dengan akses komunikasi pengguna layanan terhadap informasi pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan jumlah dan kapasitas SDM pengelola data domain serta *sub – domain* untuk pengelolaan *website* juga jaringan intra pemerintahan daerah masih terbatas. Selain itu masih rendahnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi hal yang harus ditingkatkan seiring penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

C. Fungsi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Permasalahan pada urusan kepegawaian dan pengembangan adalah masih terdapat jabatan yang belum terisi baik struktural, fungsional, maupun pelaksana. Jumlah tenaga honorer di lingkungan pemda juga masih besar dikarenakan belum adanya standar kompetensi dan pola pengangkatan sesuai kebutuhan organisasi dan rendahnya komitmen pejabat berwenang dalam melakukan efisiensi. Selain itu, permasalahan lain yang perlu diselesaikan dengan segera adalah belum adanya

sistem untuk mengukur kinerja pegawai serta dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

D. Fungsi Perencanaan

- Kurangnya pemahaman aparaturnya bidang perencanaan

Salah satu permasalahan terkait fungsi perencanaan adalah kurangnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga kemampuan bidang perencanaan belum merata pada setiap aparaturnya dan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang belum berjalan dengan baik. Secara kualitas dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman dalam penyusunan indikator sasaran, program dan kegiatan dalam renstra termasuk dalam hal proses pendampingan dan evaluasi. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan capaian persentase konsistensi program atau keselarasan antar dokumen yang belum mencapai 100 persen baik antara RPJMD – RKPD (96,24 persen) dan RKPD – PPAS (97,13 persen); persentase program OPD yang mendukung *pro-poor* dan *pro-job* yang mencapai 23,36 persen; dan persentase alokasi anggaran OPD yang mendukung program pengentasan kemiskinan yang hanya mencapai 86,81 persen.

- Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi

Permasalahan lainnya yaitu belum meratanya tingkat pemahaman OPD tentang penyusunan indikator sasaran, program dan kegiatan dalam renstra termasuk dalam hal proses pendampingan dan evaluasi. Dibutuhkan sebuah *tools modelling* untuk meningkatkan pemahaman dan juga memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam mencapai hasil terlaksana secara optimal tak terkecuali *monitoring* dan evaluasi. Permasalahan ini dibuktikan dengan realisasi capaian kinerja hasil *monitoring* dan evaluasi RKPD yang mencapai 94,17 persen dan realisasi capaian belanja hasil *monitoring* dan evaluasi yang hanya mencapai 86,81 persen.

E. Fungsi Keuangan

- Belum optimalnya pengelolaan pada potensi sumber PAD

Belum optimalnya *pengelolaan* pada potensi sumber PAD juga dialami oleh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung. Beberapa capaian justru mengalami penurunan dikarenakan efek pandemi terhadap terhambatnya kegiatan pelayanan dan perekonomian masyarakat sehingga penerimaan pendapatan daerah juga terganggu. Permasalahan ini terlihat dari beberapa capaian tahun 2020 antara lain persentase pajak daerah terhadap PAD hanya mencapai 53,16 persen atau menurun 6,07 persen; penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan daerah yang mencapai 5,86 atau menurun 1,77 persen;

serta persentase data wajib pajak yang dimutakhirkan yang hanya mencapai 19,63 persen atau menurun 61,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

- Kurangnya pemahaman aparaturnya dalam mengelola keuangan daerah

Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah menjadi permasalahan yang dialami hampir di tiap – tiap OPD. Hal tersebut disebabkan kurangnya kegiatan pelatihan *atau* bimtek bagi para pengelola juga belum diterapkannya standar kebutuhan sehingga dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah OPD hanya memenuhi keinginannya saja. Permasalahan ini terlihat dari beberapa capaian antara lain persentase OPD yang penyerapan keuangan sesuai target hanya tercapai 80 persen serta persentase penerbitan SP2D tepat waktu hanya sebesar 95 persen.

F. Fungsi Pengawasan

- Pelaksanaan pengawasan belum optimal

Pelaksanaan pengawasan belum optimal salah satunya banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang disampaikan kepada inspektorat. Selain *itu* persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan inspektorat yang hanya mencapai 70,86 persen pada tahun 2020 dan juga penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK yang hanya mencapai 54,29 persen.

- Kapasitas aparaturnya dan sistem pengawasan yang masih rendah

Kapasitas aparaturnya dan sistem pengawasan yang masih rendah di Kabupaten Belitung Timur *perlu* ditingkatkan karena capaian tahun 2020 untuk kapabilitas APIP masih di level 2 atau level kapabilitas infrastruktur sedangkan maturitas SPIP juga di level 2 atau berkembang.

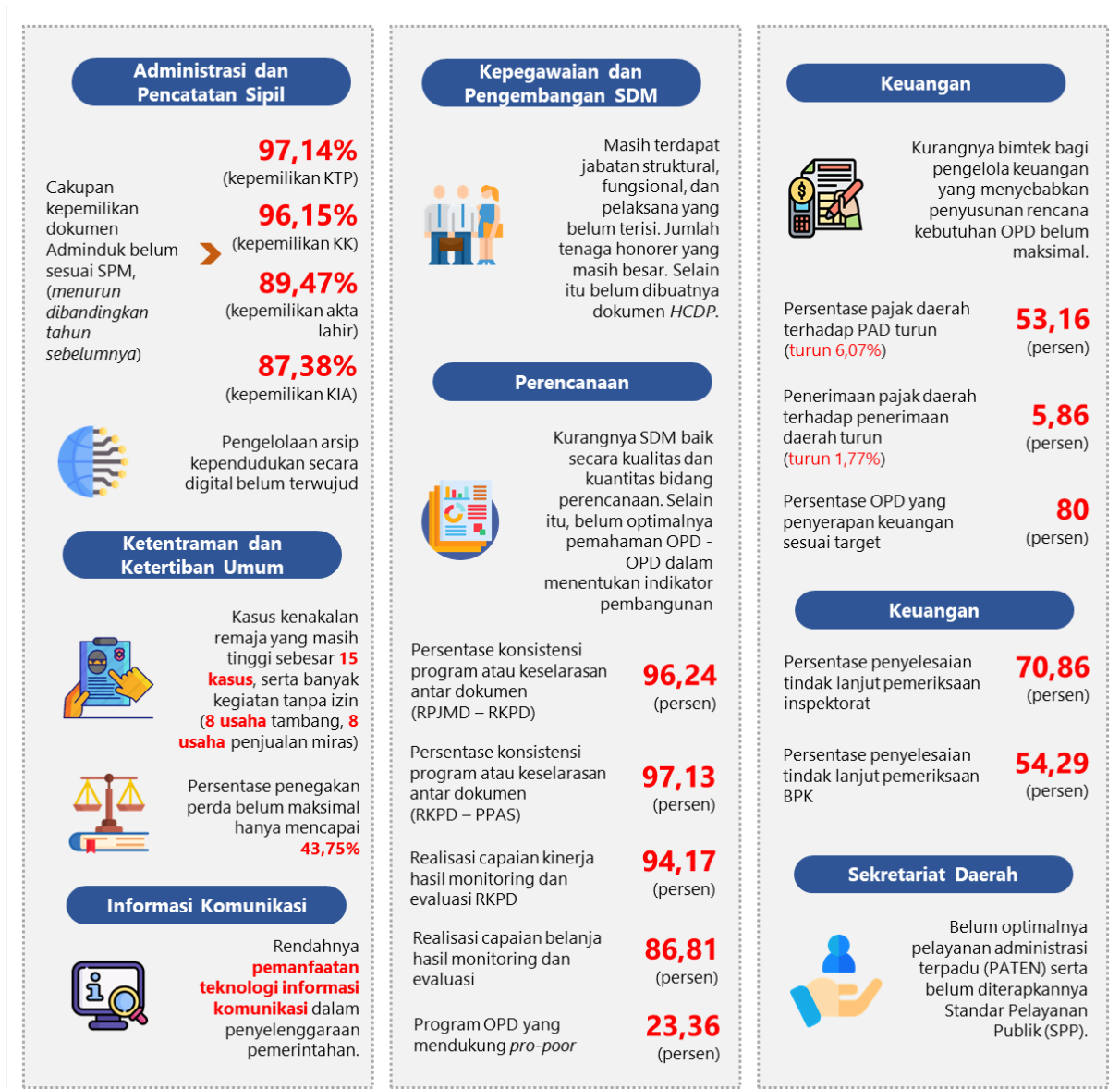
G. Urusan Sekretariat Daerah

Permasalahan pada urusan sekretariat daerah yaitu belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di masing – masing kecamatan. Selain itu, untuk pelayanan publik belum semua OPD menerapkan standar operasional yang telah ditetapkan sesuai standar pelayanan publik (SPP) dan melaksanakan evaluasi pelayanan publik dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala. Tindak lanjut yang terencana dari hasil survei kepuasan masyarakat juga belum dilakukan. Sedangkan beberapa penyelesaian gugatan kepada dan atau oleh pemerintah serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga belum optimal.

H. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum mengambil peran penting namun masih belum optimal dalam perwujudannya. Permasalahan utama yang perlu disorot adalah persentase penegakan perda yang hanya mencapai 43,75 persen pada tahun 2020.

Hal ini dibuktikan pada kondisi lapangan dimana masih menjamurnya tempat usaha ilegal dan juga penyalahgunaan izin usaha khususnya pada warung – warung kecil serta kenakalan remaja yang masih tinggi. Disisi lain rendahnya pemahaman terhadap konsep bela negara, pengendalian, dan pengawasan penyalahgunaan NAPZA; belum adanya peta kerawanan sosial; dan rendahnya tingkat kerjasama intelijen juga merupakan permasalahan yang berkontribusi bagi kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum.



Sumber : LKPJ Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 4.2 Rangkuman Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

4.1.2 Daya Saing dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Belum Optimal

Masalah pokok ini merupakan gabungan dari beberapa masalah terkait kualitas tenaga kerja dan wirausahawan, kinerja investasi daerah, aktivitas produksi sektor industri dan UMKM, serta kinerja perekonomian sektor unggulan khususnya pertanian, pariwisata dan perikanan seperti yang terangkum dalam **Tabel 4.1**. Permasalahan ini harus diatasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab dari peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Berbagai indikator serta *benchmark* dari beberapa sumber kajian baik tingkat global, nasional, LKPJ maupun KLHS digunakan dalam tahap ini untuk mengukur capaian serta merumuskan permasalahan di Kabupaten Belitung Timur. Dari indikator yang digunakan, berikut merupakan 31 akar masalah yang dikelompokkan menjadi sembilan poin berdasarkan urusan daerah:

A. Urusan Ketenagakerjaan

- Lapangan kerja yang belum memadai

Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan masih ditemukannya pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung Timur sebesar 3,93 persen. Pengangguran terbuka disebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, informasi bursa kerja yang relatif terbatas, serta kurangnya kemampuan atau kompetensi penduduk usia kerja.

- Tingkat pendidikan dan kualitas angkatan kerja lokal masih rendah

Rendahnya kualitas angkatan kerja di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Tahun 2020, lulusan sekolah dasar masih mendominasi latar belakang pendidikan tenaga kerja lokal sebesar 43,53 persen, sedangkan untuk SMA sebesar 26,48 persen, dan lulusan perguruan tinggi yaitu 9,08 persen. Pekerja lulusan sekolah dasar juga masih mendominasi di beberapa sektor lapangan kerja seperti pertanian (62,09 persen) dan industri pengolahan (41,48 persen).

- Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menurun

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja merupakan salah satu indikator TPB yang ditargetkan meningkat. Capaian di Kabupaten Belitung Timur justru menurun dimana tahun 2019 sebesar 9,55 persen sedangkan tahun 2020 menjadi 7,20 persen sehingga menjadi sebuah permasalahan karena indikator ini belum memenuhi target TPB.

B. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan terkait penanaman modal sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sistem penanaman modal oleh pemerintah daerah dimulai dari kurangnya kerjasama promosi, tidak adanya *feedback* nyata dari *event*

investasi, belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi investor, serta belum optimalnya fasilitasi koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan investor.

C. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Permasalahan dari urusan KUKM berkaitan dengan rendahnya upaya pengembangan skala usaha. Pada tahun 2016 – 2020, jumlah usaha skala menengah di Belitung Timur tidak mengalami kenaikan sama sekali atau stagnan pada jumlah 21 unit. Pada tahun 2020, perkembangan usaha kecil juga tidak signifikan, hanya bertambah 6 unit dari tahun 2019 menjadi 328 unit. Hal tersebut dipengaruhi oleh situasi pandemi *Covid – 19* yang menyebabkan perekonomian dan daya beli masyarakat menurun, sehingga usaha yang dilakukan pelaku UMKM lebih mengarah kepada strategi bertahan daripada berkembang. Selain itu belum optimalnya sarana pemasaran produk UMKM juga menjadi penyebab pengembangan usaha kecil dan menengah lokal belum optimal.

D. Urusan Pangan

- Ketergantungan pasokan pangan dari wilayah lain

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar 104.643 kg/tahun/1000 penduduk menjadi 100.910 kg/tahun/1000 pada tahun 2020. Penurunan tersebut juga diperparah dengan produksi beras lokal yang hanya memenuhi 16,64 persen dari total kebutuhan masyarakat dalam satu tahun. Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Belitung Timur masih bergantung dari wilayah lain terkait penyediaan pasokan pangan.

- Rendahnya kualitas pangan masyarakat

Rendahnya kualitas pangan masyarakat diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih jauh dari kata ideal. Berdasarkan data Susenas 2019, skor PPH Kabupaten Belitung Timur adalah 84,6, masih jauh dari target TPB yaitu 92,5. Semakin tinggi nilai skor PPH menunjukkan semakin beragam konsumsi pangan yang artinya semakin tinggi kualitas konsumsi yang juga berpengaruh pada pembangunan manusia.

- Instabilitas harga dan pasokan pangan

Masalah instabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Belitung Timur merupakan masalah yang kompleks dan dengan berbagai macam faktor penyebab. Beberapa alasan fluktuasi harga pangan adalah : (1) harga pangan mampu merespon secara cepat *shock* yang terjadi dalam perekonomian peningkatan permintaan; (2) harga pangan juga mampu merespon terhadap *non-economic shocks*, seperti : banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya yang menghambat jalur distribusi. Faktor belum optimalnya pemantauan harga

dan pasokan pangan dari pemerintah daerah juga ikut mempengaruhi terkait ketepatan kebijakan yang dikeluarkan.

E. Urusan Pertanian

Permasalahan utama dari pertanian adalah perubahan penggunaan lahan pertanian baik sawah maupun tegalan di Kabupaten Belitung Timur. Alih fungsi ini ikut berperan dalam menurunkan produktivitas usaha pertanian selain karena penerapan teknologi tepat guna oleh petani yang masih minim.

F. Urusan Perikanan

Permasalahan pada urusan perikanan adalah rendahnya akses permodalan dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya nelayan lokal yang masuk kategori nelayan kecil dengan kapal dibawah 5 GT serta lebih banyak kelompok pembudidaya perikanan yang tidak aktif dibandingkan kelompok aktif. Kurangnya permodalan ini juga berdampak menurunnya produksi perikanan tangkap sebesar 3.910 ton pada tahun 2020 serta minimnya nilai tambah industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal ini menyebabkan ketersediaan bahan untuk produk lokal seperti bakso dan tahu isi ikan berkurang dan kalah bersaing dengan produk wilayah lain.

G. Urusan Pariwisata

- Jumlah obyek wisata layak beserta kunjungannya mengalami penurunan

Terjadi penurunan pada jumlah obyek wisata yang layak dikunjungi di Kabupaten Belitung Timur dimana pada tahun 2019 berjumlah 43 obyek menjadi hanya 40 obyek di tahun 2020. Selain itu jumlah kunjungan wisata juga menurun drastis menjadi 70.420 di tahun 2020 yang sebelumnya mencapai 279.486 kunjungan. Beberapa penyebabnya selain larangan berwisata selama pandemi Covid – 19 adalah belum optimalnya penyediaan infrastruktur dan pengelolaan kawasan wisata.

- Jumlah devisa sektor pariwisata daerah menurun

Jumlah devisa sektor pariwisata merupakan indikator TPB yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2020 jumlah tersebut menurun dari Rp. 796.806.000 menjadi Rp 582.776.500 dikarenakan adanya pandemi Covid – 19. Meskipun demikian capaian ini tetap menjadi sebuah permasalahan Kabupaten Belitung Timur karena target dari TPB yang tidak terpenuhi.

- Kualitas pelaku jasa pariwisata yang masih rendah

Kualitas pelaku jasa pariwisata yang rendah dibuktikan dengan belum adanya pelaku jasa pariwisata lokal di Kabupaten Belitung Timur yang bersertifikasi pada tahun 2019 dan 2020. Selain itu, jumlah jasa usaha pariwisata juga mengalami penurunan drastis dari 520 penyedia jasa di tahun 2019 menjadi

hanya 166 pada tahun 2020. Hal ini menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat umum untuk memulihkan kondisi pariwisata lokal sebagai salah satu sektor prioritas bagi pengembangan ekonomi lokal.

H. Urusan Perdagangan

Permasalahan pada urusan perdagangan adalah keberadaan pasar di tiap wilayah yang belum merata. Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk maka kondisi ini tidaklah ideal ditambah jarak antar desa dengan pasar yang masih sangat jauh.

I. Urusan Perindustrian

Permasalahan urusan perindustrian adalah pertumbuhan industri yang menurun dari 10 persen pada tahun 2019 menjadi 6 persen di tahun 2020. Permasalahan terkait bahan baku industri terutama Industri Kecil Menengah (IKM) juga masih terjadi dimana sebagian besar belum dibudidayakan dan hanya memanfaatkan hasil hutan yang tersedia. Selain itu, permasalahan pemasaran juga masih dialami oleh IKM – IKM di Kabupaten Belitung Timur yang menyebabkan produk lokal seperti anyaman dan makanan ringan sulit untuk dipasarkan di luar daerah.



Sumber: LKPJ Kabupaten Belitong Timur, 2020

Gambar 4.3 Rangkuman Permasalahan Daya Saing dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Belum Optimal

4.1.3 Pelayanan dan Akses Infrastruktur Belum Merata

Masalah pokok ini merupakan gabungan dari dua masalah terkait belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas serta belum meratanya konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah seperti yang terangkum dalam **Tabel 4.1**. Permasalahan ini harus diatasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab dari penyediaan infrastruktur berkualitas dan juga pemerataan pelayanannya.

Berbagai indikator serta *benchmark* dari beberapa sumber kajian baik tingkat global, nasional, LKPJ maupun KLHS digunakan dalam tahap ini untuk mengukur capaian serta merumuskan permasalahan. Dari beberapa indikator yang digunakan, terdapat 14 akar

masalah yang dikelompokkan menjadi empat poin berdasarkan urusan daerah dengan detail sebagai berikut:

A. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Akses masyarakat terhadap air minum dan air bersih belum merata

Pada tahun 2020, masih terdapat 21,45 persen masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang belum terlayani oleh jaringan penyediaan air minum. Sedangkan, 12,33 persen masyarakat juga belum terlayani oleh penyediaan air bersih. Selain akses oleh masyarakat, kualitas air juga menjadi perhatian dimana kondisi air baku masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Akses masyarakat terhadap jaringan sanitasi belum merata

Pada tahun 2020, masih terdapat 6,64 persen masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang belum terlayani oleh jaringan sanitasi. Hal ini dikarenakan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) masih belum optimal sehingga perlu dibentuk unit pelaksana teknis khusus agar lebih terkoordinasi.

- Kondisi jalan yang kurang baik

Pada tahun 2020, masih terdapat 21,33 persen panjang jalan di Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi kurang baik atau terkategori rusak sedang – berat. Berdasarkan standar, 100 persen jalan wilayah harus dalam kondisi yang baik dan disertai dengan atribut pelengkap jalan seperti marka dan rambu – rambu lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kondisi jalan akan memudahkan aksesibilitas antar wilayah dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan penggunaannya.

- Akses masyarakat pengelolaan air limbah dan juga lumpur tinja

Pada tahun 2020, capaian dari indikator TPB yaitu pengelolaan air limbah dan juga lumpur tinja masih kecil dimana masing – masing 5 persen dan 0,73 persen. Meskipun telah memenuhi target TPB yaitu meningkat namun capaian kedua indikator masih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan keluarga yang ada.

B. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Ketersediaan rumah layak huni yang menurun

Pada tahun 2020, jumlah rumah yang terkategori layak huni di Kabupaten Belitung Timur sebesar 74,23 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 76,92 persen. Hal ini tentu harus diatasi untuk mencapai target dimana 100 persen rumah terkategori sebagai rumah layak huni.

- Masih ditemukannya kawasan kumuh perkotaan

Pada tahun 2020, luasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Belitung Timur masih sebesar 9,37 persen. Meskipun jumlahnya menurun drastis dari tahun sebelumnya yaitu 51,81 persen namun permasalahan ini tetap harus diselesaikan untuk mencapai target bebas permukiman kumuh (0 persen).

- Rendahnya pembiayaan bagi perumahan

Rendahnya pembiayaan perumahan di Kabupaten Belitung Timur diantaranya disebabkan oleh terbatasnya bantuan khususnya skema / pola bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, rendahnya daya beli atau *affordability* MBR pada sektor perumahan, baik yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni, terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR, dan terjadinya *mismatch* dalam pembiayaan perumahan akibat sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan.

C. Urusan Perhubungan

- Ruas jalan sesuai standar keselamatan masih rendah.

Ruas jalan di Kabupaten Belitung Timur yang memenuhi standar keselamatan masih rendah yaitu sekitar 18,15 persen di tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh belum terlengkapinya ruas – ruas jalan dengan perlengkapan jalan seperti marka, rambu – rambu, dan juga penerangan bagi jalan umum. Hal ini perlu diperhatikan karena penyediaan perlengkapan jalan juga bagian dari pengurangan angka kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan.

- Angkutan umum laik jalan masih rendah

Jumlah angkutan umum laik jalan di Kabupaten Belitung Timur masih sangat rendah yaitu sebesar 16,66 persen di tahun 2020. Capaian ini justru menurun drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 51,81 persen. Tingginya jumlah angkutan yang tidak laik jalan akan berpengaruh terhadap keoptimalan pelayanan angkutan wilayah yang juga masih menjadi permasalahan umum di berbagai daerah.

- Pemanfaatan pelabuhan yang belum optimal

Pelabuhan – pelabuhan seperti Pelabuhan ASDP Manggar, Pelabuhan Dendang, dan pelabuhan pengumpan lokal lainnya masih belum optimal pemanfaatannya. Hal ini juga berpengaruh terhadap terbatasnya jaringan transportasi antar pulau khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Desa Buku Limau, dan pulau lainnya.

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Belitung Timur adalah masih adanya beberapa daerah khususnya pulau – pulau kecil berpenghuni yang belum teraliri jaringan listrik yang memadai.

4.1.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang Belum Optimal

Masalah pokok ini merupakan gabungan dari dua masalah terkait masih rendahnya kinerja dan kualitas lingkungan hidup serta masih rendahnya sistem ketahanan wilayah terhadap bencana seperti yang terangkum dalam **Tabel 4.1**. Permasalahan ini harus diatasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan sehingga ketahanan bencana dapat terwujud dalam kurun lima tahun kedepan.

Berbagai indikator serta *benchmark* dari beberapa sumber kajian baik tingkat global, nasional, LKPJ maupun KLHS digunakan dalam tahap ini untuk mengukur capaian serta merumuskan permasalahan. Dari beberapa indikator yang digunakan, terdapat 11 akar masalah yang dikelompokkan menjadi dua poin berdasarkan urusan daerah dengan detail sebagai berikut:

A. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemanfaatan ruang yang belum optimal

Permasalahan pemanfaatan ruang mempunyai peran penting dalam membentuk kelompok permasalahan ini khususnya terkait dengan pemanfaatan lahan (alih fungsi) yang belum sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Disisi lain, berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahun 2020, persentase ketaatan tata ruang di Kabupaten Belitung Timur baru mencapai 77,44 persen. Capaian tersebut menandakan masih terdapat 23,56 persen kegiatan pembangunan yang belum menaati aturan terkait tata ruang. Hal ini wajib menjadi perhatian dimana setiap pembangunan fisik atau alih fungsi lahan yang dilakukan harus sejalan dengan tata ruang yang berlaku karena telah mempertimbangkan perlindungan kelestarian, kerawanan kebencanaan, dan sebagainya.

- Infrastruktur kebencanaan belum memadai

Beberapa infrastruktur kebencanaan masih belum memadai khususnya secara kuantitas di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data statistik, persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan daya rusak air baru mencapai 77,78 persen di tahun 2020. Pada tahun yang sama penanggulangan kawasan rawan abrasi dan rawan gelombang pasang pada beberapa titik juga baru mencapai 33,33 persen.

B. Urusan Lingkungan Hidup

- Penurunan kualitas air

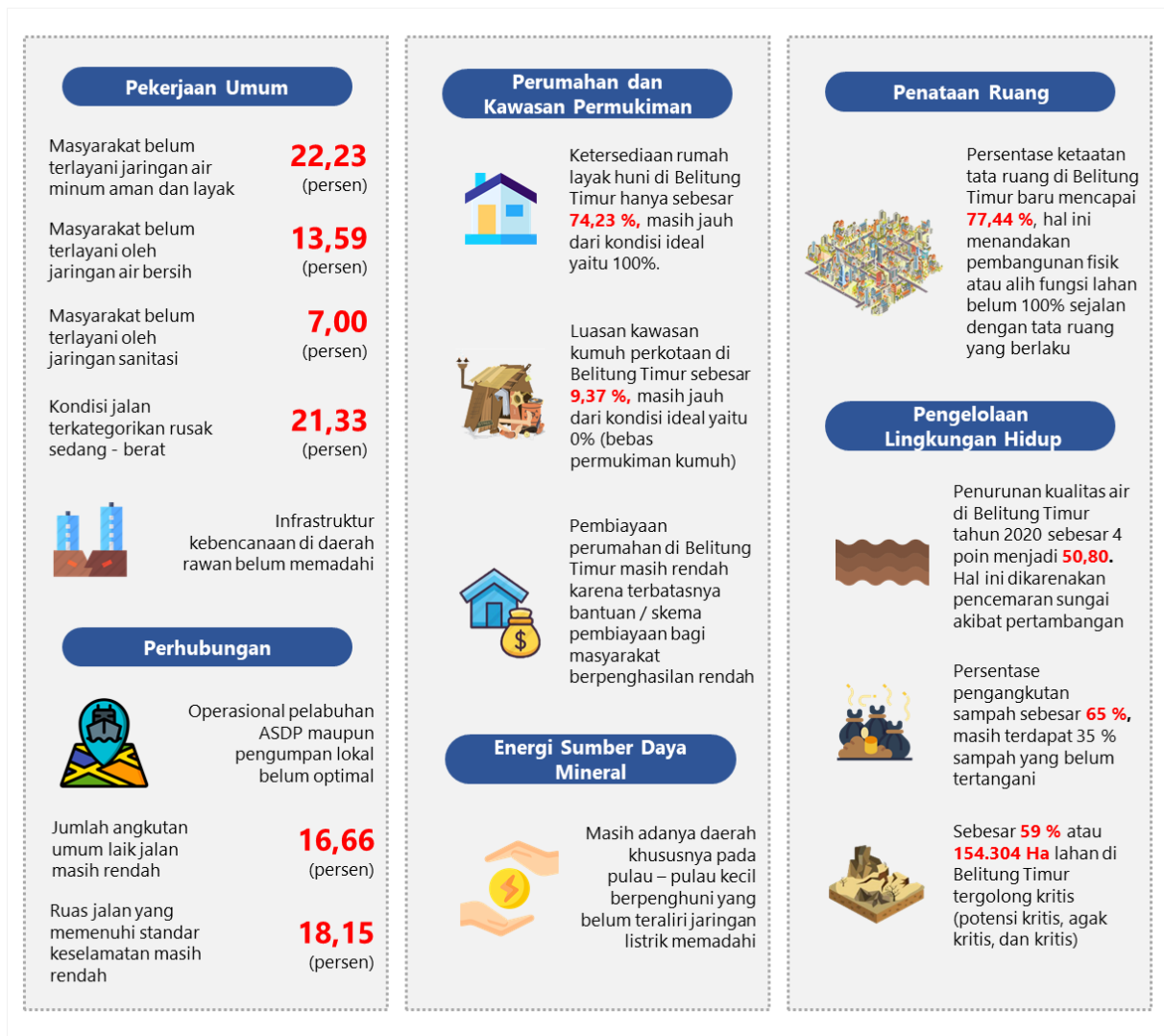
Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan 4 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu 54,50 menjadi 50,83. Penurunan kualitas air disebabkan oleh aktivitas yang mengabaikan kelestarian lingkungan seperti maraknya kegiatan penambangan di Daerah Aliran Sungai sehingga degradasi lingkungan sungai tidak bisa dihindarkan. Disisi lain, kegiatan persampahan masyarakat juga ikut mempengaruhi dimana masih terdapat 35 persen sampah yang belum tertangani oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat cenderung membuangnya ke sungai.

- Pengelolaan lahan kritis yang belum optimal

Ketidakoptimalan pengelolaan lahan kritis dapat dilihat dari luasnya lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur. Dari 260.476 Ha total luas lahan, jumlah lahan tidak kritis hanya seluas 106.771 Ha atau 41 persen saja sedangkan sisanya tergolong lahan kritis. Untuk kategori lahan potensi kritis seluas 89.947 Ha (34,5 persen), kategori agak kritis 59.569 Ha (22,8 persen) dan kategori kritis seluas 4.189 Ha (1,6 persen), sedangkan tidak ditemukan lahan dengan kategori sangat kritis di Kabupaten Belitung Timur.

- Ketaatan terhadap aturan lingkungan hidup menurun

Ketaatan penanggung jawab usaha terhadap aturan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, persentase ketaatannya hanya mencapai 68 persen atau menurun 20 persen dari capaian 2019 sebesar 88 persen. Disisi lain, tingkat ketaatan pada tahun 2018 juga lebih besar yaitu 90 persen. Penurunan ini menjadi peringatan penting yang harus ditindaklanjuti mengingat kelestarian lingkungan hidup sudah mulai diabaikan demi berlangsungnya kegiatan perekonomian semata.



Sumber: LKPJ Kabupaten Belitong Timur, 2020

Gambar 4.4 Rangkuman Permasalahan Pelayanan dan Akses Infrastruktur Belum Merata

4.1.5 Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat yang Belum Optimal

Masalah pokok ini merupakan gabungan dari beberapa masalah terkait kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemiskinan penduduk, perlindungan dan jaminan sosial, serta pembangunan berbasis keadilan dan gender seperti yang terangkum dalam **Tabel 4.1**. Permasalahan ini harus diatasi pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab akan pembangunan sumber daya manusia dan juga keberhasilan pemberdayaan masyarakat lokal dalam kurun lima tahun kedepan.

Berbagai indikator serta *benchmark* dari beberapa sumber kajian baik tingkat global, nasional, LKPJ maupun KLHS digunakan dalam tahap ini untuk mengukur capaian serta merumuskan permasalahan di Kabupaten Belitong Timur. Dari beberapa indikator yang digunakan, terdapat 28 akar masalah yang dikelompokkan menjadi sembilan poin berdasarkan urusan daerah dengan detail sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan

- Rata – rata lama sekolah belum mencapai standar wajib belajar

Angka rata-rata lama sekolah bagi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 sebesar 8,22 tahun. Hal tersebut diartikan bahwa secara rata-rata penduduk Belitung Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,22 tahun atau setara SMP kelas VIII. Meskipun capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 8,15 tahun namun tetap belum memenuhi capaian minimal lama bersekolah yaitu 12 tahun meliputi jenjang SD – SMP – SMA seperti yang dipersyaratkan dalam program Wajib Belajar 12 tahun.

- Belum adanya PAUD yang menerapkan konsep *holistik integratif*

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 mengamanatkan agar pengembangan anak usia dini hendaknya dilakukan secara *holistik integratif*. Konsep *holistik integratif* diartikan sebagai penanganan menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini. Jumlah PAUD di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 92 lembaga pada tahun 2020 namun belum ada satuan yang menerapkan konsep tersebut.

- Standar mutu pendidikan yang belum merata

Pada tahun 2019, institusi pendidikan dengan jenjang SD dan SMP yang sudah berakreditasi A hanya berjumlah 29 sekolah, sementara yang berakreditasi B masih berjumlah 101 sekolah. Untuk pendidikan PAUD, masih terdapat lembaga terakreditasi C bahkan belum terakreditasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kualitas tenaga pendidik, tidak lengkapnya administrasi satuan pendidikan, kondisi ruang kelas yang rusak ringan sampai dengan rusak berat, kurangnya kelengkapan sarana – prasarana, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat didalam pengelolaan sekolah.

- Masih adanya anak putus dan tidak melanjutkan sekolah

Pada tahun 2020, masih ditemukan anak putus sekolah di Kabupaten Belitung Timur pada jenjang pendidikan SD sebanyak 40 siswa atau 0,01 persen sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP sebesar 108 siswa atau 1,26 persen. Masih di tahun yang sama, angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs hanya mencapai 93,54 persen dan melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK sebesar 99 persen. Sebagian besar keputusan tersebut diambil bukan karena ketiadaan biaya sekolah, namun beberapa anak lebih memilih mengikuti orang tua bekerja di tambang maupun kebun sawit dengan upah yang menggiurkan.

- Mutu tenaga pendidikan dasar belum mencapai standar minimal

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan DIV / S1 pada tahun 2020 baru mencapai 85,83 persen. Peningkatan kualitas menjadi hal yang wajib dilakukan untuk memenuhi capaian standar yaitu 100 persen atau keseluruhan guru yang mengajar memiliki kualifikasi pendidikan DIV / S1. Disisi lain, guru yang memiliki sertifikat pendidik hanya sebesar 68,8 persen di tahun yang sama. Jumlah ini juga masih jauh dari standar serta memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah.

- Belum meratanya kesempatan pendidikan bagi anak inklusif

Sampai tahun 2020, Kabupaten Belitung Timur belum memiliki ruang belajar, sarana penunjang, maupun guru pembimbing yang dikhususkan atau diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus (inklusif) di sekolah penyelenggara inklusi. Hal ini menjadi permasalahan dimana kesetaraan belum tercapai bagi anak inklusif untuk mendapatkan pelayanan pendidikan maupun kemudahan lewat penyediaan prasarana penunjang.

B. Urusan Kesehatan

- Upaya perwujudan predikat “Kabupaten Sehat” belum optimal

Sampai tahun 2020, predikat Kabupaten Sehat belum juga dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur dari hasil penilaian yang dilakukan setiap dua tahun sekali. Hal ini membutuhkan koordinasi yang lebih optimal antar OPD dan juga kerjasama dengan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran khususnya dalam bidang kesehatan.

- Beberapa kinerja pelayanan kesehatan belum memenuhi standar

Untuk pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit kronis seperti TB, hipertensi, dan HIV belum memenuhi standar minimal yaitu 100,00 persen penderita penyakit terlayani. Pada tahun 2020, capaian Kabupaten Belitung Timur pada masing – masing pelayanan berturut – turut yaitu 85,96 persen, 85 persen dan juga 67,85 persen. Selain itu, cakupan persalinan dan nifas di fasilitas kesehatan juga belum mencapai target 100 persen, hanya sebesar 84,10 persen dan 82,96 persen pada tahun 2020.

- Rasio ketersediaan tenaga kesehatan belum memenuhi standar minimal

Hampir seluruh tenaga kesehatan jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya penduduk per 100.000 jiwa sehingga rasio yang dihasilkan jauh dibawah standar. Adapun rasio tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur yaitu dokter spesialis sebesar 4,87 (rasio minimal 11); dokter umum 32,24 (rasio minimal 45); bidan 103,81 (rasio minimal 120); dan dokter gigi 7,3 (rasio minimal 13). Selain itu, kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan belum memenuhi target TPB dimana belum meningkat dari angka 3 persen.

- Pelayanan Kesehatan Ibu – Anak (KIA) masih belum optimal

Belum optimalnya pelayanan KIA dibuktikan oleh beberapa catatan terkait angka kematian dan penyakit bayi yang masih tinggi di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini juga menjadi catatan sebagai kondisi yang belum terwujud berdasarkan TPB yang mensyaratkan penurunan kasus. Pada tahun 2019 angka kematian ibu masih mencapai 102 kasus, sedangkan kematian balita pada tahun 2020 sebesar 12 kasus, dan kematian neonatal sebesar 6 kasus. Pada tahun yang sama 2,4 persen bayi menderita *wasting* dan 7,6 persen bayi menderita *stunting*. Selain itu, imunisasi dasar lengkap anak umur 12 – 23 bulan juga baru mencapai 58 persen atau belum mencapai target TPB yaitu 63 persen.

- Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan kesehatan

Rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dibuktikan dengan belum semua desa mendapatkan status Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF) yaitu hanya sekitar 61 persen dari keseluruhan desa pada tahun 2020. Persentase desa yang menyelenggarakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) juga masih 0 persen. Selain itu, proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air juga masih kecil yaitu 5 persen sehingga belum mencapai target TPB. Hal ini menjadi permasalahan karena berpengaruh bagi kebersihan dan juga tingkat kesehatan masyarakat.

C. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Tingginya tingkat *unmet need* KB

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengendalian penduduk adalah tingginya angka kehamilan pada kelompok 4T (Terlalu Tua, Terlalu Muda, Terlalu Sering, dan Terlalu Banyak). Salah satu penyebabnya adalah masih terdapat 7,8 persen pasangan usia subur yang belum terlayani oleh KB atau *unmet need* pada tahun 2020. Hal ini perlu ditangani dengan segera karena berpotensi mempengaruhi munculnya permasalahan lain seperti kesulitan dalam mewujudkan proporsi penduduk suatu wilayah yang seimbang.

- Belum tercapainya target penggunaan alat kontrasepsi metode modern

Seperti yang diamanatkan dalam TPB maka target proporsi perempuan usia reproduksi (15 – 49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern adalah 66 persen. Di Kabupaten Belitung Timur target tersebut belum terwujud dengan capaiannya yang masih 0 persen.

D. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Upaya perwujudan predikat “Kabupaten Layak Anak” belum optimal
Sampai tahun 2020, predikat Kabupaten Layak Anak belum dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur sehingga masih membutuhkan koordinasi yang lebih optimal antar OPD dan juga kerjasama dari masyarakat khususnya bidang perlindungan anak.
- Capaian IPG masih dibawah rata – rata provinsi
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur sebesar 86,37 atau 3 terbawah diantara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rata – rata provinsi sebesar 88,8. Selain itu jumlah kebijakan responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Kabupaten Belitung Timur juga hanya 1 kebijakan sehingga belum mencapai target TPB sebanyak 16 kebijakan.
- Pengentasan kemiskinan perempuan belum maksimal
Kemiskinan pada perempuan masih ditemukan di Kabupaten Belitung Timur terutama bagi perempuan yang juga berperan sebagai kepala keluarga. Sebanyak 1.231 kepala keluarga perempuan masih masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Pengurangan jumlah kasus KDRT belum maksimal
Pada tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur masih ditemukan kasus KDRT sebesar 9 kasus dimana meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 2 kasus. Peningkatan ini menjadi sebuah peringatan bagi kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam upaya menuju 0 kasus KDRT.
- Masih rendahnya kreativitas, kemampuan dan keterampilan bagi perempuan
Rendahnya kreativitas, kemampuan, dan keterampilan bagi perempuan ditandai dengan masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan juga swasta dimana pada tahun 2020 masing – masing sebesar 45,37 persen dan 54,63 persen. Jumlah tersebut cenderung menurun khususnya partisipasi di lembaga swasta karena adanya PHK dan perumahan pegawai disaat pandemi Covid-19. Permasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesempatan perempuan bagi pengembangan diri.

E. Urusan Sosial

- Angka kemiskinan daerah masih diatas rata – rata provinsi
Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 masih tinggi, yaitu sebesar 6,6 persen. Angka ini dibawah rerata nasional namun masih diatas rerata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,62 persen. Selain itu, proporsi sumber daya yang dialokasikan pemerintah untuk program

pemberantasan kemiskinan justru menurun dari 29 persen menjadi 19 persen di tahun 2020, sedangkan berdasarkan TPB ditargetkan meningkat. Capaian ini menandakan belum maksimalnya pendekatan *pro – poor* dalam perumusan kebijakan dan perlunya peningkatan sinergitas pengentasan kemiskinan.

- Pemanfaatan DTKS yang belum optimal

Belum optimalnya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terjadi pada penyelenggaraan program pembagian bantuan. Hal ini dapat dilihat dari persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencapai 100 persen atau hanya sebesar 96,58 persen. Disamping itu, masih banyak bantuan yang salah sasaran karena kurangnya pemahaman dan kesadaran OPD dalam penggunaan DTKS sebagai data dasar penanggulangan kemiskinan.

- Penyediaan sarana – prasarana kebencanaan belum memadai

Pelayanan terkait kebencanaan masih belum optimal di Kabupaten Belitung Timur, ditandai dengan pendidikan dan pelatihan SDM tanggap bencana yang masih kurang serta kurangnya anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana – prasarana tanggap bencana. Hal ini menyebabkan ketersediaan sarana – prasarana (72,96 persen) dan logistik – obat (66,53 persen) di kawasan rawan bencana belum mencapai 100 persen pada tahun 2020 dan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

- Kurangnya pemahaman aparat terhadap penanggulangan kebencanaan

Kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan. Hal ini terlihat dimana pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membentuk budaya sadar bencana dan ketahanan masih belum maksimal. Standar operasional penanggulangan bencana belum ditetapkan serta kapasitas sistem informasi kebencanaan belum mencapai kinerja yang maksimal.

F. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan terkait kepemudaan di Kabupaten Belitung Timur antara lain partisipasi pemuda pelopor masih rendah. Capaian tahun 2020 hanya sebesar 53,57 persen atau menurun drastis dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 78,04 persen. Kondisi tersebut dikarenakan belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda. Selain itu, persentase kewirausahaan muda mandiri juga masih fluktuatif dimana pada tahun 2019 berhasil naik 24 persen dan turun 20 persen pada tahun setelahnya menjadi 44,88 persen.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

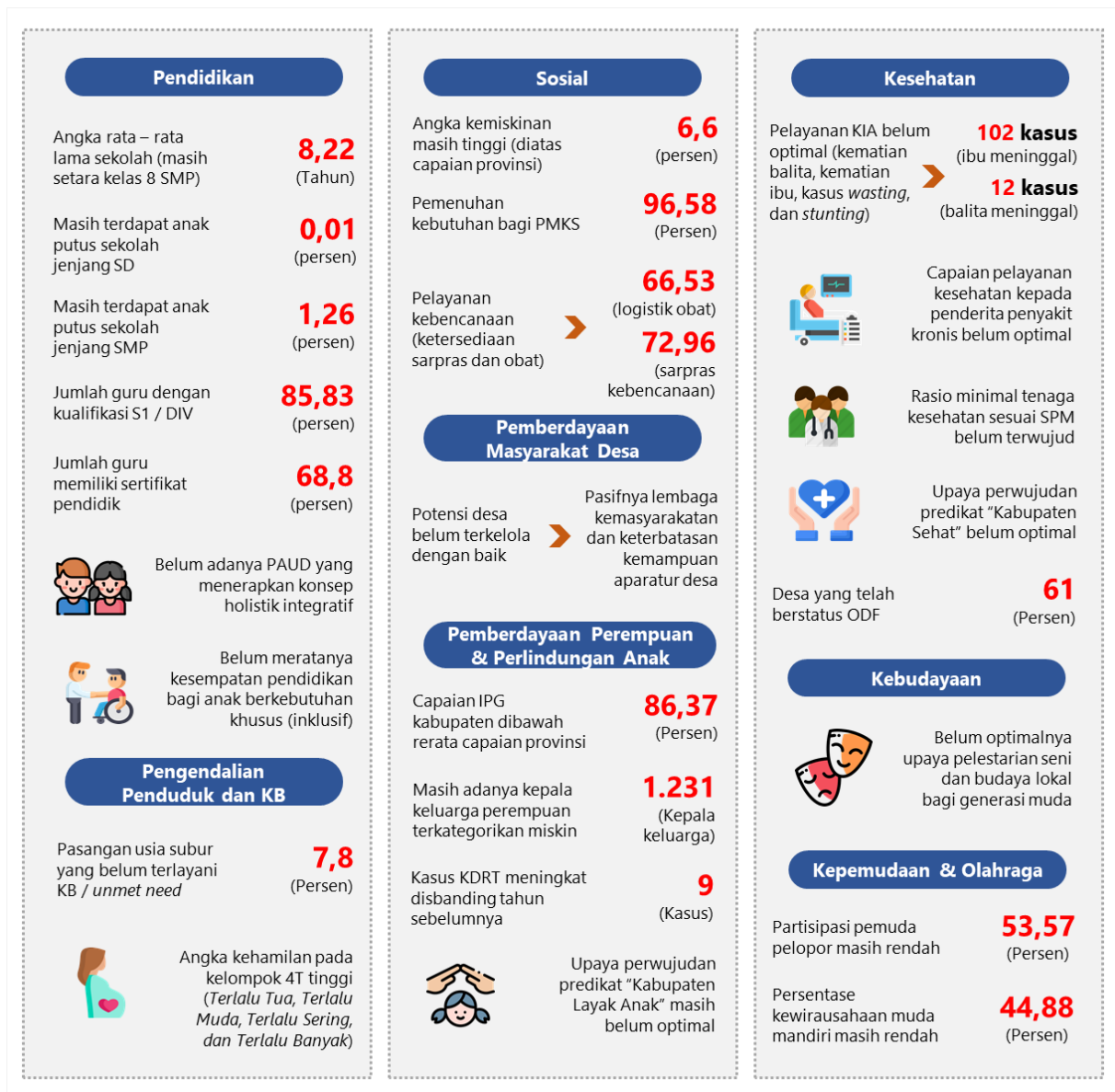
Permasalahan pada pemberdayaan masyarakat desa umumnya disebabkan oleh keterbatasan aparatur desa di Kabupaten Belitung Timur dalam melakukan perencanaan dan pembangunan sehingga potensi desa belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Keterbatasan tersebut menyebabkan pasifnya lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, dan juga Bumdes sehingga kemandirian masyarakat desa sulit terbentuk. Permasalahan ini juga terlihat dari capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang cenderung stagnan dari tahun 2016 – 2020.

H. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pada urusan perpustakaan berkaitan dengan minat baca masyarakat yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya tingkat pembinaan, promosi, dan publikasi berkaitan dengan budaya membaca serta ketersediaan perpustakaan yang praktis belum tersedia di setiap wilayah. Perpustakaan – perpustakaan yang ada di Kabupaten Belitung Timur juga belum seluruhnya dilengkapi dengan sistem digitalisasi dan fasilitas layanan standar yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Pada tahun 2020, jumlah perpustakaan pada tingkat kecamatan hanya 3 unit dari 7 kecamatan yang ada serta 21 perpustakaan desa dari keseluruhan 39 desa.

I. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pada urusan kebudayaan antara lain belum adanya gedung kesenian dan juga perda tentang pelestarian cagar budaya di Kabupaten Belitung Timur. Kedua hal tersebut perlu diakomodasi karena sama – sama bertujuan untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah baik fisik maupun non fisik. Selain itu, kurangnya edukasi kepada generasi muda, kurangnya kajian atau literatur, dan tergerusnya budaya lokal menjadi sebuah permasalahan umum yang dihadapi dan harus dicarikan solusinya untuk menghindari kepunahan warisan seni dan budaya lokal.



Sumber: LKPJ Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 4.5 Rangkuman Permasalahan Kualitas SDM dan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat yang Belum Optimal

Tabel 4.1 Keterkaitan dan Detail Permasalahan Kabupaten Belitung Timur

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 - Konsistensi antara RPJMD dengan RKPD belum mencapai 100% - Konsistensi antara RKPD dengan KUA-PPAS belum mencapai 100% - Keselarasan program antara Renja dan Renstra belum mencapai 100%	1 Belum terwujudnya integrasi antara kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pembangunan daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BELUM OPTIMAL	MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGAR AAN KETATAPEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN YANG BAIK	1 Mendorong integrasi penelitian dan pengembangan dengan proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
2 Rata - rata capaian program terhadap RKPD menurun				2 Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan	
3 - Persentase pajak daerah terhadap PAD menurun - Persentase pajak daerah terhadap penerimaan daerah menurun - Persentase sumber pajak daerah yang didata menurun - Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB belum memenuhi target TPB	2 Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah			2 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	3 Meningkatkan pendapatan asli daerah
4 - Persentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target menurun - Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU belum memenuhi target TPB - Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam KPBU belum memenuhi target TPB					4 Meningkatkan efektivitas pembiayaan daerah
3 Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan inspektorat belum mencapai 100%					3 Belum optimalnya pengawasan dalam

AKAR MASALAH		MASALAH	MASALAH POKOK	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5	- Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK belum mencapai 100% - Kapasitas aparatur dan sistem pengawasan yang belum optimal	penyelenggaraan pemerintahan daerah			pemerintahan daerah	
6	- Pelayanan PATEN di masing - masing kecamatan belum optimal - Penerapan standar operasional pelayanan sesuai SPP pada OPD belum mencapai 100% - OPD yang melaksanakan evaluasi melalui pengukuran IKM secara berkala belum mencapai 100% - Beberapa kinerja pelayanan publik belum mencapai 100% sesuai SPM	4 Belum terwujudnya pelayanan publik yang prima			4 Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan berdasarkan standar pelayanan publik	6 Menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan proses bisnis yang efektif dan efisien
7	- Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah - Keterbatasan infrastruktur bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi pembangunan daerah	5 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan			5 Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	7 Mengembangkan sistem pelayanan elektronik yang terintegrasi
8	- Jumlah tenaga honorer masih besar - Beban tugas dan fungsi yang tidak berimbang antarOPD	6 Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan			6 Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	8 Penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan
9	- Belum adanya sistem untuk mengukur kinerja aparatur - Belum adanya dokumen <i>Human Capital Development Plan</i> (HCDP)	7 Belum meratanya tingkat integritas dan profesionalitas aparatur			7 Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur	9 Melaksanakan <i>assessment center</i> dan penilaian berbasis kinerja setiap aparatur
1	Lulusan sekolah dasar mendominasi latar belakang pendidikan tenaga kerja	1 Masih kurangnya kompetensi bagi tenaga kerja lokal			1 Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	1 Mengoptimalkan layanan pembinaan tenaga kerja

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
- Masih adanya sengketa pengusaha pekerja - Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja belum memenuhi target TPB - Rasio penduduk yang bekerja menurun		DAYA SAING DAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI YANG BELUM OPTIMAL	PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRSAUSAHAWA N DAERAH YANG MANDIRI DAN UNTUK PERLUASAN KESEMPATAN KERJA		
2 - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan belum memenuhi target TPB - Tingkat partisipasi angkatan kerja menurun					2 Meningkatkan jaringan tenaga kerja
3 Persentase wirausaha muda mengalami penurunan	2 Masih kurangnya kompetensi bagi wirausaha lokal			2 Meningkatkan keterampilan wirausaha masyarakat	3 Mengoptimalkan layanan pembinaan kewirausahaan
4 - Pemberian insentif dan kemudahan bagi investor belum optimal - Fasilitasi koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan investor atau pengusaha besar belum optimal	3 Belum optimalnya kinerja investasi daerah			3 Meningkatkan kemudahan berinvestasi	4 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan pro investasi
5 - Pertumbuhan industri mengalami penurunan - Bahan baku untuk beberapa industri belum dibudidayakan - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur belum sesuai target TPB - Kesulitan pemasaran bagi hasil industri kriya dan kuliner	4 Belum optimalnya aktivitas produksi sektor industri			4 Mengembangkan sektor industri	5 Mengembangkan kawasan industri
6 Akses permodalan bagi nelayan rendah sehingga produksi perikanan tangkap menurun.	5 Masih rendahnya kualitas dan kapasitas produk			5 Meningkatkan kualitas dan kapasitas produk	6 Meningkatkan produktivitas perikanan

AKAR MASALAH		MASALAH	MASALAH POKOK	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
7	- Jumlah kelompok pembudidaya perikanan yang tidak aktif lebih banyak dibandingkan kelompok aktif - Ketidakcukupan stok bahan baku untuk industri pengolahan perikanan	pertanian dan perikanan			pertanian dan perikanan	
	- Alih fungsi lahan pertanian yang menurunkan produktivitas pertanian - Penerapan teknologi tepat guna oleh petani masih minim					7 Meningkatkan produktivitas pertanian
	- Ketersediaan pangan utama menurun - Kualitas konsumsi pangan dari PHP belum mencapai target TPB					8 Meningkatkan ketahanan pangan
9	- Jumlah jasa usaha pariwisata mengalami penurunan - Jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan - Jumlah devisa sektor pariwisata belum memenuhi target TPB - Belum adanya pelaku jasa pariwisata lokal yang bersertifikat - Rata - rata lama menginap stagnan	6	Masih rendahnya daya saing pariwisata lokal		6 Meningkatkan daya saing pariwisata	9 Meningkatkan pengelolaan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif
	- Belum tersedianya gedung kesenian lokal - Belum ditetapkan perda tentang pelestarian cagar budaya					10 Mengembangkan budaya lokal
11	- Produk unggulan daerah masih kalah bersaing dengan produk daerah lain - Jumlah usaha mikro berizin usaha masih sangat kecil	7	Masih rendahnya kualitas produk unggulan daerah		7 Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah	11 Meningkatkan penjaminan mutu produk unggulan daerah

AKAR MASALAH		MASALAH	MASALAH POKOK	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
12	- Persentase usaha mikro yang naik kelas menurun - Pemasaran produk UMKM belum optimalnya					12 Meningkatkan produktivitas UMKM
1	- Akses sanitasi oleh masyarakat belum mencapai 100% - Akses air bersih oleh masyarakat belum mencapai 100% - Akses air minum oleh masyarakat belum mencapai 100% - Kawasan strategis belum 100% memiliki infrastruktur baik - Rumah terkategori layak huni belum mencapai 100% - Luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan belum mencapai 0% - Peraturan tata ruang belum 100% ditaati - Proporsi layanan sistem pengelolaan air limbah terpusat belum sesuai target TPB - Proporsi layanan sistem pengelolaan lumpur tinja belum sesuai target TPB - Internalisasi RPDAST ke dalam RTRW belum sesuai target TPB - Jalan kabupaten belum 100% dalam kondisi baik	1 Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas	PELAYANAN DAN AKSES INFRASTRUKTUR BELUM MERATA	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI SINERGITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	1 Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas	1 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
2	- Angkutan umum laik jalan masih rendah - Persentase layanan angkutan darat menurun - Pemanfaatan pelabuhan belum optimal	2 Belum meratanya konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah			2 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	2 Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Pemanfaatan pelabuhan belum optimal					
3 - Capaian Indeks Kualitas Air menurun - Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan belum memenuhi target TPB - Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan belum memenuhi target TPB					3 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
4 - Penanganan sampah wilayah belum mencapai 100% - Penyediaan data dan informasi pengelolaan LH belum mencapai 100% - Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati belum memenuhi target TPB - Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap aturan LH menurun	3 Masih rendahnya kinerja dan kualitas lingkungan hidup	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA YANG BELUM OPTIMAL		3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4 Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
5 - Kawasan rawan belum 100% tertanggulangi - Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan belum memenuhi target TPB - Indeks Risiko Bencana Indonesia belum memenuhi target TPB - Kurangnya pemahaman masyarakat akan penanggulangan bencana	4 Masih rendahnya sistem ketahanan wilayah terhadap bencana			4 Meningkatkan ketahanan terhadap bencana	5 Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6 - Belum adanya PAUD yang menerapkan konsep holistik integratif - Standar mutu pendidikan berdasarkan akreditasi belum merata	5 Belum maksimalnya capaian kinerja pelayanan pendidikan			5 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	6 Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan

AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sarana - prasarana pendidikan bagi siswa inklusif belum merata	Belum maksimalnya capaian kinerja pelayanan kesehatan	YANG BELUM OPTIMAL		Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	
7 - Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DIV belum mencapai 100% - Rasio jumlah guru terhadap peserta didik jenjang SD/MI belum memenuhi standar minimal - Rasio jumlah guru terhadap peserta didik jenjang SMP/MTs belum memenuhi standar minimal					7 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pendidikan
8 - Penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN belum mencapai 100% - Masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar belum 100% - Warga berusia 60 tahun yang mendapatkan screening kesehatan belum 100% - Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan belum 100% - Prevalensi tekanan darah tinggi belum mencapai target TPB - Prevalensi penurunan stunting balita belum mencapai target TPB - Target Imunisasi belum mencapai target TPB					8 Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
9 - Obat dan vaksin yang tersedia di puskesmas belum 100% - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan belum mencapai target TPB - Rasio ketersediaan tenaga kesehatan belum memenuhi standar minimal					9 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan

AKAR MASALAH		MASALAH	MASALAH POKOK	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
10	Masih rendahnya persentase program - OPD yang mendukung pro-poor dan pro-job Alokasi anggaran OPD yang mendukung program pengentasan kemiskinan belum mencapai 100% - Angka kemiskinan daerah masih diatas rata - rata provinsi	7	Masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk		7	Menurunkan tingkat kemiskinan	10	Mengoptimalkan sinergitas kebijakan penurunan kemiskinan
11	- Penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN belum mencapai 100% PMKS yang memperoleh bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar belum mencapai 100% - Pemanfaatan DTKS sebagai data dasar penanggulangan bencana belum optimal	8	Belum meratanya perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk		8	Meningkatkan pemerataan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk	11	Menguatkan sistem kelembagaan perlindungan sosial
12	Upaya perwujudan predikat "Kabupaten Layak Anak" belum optimal Capaian indeks pembangunan gender dibawah rata - rata provinsi - Masih ditemukan kasus KDRT	9	Belum terlaksananya pembangunan berbasis keadilan dan kesetaraan gender		9	Melaksanakan pembangunan berbasis keadilan dan kesetaraan gender	12	Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak
13	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan belum memenuhi target TPB Pengentasan kemiskinan pada perempuan belum maksimal Masih rendahnya kreativitas, kemampuan, dan keterampilan bagi perempuan						13	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis gender

Sumber: LKPJ dan KLHS Kabupaten Belitung Timur (data diolah), 2020

4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa mendatang. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Seperti pada **Gambar 4.1** dan **Tabel 4.1**, penentuan isu – isu strategis berkaitan erat dengan kelompok masalah pokok yang muncul dan bersifat makro bagi Kabupaten Belitung Timur. Masalah pokok ini akan dikombinasikan dengan isu nasional, regional kawasan, maupun internasional sehingga isu strategis daerah dapat terbentuk. Komponen tersebut seringkali terlupakan karena pengaruhnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat di wilayah terkait. Namun untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan maka isu strategis Kabupaten Belitung Timur tetap mempertimbangkan beberapa isu internasional dan nasional terkini dengan detail sebagai berikut:

4.2.1 Isu Strategis Global dan Regional

Banyaknya isu strategis pada lingkup global dan regional menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi kesehatan, teknologi komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi di baik Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi daerah tak terkecuali Kabupaten Belitung Timur. Beberapa isu global apabila direspon dengan baik akan menjadi faktor pendukung bagi percepatan pembangunan, namun sebaliknya, akan menjadi faktor penghambat apabila pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya gagal menemukan strategi untuk merespon isu tersebut. Berikut merupakan isu – isu strategis pada lingkup global dan regional yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah antara lain:

A. Upaya Pemulihan Sistem Kesehatan

Seperti yang kita ketahui, virus *Covid – 19* awalnya menyerang masyarakat di wilayah Wuhan, Tiongkok dan menyebar menjadi pandemi global. Sistem kesehatan beberapa negara pun kewalahan dalam menghadapi virus baru yang menyebar dengan cepat dan berisiko tinggi ini, khususnya di awal tahun 2020. Sampai awal tahun 2021, jumlah kasus infeksi dunia mencapai 168 juta penduduk dan 3,49 juta diantaranya meninggal dunia. Kasus tertinggi dicatat oleh negara – negara padat penduduk baik negara maju maupun negara berkembang seperti Amerika, India, Brazil, Perancis, dan Turki.

Selama satu tahun terakhir sistem kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak. Banyak tenaga kesehatan yang terpapar dan meninggal, keterisian tempat tidur atau *Bed Occupancy Ratio* (BOR) rumah sakit yang meningkat, kurangnya sarana – prasarana kesehatan seperti masker, ventilator, dan alat pelindung diri menjadi permasalahan baru yang muncul di beberapa negara disaat pandemi berlangsung. Sistem kesehatan global yang mulai melemah dapat membahayakan kondisi masyarakat apabila tidak direspon lewat penguatan atau

pemulihan yang jitu dan tepat sasaran. Meskipun kondisi ini diprediksi terus berlangsung namun kerjasama – kerjasama internasional dalam penyediaan serta pemulihan sistem kesehatan sudah mulai dilaksanakan.

Hampir satu tahun pandemi terjadi, beberapa upaya kesehatan dilakukan oleh seluruh negara untuk menekan kasus infeksi salah satunya adalah program vaksinasi. Beberapa negara mulai berlomba dan berkolaborasi untuk mengembangkan vaksin seperti Amerika – Jerman dengan *Pfizer*, Inggris dengan *AstraZeneca*, Tiongkok dan beberapa negara yang juga mengembangkan *Sinovac*, serta produk – produk lainnya. Keberhasilan program vaksinasi dari segi kecepatan dan efektivitas diyakini menjadi kunci pulihnya sistem kesehatan dunia dan sektor lain yang terdampak seperti pariwisata dan transportasi.

Dilihat dari perkembangannya, berakhirnya fenomena pandemi masih belum dapat dipastikan. Banyak negara – negara dunia yang terancam mengalami gelombang kedua dari pandemi *Covid – 19* dilihat dari kenaikan kasus harian. Berlangsungnya pemanasan global juga diyakini akan mempengaruhi kemunculan jenis – jenis penyakit baru dan risiko meningkatnya pandemi. Oleh karena itu, isu pemulihan sistem kesehatan menjadi sangat penting untuk direspon sebagai langkah awal percepatan pemulihan beberapa sektor dasar dan juga untuk menghadapi risiko pandemi yang mungkin terjadi lagi di masa mendatang.

B. Pemulihan Ekonomi Global

Upaya pemulihan ekonomi menjadi isu global setelah berlangsungnya pandemi *Covid – 19* yang menyebabkan kontraksi perekonomian hampir di seluruh negara. Berdasarkan laporan dari *International Monetary Fund* (IMF), beberapa negara sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020 seperti Perancis (-9,0 persen), Italia (-9,2 persen), Inggris (-10,0 persen), Singapura (-6,6 persen), India (-4,5 persen), dan lain sebagainya. Krisis fiskal menjadi permasalahan yang kemudian muncul disaat negara hanya memiliki ruang kebijakan yang terbatas seperti pada beberapa negara berkembang.

Data World Bank menjelaskan bahwa selama tahun 2020 perdagangan dunia turun 13–32 persen, perjalanan internasional turun sampai 52 persen, dan pertumbuhan ekonomi dunia senilai -5,2 persen. Apabila kontraksi ini terus terjadi, selama dua tahun kedepan dunia diprediksi kehilangan output ekonomi senilai US\$ 12 triliun. Kondisi ini ikut diperparah dengan 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan 420–580 juta orang menjadi miskin pada waktu yang sama.

Oleh karena itu, penanganan permasalahan di sektor kesehatan menjadi langkah awal yang difokuskan pada beberapa negara untuk memulihkan perekonomiannya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh keberhasilan program vaksinasi dan distribusinya secara universal. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi dan pemberian insentif untuk alokasi sumber daya yang efisien

sebagai upaya pemulihan jangka menengah. Sementara itu, untuk jangka panjang perlu difokuskan pada penguatan kerja sama internasional, reformasi kerangka kebijakan, serta penanganan terhadap perubahan iklim.

Perlu digarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi global sangat bergantung pada beberapa hal antara lain perkembangan kasus *Covid-19* harian; ketidakmerataan akses vaksin; kecepatan pemulihan sektor terdampak langsung seperti pariwisata, transportasi, ekspor komoditas, dan lain – lain; lalu kecepatan normalisasi kebijakan moneter pada negara – negara maju. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi global diprediksi tidak merata serta sangat dipengaruhi oleh perkembangan pandemi dimasa mendatang.

C. Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia – Pasifik dalam Perekonomian Global

Prospek ekonomi di kawasan Asia Pasifik tetap kuat dan bergeser ke arah yang lebih baik setidaknya sebelum pandemi *Covid – 19* melanda semua negara. Kekuatan perekonomian Asia – Pasifik ditopang oleh keberadaan 41 persen penduduk dunia serta 50 persen transaksi internasional yang terjadi pada kawasan ini. IMF mendefinisikan perekonomian Asia – Pasifik selama beberapa dekade kebelakang yang lekat dengan permintaan domestik yang kuat, kemajuan teknologi, dan investasi swasta yang besar. Tren ini juga ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap, seiring dengan perkembangan pemulihan ekonomi. Berbagai kerjasama lintas negara yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnership*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, *East Asia Summit (EAS)*, dan *Expand ASEAN Maritime Forum*.

D. Keterbukaan Pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pemberlakuan MEA di kawasan ASEAN tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Provinsi Bangka Belitung kedepan. MEA dengan prinsip perdagangan bebas akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan juga basis produksi. ASEAN juga diharapkan menjadi wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosio – ekonomi beragam.

Terdapat lima hal yang tidak dapat dibatasi peredarannya dalam pemberlakuan MEA yaitu arus barang, arus jasa, arus modal, arus investasi, dan arus tenaga kerja terlatih. Perluasan pangsa pasar Indonesia khususnya ekspor antar negara ASEAN, transfer teknologi, dan sebagainya menjadi dampak positif dari pemberlakuan MEA. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, serta kompeten perlu ditingkatkan dan menjadi peluang kompetitif mengingat ketersediaannya yang cukup besar di Indonesia.

Namun disisi lain, kerjasama semacam ini dapat meningkatkan sifat konsumtif apabila bangsa Indonesia hanya sebagai penerima dampak bukan sebagai pemeran utama dalam MEA. Kerjasama MEA memang belum sepenuhnya diterapkan, namun kemudahan barang impor yang masuk serta gencarnya investasi dari luar sudah dapat dirasakan beberapa tahun kebelakang. Oleh karena itu, isu ini perlu direspon baik pemerintah, pengusaha, dan *stakeholder* lainnya agar negara dan juga daerah dapat mempersiapkan dan mengambil peran dari pemberlakuan MEA.

E. Stabilitas Politik Global yang Dinamis

Kebijakan proteksi ekonomi Amerika Serikat, perang dagang dengan Tiongkok, diikuti dengan penarikan diri dari komitmen *Trans Pacific Partnership (TPP)* akan memberikan pengaruh pada inisiatif perdagangan dunia, termasuk Indonesia. Amerika dan juga Tiongkok merupakan salah satu negara tujuan ekspor komoditas sehingga secara tidak langsung kebijakan yang diambil kedua negara juga berdampak pada Indonesia minimal dalam sektor perdagangan. Selain itu, ketegangan politik di Asia Timur dan Timur Tengah serta gerakan radikalisme dan terorisme yang berkembang dan sedang bergejolak di beberapa negara juga menjadi tantangan terhadap stabilitas politik dan keamanan baik global, regional, maupun nasional. Isu ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan agar seluruh *stakeholder* lebih pro – aktif dalam mengantisipasi perubahan dan pergerakan tersebut.

F. Transformasi Teknologi dan Industri 4.0

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Manfaat transformasi ini dirasakan oleh seluruh negara baik maju maupun berkembang dilihat dari lekatnya teknologi digital dalam kehidupan masyarakatnya. Teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan selanjutnya adalah kemampuan dalam mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Transformasi teknologi digital juga menandai dimulainya era industri 4.0 atau industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet, dan cetak tiga dimensi. Banyak perusahaan multinasional yang sudah bertransformasi dan memanfaatkan kecanggihan ini seperti yang bergerak dalam bidang transportasi, otomotif, telekomunikasi dan lain sebagainya. Pengaplikasian prinsip – prinsip dalam industri 4.0 diyakini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern serta

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Namun disisi lain, tren ini juga berpotensi menyebabkan hilangnya 60 persen jabatan pekerjaan di dunia karena tergantikan oleh otomatisasi mesin. Isu ini harus direspon dengan baik dengan agar pemanfaatan teknologi dapat secara maksimal utamanya dalam mendukung perkembangan ekonomi dan juga kepentingan lainnya dari setiap negara.

G. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals (MDG's)* yang berakhir pada tahun 2015. MDG's diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama dibidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index*. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. Bila pada *Millenium Development Goals (MDG's)* terdapat 8 sasaran dan 60 target maka pada *Sustainable Development Goals* diperluas menjadi 17 sasaran dan 169 target pembangunan. Terkait dengan pelaksanaannya, sebanyak 193 negara resmi menegaskan komitmennya untuk ikut serta mensukseskan pembangunan yang berkelanjutan.



Sumber: Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 4.6 Isu Strategis Pembangunan Tingkat Global dan Regional

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda – agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menjadi awal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kemampuan stakeholder di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu – isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan. Berikut merupakan isu – isu strategis nasional yang perlu dipertimbangan bagi pembangunan wilayah antara lain:

A. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi *Covid – 19*. Pelaksanaannya selama lima tahun kedepan dilakukan secara bertahap diantaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi perdagangan.

B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan selama lima tahun kedepan dimulai dari mempercepat pemulihan dampak pandemi *Covid – 19*, dilanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan, dan investasi sektor – sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital

untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses, dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak *Covid – 19* terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja terdampak pandemi.

D. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan selama lima tahun kedepan dimulai dari mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi *Covid – 19* melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama / keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

E. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

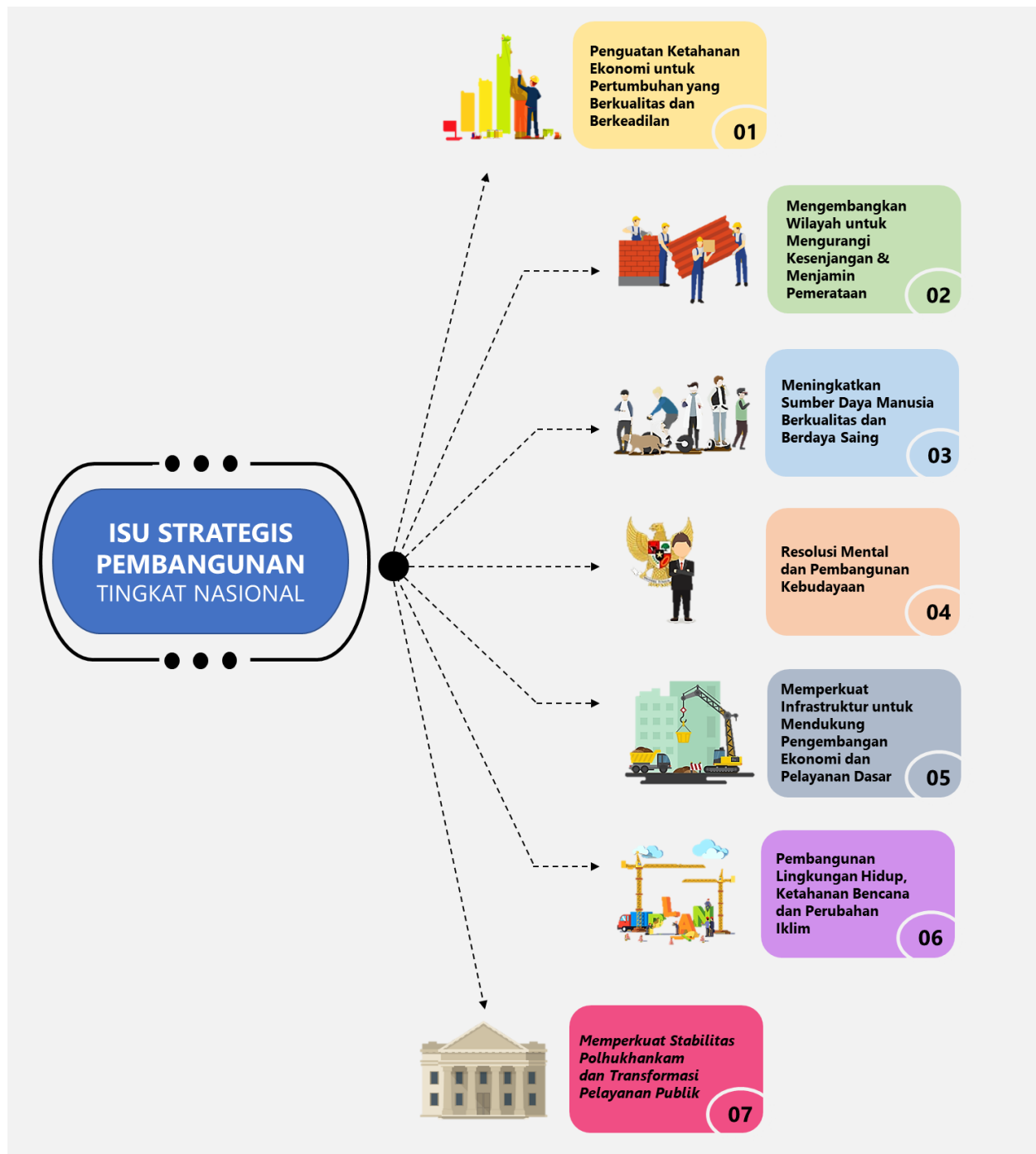
Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar selama lima tahun kedepan dimulai dari pemulihan pascapandemi *Covid – 19* dan selanjutnya diarahkan pada pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode peningkatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur.

F. Membangun Lingkungan, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana non-alam seperti pandemi *Covid – 19*, serta perubahan iklim diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

G. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dimulai dari mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi *Covid – 19* dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini di antaranya dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerja sama pembangunan internasional; optimalisasi penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan *physical distancing*; serta pemulihan pelayanan publik.



Sumber: Lampiran 1 Perpres 18 2020 - Narasi RPJMN 2020-2024

Gambar 4.7 Isu Strategis Pembangunan Tingkat Nasional

4.2.3 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan beberapa isu strategis pada level global, regional, juga nasional seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya serta ditambah beberapa pertimbangan terkait isu daerah dari dokumen KLHS RPJMD dan juga rencana – rencana pengembangan dari dokumen RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034 sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dalam pembentukan isu strategis daerah. Disusunlah empat isu strategis pembangunan Kabupaten Belitung Timur dengan detail penjelasan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pencapaian Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi adalah isu strategis dalam bidang tata kelola pemerintahan. Kondisi yang belum ideal ini tentu menjadi hambatan dalam perwujudan *good governance* dan *clean government* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Timur. Pernyataan terkait isu ini setidaknya juga muncul dalam dokumen induk KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2024 yang juga mengangkat isu terkait tata kelola dan reformasi birokrasi. Detail kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur yang ikut memperkuat isu ini sebagai berikut:

- Belum efektif dan efisiennya struktur dan kelembagaan birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *smart institution*.

- Pelayanan publik yang belum prima

Perbaikan kualitas pelayanan publik tidak hanya untuk kemudahan berusaha, tetapi juga sebagai cerminan citra baik pemerintah. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, setidaknya ada tiga perbaikan yang dapat dilakukan. Pertama, perbaikan sarana dan prasarana fisik dalam memberikan pelayanan. Kedua, peningkatan kualitas ASN sebagai pemberi layanan, dan ketiga yaitu perubahan *mind set* dan juga *culture set* dari ASN yang bertugas memberikan layanan publik.

- Optimalisasi transformasi digital tata kelola pemerintahan

Terkait transformasi pelayanan di tengah kondisi pandemi *Covid – 19*, orientasi pemerintah sudah mengalami perubahan. Akibat pandemi *Covid – 19* ini hanya pelayanan daring yang tetap survive atau bertahan meskipun beberapa layanan tatap muka masih terus berjalan. Oleh karena itu, pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagai salah satu upaya perwujudan reformasi birokrasi. Penerapan ini juga menuntut adanya transformasi digital yang menyeluruh, baik dari sistem hingga SDM aparatur.

Dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang tersebut, terutama Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE, membuktikan bahwa saat ini pemerintah serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-government*) secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam sistem administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, juga berkaitan dengan revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi dalam unsur tata kelola pemerintahan juga merupakan salah satu penunjang bagi ASN agar lebih berkualitas, inovatif, berdaya saing, efektif dan efisien didalam melaksanakan tugasnya. Dibutuhkan sebuah inovasi yang mampu mendukung dan mengimplementasikan teknologi informasi kedalam tata kelola pemerintahan secara mudah, efektif, dan efisien sebagai bagian dari era revolusi industri 4.0 keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu meningkatkan kapasitas baik aparatur, lembaga, dan sistem penyelenggaraan pemerintah secara spesifik lewat sebuah pernyataan tujuan sampai dengan arah kebijakan pembangunan. Respon terhadap isu ini menjadi penting agar nantinya pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, transparansi, dan tentunya supremasi hukum.

B. Pengembangan Ekonomi Sektor Prioritas

Pengembangan ekonomi akan lebih diprioritaskan kepada sektor – sektor yang memiliki potensi *endowment* (kekayaan sumber daya), nilai strategis lokasi, dan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Isu pengembangan ekonomi juga disinggung dalam dokumen induk KLHS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2024, khususnya pada pencapaian indikator TPB yang berkaitan dengan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu, beberapa pengembangan kawasan strategis perekonomian dalam dokumen RTRW juga memiliki pertimbangan tersendiri. Detail kondisi pengembangan ekonomi sektor prioritas Kabupaten Belitung Timur yang ikut memperkuat isu ini sebagai berikut :

- **Pengembangan ekonomi sektor pertanian**

Pengembangan sektor pertanian dilakukan untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari masih minimnya peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian. Rendahnya produktivitas pertanian juga akan mendapat perhatian lewat upaya penerapan teknologi tepat guna yang inovatif serta pengoptimalan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok – kelompok tani.

- Pengembangan ekonomi sektor perikanan

Belum optimalnya pengembangan ekonomi sektor perikanan terlihat dari rendahnya jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mendapatkan izin edar, sarana – prasarana mendukung aktivitas penangkapan ikan yang minim, dan banyaknya kelompok pembudidaya non aktif yaitu 19 dari 33 kelompok. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus mengingat sumber daya alam terkait kelautan dan perikanan sangat melimpah di Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu, pemerintah telah merencanakan Pelabuhan Perikanan Pantai Manggar dan kawasan *hatchery* dengan model *Marine Culture Estate* yang diharapkan menjadi sentra perikanan laut di Kabupaten Belitung Timur. Melalui pengembangan tersebut eksploitasi atau pemanfaatan potensi laut khususnya budidaya perikanan dan kelautan dapat lebih dioptimalkan.

- Pengembangan ekonomi sektor industri pengolahan

Terbatasnya bahan baku produksi untuk IKM terutama IKM yang memproduksi dari memanfaatkan hasil hutan (IKM kerajinan) dan bahan baku musiman (IKM pangan) masih menjadi permasalahan umum. Sedangkan untuk industri pengolahan berbahan baku hasil laut juga belum optimal pertumbuhannya. Pemerintah telah merencanakan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) sebagai salah satu kawasan strategis di sepanjang pantai bagian utara dari Tanjung Pasiren hingga Tanjung Alam Paku. Hal tersebut merupakan salah satu dukungan yang sangat besar bagi pengembangan sektor perikanan - kelautan dan juga industri pengolahan khususnya industri pengemasan hasil perikanan (*Fish Processing Industry*) dan *Industrial Cold Storage* sehingga diharapkan produk industri pengolahan Kabupaten Belitung Timur dapat memperluas jangkauan pasarnya untuk tujuan ekspor.

- Pengembangan ekonomi sektor pariwisata

Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat strategis dan berpengaruh besar dalam pembangunan suatu daerah. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, sektor pariwisata merupakan sektor yang bisa memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data statistik, proporsi kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Belitung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 81,92 persen, namun nyatanya belum memberikan dampak seperti yang diharapkan. PAD yang diperoleh oleh Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 dari sektor tersebut hanya sebesar Rp. 1,9 milyar, dibandingkan dengan Kabupaten Belitung dengan PAD sebesar Rp. 20,6 milyar. Dampak ekonomi lainnya yang juga belum didapatkan oleh Belitung Timur yaitu kontribusi sektor yang tercermin dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum hanya sebesar 2,49 persen. Hal tersebut coba

diatasi lewat pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Burung Mandi – Nyiur Melambai sebagai ikon pengembangan wisata Kabupaten Belitung Timur serta pengoptimalan 4A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Aktifitas) di kawasan destinasi wisata prioritas lainnya seperti Desa Wisata Laskar Pelangi, Kawasan Pelestarian Budaya Gunung Samak dan Gosong Cina yang juga memanfaatkan teknologi digital yang berkembang.

Perlu diketahui bahwa pemfokusan pengembangan sektor ekonomi tentu akan berimplikasi terhadap keruangan wilayah seperti dukungan infrastruktur ekonomi, sarana – prasarana dan utilitas, dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan untuk mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi lokal yang berstatus prioritas lewat sebuah pernyataan tujuan sampai dengan arah kebijakan pembangunan. Respon terhadap isu ini menjadi penting agar nantinya sumber daya ekonomi beserta keunggulan – keunggulannya dapat termanfaatkan dengan baik sehingga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi daerah dan secara tidak langsung ikut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

C. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Penduduk adalah aset kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pergeseran paradigma pembangunan mulai menempatkan penduduk atau manusia sebagai tujuan akhir, bukan alat dari pembangunan itu sendiri. Proses pembangunan tersebut menjadi fokus yang dilaksanakan daerah untuk menyambut berbagai kemajuan – kemajuan yang mutlak membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Isu ini harus direspon dengan baik mengingat persaingan antar daerah dalam membentuk masyarakat yang berdaya saing semakin yang ketat.

Kualitas dan daya saing SDM yang terbentuk di Kabupaten Belitung Timur dapat dikatakan belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan melalui kerjasama berbagai pihak. Pernyataan tersebut setidaknya juga muncul dalam dokumen induk KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2024 yang juga mengangkat isu terkait kualitas sumber daya manusia. Kualitas dan daya saing ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan, keterampilan bagi tenaga kerja, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang belum optimal, dan lain sebagainya. Detail kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Belitung Timur yang ikut memperkuat isu ini sebagai berikut:

- **Kualitas pendidikan dasar**

Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia masih rendah ditunjukan dengan kinerja pendidikan dasar antara lain masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah, rasio tenaga pendidik terhadap jumlah sekolah, pemanfaatan teknologi informasi belum optimal, belum adanya PAUD holistik integratif, masih adanya

anak putus sekolah, belum adanya ketersediaan ruang belajar khusus dan tenaga pendidik di sekolah penyelenggara inklusi beserta sarana pendukung pembelajaran.

- Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat

Derajat akses dan pelayanan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan karena masih ditemukan kasus seperti penyakit menular dan tidak menular, rasio tenaga kesehatan yang belum sesuai standar, akses sanitasi dasar belum sepenuhnya sesuai standar, belum optimalnya penyehatan lingkungan di fasilitas kesehatan, belum optimalnya penanganan pelayanan gizi masyarakat pada kelompok rentan.

- Belum optimalnya pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak

Belum optimalnya pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak ditunjukkan dengan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan pencegahan stunting pada anak.

- Belum optimalnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Belum optimalnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan dengan masih tingginya angka *Total Fertility Rate* (TFR) dan belum memadainya peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan program bangsa kencana.

- Perlunya peningkatan pembudayaan dan pemassalan olahraga

Partisipasi masyarakat dalam pembudayaan dan pemassalan olahraga masih perlu ditingkatkan karena kualitas tenaga keolahragaan yang profesional dan juga capaian prestasi yang belum sesuai harapan.

- Kualitas tenaga kerja belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja

Kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 32.190 orang atau 43,53 persen dari total orang yang berkerja. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Belitong Timur perlu membuat tujuan hingga arah kebijakan yang secara khusus berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing masyarakatnya. Apabila isu ini terlambat untuk direspon maka peluang pengembangan wilayah akan terhambat mengingat begitu banyaknya fenomena dan pergeseran tren yang tidak dapat diabaikan seperti bonus demografi, era industri 4.0, dan lain sebagainya. Sulitnya adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan – perubahan tersebut justru akan mempersulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks seperti kemiskinan, kerawanan sosial, dan lain sebagainya.

D. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Pengurangan Risiko Bencana

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa ketersediaan infrastruktur di wilayahnya merata untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Dalam kondisi yang ideal seharusnya sebuah infrastruktur direncanakan dan dibangun berdasarkan kebutuhan tiap pertambahan penduduk serta berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan agar setiap masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran infrastruktur, tidak ada *blank service area* atau justru *overload service*. Selain itu, pengembangan infrastruktur dasar juga mengacu kepada pelestarian lingkungan hidup, sesuai dokumen KLHS Kabupaten Belitung Timur dan juga beberapa rencana pengembangan yang tercantum dalam dokumen RTRW.

- Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang masih perlu ditingkatkan

Aksesibilitas wilayah di Kabupaten Belitung Timur masih perlu ditingkatkan, baik secara kualitas dan kuantitas. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang bernilai baik baru mencapai 79,67 persen sehingga masih perlu upaya lebih lanjut. Sementara itu, konektivitas wilayah juga belum optimal mengingat belum terselesaikannya Pelabuhan Dendang dan Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang. Selama ini, arus barang dan jasa dari dan menuju Belitung Timur cenderung memanfaatkan pelabuhan maupun bandara yang ada di Kabupaten Belitung.

- Ketaatan dalam pemanfaatan pola ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan melalui RTRW yang meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Keduanya memiliki peruntukan masing – masing yang harus ditaati oleh semua unsur masyarakat. Pengaturan peruntukan dalam pemanfaatan ruang juga merupakan respon dari masifnya pembangunan fisik dan alih fungsi lahan sehingga lingkungan pun ikut terancam. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah tantangan untuk menciptakan ketaatan dalam pemanfaatan ruang sesuai aturan yang telah ditetapkan demi kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

- Pengoptimalan sistem perkotaan (Sistem Pusat Pelayanan)

Berdasarkan kebijakan RTRW, perkotaan Manggar ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan tugas melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Peran fungsi yang dimiliki antara lain sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran; pusat pelayanan sosial ekonomi; pelayanan transportasi regional; pusat pengolahan; dan pusat pendidikan tinggi. Namun dalam kondisi eksisting, peran sebagai PKW belum dapat dilaksanakan secara optimal karena skala pelayanannya masih dalam taraf lokal (PKL), sama seperti perkotaan Kelapa Kampit dan perkotaan Gantung. Ketidaoptimalan fungsi ini menjadi sebuah isu yang harus direspon melalui pembangunan fisik maupun

penguatan struktur dan pola ruang sesuai dengan RTRW maupun RDTR yang telah ditetapkan.

- Infrastruktur pelayanan dasar

Capaian universal khususnya akses masyarakat dalam bidang air minum, status kumuh dan sanitasi (100-0-100) masih belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, pengurangan *backlog* juga menjadi perhatian dimana baru tersedia sebanyak 31.833 unit disaat kebutuhan telah mencapai 40.796 rumah. Dari fakta ini, *backlog* yang dihasilkan masih cukup besar dan menjadi pekerjaan yang berat bagi pemerintah untuk menurunkan angka *backlog* sebesar 22 persen atau 8.963 unit.

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Nilai indeks kualitas air yang masih rendah jika dibandingkan dengan indeks kualitas udara dan tutupan lahan, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan penambangan yang dilakukan di daerah aliran sungai sehingga air sungai menjadi tercemar. Sementara itu keberadaan lahan kritis juga menjadi perhatian dimana luasan lahan kritis sampai potensial kritis di Kabupaten Belitung Timur yang mencapai ± 153.705 Ha atau 59 persen dari luas daratan Kabupaten Belitung Timur secara keseluruhan.

- Pengurangan terhadap risiko bencana

Pengurangan terhadap risiko bencana wajib dilakukan sebagai langkah antisipasi dari munculnya bencana yang banyak memberikan kerugian materi maupun non materi bagi lingkungan dan masyarakat. Bencana seperti gelombang pasang dan abrasi sangat mengancam kehidupan masyarakat di pesisir selain bencana banjir yang pernah terjadi di beberapa kecamatan. Pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan pemahaman akan kebencanaan bagi masyarakat dan aparaturnya menjadi kunci yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari langkah pengurangan risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu meningkatkan kinerja dan juga mengoptimalkan kegiatan untuk penyediaan dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar dan juga pengurangan risiko bencana secara spesifik lewat sebuah pernyataan tujuan sampai dengan arah kebijakan pembangunan. Respon terhadap isu ini menjadi penting agar masyarakat dapat merasakan pelayanan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata serta mengurangi dampak – dampak merugikan yang mungkin terjadi disaat bencana muncul kembali. Hal ini juga berpengaruh dalam memberikan rasa aman dan tentunya meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 berisi penjabaran visi, misi, serta program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi visi pembangunan yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai setidaknya dalam kurun lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021- 2026 adalah tahapan pembangunan periode keempat atau terakhir dari RPJPD Belitung Timur Tahun 2005–2025 sehingga menjadi penting karena berpengaruh terhadap pencapaian target akhir pembangunan sesuai RPJPD.

Visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA

Bangkit diartikan suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun, timbul/terbit atau mulai sedangkan **Berdaya** merupakan suatu perubahan yang dapat berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, atau mempunyai akal. Visi tersebut mengandung makna bahwa selama lima tahun mendatang diharapkan terjadi perubahan situasi dan kondisi di Kabupaten Belitung Timur dari kondisi stagnan mengarah pada kondisi yang lebih dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi lesu menjadi bersemangat dengan menggunakan segala tenaga, akal, dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional.

5.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi pembangunan yang berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi mengarahkan sekaligus membatasi proses pencapaian tujuan pembangunan yang diterjemahkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan agar sesuai dan sejalan untuk pencapaian visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

Adapun rumusan misi sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Sebagai salah satu prasyarat pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan untuk membentuk jalannya pemerintahan daerah yang selalu mengedepankan keinginan masyarakat, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, juga keadilan sosial dalam masyarakat. Sedangkan prinsip pemerintah yang bersih (*clean government*) berperan dalam meningkatkan transparansi serta menekan penyalahgunaan wewenang pemerintahan. Kedua prinsip tersebut dapat tergambarkan melalui pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan kinerja serta evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Peningkatan kapasitas pada sektor terkait perlu dilakukan dalam kurun lima tahun kedepan yang bermuara pada peningkatan reformasi birokrasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Belitung Timur sebagai suatu kepastian terciptanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan pelayanan publik juga berjalan seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk terus melakukan adaptasi berupa peningkatan kualitas layanan dan juga kinerjanya. Terakhir, berkaitan dengan pembenahan manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan adalah kebutuhan akan manajemen kelembagaan dan juga sumber daya aparatur yang efisien. Nantinya, sistem kelembagaan manajemen aparatur yang tepat dan efisien akan tercermin dalam bentuk peningkatan efektifitas dalam pelaksanaan tugas fungsi tiap organisasi pemerintah daerah dan juga profesionalisme aparatur di Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja

Pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong lahirnya wirausahawan–wirausahawan baru serta memperluas kesempatan kerja. Melalui penciptaan wirausahawan baru dan perluasan kesempatan kerja tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Belitung Timur serta memperkuat perekonomian lokal. Lebih jauh lagi, melalui pencapaian hal tersebut diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat beberapa kondisi yang harus diperbaiki untuk mencapai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut, salah satunya adalah kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga

kerja sangat dibutuhkan terutama dalam menciptakan wirausahawan baru, dimana seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki ide-ide dan inovasi-inovasi agar dapat bertahan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Belitung Timur harus dapat mengakomodasi kondisi-kondisi tersebut.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan layanan infrastruktur yang layak dan dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkualitas. Sesuai dengan misi tersebut, maka pembangunan ke depan harus mengarah pada penciptaan pertumbuhan yang inklusif dengan memberikan akses luas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat atas berbagai fasilitas pembangunan. Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang akan dicapai ditunjukkan dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik kebutuhan material maupun kebutuhan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan harus dilaksanakan secara inklusif menyeluruh di segala bidang.

Di sisi lain persoalan kemiskinan yang belum terselesaikan menjadi perhatian penting dalam prioritas pembangunan Belitung Timur ke depan. Dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan di Belitung Timur, pembangunan ke depan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat serta sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan seluruh pemangku kepentingan. Persoalan kemiskinan bersifat multidimensi, sehingga untuk penanganan yang komprehensif diperlukan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan ketiga misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Timur, maka dirumuskanlah sebuah tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan turunan atau penjabaran secara operasional yang akan berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjabaran ini nantinya akan menjadi penghubung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam perencanaan kebijakan, tak terkecuali RPJMD, tahapan perumusan tujuan layaknya titik kritis. Hal tersebut dikarenakan

tingkatannya yang tinggi secara prioritas sehingga ikut mempengaruhi penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara alur, visi–misi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun akan menjadi landasan serta dijabarkan kedalam sebuah tujuan untuk dioperasionalkan lewat program – program penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tercapainya tujuan juga dianggap sebagai *impact* keberhasilan dari tercapainya program – program yang ditetapkan. Rumusan tujuan berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih

Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih merupakan tujuan dari misi pertama yaitu membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut perlu didukung oleh peningkatan kapasitas dalam beberapa hal antara lain perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; pengelolaan keuangan; dan juga pengawasan. Selain itu peningkatan kinerja dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga mengambil peran penting upaya pembenahan penyelenggaraan ketatapemerintahan.

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien

Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan tujuan kedua dari misi pertama yaitu membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tujuan ini mengambil peran yang signifikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien adalah peningkatan kualitas sesuai dengan standar yang berlaku dan juga pemanfaatan teknologi informasi didalamnya.

Tujuan 3 : Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien

Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien merupakan tujuan ketiga dari misi pertama yaitu membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tujuan ini dapat dicapai apabila integritas dan profesionalisme dari aparatur meningkat serta organisasi perangkat daerah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif.

Tujuan 4 : Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat

Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan yang difokuskan dalam rangka mencapai misi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dipengaruhi oleh angka pengangguran Kabupaten Belitung Timur yang beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Belitung Timur, diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dapat diperluas dengan pembukaan investasi daerah.

Tujuan 5 : Meningkatnya perekonomian lokal

Peningkatan perekonomian lokal membawa dampak yang luas bagi kondisi perekonomian di suatu daerah. Dengan meningkatnya perekonomian lokal di suatu daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan semakin baik. Peningkatan perekonomian lokal dapat dicapai melalui beberapa hal, salah satunya adalah pengembangan sektor prioritas daerah.

Tujuan 6 : Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat

Perwujudan pemerataan dilakukan sesuai prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*leave no one behind*). Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat menjadi tujuan pembangunan misi ketiga dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkapasitas ditunjukkan dengan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang semakin membaik sehingga dapat mendorong kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan wilayah.

Tujuan 7 : Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana

Peningkatan layanan sarana dan prasarana yang layak serta dapat diakses secara luas dengan mudah oleh masyarakat menjadi tujuan pembangunan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana yang terjangkau dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur wilayah sehingga secara beriringan dapat mendorong produktivitas masyarakat. Akses sanitasi dan air minum yang aman dan layak, pelayanan persampahan serta peningkatan aksesibilitas menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kinerja infrastruktur wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam lima tahun mendatang. Selain peningkatan layanan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat urgensi isu dan beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup yang harus diselesaikan.

Tujuan 8 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang akan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga diharapkan akan menurunkan angka kemiskinan diiringi dengan meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, kondisi sejahtera yang akan dicapai tidak hanya dicerminkan dari kemampuan ekonomi (pendapatan) yang semakin membaik, tetapi juga tercermin dari kebahagiaan dengan adanya rasa aman dalam kehidupan masyarakat serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan jaminan perlindungan secara adil. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin luas.

Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari tercapainya suatu tujuan. Rumusan sasaran dari pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- b. Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik.

Tujuan 3 : Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah daerah; dan
- b. Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur.

Tujuan 4 : Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja; dan
- b. Meningkatnya investasi.

Tujuan 5 : Meningkatkan perekonomian lokal

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan; dan
- b. Meningkatnya daya saing daerah.

Tujuan 6 : Meningkatkan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan; dan
- b. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.

Tujuan 7 : Meningkatkan tingkat pelayanan sarana dan prasarana

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah; dan
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 8 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Menurunnya tingkat kemiskinan; dan
- b. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
MISI 1	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik										
1.1	Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,12	53,12	55,00	58,00	61,00	63,00	65,00	65,00
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	Persen	NA	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (T)	Tinggi (T)	Tinggi (T)	Tinggi (T)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
1.1.2	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	NA	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	NA	3,20	3,35	3,50	3,65	3,80	3,95	3,95
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	NA	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	3,15	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,10
1.3	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien	Indeks Merit System	Nilai 100-400	NA	100,00	102,00	122,00	143,00	163,00	184,00	184,00
1.3.1	Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Kelembagaan	Persen	NA	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00	80,00
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	NA	52,06	54,00	55,00	56,00	57,00	60,00	60,00
MISI 2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja										
2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,33	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,70	72,70

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,93	3,50	3,48	3,46	3,40	3,35	3,30	3,30
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,43	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,00
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	NA	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
2.1.2	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	346,571	359,057	367,382	378,771	390,513	402,814	415,704	415,704
2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,66	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00
		PDRB per kapita	Juta Rp	59,47	63,47	64,17	65,20	66,57	68,29	70,39	70,39
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	-0,49	2,96	3,11	3,25	3,40	3,54	3,69	3,69
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	5,82	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	4,50
		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	-3,47	3,26	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20

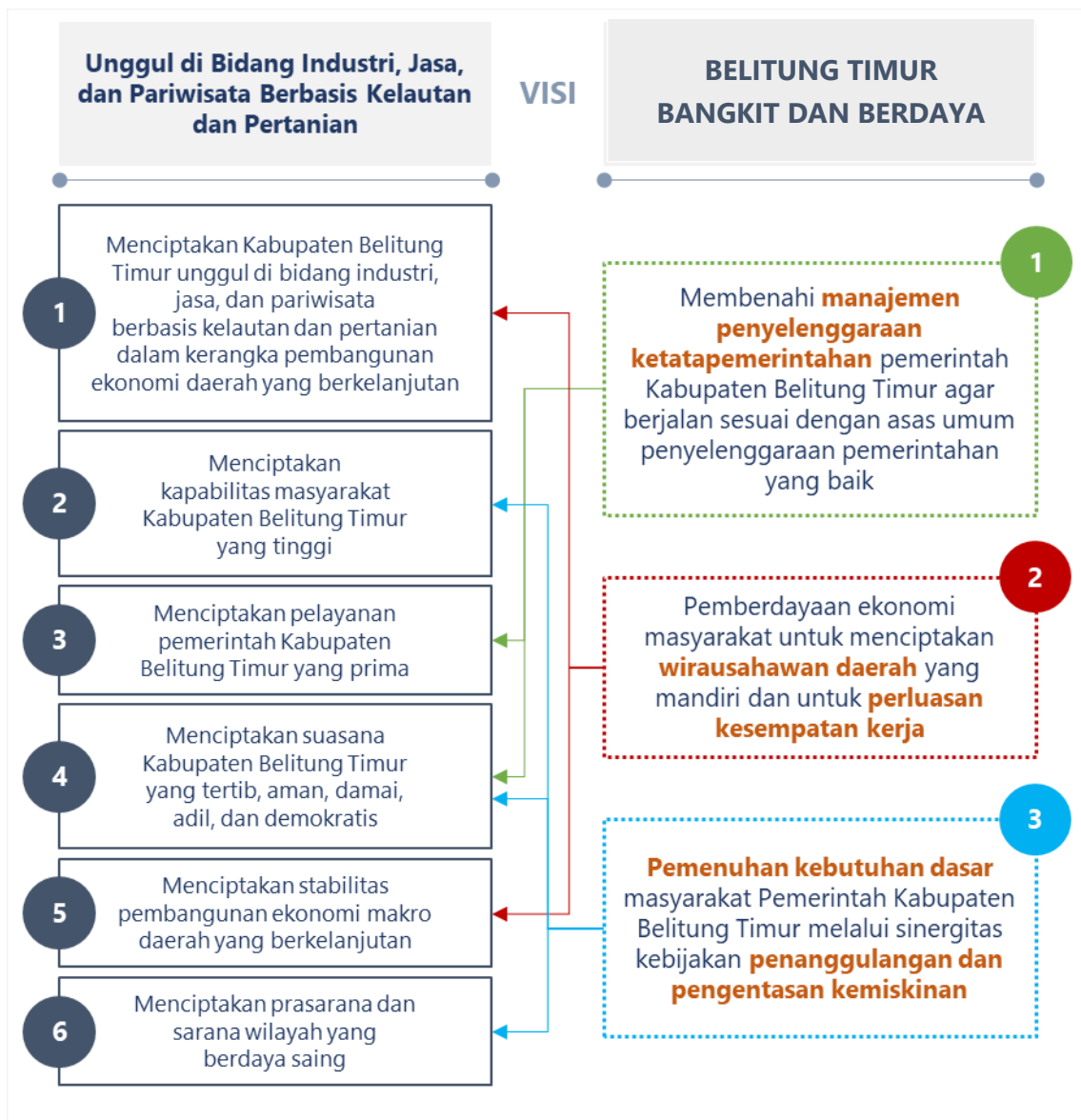
NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	1,58	1,59	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,65
MISI 3	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan										
3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	70,92	71,52	71,97	72,43	72,88	73,33	73,78	73,78
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,52	11,54	11,55	11,57	11,58	11,60	11,61	11,61
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,22	8,30	8,37	8,44	8,51	8,58	8,64	8,64
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Predikat	NA	Padapa	Padapa	Wiwerda	Wiwerda	Wistara	Wistara	Wistara
3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Indeks infrastruktur wilayah	Nilai 1-100	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	NA	94,65	95,57	96,59	97,68	98,78	99,88	99,88
		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	61,97	62,74	64,95	67,23	69,59	72,02	74,52	74,52
		Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	66,17	69,36	71,96	73,48	75,00	76,52	78,04	78,04
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	68,32	69,18	69,70	70,23	70,75	71,28	71,81	71,81
		Indeks Risiko Bencana	Angka	-	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40
3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Persen	6,52	6,45	6,34	6,22	6,11	5,99	5,88	5,88
		Indeks Gini	Nilai	0,257	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
3.3.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,700	0,696	0,642	0,588	0,534	0,480	0,426	0,426
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,19	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
3.3.2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	96,20	96,30	96,50	96,80	97,00	97,50	97,80	97,80

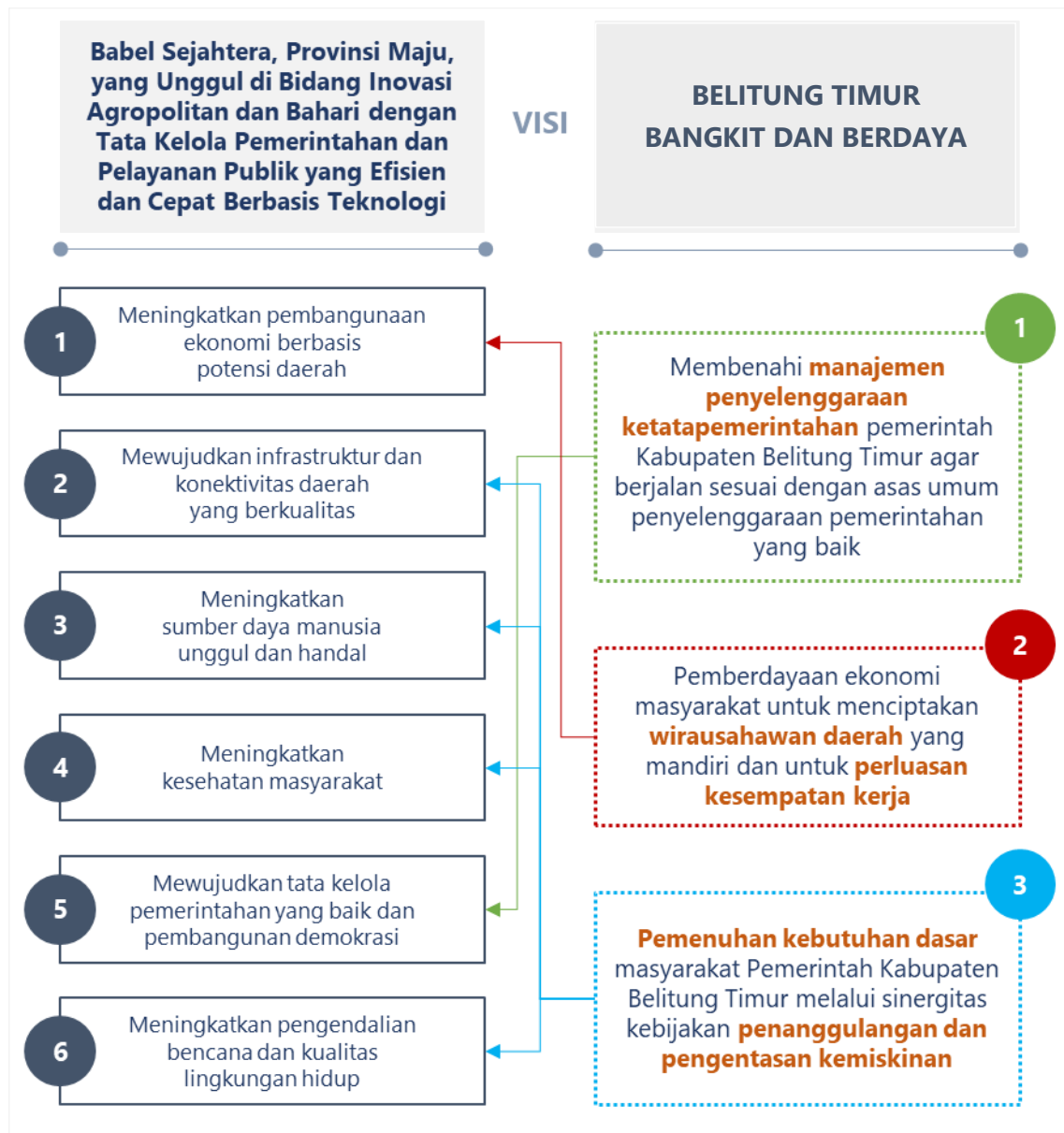
NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	84,70	84,80	84,85	84,90	84,95	85,00	85,00	85,00
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5.4 Keterkaitan Visi-Misi RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

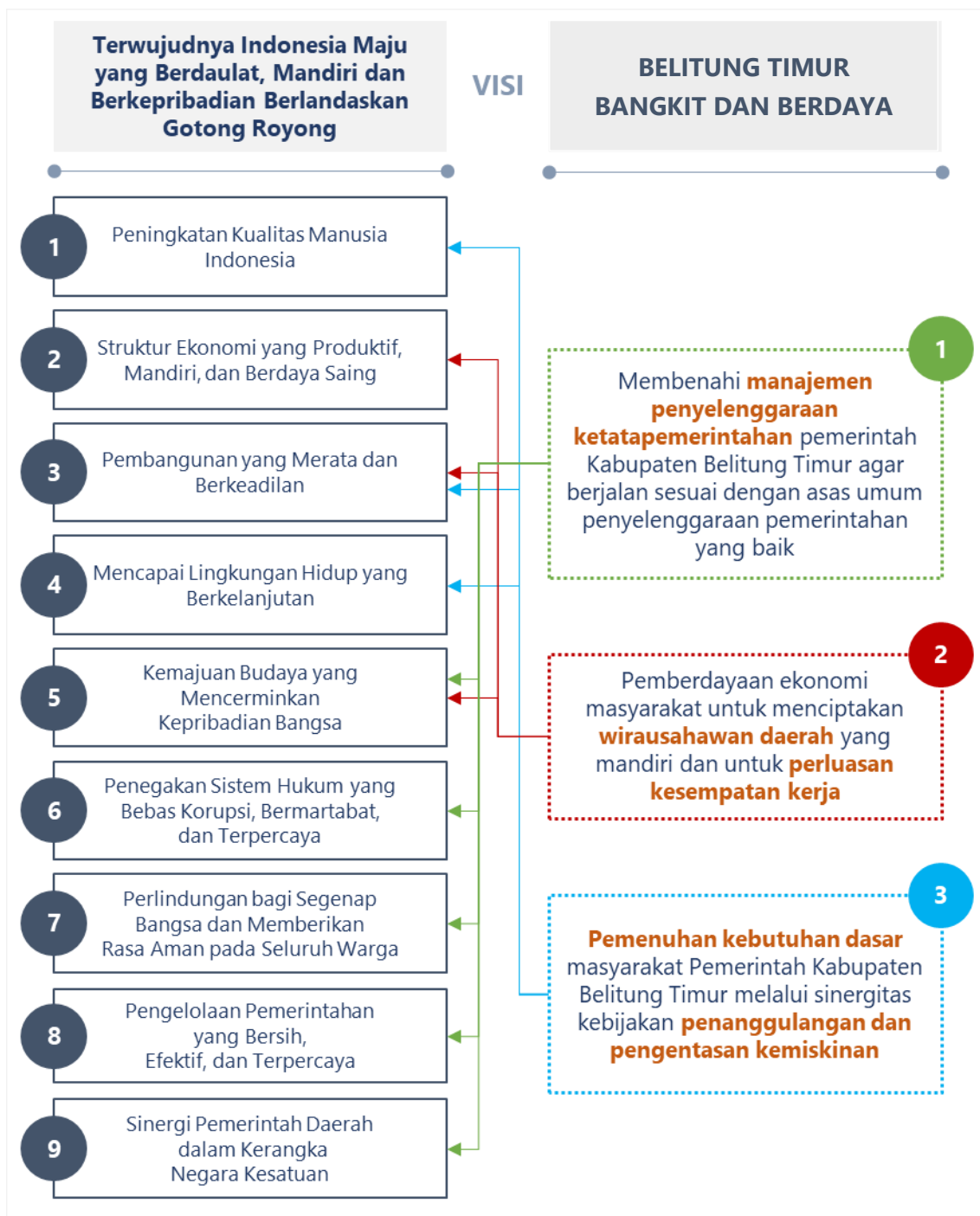
Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan pada bahasan sebelumnya juga disusun dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, serta RPJMN Tahun 2020-2024. Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui gambar berikut.



Gambar 5.1 Keterkaitan Visi-Misi RPJPD Tahun 2005–2025 dengan RPJMD Kabupaten Balitung Timur Tahun 2021–2026



Gambar 5.2 Keterkaitan Visi–Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2026



Gambar 5.3 Keterkaitan Visi–Misi RPJMN Tahun 2020–2024 dengan RPJMD Kabupaten Balitung Timur Tahun 2021–2026

Tabel 5.2 Sinkronisasi Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2020-2024	PENJABARAN DALAM RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2021-2026
AGENDA 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 2 , dengan fokus pada: Tujuan 4 : Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat Sasaran: a. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja; dan b. Meningkatnya investasi. Tujuan 5 : Meningkatnya perekonomian lokal Sasaran: a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan; dan b. Meningkatnya daya saing daerah.
AGENDA 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 2 dan Misi 3
AGENDA 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 3 , dengan fokus pada: Tujuan 6 : Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat Sasaran: a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan; dan b. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan 8 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sasaran: a. Menurunnya tingkat kemiskinan; dan b. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.
AGENDA 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 1 dan Misi 3
AGENDA 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 3 , dengan fokus pada: Tujuan 7 : Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Sasaran : a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah
AGENDA 6 :	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 3 , dengan fokus pada:

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN TAHUN 2020-2024	PENJABARAN DALAM RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2021-2026
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Tujuan 7 : Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Sasaran : a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
AGENDA 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi 1, dengan fokus pada: Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih Sasaran : a. Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; b. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah; dan c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien Sasaran : a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan b. Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik. Tujuan 3 : Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien Sasaran : a. Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah daerah; dan b. Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur.

Tabel 5.3 Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten, Provinsi dan Nasional

NO.	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPJMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022														RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2026							
	INDIKATOR PEMBA- NGUNAN	REALI SASI	TARGET							INDIKATOR PEMBA- NGUNAN	REALISASI			TARGET										INDIKATOR PEMBA- NGUNAN	REALI SASI	TARGET					
			2020*	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2018*	2019*	2020*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020*	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,94					75,54			Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	70,67	71,30	71,47										Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	70,92	71,52	71,97	72,43	72,88	73,33	73,78	
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	10,19					6,0 - 7,0			Persentase Angka Kemiskinan (Persen)	5,25	4,62	4,53	4,17	4,15	4,10	4,05	4,00					Angka Kemiskinan (Persen)	6,52	6,45	6,34	6,22	6,11	5,99	5,88	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (Persen)	7,07					3,6 - 4,3			Persentase Angka Pengangguran (Persen)	3,61	3,58	5,25	5,7	5,6	5,5	5,3	5,3					Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,93	3,50	3,48	3,46	3,40	3,35	3,30	
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-2,07	5,3	5,4 - 5,7	5,7 - 6,0	6,0 - 6,3	6,2 - 6,5			Persentase pertumbuhan PDRB (Persen)	4,45	3,32	-2,30	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60					Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	-0,66	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
5.	GNI per Kapita (USD)	3.825,67					5.810 - 6.000			PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)	50.082	50.911	49.772	50.732	53.015	55.401	57.894	60.499					PDRB per kapita (Juta Rupiah)	59,47	63,47	64,17	65,20	66,57	68,29	70,39	
6.	Rasio Gini (Nilai 0-1)	0,385					0,360 - 0,374			Indeks Gini (Nilai 0-1)	0,281	0,269	0,257	0,278	0,269	0,259	0,25	0,24					Indeks Gini (Nilai 0-1)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan yang komprehensif tentang bagaimana cara pemerintah daerah dalam kurun 5 tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan yang komprehensif, perumusan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1 Strategi

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang maka dirumuskan strategi pada setiap sasaran RPJMD. Berikut rincian strategi untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

VISI : BELITUNG BANGKIT DAN BERDAYA

MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI 1	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Mendorong integrasi penelitian dan pengembangan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan publik
			Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien	Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan
			Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur

MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI 2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
			Meningkatnya investasi	Meningkatkan kemudahan berinvestasi
		Meningkatnya Perekonomian Lokal	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Mengembangkan sektor industri
				Meningkatkan kualitas dan kapasitas produk pertanian dan perikanan
				Meningkatkan daya saing pariwisata
MISI 3	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
				Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
		Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas
				Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah

MISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
				Meningkatkan ketahanan terhadap bencana
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan	Menurunkan tingkat kemiskinan
			Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan pemerataan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk
				Melaksanakan pembangunan berbasis keadilan dan kesetaraan gender

Tabel 6.2 Sinkronisasi Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 dengan Strategi RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
AGENDA 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan AGENDA 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	MISI 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih	Meningkatkan kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Mendorong integrasi penelitian dan pengembangan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan publik
			Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien	Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan
			Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur
		AGENDA 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan AGENDA 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	MISI 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat
	Meningkatnya investasi			Meningkatkan kemudahan berinvestasi
Meningkatnya perekonomian lokal	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			Mengembangkan sektor industri
				Meningkatkan kualitas dan kapasitas produk pertanian dan perikanan

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
AGENDA 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan AGENDA 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing AGENDA 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan AGENDA 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar AGENDA 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	MISI 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat		Meningkatkan daya saing pariwisata
			Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah
			Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
			Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas
				Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
				Meningkatkan ketahanan terhadap bencana
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan
				Menurunkan tingkat kemiskinan

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan pemerataan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk Melaksanakan pembangunan berbasis keadilan dan kesetaraan gender

MISI 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik

STRATEGI 1 : Mendorong Integrasi Penelitian dan Pengembangan dengan Proses Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Perencanaan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi juga sebagai komponen yang harus ada untuk menjamin keberhasilan pencapaian rencana pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, output dari kegiatan penelitian dan pengembangan harus mulai diintegrasikan agar terwujud konsistensi dalam rencana pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaannya serta memastikan agar keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor dapat tercapai sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.

STRATEGI 2 : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi ini dilakukan untuk memastikan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dapat berjalan lancar dan kualitas kinerjanya mencapai kriteria efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dalam periode yang telah ditetapkan.

STRATEGI 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu sistem yang dibangun haruslah memiliki pertanggungjawaban yang baik, jelas, teratur, dan efektif sebagai satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

STRATEGI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis SPM

Segala jenis dan mutu pelayanan dasar dalam bentuk barang dan jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu berhak diperoleh masyarakat agar dapat hidup secara layak. Oleh karena itu, dalam pelayanan publik berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib, setiap individu haruslah dipenuhi hak – haknya secara minimal sesuai standar teknis. Hal ini menjadi mutlak untuk dijalankan pemerintah daerah sesuai dengan amanat perundangan tentang penerapan standar pelayanan minimal yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum.

STRATEGI 5 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu perwujudan nyata adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh pemerintah daerah sehingga nantinya akan mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

STRATEGI 6 : Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintahan.

Strategi terkait peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan turunan langsung dari area perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu penataan organisasi atau kelembagaan. Kedepan diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih wewenang dan juga inefisiensi pelaksanaan tugas fungsi dari OPD – OPD yang ada. *Assessment* perlu dilakukan dengan berbasis kinerja sebagai bahan untuk melakukan penyederhanaan sehingga struktur organisasi pemerintahan daerah menjadi efektif dan tepat fungsi.

STRATEGI 7 : Meningkatkan Integritas dan Profesionalitas Aparatur.

Integritas dan profesionalitas aparatur memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkatan. Manajemen kepegawaian yang ada harus di-*design* berkontribusi aktif dalam pengembangan nilai – nilai untuk menegakkan integritas dan profesionalitas. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melakukan penguatan aparatur berkaitan dengan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin agar tiap – tiap aparatur pemerintahan daerah dapat melakukan tugas – pekerjaan sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan.

MISI 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja

STRATEGI 1 : Meningkatkan keterampilan tenaga kerja

Permasalahan pengangguran merupakan salah satu permasalahan kompleks dalam aspek ketenagakerjaan yang sudah hadir sejak dulu. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi dua hal yang sangat berpengaruh dalam mendukung terjadinya permasalahan tersebut. Selain itu, minimnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan juga berperan dalam memperparah permasalahan pengangguran. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan pengangguran adalah dengan meningkatkan keterampilan bagi tenaga kerja. Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi tenaga kerja, sehingga dapat bersaing di dunia kerja dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat secara luas.

STRATEGI 2 : Meningkatkan kemudahan berinvestasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman aset oleh perusahaan atau perorangan, melalui kegiatan investasi yang dilakukan di daerah, berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan investasi juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran, selain peningkatan keterampilan kerja. Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan investasi di daerah, salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan berinvestasi. Dengan kemudahan berinvestasi, diharapkan dapat menarik minat investor baru untuk berinvestasi, sehingga jumlah investasi juga semakin meningkat.

STRATEGI 3 : Mengembangkan sektor industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangan sektor industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan Kabupaten Belitung Timur. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor industri, campur tangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk penyusunan kebijakan. Kebijakan pemerintah daerah yang pro terhadap pengembangan sektor industri dibutuhkan sebagai landasan dan dasar hukum. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung, seperti transportasi dan perdagangan, juga menjadi hal penting dalam mendukung sektor industri agar lebih berkembang.

STRATEGI 4 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas produk pertanian dan perikanan

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Belitung Timur, selain sektor industri. Hal tersebut berarti sektor pertanian Kabupaten Belitung Timur pada dasarnya memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian lokal, namun perlu upaya lebih sehingga sektor tersebut dapat lebih berkembang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas produk pertanian dan perikanan. Peningkatan kualitas dan kapasitas produk tersebut dapat terwujud melalui peningkatan sumberdaya manusia di bidang pertanian, penyediaan sarana prasarana pendukung, dan penerapan teknologi.

STRATEGI 5 : Meningkatkan daya saing pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu media promosi yang efektif menarik orang untuk datang ke suatu daerah. Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi pariwisata yang beragam, dimana sebagian besar merupakan wisata alam. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi Kabupaten Belitung Timur karena menjadi ciri khas yang sulit ditemukan di daerah lain, sehingga dapat lebih menarik minat wisatawan untuk datang. Dengan pengembangan pariwisata yang tepat, akan meningkatkan daya saing pariwisata dan memicu penambahan aktivitas ekonomi lokal. Lebih jauh lagi, pengembangan pariwisata akan berdampak pada peningkatan perekonomian Kabupaten Belitung Timur.

STRATEGI 6 : Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah

Peningkatan kualitas produk unggulan daerah bertujuan untuk mendorong daya saing produk unggulan daerah agar dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional, dan kemudian meningkatkan perekonomian daerah. Lebih jauh lagi, peningkatan kualitas produk tersebut akan mempengaruhi daya saing daerah. Hal tersebut disebabkan karena perekonomian daerah merupakan salah satu faktor pembentuk daya saing daerah, sehingga dengan meningkatnya perekonomian daerah maka daya saing daerah juga akan meningkat.

MISI 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

STRATEGI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan tujuan tersebut, sistem pendidikan yang baik sangat diperlukan untuk menghasilkan generasi penerus yang cerdas, produktif, inovatif dan berkarakter serta mampu bersaing di kondisi perkembangan global yang dinamis dan kompetitif. Mengingat pentingnya pendidikan, upaya penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas terus didorong melalui peningkatan pengelolaan layanan pendidikan di berbagai jenjang baik pendidikan dasar, pendidikan usia dini, maupun pendidikan non formal (kesetaraan), pemerataan penyediaan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkarakter.

STRATEGI 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang krusial karena berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu untuk hidup layak dan produktif. Kualitas kesehatan yang baik diperlukan untuk mendukung produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, sistem dan kinerja pelayanan kesehatan yang baik sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, sehingga upaya penyelenggaraan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan melalui peningkatan pemerataan layanan kesehatan serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan.

STRATEGI 3 : Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas

Pembangunan sarana dan prasarana permukiman dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan sehat. Peran penting sarana dan prasarana dalam mendukung aktivitas masyarakat mendorong diperlukannya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan terjangkau bagi

masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana permukiman di Kabupaten Belitung timur dalam lima tahun yang akan datang diarahkan pada peningkatan pelayanan baik dari segi kuantitas yaitu dengan memperluas cakupan pelayanan maupun dari segi kualitas dengan meningkatkan kinerja pelayanan yang semakin baik.

STRATEGI 4 : Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah

Konektivitas dan aksesibilitas berkaitan erat transportasi. Pembangunan konektivitas dan aksesibilitas sangat penting untuk menunjang mobilitas penduduk maupun barang. Adanya konektivitas transportasi menciptakan kemudahan dan kelancaran yang dapat mendorong perekonomian. Upaya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Belitung Timur diarahkan pada peningkatan efektivitas sistem transportasi dengan meningkatkan kualitas layanan jalan dan pengembangan layanan transportasi laut.

STRATEGI 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, penyelenggaraan pembangunan harus memastikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana sehingga tidak berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung dilakukan melalui penguatan kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan sumber daya alam dan lingkungan.

STRATEGI 6 : Meningkatkan ketahanan terhadap bencana

Kejadian bencana, baik bencana alam maupun non alam, merupakan kejadian tidak terduga dan tidak diperkirakan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian. Namun, kesiapsiagaan masyarakat baik fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana harus tetap dilakukan untuk meminimalisasi dampak atau risiko yang ditimbulkan. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ketangguhan bencana dilakukan melalui kebijakan-kebijakan peningkatan ketangguhan yang mengarah pada penguatan kesiapan dan kapasitas individu, masyarakat, pemerintah serta sistem di daerah dalam menghadapi guncangan dan tekanan yang berpotensi terjadi sehingga dapat pulih dan tumbuh dengan lebih baik.

STRATEGI 7 : Menurunkan tingkat kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi, karena itu pengentasan dan penanggulangan kemiskinan memerlukan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan solusi terbaik bersama guna mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut. Dalam pembangunan Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang, penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas perhatian dan fokus bagi pemerintah daerah karena kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, upaya pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat secara merata terus dilakukan untuk mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan.

STRATEGI 8 : Meningkatkan pemerataan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk

Perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi dan sosial baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak terduga karena adanya bencana alam, bencana non alam (pandemi), perubahan iklim maupun situasi tidak terduga lainnya. Perlindungan sosial diberikan terutama bagi penduduk miskin dan rentan untuk mengurangi beban pengeluaran. Mengingat peran penting perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya peningkatan perlindungan dan jaminan sosial terus dilakukan di antaranya melalui perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan DTKS sehingga realisasi pemberian perlindungan dan jaminan sosial menjadi efektif dan tepat sasaran.

STRATEGI 9 : Melaksanakan pembangunan berbasis keadilan dan kesetaraan gender

Pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil. Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok usia, serta yang kebutuhan khusus (disabilitas) dapat terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Upaya untuk mewujudkan pembangunan berbasis keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Belitung Timur dilakukan melalui penguatan kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif gender.

6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pembangunan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan pembangunan per tahun Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan per Tahun

2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial	Pemulihan ekonomi dan kesehatan melalui pemberdayaan potensi unggulan berbasis masyarakat	Pemulihan ekonomi dan meningkatkan sinergitas pengentasan serta penanggulangan kemiskinan	Mewujudkan stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar	Memperkuat daya saing daerah dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

6.3 Sinkronisasi Program RPJMD dan RTRW

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Belitung Timur dengan RTRW Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat melalui beberapa aspek, salah satunya adalah indikasi program RTRW dengan program nomenklatur yang terdapat di dokumen RPJMD. Indikasi program merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Keterkaitan antara program RPJMD dengan indikasi program RTRW meliputi perwujudan struktur ruang berupa pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal; rencana pengembangan sistem jaringan transportasi; rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; rencana penyehatan lingkungan; serta perwujudan pola ruang dengan berbagai macam peruntukannya.

Secara umum, indikasi program RTRW sangat berkaitan dengan beberapa program RPJMD yang termasuk dalam bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang urusan lingkungan hidup, bidang urusan perhubungan, dan lain sebagainya. Beberapa indikasi program yang tidak berkaitan dikarenakan bukan termasuk kewenangan dari kabupaten / kota berdasarkan nomenklatur program RPJMD. Adapun detail integrasi program sebagai berikut :

Tabel 6.4 Sinkronisasi Program RPJMD dan RTRW

KODE	INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
II	RENCANA STRUKTUR RUANG	
II A	PUSAT KEGIATAN WILAYAH	
II A 1	Menciptakan iklim kondusif untuk kegiatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
II A 2	Meningkatkan kerjasama antar wilayah secara komplementatif	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
II A 3	Pengembangan ekonomi kawasan secara terintegrasi	Program Perekonomian dan Pembangunan
II B	PUSAT KEGIATAN LOKAL	
II B 1	Menciptakan iklim kondusif untuk kegiatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
II B 2	Meningkatkan kerjasama antar wilayah secara komplementatif	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
II B 3	Pengembangan ekonomi kawasan secara terintegrasi	Program Perekonomian dan Pembangunan
II B	RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT	
II B 1	Rencana Jaringan Jalan Kolektor Primer	Program Penyelenggaraan Jalan
II B 2	Rencana Jaringan Jalan Lokal Primer	Program Penyelenggaraan Jalan
II B 3	Rencana Terminal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
II C	RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT	
II C 1	Rencana Pelabuhan	Program Pengelolaan Pelayaran
II C 2	Rencana Terminal Khusus	Program Pengelolaan Pelayaran

KODE			INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
II	C	3	Peningkatan Alur Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
II	D		RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA	
II	D	1	Rencana Bandara Udara Baru	-
II	E		RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	
II	E	1	Rencana Jaringan Terestrial	-
II	E	2	Rencana Jaringan Satelit	-
II	F		RENCANA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ENERGI	
II	F	1	Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap	-
II	F	2	Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	-
II	F	3	Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas	-
II	F	4	Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Surya Terpusat	-
II	F	5	Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Baru Terbarukan	-
II	F	6	Rencana Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi	-
II	F	7	Rencana Pembangunan Gardu Induk	-
II	F	8	Rencana Pengembangan SUTM dan SUTR	-
II	F	9	Rencana Pengembangan Biodiesel	-
II	F	10	Rencana Pengembangan Bioethanol	-
II	F	11	Rencana Pengembangan Briket Arang	-
II	F	12	Rencana Pengembangan Reaktor Gas Metan	-
II	F	13	Rencana Pengembangan Briket Batubara	-
II	F	14	Rencana Pengembangan dan Pembangunan SPBU, SPBG, dan SPDN	-
II	F	15	Rencana Pembangunan Stasiun Pemurnian Minyak Bumi	-
II	F	16	Rencana Pembangunan Pool Stasiun Bahan Bakar Khusus	-
II	G		RENCANA SUMBER DAYA AIR	
II	G	1	Pengelolaan Wilayah Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
II	G	2	Operasi dan Pembelajaran Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
II	G	3	Pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana - prasarana pengelolaan air baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
II	G	4	Rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan sarana - prasarana pengaman pantai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
II	H		RENCANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	
II	H	1	Rencana Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
II	H	2	Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
II	H	3	Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

KODE			INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
II	H	4	Rencana Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
III			RENCANA POLA RUANG	
III A			KAWASAN HUTAN LINDUNG	
III	A	1	Identifikasi Batas dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
III	A	2	Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi Kawasan Hutan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
III	A	3	Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam Hutan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
III	A	4	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Penyangga Hutan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
III	A	5	Penyusunan DED Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
III	A	6	Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan Hutan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
III	A	7	Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
III	A	8	Pemaduserasian Tata Guna Hutan antara dengan RTRW Kabupaten Belitung Timur	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
III	A	9	Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
III	A	10	Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
III	A	11	Pembangunan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
III B			KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT	
III	B	1	Inventarisasi dan Pengelolaan Kawasan Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
III	B	2	Inventarisasi dan Pengelolaan Kolong	Program Perekonomian dan Pembangunan
III	B	3	Inventarisasi dan Pengelolaan Kawasan Pantai Wisata	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
III	B	4	Penyusunan Arah Insentif dan Disinsentif dalam Pengembangan Kawasan Sempadan Sungai, Pantai dan Kolong	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
III	B	5	Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam Kawasan Perlindungan Setempat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
III	B	6	Pelaksanaan dan Pengembangan wujud sempadan sungai, kolong sebagai fungsi lindung sesuai kriteria yang berlaku	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
III	B	7	Relokasi fungsi budidaya yang berada di sekitar kawasan sempadan secara bertahap dikembalikan kawasan lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

KODE			INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
III	B	8	Pengembangan kegiatan yang mendukung fungsi perlindungan setempat di sekitar sempadan seperti perikanan dan pariwisata	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
III C			KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN ILMU PENGETAHUAN	
III	C	1	Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
III	C	2	Penyusunan Identifikasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
III D			KAWASAN RAWAN BENCANA	
III	D	1	Penyusunan Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten	Program Penanggulangan Bencana
III	D	2	Membuat jalur evakuasi, area penyelamatan dan jalur bantuan	Program Penanggulangan Bencana
III E			KAWASAN HUTAN PRODUKSI	
III	E	1	Penyusunan Identifikasi Kerusakan Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Belitung Timur	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
III	E	2	Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya pengebangan liar dan kebakaran hutan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
III F			KAWASAN PERTANIAN	
III	F	1	Budidaya Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
III	F	2	Budidaya Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
III	F	3	Budidaya Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
III	F	4	Budidaya Peternakan, Mengembangkan, dan Menetapkan Kawasan Sentra Peternakan Kabupaten Belitung Timur	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
III G			KAWASAN PERTAMBANGAN	
III H			KAWASAN PARIWISATA	
III	H	1	Review RIPPDA	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
III	H	2	Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Daya Tarik Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
III	H	3	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata Potensial / Strategis	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
III	H	4	Infrastruktur Kawasan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
III	H	5	Mengembangkan Destinasi Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
III	H	6	Studi, Identifikasi dan Program Pengembangan Wisata Bahari	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
III	H	7	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
III I			KAWASAN PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL	

KODE			INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
III	I	1	Penyusunan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
III	I	2	Studi Kawasan Konservasi Mangrove	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
III	I	3	Pengembangan Kota / Desa / Pesisir	-
III	J		KAWASAN INDUSTRI	
III	J	1	Pengembangan kawasan Industri Air Kelik (KIAK) terdapat di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
III	J	2	Pengembangan kawasan peruntukan industri menengah, kecil, dan rumah tangga	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
III	K		KAWASAN PERMUKIMAN	
III	K	1	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni	Program Pengembangan Perumahan
III	K	2	Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
III	K	3	Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

6.4 Program Inovasi Daerah

Sebagai percepatan mewujudkan Belitung Timur Bangkit dan Berdaya diperlukan upaya-upaya yang inovatif dan aksi nyata sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi fokus percepatan adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendorong investasi sebagai indikator-indikator yang dapat diukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

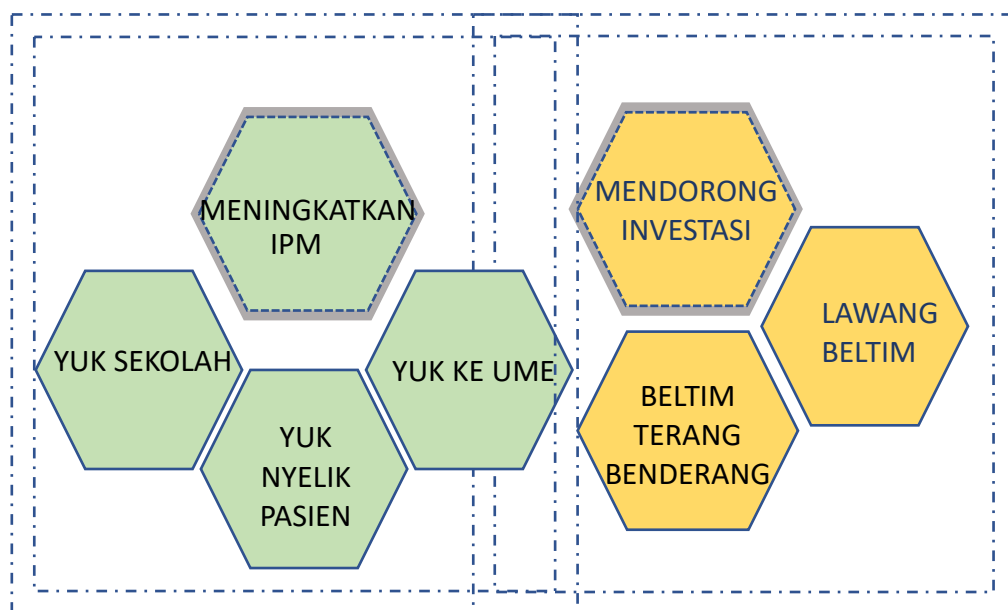
IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Capaian IPM yang tinggi mengindikasikan bahwa pembangunan di daerah tersebut telah berhasil. IPM terdiri dari tiga komponen penyusun yang terdiri dari aspek **kesehatan**, **pendidikan** dan **ekonomi**. Sesuai dengan hal tersebut, ketiga aspek tersebut turut menjadi perhatian khusus pemerintah daerah untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pada aspek ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, diperlukan adanya **investasi** yang dapat membuka peluang berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Investasi adalah salah satu indikator yang cukup vital untuk menjadi salah satu penentu kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah, sehingga dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat membantu para investor maupun calon investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Selain itu, investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu kebijakan yang mendukung kemudahan investasi sangat diperlukan, di mana semakin mudah proses investasi masuk ke daerah maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi dan

semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu daerah. Selanjutnya investasi juga berpotensi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dan daya beli masyarakat lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja dari wilayah sekitar. Dengan demikian, adanya investasi sangat membantu pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD 2021-2026 dirumuskan 5 (lima) inovasi daerah melalui pendekatan THIS (Tematik Holistik Integratif Spasial) sebagai berikut :

1. Yuk Sekolah
2. Yuk Nyelik Pasien
3. Yuk Ke Ume
4. Lawang Beltim
5. Beltim Terang Benderang

Dengan fokus target percepatan pada peningkatan IPM dan mendorong investasi seperti ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 6.1 Inovasi Daerah

1. YUK SEKOLAH

Yuk Sekolah merupakan program yang didesain sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah dengan meningkatkan lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk Belitung Timur. Putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi, psikologis, serta lingkungan sosial menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu, melalui pendekatan

THIS (Tematik, Holistik, Integrative dan Spasial) dilaksanakan percepatan peningkatan kualitas akademis masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan program **Yuk Sekolah** untuk memperluas cakupan akses penerimaan layanan pendidikan bagi masyarakat, dengan melakukan berbagai pendekatan agar anak-anak usia sekolah dapat memenuhi haknya untuk menerima pendidikan setinggi-tingginya, dan bagi masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui jalur penyetaraan.

Program **Yuk Sekolah** diharapkan dapat memberi dampak sebagai berikut :

1. Menekan Angka Putus Sekolah (APS);
2. Memperluas cakupan akses layanan pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas standar mutu pendidikan;
4. Memperkuat pendidikan karakter;
5. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni (APK dan APM) PAUD;
6. Memperluas cakupan akses layanan PAUD, TK, KB dan RA;
7. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni (APK dan APM) SD;
8. Meningkatkan Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs;
9. Meningkatkan standar mutu Pendidikan SMP;
10. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni (APK dan APM) SMP;
11. Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan;
12. Memperluas cakupan akses layanan PKBM;
13. Memperkuat Gerakan Literasi Sekolah.

Dari sisi perencanaan yang terintegrasi, Program Yuk Sekolah merupakan strategi program yang melibatkan berbagai *stakeholders* dan urusan pemerintahan diantaranya:

1. Pendidikan, berkontribusi dalam :
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan sekolah dasar;
 - c. Pendidikan SMP;
 - d. Pendidikan SMA/SMK;
 - e. Pendidikan Penyetaraan;
 - f. Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Penyediaan sarpras pendidikan;
 - h. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

2. Perpustakaan, berkontribusi dalam :
 - a. Meningkatkan minat baca masyarakat;
 - b. Memperkuat sosialisasi dan edukasi literasi masyarakat;
 - c. Mengembangkan perpustakaan digital;
 - d. Memperluas cakupan layanan perpustakaan.
3. Kebudayaan, berkontribusi dalam :
 - a. Meningkatkan edukasi budaya kepada generasi muda;
 - b. Mengoptimalkan kajian atau literatur budaya;
 - c. Mengembangkan budaya lokal.
4. Olahraga, berkontribusi dalam :
 - a. Meningkatkan prestasi olahraga pelajar;
 - b. Optimalisasi peran organisasi olahraga dalam meningkatkan pemasaran olahraga di tingkat pelajar.
5. Kepemudaan dan Pramuka, berkontribusi dalam :
 - a. Meningkatkan partisipasi pemuda pelopor;
 - b. Optimalisasi peran organisasi kepemudaan;
 - c. Meningkatkan kualitas layanan kepemudaan.

Untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program **Yuk Sekolah** tersebut, perlu dukungan lintas sektor untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya, meliputi:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 2) Dinas Pendidikan;
- 3) Dinas Perpustakaan;
- 4) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- 5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 7) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) Dinas Perhubungan
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dukungan lintas dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program **Yuk Sekolah** juga diperlukan dukungan dalam lingkup yang lebih luas, meliputi dukungan dari pemerintah provinsi maupun nasional. Dukungan lintas sektor dari lingkup pemerintah

provinsi yang diperlukan dalam pelaksanaan program **Yuk Sekolah** yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan dari tingkat nasional, diperlukan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. YUK NYELIK PASIEN

Yuk Nyelik Pasien adalah program yang akan menjadi benang merah dalam rangka mengintegrasikan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien atau masyarakat dari rumah sakit ke puskesmas. Secara garis besar, tujuan program **Yuk Nyelik Pasien** adalah meningkatkan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin dan tidak mampu serta memiliki masalah kesehatan melalui tim perawat kesehatan masyarakat dengan kunjungan rumah. Keluarga rentan merupakan keluarga yang berisiko tidak terakses atau mengkasas pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya berbagai sumber daya dalam keluarga seperti keterbatasan keuangan, sarana transportasi, pengetahuan dalam perawatan kesehatan, dan sebagainya.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi prioritas yang harus terus diupayakan sebagai salah satu upaya dalam rangka mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas guna menuju “Belitung Timur Bangkit dan Berdaya.” Upaya ini tentunya tidak dapat dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi dengan melibatkan lintas sektor dan yang lebih utama adalah peran serta masyarakat. Oleh karena itu untuk keberhasilan pelaksanaan program **Yuk Nyelik Pasien**, dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) dengan didukung oleh terbangunnya pemberdayaan masyarakat melalui penggerakkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan upaya bersumber daya kesehatan masyarakat (UKBM) seperti ambulan desa, bank darah desa, dan sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat, serta peningkatan peran kader pendamping keluarga dalam pelaporan kasus, pendampingan dan pemantauan minum obat, dan lain-lain. Dengan adanya sinergi dan integrasi tim tenaga kesehatan dengan peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian keluarga dalam perawatan kesehatan.

Dari sisi perencanaan yang terintegrasi, program **Yuk Nyelik Pasien** merupakan strategi program yang melibatkan berbagai *stakeholders* dan Urusan Pemerintahan (UP) diantaranya:

1. UP Bidang Kesehatan, berkontribusi dalam:
 - a. Melaksanakan UKP dan UKP dan layanan pendukungnya;
 - b. Menyediakan database pasien dan melakukan klasifikasi pasien sesuai fokus program yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin dan tidak mampu serta memiliki masalah kesehatan.

2. UP Bidang Sosial, berkontribusi dalam:
 - a. Memperkuat kualitas DTKS sebagai basis Intervensi Program dan Kegiatan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Layanan SLRT;
 - c. Meningkatkan layanan Jaminan & Perlindungan Sosial.
3. UP Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, berkontribusi dalam:
 - a. Menurunkan tingkat *unmet need* KB;
 - b. Mendorong penggunaan alat kontrasepsi metode modern;
 - c. Penyediaan Database Keluarga Sejahtera yang akurat dan sebagai basis intervensi peningkatan kesejahteraan keluarga.
4. UP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi dalam peningkatan peran kader pendamping keluarga dan pemantauan perawatan kesehatan keluarga.

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program **Yuk Nyelik Pasien** ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan layanan pasca perawatan;
2. Mempercepat penurunan penyakit menular;
3. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta balita;
4. Memperkuat upaya pemulihan kesehatan dalam penanganan Pandemi COVID-19;
5. Meningkatkan kompetensi SDM kesehatan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas SPM kesehatan;
8. Kemitraan yang baik dengan multi pihak (BPJS & Masyarakat);
9. Pencegahan dan penanganan stunting;
10. Mengembangkan Kabupaten Sehat;
11. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan;
12. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan pada FKTP dan FKTL.

Untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program **Yuk Nyelik Pasien** tersebut, perlu dukungan lintas sektor untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya, meliputi:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

- 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dukungan lintas dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program **Yuk Nyelik Pasien** juga diperlukan dukungan dalam lingkup yang lebih luas, meliputi dukungan dari pemerintah provinsi maupun nasional. Dukungan lintas sektor dari lingkup pemerintah provinsi yang diperlukan dalam pelaksanaan program **Yuk Nyelik Pasien** yaitu Dinas Kesehatan. Sedangkan dari tingkat nasional, diperlukan dukungan dari Kementerian Kesehatan.

3. YUK KE UME

Yuk Ke Ume secara harfiah dalam bahasa Belitung merupakan ajakan untuk pergi ke kebun, sejak dulu masyarakat lokal Belitung Timur memiliki kebun atau bekerja di kebun. Sehingga secara filosofis, program **Yuk Ke Ume** merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk membantu pencapaian ketahanan pangan baik ketahanan pangan keluarga (bersifat subsisten/pemenuhan kebutuhan sendiri) dan ketahanan pangan daerah (bersifat komersil dan produksi massal).

Melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integrative dan Spasial), program **Yuk Ke Ume** didukung oleh beberapa *stakeholders* dan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Pertanian, berkontribusi dalam :
 - a. Menyediakan penyediaan dan pengembangan sarara dan prasarana pertanian;
 - b. Meningkatkan cakupan penyuluhan pertanian;
 - c. Meningkatkan pengelolaan hewan ternak.
2. Pangan
 - a. Mengelola ketahanan pangan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Perikanan
 - a. Meningkatkan pembinaan perikanan budidaya;
 - b. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Program **Yuk Ke Ume** diharapkan dapat memberi dampak meningkatkan produktivitas ekonomi unggulan Belitung Timur. Untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program **Yuk Ke Ume** tersebut, perlu dukungan lintas sektor untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya, meliputi:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 2) Dinas Pertanian dan Pangan;
- 3) Dinas Perikanan;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Selain perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dukungan lintas dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program **Yuk Ke Ume** juga diperlukan dukungan dalam lingkup yang lebih luas, meliputi dukungan dari pemerintah provinsi maupun nasional. Dukungan lintas sektor dari lingkup pemerintah provinsi yang diperlukan dalam pelaksanaan program **Yuk Ke Ume** antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan dari tingkat nasional, diperlukan dukungan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial.

4. LAWANG BELTIM

Kebutuhan akan tersedianya informasi yang mudah diakses, cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu dasar pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Kebutuhan informasi bahkan sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. **Lawang Beltim** merupakan program inovasi daerah yang dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sebagai upaya membuat sebuah portal layanan terpadu berbasis elektronik guna memudahkan pelayanan, komunikasi dan pertukaran data dan informasi antar pemangku kepentingan yang cepat, mudah dan transparan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki kanal informasi resmi Pemerintah Daerah yang menampilkan secara interaktif jurnal informasi pembangunan daerah, mensosialisasikan kebijakan/program Pemerintah Daerah, menyajikan potensi dan keunggulan daerah serta menyediakan media bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan *feedback* dari masyarakat dalam rangka upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Lawang Beltim adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana promosi yang berpengaruh terhadap opini publik, peningkatan kunjungan wisatawan serta keputusan investor dalam berinvestasi. Data-data maupun informasi yang disajikan dalam **Lawang Beltim** diharapkan mampu menjadi acuan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur jangka panjang maupun jangka pendek.

Untuk keberhasilan dan keberlanjutan program **Lawang Beltim**, perlu dukungan lintas sektor untuk berkontribusi dalam pelaksanaan, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Dinas Komunikasi dan Informatika, berkontribusi dalam:
 - a. Menyediakan infrastruktur jaringan;
 - b. Menyediakan informasi yang akan dijadikan konten dalam **Lawang Beltim**, baik di internal pemerintah daerah maupun eksternal/vertikal;
 - c. Berkolaborasi dalam pengembangan **Lawang Beltim**.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan;
5. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; serta
6. Seluruh perangkat daerah berkontribusi dalam menjadikan Lawang Beltim sebagai media promosi dan publikasi berbagai layanan ke seluruh masyarakat.

Selain perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dukungan lintas dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program **Lawang Beltim** juga diperlukan dukungan dalam lingkup yang lebih luas, meliputi dukungan dari pemerintah provinsi maupun nasional. Dukungan lintas sektor dari lingkup pemerintah provinsi yang diperlukan dalam pelaksanaan program **Lawang Beltim** yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan dari tingkat nasional, diperlukan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

5. BELTIM TERANG BENDERANG

Merupakan program inovasi daerah yang dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, integrative dan Spasial) sebagai upaya untuk menciptakan Kabupaten Belitung Timur yang semarak dan meningkatkan daya tarik kawasan terutama pada kawasan-kawasan tertentu yang diprioritaskan.

Tujuan program **Beltim Terang Benderang** antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik kawasan yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar kawasan;
2. Mengurangi potensi angka kriminalitas dengan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu rasa amannya akibat kurangnya pencahayaan pada kawasan tertentu.

Untuk keberhasilan program **Beltim Terang Benderang**, perlu dukungan lintas sektor dari urusan pemerintahan dan beberapa *stakeholders* atau perangkat daerah, meliputi: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perhubungan,

Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dukungan lintas sektor diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaannya, mencakup:

1. Perhubungan berkontribusi dalam pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini penerangan jalan umum;
2. Lingkungan Hidup berkontribusi dalam penerangan taman-taman (ruang terbuka hijau);
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungannya.

Selain perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dukungan lintas dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program **Beltim Terang Benderang** juga diperlukan dukungan dalam lingkup yang lebih luas, meliputi dukungan dari pemerintah provinsi maupun nasional. Dukungan lintas sektor dari lingkup pemerintah provinsi yang diperlukan dalam pelaksanaan program **Beltim Terang Benderang** antara lain Dinas Perhubungan dan Dinas ESDM. Sedangkan dari tingkat nasional, diperlukan dukungan dari Kementerian ESDM dan PLN.

6.5 Program Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian visi misi pembangunan daerah, diperlukan langkah-langkah konkrit dalam bentuk program-program pembangunan yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi misi daerah. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menetapkan beberapa program pembangunan yang menjadi prioritas (super prioritas) untuk dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Program prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- 1) **Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik**

Pelaksanaan pembangunan pada Misi 1, diprioritaskan pada:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
6. Program Penyelenggaraan Pengawasan
7. Program Pengelolaan Izin Lokasi
8. Program Pelayanan Penanaman Modal
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

12. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
13. Program Administrasi Umum
14. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
15. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2) **Misi 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja**

Pelaksanaan pembangunan pada Misi 2, diprioritaskan pada:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Promosi Penanaman Modal
7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
11. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
12. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
13. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
14. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
15. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
17. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. Program Pengembangan Ekspor
19. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
20. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
21. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
22. Program Pengembangan UMKM
23. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3) **Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan**

Pelaksanaan pembangunan pada Misi 3, diprioritaskan pada:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
7. Program Pengembangan Perumahan
8. Program Kawasan Permukiman
9. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12. Program Penyelenggaraan Jalan
13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
14. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
15. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
16. Program Pengelolaan Persampahan
17. Program Penanggulangan Bencana
18. Program Pemberdayaan Sosial
19. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
20. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
21. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program super prioritas juga mendukung agenda dan prioritas pembangunan baik di level nasional dan provinsi serta inovasi – inovasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (**Tabel 6.5**).

6.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Hal ini bertujuan agar setiap perencanaan yang dihasilkan dapat saling terkoordinasi; terjamin integrasi, sinkronisasi, dan tersinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah; serta dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap prioritas pembangunan daerah yang muncul dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 akan selalu berkaitan dengan agenda pembangunan pada level yang lebih tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pembangunan di Kabupaten Belitung Timur memiliki dasar yang kuat juga tetap dalam koridor pencapaian prioritas pembangunan baik level provinsi maupun nasional.

Semua prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 tercermin dalam setiap program pembangunan daerah yang menginduk pada agenda pembangunan sesuai RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN. Tujuh agenda pembangunan tersebut diturunkan menjadi 31 prioritas pembangunan nasional dengan substansi dan redaksi yang lebih spesifik mulai dari pengelolaan sumber daya ekonomi, pengembangan komoditas unggulan, pengendalian penduduk, sampai dengan reformasi birokrasi dan tata kelola. Secara detail, prioritas pembangunan nasional yang ketiga tentang kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan prioritas pembangunan yang menurunkan program terbanyak dalam penyusunan RPJMD ini yaitu 53 program daerah, dilanjutkan oleh prioritas nasional kesatu tentang ketahanan ekonomi nasional sebanyak 46 program daerah dan prioritas ketiga tentang pengembangan kewilayahan yang menurunkan sebanyak 30 program daerah. Adapun detail keterkaitan antara agenda dan prioritas pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada **Tabel 6.7**.

Tabel 6.5 Integrasi Program Inovasi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur

TEMATIK					INTEGRASI PROGRAM RPJMD 2021 - 2026					
NO	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG (RPJMD PROVINSI)	PRIORITAS KABUPATEN BELTIM	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM SUPER PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	ANGGARAN
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat; Pembangunan Agropolitan	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan	"YUK KEUME"	BAPPELITBANGDA KAB. BELTIM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100%	35.310.300.000
								Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100%	
					DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. BELTIM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	20%	11.043.000.000
								Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	20%	13.881.000.000
								Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan (BPP) dan wilayah binaan (Desa)	7%	5.255.648.000
								Penurunan jumlah kasus penyakit hewan, Penurunan jumlah kasus gangguan reproduksi pada sapi, Penurunan angka kematian pedet, Peningkatan ketersediaan obat hewan dan sarana kesehatan hewan lainnya, Peningkatan jumlah unit usaha hasil ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)	20%	2.247.500.000
								Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	87,5%	2.538.357.500
								Terlaksananya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	0%	390.000.000
								DINAS PERIKANAN KAB. BELTIM	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan		63%	13.853.961.000
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BELTIM	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45%	104.976.187.500
								Rasio jaringan irigasi	33,09 m/ha	
								Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	
								Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	54%	
					DINAS PERTANIAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	75% (2022)	34.535.265.000
								Persentase Pertambahan kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	75% (2022)	18.317.632.500
								Persentase kelembagaan aktif	75% (2022)	18.317.632.500

TEMATIK					INTEGRASI PROGRAM RPJMD 2021 - 2026							
NO	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG (RPJMD PROVINSI)	PRIORITAS KABUPATEN BELTIM	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM SUPER PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	ANGGARAN		
							PROGRAM PERKEBUNAN	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	4118,19 (2022)	4.922.400.500		
								Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	199,96 (2022)	4.922.400.500		
								Peningkatan produksi lada	53883 (2022)	30.349.000.000		
								Pertambahan jumlah kelompok yang menerapkan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	131 (2022)	27.774.000.000		
								Tersedianya kawasan pengembangan budi daya lada	1 (2022)	28.624.000.000		
								Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan	106 (2022)	28.154.000.000		
								PROGRAM TANAMAN HOLTIKULTURA	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	60017 (2022)	4.853.618.500	
								Pertambahan jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	70 (2022)	4.697.066.000		
								DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PROGRAM PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	19,375 (2022)	1.220.000.000
										Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6.9% (2022)	2.782.230.000
										PROGRAM USAHA PERIKANAN DAN PERIKANAN	Volume Kontribusi Perikanan Budidaya	13620 (2022)
									Volume Produksi Olahan	22610 (2022)	2.587.605.000	
							DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PROGRAM SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	0.4 (2022)	16.540.000.000	
									Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	0.85 (2022)	99.999.500.000	
									Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	0.18 (2022)	14.872.543.635	
								KEMENTERIAN PERTANIAN RI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian	269.884 (2024)	1.536.000.000.000
									Jumlah pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanam tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	1.100 (2024)	716.400.000.000	
									Jumlah unit embung pertanian untuk penambahan areal pertanian	400 (2024)	254.800.000.000	
									Jumlah unit irigasi perpipaan mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	138 (2024)	84.300.000.000	
									Jumlah perluasan areal pertanian	10.000 (2024)	1.021.700.000.000	
							Jumlah lahan pertanian yang dioptimasi		100.000 (2024)	2.309.200.000.000		
							Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian		20.000 (2024)	265.500.000.000		
							KEMENTERIAN SOSIAL RI		PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah KTH Mandiri	500 (2024)	120.800.000.000

TEMATIK					INTEGRASI PROGRAM RPJMD 2021 - 2026						
NO	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG (RPJMD PROVINSI)	PRIORITAS KABUPATEN BELTIM	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM SUPER PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	ANGGARAN	
								Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi)	7.500 (2024)	273.000.000.000	
								Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan wanawiyata widyakarya)	50 (2024)	6.200.000.000	
								PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	133 (2024)	24.993.840.000.000
								Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10.000.000 (2024)	15.442.220.000.000	
2	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial	"YUK SEKOLAH"	BAPPELITBANGDA KAB. BELTIM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100%	35.310.300.000,00	
							Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100%			
						PROGRAM PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	70%	326.293.172.500,00	
								Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	95%		
								Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	74%		
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS	76%	6.473.000.000	
								Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	76%		
								Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI	97%		
								Persentase pengawas dan kepala sekolah yang bersertifikat	100%		
							PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan program kesetaraan paket A, B, C	100%	915.000.000,00	
								Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	86%		
							PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Penyediaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota	4 kegiatan	390.000.000,00	
								Pengembangan koleksi muatan lokal dan budaya etnis	4%		
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. BELTIM		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	1,45	7.340.960.000	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	14.260.000.000	
								Persentase wirausaha muda	3%		
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. BELTIM		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pelatihan SDM kepramukaan	55%	4.455.000.000	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	100%	106.543.094.900	
								Persentase pembinaan cabang keolahragaan	85%		
					DINAS KEBUDAYAAN DAN		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	70%	13.228.368.154	

TEMATIK					INTEGRASI PROGRAM RPJMD 2021 - 2026					
NO	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG (RPJMD PROVINSI)	PRIORITAS KABUPATEN BELTIM	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM SUPER PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	ANGGARAN
					PARIWISATA KAB. BELTIM					
					SATPOL PP KAB. BELTIM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100% 39%	34.434.027.000
					DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah keluarga yang terlayani	50%	705.938.687
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Forum Anak Desa	9%	2.523.515.624
								Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	3%	
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100%	4.402.276.187
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah dokumen data gender yang tersedia	1 dokumen	828.844.687
					DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB BELTIM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun (kelahiran per 1.000 perempuan)	15%	1.533.137.000
					DINAS PERHUBUNGAN KAB BELTIM	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	35%	86.177.028.702
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. KEP BABEL		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100% (2022)	15.210.000.000
								APK SMA	0.4394 (2022)	170.500.000.000
								Persentase SMA terakreditasi A	0.6061 (2022)	9.500.000.000
								APK SLB	0 (2022)	65.250.000.000
								Persentase SLB terakreditasi A	1 (2022)	1.500.000.000
								Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan peternakan yang memiliki akreditasi A	100 (2022)	3.355.476.472
								Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	100 (2022)	3.355.476.472
								Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	100 (2022)	3.355.476.472
								Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikatProfesi pihak 1 (LSP-P1)	100 (2022)	3.355.476.472
								Persentase SMK terakreditasi A	0,6 (2022)	2.232.178.077
					KEMENTERIAN PENDIDIKAN RI		PENINGKATAN LAYANAN PEMERATAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	500 (2022)	15.020.000.000
								Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	12150 (2024)	94.600.000.000
								Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10.360.614 (2024)	23.320.800.000.000
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan	Pembangunan Kesehatan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan dasar dan pemulihan	"YUK NYELIK PASIEN"	BAPPELITBANGDA KAB. BELTIM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen	35.310.300.000
								Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100 Persen	
								Cakupan Desa Siaga Aktif	100 Persen	3.385.000.000,00

TEMATIK					INTEGRASI PROGRAM RPJMD 2021 - 2026					
NO	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG (RPJMD PROVINSI)	PRIORITAS KABUPATEN BELTIM	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM SUPER PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	ANGGARAN
	pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk		ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial		DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEHATAN BIDANG	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	100 Persen	74.471.165.000,00
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 Persen	
								Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	75 Persen	
						ROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	97 Persen	474.182.236.050,00
								Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan balita	95 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	85 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100 Persen	
								Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100 Persen	
								Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	90 Persen	
								Persentase rumah sakit terakreditasi	100 Persen	
								Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	97 Persen	
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Cakupan PUS Unmet Need	5,19 Persen	7.901.268.325,00
							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	100 Persen	3.401.181.950,00
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun (kelahiran per 1.000 perempuan)	15	1.533.137.000,00
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Penggunaan Obat Rasional	95 Persen	828.000.000,00
					DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA			Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	100 Persen	8.166.804.983,00
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemberian bantuan sosial	100 Persen	
								Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100 Persen	22.388.196.135,00
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), keluarga dan masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 Persen	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 Persen	7.022.345.059,00

TEMATIK					INTEGRASI PROGRAM RPJMD 2021 - 2026								
NO	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG (RPJMD PROVINSI)	PRIORITAS KABUPATEN BELTIM	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM SUPER PRIORITAS		PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	ANGGARAN		
									Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	100 Persen	7.370.057.606,00		
								PROGRAM BENCANA	PENANGANAN	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		100 Persen	
					SATPOL PP KAB. BELTIM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100 Persen	34.434.027.000,00		
									Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	390 Persen			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM BENCANA	PENANGGULANGAN	PROGRAM BENCANA	Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	100 Persen	56.305.101.000,00		
									Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 Persen			
									Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	100 Persen			
									Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	100 Persen			
					DINAS KESEHATAN PROV. KEP BABEL			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat				
					KEMENTERIAN KESEHATAN RI			Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi			100 Persen (2024)	100 Persen (2024)
									Persentase rumah sakit terakreditasi				
4	Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	Pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan	Mewujudkan stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar	"BELTIM TERANG BENDERANG"	BAPPELITBANGDA KAB. BELTIM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen	35.310.300.000,00			
							Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100 Persen					
					DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Insfrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	35 Persen	86.177.028.702			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELTIM		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	62,5 Persen	3.750.000.000			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BELTIM	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luas Ruang Terbuka Hijau	23 Persen	8.893.039.500			
					DINAS PERHUBUNGAN PROV. KEP. BABEL			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	1210 unit (2022)	45.187.440.731		
					DINAS ESDM PROV. KEP BABEL			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTIKAN					
					KEMENTERIAN ESDM RI	ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN		Rasio elektrifikasi (%)	100 Persen (2024)	183.712.000.000.000			
								Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1408 kWh (2024)				
								Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	6,07 juta ton (2024)				
								Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	19,5 Persen (2024)				
PLN					Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Indeks Ketahanan Energi (Indeks	70,3 (2024)	177.775.200.000.000					
5	Memperkuat infrastruktur mendukung	(PP 1) Peningkatan Ekonomi; (PP 6) Pembangunan Pariwisata	Memperkuat daya saing daerah dan inovasi	"LAWANG BELTIM"	BAPPELITBANGDA KAB. BELTIM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100%	35.310.300.000,00			

NO	TEMATIK				HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	INTEGRASI PROGRAM RPJMD 2021 - 2026				
	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG (RPJMD PROVINSI)	PRIORITAS KABUPATEN BELTIM	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR		PROGRAM SUPER PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026	ANGGARAN
	pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.		penyelenggaraan pemerintahan daerah					Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100%	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BELTIM		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	100%	9.889.000.000,00
						PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM INFORMATIKA APLIKASI	Tingkat kematangan aspek TIK	3,5%	31.391.330.187,00
					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. BELTIM		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Daerah	4,0%	21.450.000.000,00
					DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KAB. BELTIM	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	2,99%	5.631.000.000,00
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	2%	2.950.750.000,00
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait penanaman modal yang telah ditetapkan	100%	770.000.000,00
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	37.006.000.000,00
					DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BELTIM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	36%	2.750.000.000,00
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	50%	1.090.000.000,00
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KEP BABEL		PROGRAM PENEGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	55% (2022)	350.000.000,00
								Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	55% (2022)	350.000.000,00
								Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	55% (2022)	350.000.000,00
								Persentase sarana komunikasi yang digunakan dalam publikasi	20% (2022)	11.200.000.000
								Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	100% (2022)	25.810.045.000,00
								Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	100% (2022)	1.325.822.500,00
							PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
								Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	60 (2024)	44.185.000.000.000
					KEMETERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI		TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase desa yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband	95 (2024)	

Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2026

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026									
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
MISI 1	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik																	
TUJUAN 1	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,12	55,00		58,00		61,00		63,00		65,00		65,00			
SASARAN 1	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Persen	65,00	68,00		71,00		74,00		77,00		80,00		80,00			
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (T)	Tinggi (T)		Tinggi (T)		Sangat Tinggi (ST)		Sangat Tinggi (ST)		Sangat Tinggi (ST)		Sangat Tinggi (ST)			
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	10.377.912.000,00	100,00	12.963.612.000,00	100,00	13.024.512.000,00	100,00	13.088.457.000,00	100,00	13.314.779.250,00	100,00	62.769.272.250,00	Sekretariat Daerah	
		Persentase kebijakan dan pembinaan keagamaan yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				Sekretariat Daerah	
		Persentase regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				Sekretariat Daerah	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026										
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program- program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi	Persen	80,00	85,00	9.871.803.143,00	85,00	11.969.018.046,00	85,00	11.928.015.143,00	85,00	13.245.015.143,00	85,00	14.044.498.474,00	85,00	61.058.349.949,00	Sekretariat DPRD		
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	Persen	0,00	100,00	1.012.439.000,00	100,00	1.110.003.900,00	100,00	1.865.053.750,00	100,00	2.888.830.750,00	100,00	2.312.759.750,00	100,00	9.189.087.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	Persen	0,00	100,00	4.010.300.000,00	100,00	7.450.000.000,00	100,00	7.700.000.000,00	100,00	7.950.000.000,00	100,00	8.200.000.000,00	100,00	35.310.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	0,00	50,00	3.750.000.000,00	55,00	5.850.000.000,00	60,00	5.150.000.000,00	65,00	5.150.000.000,00	70,00	5.150.000.000,00	70,00	25.050.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
		Persentase implemetasi rencana kelitbangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	558.551.500,00	100,00	690.212.000,00	100,00	690.212.000,00	100,00	700.212.000,00	100,00	700.212.000,00	100,00	3.339.399.500,00	Inspektorat Daerah	
SASARAN 2	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	75,00	76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		80,00			
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Persen	100,00	100,00	2.739.865.964,00	100,00	3.050.609.262,00	100,00	3.115.639.726,00	100,00	3.235.171.712,00	100,00	3.334.430.297,00	100,00	15.475.716.961,00	Sekretariat Daerah	
Tingkat kematangan UKPBJ		Level Proaktif	5,00	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		Sekretariat Daerah		
Persentase peningkatan kualitas kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan,dan sumber daya alam		Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah		
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	10,00	10,00	109.432.255.549,00	10,00	114.667.802.149,00	10,00	120.405.031.662,00	10,00	126.431.634.880,00	10,00	132.762.394.933,00	10,00	603.699.119.173,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Persentase realisasi SP2D tepat waktu	Persen	95,00	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	0,75	0,80		0,81		0,83		0,87		0,88		0,88		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Persen	85,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Ketepatan waktu penetapan Raperda APBD	Angka	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023		2024		2025		2026						
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
																	Pendapatan Daerah	
		Persentase belanja pendidikan	Persen	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Angka	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Rasio belanja pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	27,00	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Ketepatan waktu penetapan Raperda Perubahan APBD	Angka	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Persentase belanja kesehatan	Persen	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Proporsi pajak terhadap total belanja	Persen	7,00	6,96		7,43		7,56		7,76		8,12		8,12		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	Persen	100,00	100,00	781.671.700,00	100,00	866.977.970,00	100,00	962.599.643,00	100,00	1.070.014.451,00	100,00	1.190.959.451,00	100,00	4.872.223.215,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Kesesuaian barang milik daerah dengan nilai aset di neraca	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	Persen	1,32	1,37	1.808.398.100,00	1,40	1.945.539.306,00	1,42	1.807.344.825,00	1,44	2.293.259.589,00	1,48	1.954.209.835,00	1,48	9.808.751.655,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
		Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	Persen	13,16	13,73		14,03		14,17		14,38		14,81		14,81		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Kemandirian keuangan daerah	Persen	13,16	13,73		14,03		14,17		14,38		14,81		14,81		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	
SASARAN 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	B	BB		BB		BB		BB		BB		BB			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persen	85,91	87,00	1.394.058.200,00	89,00	1.394.058.200,00	91,00	1.394.058.200,00	93,00	1.394.058.200,00	96,00	1.394.058.200,00	96,00	6.970.291.000,00	Inspektorat Daerah
		Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	70,86	73,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		Inspektorat Daerah	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100,00	100,00	42.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	467.000.000,00	Kecamatan Damar
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	75,00	100,00	80.000.000,00	100,00	102.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.000.000,00	100,00	135.000.000,00	100,00	532.000.000,00	Kecamatan Dendang	
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	57,00	69,00	39.717.500,00	69,00	39.000.000,00	80,00	41.500.000,00	83,00	41.500.000,00	88,00	41.500.000,00	88,00	203.217.500,00	Kecamatan Gantung	
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100,00	100,00	147.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	230.000.000,00	100,00	255.000.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	1.117.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit	
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100,00	100,00	220.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	985.000.000,00	Kecamatan Manggar	
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100,00	100,00	57.500.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	265.000.000,00	100,00	1.102.500.000,00	Kecamatan Simpang Pesak	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100,00	100,00	122.000.000,00	100,00	87.000.000,00	100,00	97.000.000,00	100,00	99.000.000,00	100,00	99.000.000,00	100,00	504.000.000,00	Kecamatan Simpang Renggang
TUJUAN 2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	3,20	3,35		3,50		3,65		3,80		3,95		3,95		
SASARAN 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	70,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kematangan perangkat daerah	Skor	28,375	28,375	31.852.594.171,00	28,38	37.493.674.456,00	30,00	44.286.358.177,00	30,00	41.205.676.086,00	37,10	40.846.709.891,00	37,10	195.685.012.781,00	Sekretariat Daerah
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP	Nilai	6,00	6,00		5,00		5,00		4,00		4,00		4,00		Sekretariat Daerah
		Kualitas pelayanan pimpinan aparatur perangkat daerah	Kategori	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	10.866.611.900,00	100,00	11.121.240.050,00	100,00	11.144.748.802,00	100,00	11.346.476.566,00	100,00	11.528.116.278,00	100,00	56.007.193.596,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	90,00	6.624.437.066,00	90,00	7.819.019.775,00	90,00	7.969.645.130,00	90,00	8.714.369.950,00	90,00	9.509.170.200,00	90,00	40.636.642.121,00	Dinas Perikanan
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	100,00	6.542.212.298,00	100,00	10.447.136.674,00	100,00	10.966.993.508,00	100,00	11.512.843.184,00	100,00	16.748.424.219,00	100,00	56.217.609.883,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP	Nilai	3,00	3,00	7.388.700.000,00	3,00	8.040.390.000,00	3,00	8.043.544.500,00	3,00	7.943.715.200,00	3,00	10.698.248.783,00	3,00	42.114.598.483,00	Dinas Perhubungan
		Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perhubungan

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perhubungan		
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Dinas Perhubungan		
		Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perhubungan		
2	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	12.975.317.016,00	100,00	15.605.650.000,00	100,00	15.891.410.500,00	100,00	16.619.076.750,00	100,00	17.376.761.500,00	100,00	78.468.215.766,00	Dinas Pertanian dan Pangan
				Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP	Nilai	4,00	4,00		4,00		3,00		3,00		2,00		2,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
				Perangkat Daerah Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP	Nilai	69,94	71,00		73,00		80,00		83,00		85,00		85,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	2.618.104.000,00	100,00	4.325.000.000,00	100,00	4.351.000.000,00	100,00	4.471.000.000,00	100,00	4.601.000.000,00	100,00	20.366.104.000,00	Kecamatan Damar
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	2.912.360.000,00	100,00	4.875.200.000,00	100,00	5.362.500.000,00	100,00	5.168.000.000,00	100,00	5.648.500.000,00	100,00	23.966.560.000,00	Kecamatan Dendang
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	100,00	3.734.392.500,00	100,00	4.201.530.000,00	100,00	3.983.605.000,00	100,00	3.901.230.000,00	100,00	4.109.000.000,00	100,00	19.929.757.500,00	Kecamatan Gantung

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026										
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	4.416.990.000,00	100,00	5.443.237.500,00	100,00	5.872.923.125,00	100,00	6.572.615.438,00	100,00	6.592.246.209,00	100,00	28.898.012.272,00	Kecamatan Kelapa Kampit		
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	3.629.000.000,00	100,00	5.062.000.000,00	100,00	4.394.000.000,00	100,00	4.576.000.000,00	100,00	5.172.000.000,00	100,00	22.833.000.000,00	Kecamatan Manggar		
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	2.944.838.500,00	100,00	3.745.000.000,00	100,00	3.927.812.500,00	100,00	4.123.690.625,00	100,00	4.015.890.625,00	100,00	18.757.232.250,00	Kecamatan Simpang Pesak		
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	3.337.611.500,00	100,00	3.989.936.500,00	100,00	4.480.874.000,00	100,00	4.560.374.000,00	100,00	4.541.374.000,00	100,00	20.910.170.000,00	Kecamatan Simpang Renggiang		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00	5.122.650.000,00	3,00	7.773.000.000,00	3,00	7.971.000.000,00	3,00	8.652.000.000,00	3,00	8.628.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks profesionalisme aparatur	Persen	80,00	85,00	22.956.014.920,00	85,00	22.710.940.920,00	90,00	24.485.940.920,00	90,00	24.987.889.024,00	95,00	25.215.219.024,00	95,00	120.356.004.808,00	Sekretariat DPRD
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	80,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00	Sekretariat DPRD	

KODE			MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2021		2022		2023		2024		2025					2026
						TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Sekretariat DPRD		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	5.797.859.691,00	100,00	7.128.586.560,00	100,00	7.531.773.492,00	100,00	8.288.469.115,00	100,00	8.713.734.303,00	100,00	37.460.423.161,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	4.586.725.000,00	100,00	5.938.674.000,00	100,00	6.092.674.000,00	100,00	6.068.174.000,00	100,00	5.830.174.000,00	100,00	28.516.421.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	Persen	0,00	100,00	7.050.526.082,00	100,00	9.072.584.954,00	100,00	8.034.268.560,00	100,00	7.722.875.560,00	100,00	9.302.875.560,00	100,00	41.183.130.716,00	Inspektorat Daerah

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja															
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00	99.619.967,00	3,00	103.693.908.000,00	3,00	108.989.851.000,00	3,00	113.703.607.000,00	3,00	113.732.639.000,00	3,00	440.219.624.967,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00	6.354.241.180,00	100,00	8.589.241.180,00	100,00	9.454.241.180,00	100,00	10.124.741.180,00	100,00	11.009.741.180,00	100,00	45.532.205.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	0,00	100,00	4.067.263.205,00	100,00	4.309.977.766,00	100,00	4.463.057.321,00	100,00	4.339.822.713,00	100,00	5.009.107.025,00	100,00	22.189.228.030,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,00	76,00	4.362.142.000,00	77,00	6.874.650.000,00	78,00	6.112.110.000,00	80,00	6.903.340.000,00	80,00	7.153.670.000,00	80,00	31.405.912.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Nilai	3,00	3,00	6.429.000.000,00	3,00	7.922.000.000,00	3,00	7.128.000.000,00	3,00	7.125.000.000,00	3,00	7.125.000.000,00	3,00	35.729.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE			MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							2021		2022		2023		2024		2025					2026	
							TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp	TARGET
							TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Nilai	3,00	3,00			3,00		3,00		3,00		3,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
				Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	7.262.520.500,00	100,00	9.180.134.550,00	100,00	8.760.176.225,00	100,00	8.911.022.551,00	100,00	9.597.027.172,00	100,00	43.710.880.998,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	67,00	5.248.790.000,00	3,00	9.670.500.000,00	3,00	10.802.500.000,00	3,00	11.934.300.000,00	3,00	12.949.500.000,00	3,00	50.605.590.000,00	Dinas Perpustakaan		
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perpustakaan			
				Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	Persen	100,00	25,00			100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perpustakaan			
				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,75	60,00			67,50		68,00		69,00		70,00		Dinas Perpustakaan			

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	70,00	5.689.700.000,00	73,00	6.790.700.000,00	76,00	6.620.700.000,00	79,00	7.210.700.000,00	82,00	7.291.700.000,00	82,00	33.603.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	0,00	100,00	6.733.300.659,00	100,00	6.694.065.692,00	100,00	7.579.118.976,00	100,00	7.380.207.225,00	100,00	7.911.285.300,00	100,00	36.297.977.852,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	165.069.079.500,00	100,00	177.687.500.000,00	100,00	187.490.000.000,00	100,00	197.332.500.000,00	100,00	207.870.000.000,00	100,00	935.449.079.500,00	Dinas Pendidikan
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	Persen	95,00	95,00	17.454.135.528,00	96,00	19.149.842.304,00	97,00	18.337.084.421,00	98,00	18.871.838.640,00	99,00	19.337.180.579,00	99,00	93.150.081.472,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Indeks profesionalisme aparatur	Persen	95,00	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	70,00	8.037.508.500,00	73,00	9.610.497.000,00	76,00	10.527.747.000,00	79,00	11.264.175.000,00	82,00	11.681.738.000,00	82,00	51.121.665.500,00	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	7.488.410.000,00	100,00	8.862.062.700,00	100,00	9.314.707.900,00	100,00	8.627.660.100,00	100,00	9.649.019.500,00	100,00	43.941.860.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023		2024		2025		2026						
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	37,17	37,53		37,93		38,29		38,64		39,00		39,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	12,62	13,04		13,79		14,39		14,78		15,10		15,10		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100,00	100,00	8.218.670.592,00	100,00	9.608.000.000,00	100,00	9.426.000.000,00	100,00	9.591.000.000,00	100,00	9.855.000.000,00	100,00	46.698.670.592,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Angka	0,00	20,00	300.000.000,00	40,00	600.000.000,00	60,00	900.000.000,00	80,00	700.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00	DPUPR
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persen	0,00	42,86	713.000.000,00	57,14	715.000.000,00	71,43	718.000.000,00	85,71	719.000.000,00	100,00	720.000.000,00	100,00	3.585.000.000,00	DPUPR
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persen	18,48	19,00	1.940.437.500,00	20,00	1.761.500.500,00	20,00	1.762.600.500,00	20,00	1.763.700.500,00	20,00	1.764.800.500,00	20,00	8.993.039.500,00	DPUPR

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase tersedianya layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	Persen	0,00	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	275.000.000,00	100,00	275.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	1.350.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	100,00	100,00	4.438.362.000,00	100,00	6.646.377.500,00	100,00	7.208.512.500,00	100,00	7.851.012.500,00	100,00	8.289.762.500,00	100,00	34.434.027.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase izin lokasi yang diberikan	Persen	0,00	20,00	40.000.000,00	40,00	50.000.000,00	60,00	50.000.000,00	80,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	240.000.000,00	DPUPR
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	Persen	0,00	80,00	200.000.000,00	60,00	300.000.000,00	40,00	300.000.000,00	20,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	DPUPR
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Persen	0,00	60,00	150.000.000,00	50,00	150.000.000,00	40,00	150.000.000,00	20,00	150.000.000,00	10,00	150.000.000,00	10,00	750.000.000,00	DPUPR
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase proses penetapan subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah yang terlaksana	Persen	0,00	20,00	350.000.000,00	40,00	600.000.000,00	60,00	600.000.000,00	80,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	2.750.000.000,00	DPUPR
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase permohonan legalitas pertanahan yang disetujui	Persen	0,00	0,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	DPUPR
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Persen	0,00	76,00	250.000,00	76,00	100.000.000,00	76,00	100.000.000,00	76,00	100.000.000,00	76,00	100.000.000,00	76,00	400.250.000,00	DPUPR
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah yang diberikan	Persen	0,00	20,00	200.000.000,00	40,00	200.000.000,00	60,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	DPUPR

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan sesuai peraturan perundangan, mekanisme di dalam maupun diluar pengadilan	BA Pengaduan	0,00	10,00	100.000.000,00	15,00	125.000.000,00	17,00	150.000.000,00	19,00	175.000.000,00	20,00	200.000.000,00	20,00	750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP	Angka	97,00	1,00	534.740.000,00	1,00	606.446.400,00	1,00	728.231.040,00	1,00	751.404.144,00	1,00	779.804.144,00	1,00	3.400.625.728,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP	Persen	97,14	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	72,18	80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran	Persen	94,41	97,00	444.220.809,00	100,00	587.642.889,00	100,00	646.407.178,00	100,00	711.047.896,00	100,00	758.175.060,00	100,00	3.147.493.832,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio penerbitan akta kematian	Angka	0,95	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Rasio pasangan berakte nikah	Angka	89,00	92,00		96,00		1,00		1,00		1,00		1,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	98,96	99,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase usulan penataan desa yang ditindaklanjuti	Persen	0,00	100,00	60.000.000,00	100,00	367.184.947,00	100,00	385.544.194,00	100,00	404.821.404,00	100,00	425.062.472,00	100,00	1.642.613.017,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama antardesa terlaksana	Persen	0,00	100,00	70.000.000,00	100,00	367.500.000,00	100,00	385.875.000,00	100,00	405.168.750,00	100,00	425.427.187,00	100,00	1.653.970.937,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persen	0,00	100,00	2.877.673.000,00	100,00	4.369.789.800,00	100,00	4.590.679.290,00	100,00	4.822.463.254,00	100,00	5.064.686.415,00	100,00	21.725.291.759,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	Persen	0,00	100,00	825.627.000,00	100,00	1.701.000.000,00	100,00	1.786.050.000,00	100,00	1.875.352.500,00	100,00	1.969.120.123,00	100,00	8.157.149.623,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026									
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	82,00	83,50	274.132.500,00	84,00	323.996.000,00	84,50	339.195.800,00	85,00	355.155.000,00	86,00	371.913.000,00	86,00	1.664.392.300,00	DPMPTSP	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	53,12	55,00	328.000.000,00	60,00	562.100.000	65,00	618.310.000	70,00	680.141.000	75,00	748.155.100,00	75,00	2.936.706.100,00	Dinas Perpustakaan	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penyelamatan arsip dari bencana yang terlaksana	Persen	0,00	45,00	45.000.000,00	50,00	308.000.000	55,00	338.800.000	60,00	372.680.000	65,00	409.948.000	65,00	1.474.428.000,00	Dinas Perpustakaan	
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Persentase pelayanan izin penggunaan arsip tertutup kota yang diberikan	Persen	0,00	10,00	20.000.000,00	15,00	49.500.000	20,00	54.450.000	25,00	59.895.000	30,00	65.884.500	30,00	249.729.500,00	Dinas Perpustakaan	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	0,00	26,00	30.000.000,00	30,00	30.000.000,00	35,00	30.000.000,00	40,00	30.000.000,00	45,00	30.000.000,00	45,00	150.000.000,00	DPMPTSP	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha	Persen	0,00	25,00	20.000.000,00	27,50	20.000.000,00	30,00	22.000.000,00	32,50	22.000.000,00	35,00	25.000.000,00	35,00	109.000.000,00	DPMPTSP	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	76,00	77,00	273.000.000,00	78,00	205.000.000,00	79,00	210.000.000,00	80,00	120.000.000,00	81,00	125.000.000,00	81,00	933.000.000,00	Kecamatan Damar	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	86,70	87,00	57.000.000,00	87,30	115.000.000,00	87,60	122.000.000,00	88,00	125.000.000,00	88,50	130.000.000,00	88,50	549.000.000,00	Kecamatan Dendang	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	88,78	88,79	310.000.000,00	88,80	110.000.000,00	88,82	111.000.000,00	88,84	11.000.000,00	88,85	12.000.000,00	88,85	554.000.000,00	Kecamatan Gantung	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	82,50	85,00	30.000.000,00	86,00	40.000.000,00	87,00	45.000.000,00	88,00	55.000.000,00	89,00	60.000.000,00	89,00	230.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	81,31	81,32	265.000.000,00	81,33	145.000.000,00	81,34	145.000.000,00	81,35	145.000.000,00	81,36	145.000.000,00	81,36	845.000.000,00	Kecamatan Manggar	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	85,94	86,00	25.000.000,00	87,00	235.000.000,00	88,00	235.000.000,00	89,00	235.000.000,00	90,00	235.000.000,00	90,00	965.000.000,00	Kecamatan Simpang Pesak	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	82,50	82,75	20.215.000,00	83,02	25.000.000,00	83,50	26.000.000,00	84,05	27.000.000,00	85,01	27.500.000,00	85,01	125.715.000,00	Kecamatan Simpang Renggiang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00	100,00	400.000.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	470.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	2.240.000.000,00	Kecamatan Damar
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	0,00	100,00	310.000.000,00	100,00	520.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	650.000.000,00	100,00	2.700.000.000,00	Kecamatan Dendang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	0,00	100,00	495.000.000,00	100,00	507.000.000,00	100,00	520.000.000,00	100,00	533.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	2.605.000.000,00	Kecamatan Gantung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00	100,00	500.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	850.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	0,00	100,00	450.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	520.000.000,00	100,00	535.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	2.555.000.000,00	Kecamatan Manggar
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	0,00	100,00	375.000.000,00	100,00	353.200.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	353.200.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	1.981.400.000,00	Kecamatan Simpang Pesak
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	0,00	100,00	352.000.000,00	100,00	355.000.000,00	100,00	357.000.000,00	100,00	360.000.000,00	100,00	365.000.000,00	100,00	1.789.000.000,00	Kecamatan Simpang Renggiang
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Persen	80,00	80,00	25.000.000,00	85,00	90.000.000,00	87,00	105.000.000,00	90,00	120.000.000,00	95,00	135.000.000,00	95,00	475.000.000,00	Kecamatan Damar
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	0,00	100,00	24.790.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	304.790.000,00	Kecamatan Dendang
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	0,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.500.000,00	100,00	6.500.000,00	100,00	7.000.000,00	100,00	32.000.000,00	Kecamatan Gantung

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD													
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0,00	100,00	20.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	820.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	0,00	100,00	60.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	460.000.000,00	Kecamatan Manggar
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	100,00	100,00	16.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	176.000.000,00	Kecamatan Simpang Pesak
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	100,00	100,00	35.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	235.000.000,00	Kecamatan Simpang Renggang
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa	Persen	0,00	100,00	1.102.292.100,00	50,00	1.175.387.500,00	55,00	1.238.013.200,00	60,00	1.292.119.400,00	65,00	1.346.838.500,00	65,00	6.154.650.700,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat	Persen	0,00	100,00	1.076.504.200,00	55,00	913.817.800,00	60,00	1.849.270.300,00	65,00	996.821.200,00	70,00	1.079.824.800,00	70,00	5.916.238.300,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas/LSM/OKP yang berstatus terdaftar	Persen	0,00	100,00	90.157.500,00	50,00	90.157.500,00	55,00	90.157.500,00	60,00	94.665.300,00	65,00	94.665.300,00	65,00	459.803.100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat	Persen	0,00	100,00	316.873.700,00	50,00	332.717.400,00	55,00	349.353.000,00	60,00	366.820.800,00	65,00	385.143.900,00	65,00	1.750.908.800,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik	Persen	0,00	100,00	935.517.000,00	55,00	982.290.900,00	60,00	1.031.407.200,00	65,00	1.082.977.700,00	70,00	1.137.126.500,00	70,00	5.169.319.300,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
SASARAN 5	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan	Angka Indeks	2,60	2,70		2,80		2,90		3,00		3,10		3,10		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026									
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Berbasis Elektronik (SPBE)																
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah dokumen data gender yang tersedia	Dokumen	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,00	1,00	828.844.687,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani	Persen	100,00	100,00	623.179.500,00	100,00	711.679.500,00	100,00	621.000.000,00	100,00	715.500.000,00	100,00	600.000.000,00	50,00	3.271.359.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital	Persen	0,00	10,00		20,00		30,00		40,00		50,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten	Persen	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	140.000.000,00	50,00	590.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	Persen	100,00	100,00	1.739.000.000,00	100,00	2.350.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	1.900.000.000,00	100,00	1.900.000.000,00	100,00	9.889.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan aspek TIK	Angka	1,25	2,00	4.410.000.000,00	3,00	5.475.500.000,00	3,00	6.244.175.000,00	3,00	7.125.511.250,00	3,50	8.136.143.937,00	3,50	31.391.330.187,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	0,00	54,55	60.000.000,00	63,64	60.000.000,00	72,73	60.000.000,00	81,82	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	300.000.000,00	DPMPTSP	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral bagi pembangunan daerah	Persen	57,14	100,00	725.000.000,00	100,00	875.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	950.000.000,00	100,00	950.000.000,00	100,00	4.400.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0,00	70,00	380.000.000,00	70,00	500.000.000,00	75,00	550.000.000,00	75,00	650.000.000,00	80,00	700.000.000,00	80,00	2.780.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
TUJUAN 3	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien	Indeks Merit System	Nilai 100-400	100,00	102,00		122,00		143,00		163,00		184,00		184,00			
SASARAN 6	Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan	Persen	72,00	74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		80,00			

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum	Persen	0,00	100,00	10.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	110.000.000,00	Kecamatan Damar	
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum	Persen	0,00	100,00	25.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	565.000.000,00	Kecamatan Dendang	
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	Persen	0,00	100,00	40.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	80.000.000,00	Kecamatan Gantung	
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum	Persen	100,00	100,00	84.000.000,00	100,00	96.000.000,00	100,00	110.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	540.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit	
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	Persen	0,00	100,00	80.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	570.000.000,00	Kecamatan Manggar	
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	Persen	0,00	100,00	10.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	90.000.000,00	Kecamatan Simpang Pesak	
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	Persen	0,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	65.000.000,00	Kecamatan Simpang Renggiang	
SASARAN 7	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	52,06	54,00		55,00		56,00		57,00		60,00		60,00			
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan program pengadaan, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja ASN	Persen	100,00	100,00	3.097.340.656,00	100,00	3.175.697.914,00	100,00	3.269.329.183,00	100,00	3.378.583.759,00	100,00	3.442.753.975,00	100,00	16.363.705.487,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
50402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	Persen	100,00	100,00	3.320.000.000,00	100,00	3.470.000.000,00	100,00	3.470.000.000,00	100,00	3.470.000.000,00	100,00	3.470.000.000,00	100,00	17.200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp			
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
MISI 2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja																	
TUJUAN 4	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	72,20	72,30		72,40		72,50		72,60		72,70		72,70			
		Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,50	3,48		3,46		3,40		3,35		3,30		3,30			
SASARAN 8	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,50	2,60		2,70		2,80		2,90		3,00		3,00			
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	0,10	0,10		0,11		0,11		0,12		0,12		0,12			
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	1,40	1,41	160.000.000,00	1,41	175.000.000,00	1,42	180.000.000,00	1,43	195.000.000,00	1,43	200.000.000,00	1,43	910.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	Persen	2,40	2,60	1.014.433.000,00	2,70	1.080.000.000,00	2,80	1.150.000.000,00	2,90	1.210.000.000,00	3,00	1.260.000.000,00	3,00	5.714.433.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	35,00	40,00	150.000.000,00	40,00	190.000.000,00	45,00	220.000.000,00	45,00	250.000.000,00	50,00	280.000.000,00	50,00	1.090.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	93,50	95,00	1.280.000.000,00	97,00	3.080.000.000,00	100,00	3.220.000.000,00	100,00	3.325.000.000,00	100,00	3.355.000.000,00	100,00	14.260.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Persentase wirausaha muda	Persen	2,00	2,20		2,25		2,50		2,75		3,00		3,00		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
SASARAN 9	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	359,057	367,382		378,771		390,513		402,814		415,704		415,704			
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	77,44	80,00	3.050.000.000,00	80,00	3.600.000.000,00	80,00	2.540.000.000,00	80,00	1.790.000.000,00	80,00	1.340.000.000,00	80,00	12.320.000.000,00	DPUPR	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persen	0,00	37,50		62,50		75,00		100,00		0,00		0,00		DPUPR
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait penanaman modal yang telah ditetapkan	Persen	33,33	66,67	50.000.000,00	66,67	200.000.000,00	66,67	250.000.000,00	100,00	210.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	770.000.000,00	DPMPTSP
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	Investor	0,00	1,00	430.000.000,00	2,00	630.187.500,00	2,00	630.187.500,00	2,00	630.187.500,00	2,00	630.187.500,00	2,00	2.950.750.000,00	DPMPTSP
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	0,00	18,00	101.310.000,00	19,00	583.431.000,00	20,00	583.431.000,00	21,00	583.431.000,00	22,00	583.431.000,00	22,00	2.435.034.000,00	DPMPTSP
TUJUAN 5	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,50	3,00		3,50		4,00		4,50		5,00		5,00		
		PDRB per kapita	Juta Rp	63,47	64,17		65,20		66,57		68,29		70,39		70,39		
SASARAN 10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,96	3,11		3,25		3,40		3,54		3,69		3,69		
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,50	3,70		3,90		4,10		4,30		4,50		4,50		
		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	3,26	3,40		3,60		3,80		4,00		4,20		4,20		
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Kelompok LPM			70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	390.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Angka	82,30	83,30	557.357.500,00	84,40	495.250.000,00	85,40	495.250.000,00	86,50	495.250.000,00	87,50	495.250.000,00	87,50	2.538.357.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	Kecamatan			120.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	0,00	680.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026									
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Nilai tambah produk pertanian / Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	Persen	70,00	75,00	100.000.000,00	80,00	250.000.000,00	85,00	250.000.000,00	90,00	250.000.000,00	95,00	250.000.000,00	95,00	1.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	Persen	0,00	60,00	2.353.555.654,00	62,00	2.385.750.000,00	65,00	2.759.687.500,00	67,00	2.829.687.500,00	70,00	2.899.687.500,00	70,00	13.228.368.154,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	Persen	0,00	50,00	280.000.000,00	55,00	280.000.000,00	55,00	300.000.000,00	60,00	320.000.000,00	62,00	350.000.000,00	62,00	1.530.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah	Persen	0,00	60,00	450.000.000,00	62,00	850.000.000,00	65,00	900.000.000,00	65,00	1.050.000.000,00	67,00	1.100.000.000,00	67,00	4.350.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persen	0,00	55,00	650.000.000,00	60,00	725.000.000,00	65,00	782.500.000,00	70,00	932.750.000,00	75,00	966.025.000,00	75,00	4.056.275.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman	Persen	0,00	60,00	400.000.000,00	65,00	1.350.000.000,00	65,00	1.700.000.000,00	70,00	900.000.000,00	75,00	975.000.000,00	75,00	5.325.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Persen	20,00	20,00	60.000.000,00	40,00	245.000.000,00	60,00	270.000.000,00	80,00	295.000.000,00	100,00	320.000.000,00	100,00	1.190.000.000,00	Dinas Perpustakaan	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	40.079,00	42.660,00	3.706.000.000,00	43.091,00	10.525.459.400,00	43.526,00	10.279.451.600,00	43.966,00	9.689.799.000,00	44.410,00	7.531.228.400,00	44.410,00	41.731.938.400,00	Dinas Perikanan	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	137,98	150,00	2.074.000.000,00	160,00	2.558.000.000,00	175,00	4.168.000.000,00	190,00	3.263.400.000,00	215,00	3.242.400.000,00	215,00	15.305.800.000,00	Dinas Perikanan	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laporan hasil pengawasan	Dokumen	0,00	4,00	0,00	4,00	140.000.000,00	4,00	154.000.000,00	4,00	170.000.000,00	4,00	187.000.000,00	4,00	651.000.000,00	Dinas Perikanan	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	65,47	59,00	1.340.914.000,00	60,00	3.480.098.000,00	61,00	2.745.960.000,00	62,00	3.317.046.000,00	63,00	2.969.943.000,00	63,00	13.853.961.000,00	Dinas Perikanan	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase capaian kinerja kunjungan wisata Kabupaten Belitung Timur	Persen	0,00	15,00	3.825.000.000,00	15,00	5.950.000.000,00	15,00	6.685.000.000,00	15,00	7.795.000.000,00	15,00	8.245.000.000,00	15,00	32.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Daerah	Persen	0,00	3,00	2.750.000.000,00	3,00	3.700.000.000,00	3,00	4.400.000.000,00	4,00	5.000.000.000,00	4,00	5.600.000.000,00	4,00	21.450.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	0,00	25,00	1.050.000.000,00	25,00	1.550.000.000,00	30,00	1.710.000.000,00	30,00	1.870.000.000,00	30,00	2.030.000.000,00	30,00	8.210.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	Persen	20,00	20,00	1.396.000.000,00	20,00	2.410.500.000,00	20,00	2.367.000.000,00	20,00	2.339.500.000,00	20,00	2.530.000.000,00	20,00	11.043.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	20,00	20,00	2.140.000.000,00	20,00	3.365.000.000,00	20,00	3.076.000.000,00	20,00	3.100.000.000,00	20,00	2.200.000.000,00	20,00	13.881.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan, Penurunan jumlah kasus gangguan reproduksi pada sapi, Penurunan angka kematian pedet, Peningkatan ketersediaan obat hewan dan sarana kesehatan hewan lainnya, Peningkatan jumlah unit usaha hasil ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)	Persen	20,00	20,00	381.000.000,00	20,00	432.000.000,00	20,00	452.500.000,00	20,00	478.000.000,00	20,00	504.000.000,00	20,00	2.247.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan	Persen	20,00	20,00	85.000.000,00	20,00	55.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	65.000.000,00	20,00	70.000.000,00	20,00	375.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya pengetahuan petani, Terklasifikasinya kelas kebun perusahaan	Orang, Perusahaan	50,80	50,00	40.000.000,00	50,00	45.000.000,00	50,80	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan (BPP) dan wilayah binaan (Desa)	Unit	3,00	3,00	740.000.000,00	3,00	1.003.912.000,00	3,00	1.053.912.000,00	4,00	1.103.912.000,00	7,00	1.353.912.000,00	7,00	5.255.648.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Persen	0,00	5,80	1.317.500.000,00	5,85	2.528.000.000,00	5,90	2.444.500.000,00	5,95	2.457.500.000,00	6,00	2.470.500.000,00	6,00	11.218.000.000,00	DPMPTSPP
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri di SIINAS	Persen	0,00	58,33	100.000.000,00	58,33	100.000.000,00	66,67	102.000.000,00	66,67	105.000.000,00	75,00	105.000.000,00	75,00	512.000.000,00	DPMPTSPP
SASARAN 11	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Skor 1-5	1,59	1,61		1,62		1,63		1,64		1,65		1,65		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026									
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	34,15	35,00	85.000.000,00	36,00	90.000.000,00	37,00	90.000.000,00	38,00	100.000.000,00	39,00	110.000.000,00	39,00	475.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	Persen	0,00	12,19	40.000.000,00	12,19	45.000.000,00	14,63	50.000.000,00	14,63	55.000.000,00	17,07	60.000.000,00	17,07	250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	38,21	38,50	280.000.000,00	39,00	290.000.000,00	39,50	290.000.000,00	39,50	300.000.000,00	40,00	310.000.000,00	40,00	1.470.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	94,31	94,55	46.000.000,00	94,75	50.000.000,00	95,00	60.000.000,00	95,25	70.000.000,00	95,50	80.000.000,00	95,50	306.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Persen	0,34	0,50	305.000.000,00	0,55	325.000.000,00	0,60	345.000.000,00	0,65	370.000.000,00	0,75	405.000.000,00	0,75	1.750.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	35,15	35,25	450.000.000,00	35,35	500.000.000,00	35,45	550.000.000,00	35,55	600.000.000,00	35,65	650.000.000,00	35,65	2.750.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	0,00	100,00	1.126.000.000,00	100,00	6.950.000.000,00	100,00	8.975.000.000,00	100,00	8.975.000.000,00	100,00	10.980.000.000,00	100,00	37.006.000.000,00	DPMPTSP	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	Angka	3,99	3,79	1.287.000.000,00	3,59	1.192.000.000,00	3,39	1.096.000.000,00	3,19	1.051.000.000,00	2,99	1.005.000.000,00	2,99	5.631.000.000,00	DPMPTSP	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor	Produk	0,00	1,00	230.000.000,00	1,00	275.000.000,00	1,00	275.000.000,00	2,00	275.000.000,00	2,00	275.000.000,00	2,00	1.330.000.000,00	DPMPTSP	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persen	0,00	70,00	195.000.000,00	72,00	1.000.500.000,00	74,00	1.000.500.000,00	76,00	1.000.500.000,00	78,00	1.000.500.000,00	78,00	4.197.000.000,00	DPMPTSP	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023		2024		2025		2026						
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Persen	0,00	72,00		72,50		73,00		73,50		74,00		74,00		DPMPTSP	
MISI 3	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan																	
TUJUAN 6	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	71,52	71,97		72,43		72,88		73,33		73,78		73,78			
SASARAN 12	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,54	11,55		11,57		11,58		11,60		11,61		11,61			
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,30	8,37		8,44		8,51		8,58		8,64		8,64			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	55,42	61,09	51.251.212.500,00	64,14	60.496.500.000,00	67,34	66.365.700.000,00	70,70	71.144.000.000,00	74,23	77.035.760.000,00	74,23	326.293.172.500,00	Dinas Pendidikan	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Persen	88,94	87,00		89,00		91,00		93,00		95,00		95,00		Dinas Pendidikan	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Persen	46,31	54,00		58,00		62,00		66,00		70,00		70,00		Dinas Pendidikan	
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan program kesetaraan paket A, B, C	Persen	0,00	37,50	105.000.000,00	50,00	165.000.000,00	62,50	190.000.000,00	87,50	215.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100,00	915.000.000,00	Dinas Pendidikan	
		Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	Persen	0,00	28,57		42,86		57,14		71,43		85,71		85,71		Dinas Pendidikan	
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	Persen	0,00	68,00	2.925.500.000,00	70,00	1.877.500.000,00	72,00	475.000.000,00	74,00	550.000.000,00	76,00	645.000.000,00	76,00	6.473.000.000,00	Dinas Pendidikan	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI	Persen	0,00	89,00		91,00		93,00		95,00		97,00		97,00		Dinas Pendidikan	
		Persentase pengawas dan kepala sekolah yang bersertifikat	Persen	71,00	71,10		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	

KODE			MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2021	2022	2023		2024		2025		2026					
						TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS	Persen	0,00	68,00		70,00		72,00		74,00		76,00		76,00	Dinas Pendidikan	
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pengembangan Koleksi Muatan Lokal dan Budaya Etnis	Kegiatan	0,00	2,00	50.000.000,00	2,00	70.000.000,00	3,00	80.000.000,00	3,00	90.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	390.000.000,00	Dinas Pendidikan
				Penyediaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota	Kegiatan	0,00	2,00		2,00		3,00		3,00		4,00		4,00	Dinas Pendidikan	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persen	100,00	100,00	9.337.479.500,00	100,00	24.561.317.000,00	100,00	23.513.677.450,00	100,00	23.975.578.177,00	100,00	25.155.042.773,00	100,00	106.543.094.900,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persen	80,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN	Persentase pelatihan SDM kepramukaan	Persen	45,00	45,00	120.000.000,00	50,00	1.025.000.000,00	55,00	1.060.000.000,00	55,00	1.165.000.000,00	55,00	1.085.000.000,00	55,00	4.455.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	1,35	1,37	798.210.000,00	1,39	1.575.687.500,00	1,41	1.615.687.500,00	1,43	1.655.687.500,00	1,45	1.695.687.500,00	1,45	7.340.960.000,00	Dinas Perpustakaan
SASARAN 13			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Predikat	Padapa	Padapa		Wiwerda		Wiwerda		Wistara		Wistara		Wistara		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	57,00	57,00	96.504.737.000,00	86,00	102.601.813.300,00	100,00	91.182.620.500,00	100,00	91.332.959.250,00	100,00	92.560.106.000,00	100,00	474.182.236.050,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen	90,00	90,00		95,00		97,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		2021		2022		2023		2024					2025	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	TARGET
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	85,00	85,00			87,00		90,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	Persen	90,00	92,00			94,00		95,00		96,00		97,00		97,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	90,00	90,00			90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	92,00	93,00			94,00		95,00		96,00		97,00		97,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persen	99,00	99,00			99,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pelayanan kesehatan balita	Persen	95,00	95,00			96,00		97,00		98,00		99,00		99,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persen	75,00	75,00			80,00		85,00		90,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	71,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen	98,00	99,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persen	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	85,71	100,00	14.610.641.000,00	100,00	14.751.026.000,00	100,00	14.892.815.000,00	100,00	15.036.022.000,00	100,00	15.180.661.000,00	100,00	74.471.165.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Persen	50,00	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penggunaan obat rasional	Persen	90,00	92,00	151.000.000,00	94,00	162.000.000,00	95,00	165.000.000,00	95,00	170.000.000,00	95,00	180.000.000,00	95,00	828.000.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persen	40,00	50,00	1.140.000.000,00	65,00	460.000.000,00	75,00	525.000.000,00	85,00	590.000.000,00	100,00	670.000.000,00	100,00	3.385.000.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	40,00	50,00	644.095.000,00	75,00	663.734.000,00	75,00	682.084.000,00	100,00	697.540.000,00	100,00	713.730.000,00	100,00	3.401.183.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Unmet Need	Persen	5,00	5,61	1.888.296.000,00	5,49	1.911.242.000,00	5,39	1.883.081.500,00	5,29	1.955.057.000,00	5,19	1.963.591.825,00	5,19	9.601.268.325,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun (kelahiran per 1.000 perempuan)	Persen	25,00	24,00	441.264.000,00	23,00	253.327.000,00	20,00	265.993.500,00	17,00	279.293.500,00	15,00	293.259.000,00	15,00	1.533.137.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
TUJUAN 7	Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana	Indeks infrastruktur wilayah	Nilai 1-100	75,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00			

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	0,36	0,37		0,38		0,39		0,40		0,41		0,41			
SASARAN 14	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	94,65	95,57		96,59		97,68		98,78		99,88		99,88			
		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	62,74	64,95		67,23		69,59		72,02		74,52		74,52			
		Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	69,36	71,96		73,48		75,00		76,52		78,04		78,04			
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	76,13	77,07	8.017.000.000,00	78,00	14.005.250.000,00	78,93	9.366.750.000,00	79,86	7.692.250.000,00	80,79	8.808.750.000,00	80,79	47.890.000.000,00	DPUPR	
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio sampah terangkut (m³)	Persen	0,65	0,75	8.500.000.000,00	0,80	11.400.000.000,00	0,85	4.400.000.000,00	0,90	1.800.000.000,00	0,90	0,00	0,90	26.100.000.000,00	DPUPR	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat	Persen	88,43	89,82	3.940.000.000,00	91,22	5.600.000.000,00	93,09	6.020.000.000,00	94,95	7.550.000.000,00	97,28	9.550.000.000,00	97,28	32.660.000.000,00	DPUPR	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	80,32	85,83	7.549.400.000,00	89,76	12.025.000.000,00	93,70	11.687.500.000,00	96,85	11.375.000.000,00	100,00	11.425.000.000,00	100,00	54.061.900.000,00	DPUPR	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penataan kawasan permukiman pendukung pariwisata strategis	Persen	0,00	14,29	1.950.000.000,00	28,57	1.950.000.000,00	57,14	1.950.000.000,00	85,71	1.950.000.000,00	100,00	1.950.000.000,00	100,00	9.750.000.000,00	DPUPR	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	79,67	82,00	23.147.860.219,00	84,70	73.813.000.000,00	87,57	80.788.000.000,00	90,11	77.288.000.000,00	90,90	73.788.000.000,00	90,90	328.824.860.219,00	DPUPR	
		Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah	Persen	0,343	0,344		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		DPUPR	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	49,50	50,50	1.300.000.000,00	51,50	4.140.000.000,00	52,50	4.300.000.000,00	53,50	4.870.000.000,00	54,50	5.128.000.000,00	54,50	19.738.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	Persen	99,07	99,22	4.255.000.000,00	99,40	2.755.000.000,00	99,61	3.535.000.000,00	99,82	4.148.000.000,00	100,00	4.175.000.000,00	100,00	18.868.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
																	Kawasan Permukiman
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	1.155.000.000,00	0,00	1.270.500.000,00	0,00	1.397.550.000,00	0,00	1.537.310.000,00	0,00	6.410.360.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00	100,00	4.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00	100,00	29.000.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Angka	0,58	0,46	800.000.000,00	0,39	440.000.000,00	0,35	440.000.000,00	0,33	440.000.000,00	0,32	440.000.000,00	0,32	2.560.000.000,00	DPUPR
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	9,93	17,00	11.953.803.500,00	25,00	20.690.999.025,00	27,00	18.179.480.219,00	32,00	18.045.451.629,00	35,00	17.307.294.329,00	35,00	86.177.028.702,00	Dinas Perhubungan
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran	Persen	56,79	60,49	1.563.742.500,00	62,96	1.275.000.000,00	65,43	1.425.000.000,00	65,43	1.650.000.000,00	66,67	1.800.000.000,00	66,67	7.713.742.500,00	Dinas Perhubungan
SASARAN 15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	69,18	69,70		70,23		70,75		71,28		71,81		71,81		
		Indeks Risiko Bencana	Angka	168,40	168,40		168,40		168,40		168,40		168,40		168,40		
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	32,00	35,00	9.284.937.500,00	38,00	21.059.250.000,00	40,00	30.862.500.000,00	43,00	21.879.250.000,00	45,00	21.890.250.000,00	45,00	104.976.187.500,00	DPUPR
		Rasio jaringan irigasi	m/ha	18,40	21,33		24,27		27,21		30,15		33,09		33,09		DPUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		DPUPR
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0,00	23,00		31,00		39,00		46,00		54,00		54,00		DPUPR

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
10503	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,00	100,00	2.929.501.000,00	100,00	13.043.900.000,00	100,00	13.443.900.000,00	100,00	13.443.900.000,00	100,00	13.443.900.000,00	100,00	56.305.101.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	0,00	100,00	200.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	2.050.000.000,00	100,00	6.150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
21103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Nilai	56,41	56,51	850.000.000,00	56,61	1.910.000.000,00	56,71	2.740.000.000,00	56,81	2.150.000.000,00	56,91	2.000.000.000,00	56,91	9.650.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	93,86	93,97		94,08		94,19		94,30		94,41		94,41		Dinas Lingkungan Hidup
		Indek Kualitas Lahan	Nilai	45,46	47,48		49,49		51,51		53,54		55,58		55,58		Dinas Lingkungan Hidup
21104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persen	0,00	22,50	150.000.000,00	32,50	900.000.000,00	42,50	900.000.000,00	52,50	900.000.000,00	62,50	900.000.000,00	62,50	3.750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
21105	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persen	0,00	90,00	80.000.000,00	90,00	120.000.000,00	90,00	120.000.000,00	90,00	120.000.000,00	90,00	120.000.000,00	90,00	560.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
21106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen	0,00	90,00	163.000.000,00	90,00	250.000.000,00	90,00	300.000.000,00	95,00	350.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	1.463.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pengetahuan teknis tentang lingkungan hidup bagi masyarakat	Persen	0,00	20,00	350.000.000,00	40,00	350.000.000,00	60,00	350.000.000,00	80,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	1.750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Persen	0,00	100,00	100.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Persen	65,04	75,00	5.644.202.000,00	80,00	7.135.000.000,00	85,00	7.635.000.000,00	90,00	7.335.000.000,00	90,00	7.835.000.000,00	90,00	35.584.202.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak MHA, hak kearifan lokal dan/atau hak pengetahuan tradisional	Penetapan Hak	0,00	2,00	80.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	680.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Angka	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
TUJUAN 8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Persen	6,45	6,34		6,22		6,11		5,99		5,88		5,88		
		Indeks Gini	Nilai	0,260	0,260		0,260		0,260		0,260		0,260		0,26		
SASARAN 16	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,696	0,642		0,588		0,534		0,480		0,426		0,426		
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,16	0,16		0,15		0,14		0,13		0,12		0,12		
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	0,00	100,00	1.022.625.200,00	100,00	1.392.006.000,00	100,00	1.461.606.300,00	100,00	1.534.686.615,00	100,00	1.611.420.944,00	100,00	7.022.345.059,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah keluarga yang terlayani	Keluarga	0,00	50,00	27.094.000,00	50,00	157.500.000,00	50,00	165.375.000,00	50,00	173.643.750,00	50,00	182.325.937,00	50,00	705.938.687,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SASARAN 17	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	96,30	96,50		96,80		97,00		97,50		97,80		97,80		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023		2024		2025		2026						
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	84,80	84,85		84,90		84,95		85,00		85,00		85,00			
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	175.202.000,00	100,00	512.790.000,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	4.287.992.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran (kabupaten/kota)	Persen	60,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Persen	0,00	100,00	28.099.500,00	100,00	73.500.000,00	100,00	77.175.000,00	100,00	81.033.750,00	100,00	850.854.375,00	100,00	1.110.662.625,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	0,00	100,00	507.044.700,00	100,00	1.422.050.000,00	100,00	1.519.827.500,00	100,00	1.600.053.875,00	100,00	17.339.220.060,00	100,00	22.388.196.135,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	Persen	0,00	100,00	950.090.545,00	100,00	1.713.000.000,00	100,00	1.745.525.000,00	100,00	1.832.863.750,00	100,00	1.925.325.688,00	100,00	8.166.804.983,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase pemberian bantuan sosial	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
				TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0,00	100,00	830.520.450,00	100,00	1.517.250.000,00	100,00	1.593.112.500,00	100,00	1.672.768.125,00	100,00	1.756.406.531,00	100,00	7.370.057.606,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	Persen	0,00	100,00	40.588.143,00	100,00	45.150.000,00	100,00	47.407.500,00	100,00	49.777.875,00	100,00	5.226.676.875,00	100,00	5.409.600.393,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	88,88	89,00	359.810.000,00	89,20	432.000.000,00	89,40	454.000.000,00	89,60	471.000.000,00	89,80	525.000.000,00	89,80	2.241.810.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 08 02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	0,00	50,00	468.737.000,00	50,00	787.500.000,00	50,00	826.875.000,00	50,00	868.218.750,00	50,00	911.629.686,00	50,00	3.862.960.436,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah IR yang terbina	Persen	0,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pelaksanaan RAD PUG	Angka	0,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	0,00	100,00	112.189.950,00	100,00	525.000.000,00	100,00	551.250.000,00	100,00	578.812.500,00	100,00	607.753.124,00	100,00	2.375.005.574,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Forum Anak Desa	Desa	0,00	5,00	260.700.000,00	7,00	525.000.000,00	9,00	551.250.000,00	9,00	578.812.500,00	9,00	607.753.124,00	9,00	2.523.515.624,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	Aturan	0,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	Persen	0,00	100,00	45.964.000,00	100,00	630.000.000,00	100,00	661.500.000,00	100,00	694.575.000,00	100,00	2.370.237.187,00	100,00	4.402.276.187,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 6.7 Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur terhadap Program Piroritas Nasional

RPJMN Tahun 2020 - 2024										RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026								
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	PN	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN																							
1.1	PP	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	92,8	94	95,2	Urusan Pangan									Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
			Angka Kecukupan Energi (Kkal/Hari)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH Konsumsi menjadi 92,50	89,2	89	89,7	90,5	91,5	92,5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (SP)	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan							
			Angka Kecukupan Protein (Gram/Kapita/Hari)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0		Persentase Pangan yang Aman Dikonsumsi	78	80	83	86	89	92			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (SP)	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat	82,30	83,30	84,40	85,40	86,50
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0	Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	78	89,5	90,5	91	93	96,32	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan							
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0		Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	NA	1	1,1	1,1	1,1	1,1			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Nilai Tambah Produk Pertanian/Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
									Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, dan Cadangan Pangan	Koefisien Varian Harga Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen	CV Beras ≤ 1 Persen	CV Beras ≤ 5 Persen	CV Beras ≤ 5 Persen	CV Beras ≤ 5 Persen	CV Beras ≤ 5 Persen	CV Beras ≤ 5 Persen									
										Persentase Cadangan Pangan	0,9	0	0	0	0	0									
			Urusan Pertanian									Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
			Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang Diimplementasikan	NA	1	2	1	1	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (SP)	Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00							
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian	17	14	15	15	15	16			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (SP)	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00					
										Persentase Pertambahan Kelompok Tani yang Melakukan Pemberdayaan di Sektor Pertanian	10	10	10	10	10	10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Reproduksi pada Sapi, Penurunan Angka Kematian Pedet, Peningkatan Ketersediaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan Lainnya, Peningkatan Jumlah Unit Usaha Hasil Ternak yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner							
																20,00			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
										Persentase Kelembagaan Pertanian Aktif	10	10	10	10	10	10	Program Penyuluhan Pertanian	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan (BPP) dan Wilayah Binaan (Desa)							
													3,00	3,00	3,00	3,00			4,00	7,00					
							Program Peningkatan Bibit Lada	NA	25000	50000	75000	100000	150000												

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026							
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Pertambahan Ketersediaan Bibit Karet	200	40000	40000	40000	40000	40000								
									Pertambahan Ketersediaan Benih Sumber Padi	NA	2	4	6	6	6									
									Pertambahan Ketersediaan Bibit Ayam	1000	5000	6000	8000	11000	15000									
									Pertambahan Ketersediaan Anakan Sapi	8	15	20	25	30	35									
									Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	Persentase Pertambahan Jumlah Benih Lada yang Bersertifikat dan Berlabel	375000	525000	655000	785000	915000	1050000								
										Persentase Pertambahan Jumlah Benih Karet yang Bersertifikat dan Berlabel	375000	525000	655000	785000	915000	1050000								
										Persentase Pertambahan Jumlah Benih Padi yang Bersertifikat dan Berlabel	100	125	150	175	200	250								
										Persentase Pertambahan Jumlah Benih Hortikultura yang Bersertifikat dan Berlabel	1000	1250	1500	1750	2000	2500								
									Persentase Unggul Lokal yang Didaftarkan Menjadi Unggul Nasional	2	2	2	2	2	2									
									Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Strategis Tanaman Pangan Padi	38393	40313	43135	47017	52188	60017								
										Pertambahan Jumlah Kelompok yang Menerapkan Peningkatan Mutu, Daya Saing, dan Nilai Tambah Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	NA	30	40	50	60	70								
										Tersedianya Kawasan Budidaya Komoditas Padi di Kawasan KTM Gantung	NA	0	1	0	0	0								
										Tersedianya Kawasan Budidaya Komoditas Cabai di KTNM Gantung	NA	0	1	0	0	0								
										Tersedianya Kawasan Budidaya Bawang Merah KTM Gantung	NA	0	1	0	0	0								
										Tingkat Produktivitas Petani di KTM Gantung	NA	0	0	0	0	0								
										Tersedianya Kawasan Budidaya Komoditas Padi	NA	0	1	0	0	0								
										Tersedianya Kawasan Budidaya Komoditas Cabai	NA	0	1	0	0	0								
Tersedianya Kawasan Budidaya Komoditas Bawang Merah	NA	0	1	0	0	0																		

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																							
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target																					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)																
										NTP Subsektor Tanaman Pangan	93,08	94,08	95,08	97,08	98,08	100,08																								
										Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	100,35	100,55	100,75	100,95	101,15	101,35																								
										Pertambahan Jumlah Volume Produksi Komoditas Cabai Besar	2284,8	2528,54	2813,28	3113,22	3443,52	3769,61																								
										Pertambahan Jumlah Volume Produksi Komoditas Cabai Rawit	1916,1	2257,43	2651,13	3095,08	3606,04	4118,19																								
										Pertambahan Jumlah Volume Produksi Komoditas Bawang Merah	65,4	81,72	98,11	114,51	164,76	199,96																								
									Program Pengembangan Perkebunan	Peningkatan Produksi Lada	39153	41111	43577	46628	49892	53883																								
										Pertambahan Jumlah Kelompok yang Menerapkan Peningkatan Mutu, Daya Saing, dan Nilai Tambah Hasil Perkebunan	6	31	56	81	106	131																								
										Tersedianya Kawasan Pengembangan Budidaya Lada	3	1	1	1	1	1																								
										Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan	97	99	101	102	104	106																								
									Program Peningkatan Pelayanan Tekr Proteksi Tanaman	Persentase Penurunan Areal Tanam yang Terserang OPT	5	5	5	5	5	5																								
									Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah Populasi Ternak Besar Sapi	11545	13090	14399	15838	17422	19164																								
										Pertambahan Jumlah Populasi Ternak Ayam	11500000	12075000	12678800	13312700	13978320	14677240																								
										Pertambahan Jumlah Kelompok yang Menerapkan Peningkatan Mutu, Daya Saing, dan Nilai Tambah Hasil Peternakan	4	8	14	20	26	32																								
										Tersedianya Kawasan Pengembangan Ternak Sapi	2	1	NA	1	NA	NA																								
										Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Peternakan	5	5	5	5	5	5																								
1.2	PP	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Konservasi Kawasan Kelautan (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	Urusan Kelautan dan Perikanan								Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																							
			Proposi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman (Persen)	<64	<67	<72	<76	<80	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Perikanan (Ton/Tahun)	181000	211300	215300	219300	223300	227300	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (SP)	Jumlah produksi perikanan tangkap	40.079	42.660	43.091	43.526	43.966	44.410																

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																							
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target																					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)																
										Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	NA	0	5000	4375	4750	5250	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (SP)	Jumlah produksi perikanan budidaya	137	150	160	175	190	215																
										Pertambahan Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	0	368000 000	420000 000	441000 000	463000 000	468000 000		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Laporan hasil pengawasan	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00															
										Persentase Penduduk yang Bekerja di Sektor Perikanan Tangkap	NA	6,79	6,8	6,8	6,9	6,9		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (SP)	Konsumsi ikan	65	59	60	61	62	63															
										Persentase Kontribusi Komuditas Ikan dalam Menyumbang Inflasi	0	11,11	22,22	22,22	33,33	55,56																								
									Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	17080	11620	12120	12620	13120	13620																								
										Angka Konsusmsi Ikan (Kg/Orang/Tahun)	49	53	54	55	56	57																								
										Volume Produksi Olahan (Ton)	24000	20610	21110	21610	22110	22610																								
										Persentase Penduduk yang Bekerja di Sektor Perikanan Budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	NA	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2																								
									Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan	NA	65	70	75	80	85																								
1.3	PP	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Rasio Kewirausahaan Nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																								Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Kelembagaan Koperasi Aktif Sektor Pertanian	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05																	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	34,15	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00
			Kontribusi Koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	Program Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi Sektor Pertanian Berkualitas Sesuai Standar	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02																	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	0,00	12,19	12,19	14,63	14,63	17,07
										Persentase Jumlah Koperasi Bidang Kelautan dan Perikanaan yang Berkualitas Sesuai Standar	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036																	Program Pendidikan dan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	38,21	38,50	39,00	39,50	39,50	40,00
								Persentase Pertumbuhan Kelembagaan Koperasi Aktif Sektor Kelautan dan Perikanan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	94,31	94,55	94,75	95,00	95,25	95,50																	
								Persentase Koperasi Aktif Di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	NA	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,34	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75																	

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026											
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
										Pertumbuhan Kelembagaan Koperasi Aktif Pendukung Pariwisata	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (SP)	Program Pengembangan UMKM (SP)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35,15	35,25	35,35	35,45	35,55	35,65		
										Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Produk Usaha Kecil Sektor Pertanian yang Tersertifikasi	0,4	0,613	0,77	0,4348	0,4348										0,4348	
											Pertambahan Pelaku Usaha Kecil Sektor Pertanian yang Menandatangani Kesepakatan Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam Daerah	80	80	90	100	90										100	
											Peningkatan Produk Usaha Kecil Sektor Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi	70	550	550	550	550										550	
											Pertambahan Pelaku Usaha Kecil Sektor Kelauatan dan Perikanan yang Menandatangani Kesepakatan Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam Daerah	160	160	160	150	160										150	
											Persentase SDM Usaha Kecil Sektor Pariwisata Terlatih	0	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006										0,0006	
											Peningkatan Produk Usaha Kecil Sektor Pariwisata yang Tersertifikasi	75	205	250	250	250										250	
											Persentase Wirausaha	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15										0,15	
										Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Pertanian	NA	0,03	0,03	0,03	0,03										0,03	
											Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Sapi	NA	0,01	0,01	0,01	0,01										0,01	0,02
											Persentase Peningkatan Volume Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05										0,05	
											Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi di Sektor Pariwisata	NA	0,01	0,01	0,02	0,02										0,02	
										Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro,	Persentase SDM Koperasi Sektor Pertanian Terlatih	NA	1,38	0,0309	0,0468	0,0344										0,0468	
											Persentase SDM Usaha Kecil Sektor Pertanian Terlatih	NA	0	0,0034	0,0036	0,0034										0,0037	
											Persentase SDM Koperasi Sektor Perikanan Terlatih	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03										0,05	

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																		
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target															
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)										
									Kecil dan Menengah	Persentase SDM Usaha Kecil Sektor Perikanan Terlatih	0	0	0	0	0	0																		
										Persentase SDM Koperasi Sektor Pariwisata Terlatih	0,0069	0,0069	0,0206	0,0151	0,0275	0,022																		
										Persentase SDM Usaha Kecil Sektor Pariwisata Terlatih	0,0006	0,0006	0,0025	0,0032	0,0032	0,0032																		
										Persentase SDM Koperasi Sektor Sumber Daya Mineral Terlatih	0,0069	0,0069	0,0206	0,0151	0,0275	0,022																		
										Persentase SDM Usaha Kecil Sektor Sumber Daya Mineral Terlatih	NA	0,0006	0,0018	0,0013	0,0018	0,0014																		
									Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							Kecamatan																		
									Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Sarana Prasarana Penunjang Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,1	0,16	0,34	0,49	0,79	1									Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (SP)	Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
										Persentase PKK Aktif	NA	0	0	0	0	0										Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
										Persentase Posyandu Aktif	NA	100	100	100	100	100										Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
																										Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
																										Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
																										Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
																										Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
																										Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1.4	PP	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB Pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	Urusan Penanaman Modal							Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																		
			Kontribusi PDB Kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Pertanian yang Digunakan untuk Promosi Investasi Daerah di Sektor Pertanian	NA	3	0	0	3	0	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (SP)	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang Telah Ditetapkan	33,33	66,67	66,67	66,67	100,00	100,00										
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1		Pertambahan Jumlah UKM Pertaniaanyang Bermitra dengan Investor	NA	1	1	1	2	2		Investor Baru yang Berinvestasi	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00										
			Kontribusi PDB Pariwisata (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5		Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Perikanan dan Kelautan yang Digunakan untuk Promosi Investasi di Sektor Perikanan Kelautan	NA	0	5	0	0	0	Program Pelayanan Penanaman Modal (SP)	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	82,00	83,50	84,00	84,50	85,00	86,00										

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026							
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp Triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1689		Pertambahan Jumlah UKM Sektor Kelautan dan Perikanan yang Bermitra dengan Investor	NA	1	1	1	1	2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	0,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00
			Pertumbuhan Investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4		Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang Digunakan untuk Promosi Investasi di Sektor Pariwisata	NA	0	0	0	0	4								
			Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun (Juta Orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0		Pertambahan Jumlah UKM Pariwisata yang Bermitra dengan Investor	NA	0	1	1	1	1								
			Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5		Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sumber Daya Mineral yang Digunakan untuk Promosi Investasi di Sektor Sumber Daya Mineral	NA	0	0	3	0	0								
			Kontribusi Tenaga Kerja Industri (Persen)	14,2	14,6	15	15,3	15,7		Pertambahan Jumlah UKM yang Bermitra dengan Investor Sumber Daya Mineral	NA	0	0	1	1	0,381								
			Jumlah Tenaga Kerja Industri (Juta Orang)	19,7	20,3	30,9	21,4	22	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pertanian	NA	2	3	3	4	4								
			Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Juta Orang)	13	13,5	14	14,5	15		Pertambahan Jumlah Investor Sektor Kelautan dan Perikanan	NA	1	2	2	4	4								
			Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Juta Orang)	19	20	20	21	21		Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	NA	2	3	3	4	4								
										Pertambahan Jumlah Investor Sumber Daya Mineral	NA	2	3	3	4	4								
									Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	Presentase Perusahaan Sektor Pertanian yang Sesuai Realisasi Investasi dengan Rencana Investasi	NA	0,0043	0,0044	0,0045	0,0046	0,0047								
										Presentase Perusahaan Sektor Kelautan dan Perikanan yang Sesuai Realisasi Investasi dengan Rencana Investasi	NA	0,0043	0,0044	0,0045	0,0046	0,0047								
										Presentase Perusahaan Sektor Pariwisata yang Sesuai Realisasi Investasi dengan Rencana Investasi	NA	0,0043	0,0044	0,0045	0,0046	0,0047								
										Presentase Perusahaan Sektor Sumber Daya Mineral yang Sesuai Realisasi Investasi dengan Rencana Investasi	NA	0,0043	0,0044	0,0045	0,0046	0,0047								
									Program Peningkatan Pelayanan	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Perizinan Sumber Daya Mineral	0,75	0,78	0,79	0,82	0,84	0,86								

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)								
									Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PTSP	NA	0	0	0	0	0																
									Urusan Perindustrian							Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																
									Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	Pertumbuhan Industri Pada Sektor Pertanian	1.149	1.474	1.499	1.524	1.549	1.547									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (SP)	Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah	0,00	5,80	5,85	5,90	5,95	6,00
										Presentase Tenaga Kerja Industri Pada Sektor Pertanian	9,98	0,1013	0,1028	0,1044	0,1058	0,1073									Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri Kecil yang Telah Memiliki Izin Usaha	0,00	25,00	27,50	30,00	32,50	35,00
										Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	0,0067	0,0068	0,007	0,0071	0,0072	0,0074									Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
										Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Industri Pariwisata	0,00301	0,00308	0,00319	0,00333	0,00353	0,00381									Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	0,00	26,00	30,00	35,00	40,00	45,00
										Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Bidang Industri Turunan Sumber Daya Mineral	0,0103	0,0104	0,0104	0,0104	0,0104	0,0103									Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Pertumbuhan Industri Turunan Sumber Daya Mineral yang Dikembangkan	3	4	4	5	5	5									Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (SP)	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	3,99	3,79	3,59	3,39	3,19	2,99
										Persentase Tenaga Kerja Industri Terhadap Total Tenaga Kerja	0,0503	0,051	0,0517	0,0524	0,0531	0,0538									Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SP)	Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi terhadap Ketentuan yang Berlaku	0,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
										Persentase Jumlah Industri yang Memiliki Standar Kesehatan Industri	0	15	15	15	15	15										Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,00	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00
										Persentase Kandungan Nutrisi Industri Olahan Pangan	1,5	2,96	4,68	6,71	9,02	11,61																
									Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian	Persentase Jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang Diawasi Sesuai Standar (112 barang SNI wajib; 140 Pelaku Usaha Tertib Niaga)	5	10	14	18	27	31																
										Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	0	20	22	25	29	34																
										Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrolagian yang Memenuhi Standar	0	10	20	50	80	100																
									Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase Komoditi Unggulan Daerah Diuji yang Memenuhi Standar Pengujian	2	3	2	2	1	1																
										Persentase Produk Sumber Daya Mineral yang Disertifikasi	0,67	0,68	0,7	0,71	0,72	0,74																
									Urusan Perdagangan																							

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026								
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
									Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)	857.937	860.000	862.000	862.000	863.000	870.000									
										Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (18 Bahan Pokok) yang Tersedia Setiap Waktu	11	73	83	89	95	100									
										Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Dibangun dan Termanfaatkan	87	0	63	12	0	25									
										Persentase Rumah Tangga Miskin yang Bekerja di Sektor Perdagangan	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1									
										Persentase Pertumbuhan Nilai Omzet Memanfaatkan resi Gudang	0	0	20	40	20	20									
										Pertumbuhan Komoditi yang Terjual Melalui Pasar Lelang	NA	0	1	1	1	1									
										Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	10	10	10	10	10	10									
									Urusan Ketenagakerjaan									Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
									Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Program Perencanaan Tenaga Kerja (SP)		Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1,40	1,41	1,41	1,42	1,43	1,43
										Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Perikanan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (SP)		Persentase Tenaga Kerja yang Sertifikat Kompetensi	2,40	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00
										Persentase Peningkatan Produksi Per Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Program Penempatan Tenaga Kerja (SP)		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00	50,00
										Persentase Peningkatan Produksi Per Tenaga Kerja Sektor Sumber Daya Mineral	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Program Hubungan Industrial		Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	88,88	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80
									Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Pertanian yang Bersertifikasi	NA	0	17,54	21,3	22,56	23,06									
										Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	0,1754	0	17,54	21,3	22,56	23,06									
										Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Pariwisata yang Bersertifikat Kompetensi	17,54	0	17,54	21,3	22,56	23,06									
										Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Sektor Sumber Daya Mineral yang Bersertifikat Kompetensi	17,54	0	17,54	21,3	22,56	23,06									

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026							
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dari Tenaga Kerja Asing	500.000.000	100	150	200	250	300								
										Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	8	14,29	17,14	20	22,86	25,71								
										Pesentase Lansia Potensial yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	NA	0	0,28	0,28	0,28	0,28								
										Persentase Ex Korban Napza yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	NA	0	10,64	10,64	10,64	10,64								
										Persentase Wanita Tunasosial yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	NA	0	8,62	8,62	8,62	8,62								
										Persentase Penyandang Disabilitas yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	NA	0	0,78	0,78	0,78	0,78								
									Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Tentang Pertanian yang Berkompetensi	0,14	0,14	0,14	0,17	0,17	0,21								
										Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Tentang Kelautan yang Berkompetensi	0,0011	0,0011	0,0011	0,0015	0,0015	0,0019								
										Persentase Pencari Kerja Pariwisata yang Mendapat Pelatihan	0	0,11	0,15	0,15	0,19	0,71								
										Persentase Tenaga Kerja Bidang Sumber Daya Mineral yang Mendapat Pelatihan Pertambangan Berkelanjutan	0	0,14	0,14	0,17	0,17	0,21								
										Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Kompetensi	0,25	30	0	0	0	0								
									Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan Pertanian yang Diperiksa Dan Dibina Sesuai Standar Pemeriksaan Perusahaan	2	2	2	2	2	2								
										Persentase Perusahaan Kelautan Perikanan yang Diperiksa dan Dibina Sesuai Standar Pemeriksaan Perusahaan	0,49	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6								
										Persentase Jumlah Perusahaan Di Bidang Pariwisata yang Diperiksa dan Dibina Sesuai Standar Pemeriksaan Perusahaan	1,44	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6								
										Persentase Perusahaan Sumber Daya Mineral yang Diperiksa dan Dibina	0	1,36	4,8	4,8	4,8	4,8								

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026														
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target												
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
										Sesuai Standar Pemeriksaan Perusahaan																					
										Pertumbuhan Kenaikan Upah Tenaga Kerja	NA	0	0	0	0	0															
										Persentase Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja	0,457	0,5	0,65	0,75	0,8	0,9															
										Persentase Penurunan Kecelakaan Kerja	Persentase Penurunan Kecelakaan Kerja	0,36	0,34	0,32	0,3	0,3									0,3						
									Urusan Pariwisata								Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata														
									Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Tingkat Kunjungan Wisatawan	0	5	7	9	11	13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (SP)								Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
									Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase Objek Wisata yang Terkelola	NA	0,32	0,32	0,33	0,33	0,36	Program Pemasaran Pariwisata								Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Total PAD Daerah	0,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
									Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan	Persentase Sumber Daya Pariwisata yang Terlatih dan Tersertifikasi	NA	NA	0	0	0	0	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SP)								Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
										Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlatih	NA	NA	0	0	0	0															
									Pertumbuhan Kelembagaan Pariwisata		NA	NA	0	0	0	0															
										Rasio Penyelenggaraan Event Kepariwisataan dengan Priode Waktu Satu Tahun	NA	NA	0	0	0	0															
1.5	PP	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	Urusan Perdagangan								Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														
			Neraca Perdagangan Barang (USD Miliar)	0,3	1	3	7,5	15	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor	857.937	860.000	862.000	862.000	863.000	870.000	Program Pengembangan Ekspor (SP)	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00							
			Nilai Devisa Pariwisata (USD Miliar)	21	23	25	27,5	30		Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu	11	73	83	89	95	100															
										Persentase Peningkat Sarana dan Prasarana Perdagangan Dibangun dan Termanfaatkan	87	0	63	12	0	25															
										Persentase Rumah Tangga Miskin yang Bekerja di Sektor Perdagangan	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1															
										Persentase Pertumbuhan Nilai Omzet yang Memanfaatkanresi Gudang	0	0	20	40	20	20															

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026									
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024				2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
										Pertumbuhan Komoditi yang Terjual Melalui Pasar Lelang	NA	0	1	1	1	1										
										Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	10	10	10	10	10	10										
1.6	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	Sekretariat Daerah								Sekretariat Daerah									
			Biaya Logistik Terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Kebijakan yang Diimplementasikan	0,9	0,9	72	75	75	80	Program Perekonomian Pembangunan	Dan	Presentase Alokasi Pemerintah Untuk Penyiapan Proyek, Transaksi Proyek, dan Dukungan Pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)							
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index	NA	34-39	NA	29-34	NA		Persentase Rekomendasi Komoditas Penyumbang Inflasi yang Paling Tinggi dengan Intervensi Program/Kebijakan	0,9	0,9	1	1	1	1			Tingkat Kematangan UKPBJ							
																			5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00							
																			Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Terkait Perekonomian Administrasi Pembangunan, dan Sumber Daya Alam							
											Keuangan								Keuangan							
							Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	0,2605	0,2376	0,2419	0,2462	0,2505	0,2548	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (SP)	yang	Persentase Program/Kegiatan Tidak Terlaksana									
							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	NA	B	B	B	A	A	Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu												
														95,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00												
							Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Persentase Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain-Lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,7395	0,7624	0,7581	0,7538	0,7495	0,7452			Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa									
							Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Nilai Aset Daerah yang Dapat Diyakini Kewajarannya	4.002.359.107.306	4.633.238.287.093	4.929.403.053.587	5.244.499.204.715	5.579.736.858.451	5.936.403.495.221	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	85,00	Persentase Belanja									
																	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00									
						Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD																				
						Ketepatan Waktu Penyampaian Keuangan																				
						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00																				
						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00																				

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target														
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
																		Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00									
																		Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00									
																		Persentase Belanja Kesehatan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00									
																		Proporsi Pajak Terhadap Total Belanja	7,00	6,96	7,43	7,56	7,76	8,12									
																	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
																		Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
																	Program Pengelola Pendapatan Daerah (SP)	Rasio PAD	1,32	1,37	1,40	1,42	1,44	1,48									
																		Rasio PAD Terhadap Komponen Pendapatan Daerah	13,16	13,73	14,03	14,17	14,38	14,81									
																		Kemandirian Keuangan Daerah	13,16	13,73	14,03	14,17	14,38	14,81									
																	Urusan Perdagangan								Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
																	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor	857.937	860.000	862.000	862.000	863.000	870.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
																		Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (18 Bahan Pokok) yang Tersedia Setiap Waktu	11	73	83	89	95	100	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (SP)	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	3,99	3,79	3,59	3,39	3,19	2,99	
																		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Dibangun dan Termanfaatkan	87	0	63	12	0	25	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SP)	Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi terhadap Ketentuan yang Berlaku	0,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	
																		Persentase Rumah Tangga Miskin yang Bekerja di Sektor Perdagangan	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1									
																		Persentase Pertumbuhan Nilai Omzet yang Memanfaatkan Rresi Gudang	0	0	20	40	20	20		Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,00	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	
										Pertumbuhan Komoditi yang Terjual Melalui Pasar Lelang	NA	0	1	1	1	1																	
										Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	10	10	10	10	10	10																	
									2	PN	MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN																						
									2.1	PP	Laju Prtumbuhan PDRB Wilayah Sumatra	(0,3)-1,3	3,9-5,1			5,6	Urusan Pariwisata								Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026														
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator		Target				Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Target									
					2020	2021	2022	2023				2024	2017	2018	2019	2020	2021				2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Pengembangan Wilayah Sumatera		IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (Nilai Min-Maks)	Provinsi Sumatera	69,6-76,1	70,1-76,5			71,9-78,2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Tingkat Kunjungan Wisatawan	0	5	7	9	11	13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (SP)	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00				
									Persentase Penduduk Miskin Wilayah Sumatera (Persen)	10,1	9,6			5,8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase Objek Wisata yang Terkelola	NA	0,32	0,32	0,33	0,33	0,36	Program Pemasaran Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Total PAD Daerah	0,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
									Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan	Persentase Sumber Daya Pariwisata yang Terlatih dan Tersertifikasi	NA	NA	0	0	0	0	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SP)	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00					
										Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif Terlatih	NA	NA	0	0	0	0														
										Pertumbuhan Kelembagaan Pariwisata	NA	NA	0	0	0	0														
										Rasio Penyelenggaraan Event Penunjang Kepariwisataan dengan Priode Waktu Satu Tahun	NA	NA	0	0	0	0														
									Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
									Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	0	0	0	0,5	0,75	1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (SP)	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	77,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
										Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang Diimplementasikan	0	0	0	50	75	100		Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Berserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	0,00	37,50	62,50	75,00	100,00	0,00						
																		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												
									Program Pengelolaan Izin Lokasi (SP)	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NA	10	20	25	30	35	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Izin Lokasi yang Diberikan	0,00	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00					
										Persentase Kesesuaian Lokasi Cetak Sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	700.000.000	30	50	75	100	25		Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan	0,00	80,00	60,00	40,00	20,00	0,00						
										Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	NA	0	0,25	0,5	0,75	1		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang Terselesaikan	0,00	0,00	50,00	40,00	20,00	10,00					
										Persentase Luas Lahan yang Bersertifikat untuk Kepentingan di TPA Regional	NA	80	0	0	0	0		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan	Persentase Proses Penetapan Subjek dan Objek Resdistribusi serta Ganti Rugi Tanah yang Terlaksana	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00					

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan | VI.87

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026								
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
										Digunakan dalam Perencanaan dan Pangambil Kebijakan															
										Persentase Rekomendasi Kajian Penanggulangan Kemiskinan yang Digunakan dalam Perencanaan dan Pangambil Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
										Persentase Rekomendasi Kajian Tentang Pengendalian Inflasi yang Digunakan dalam Perencanaan dan Pangambil Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
										Persentase Rekomendasi Kajian Kependudukan yang Digunakan dalam Perencanaan dan Pangambil Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
										Persentase Rekomendasi Kajian Infrastruktur dan Konektivitas yang Digunakan dalam Perencanaan dan Pangambil Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
										Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan yang Digunakan Sebagai Rekomendasi Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
										Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan yang Digunakan Sebagai Rekomendasi Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
										Persentase Rekomendasi Kajian yang Digunakan dalam Perencanaan dan Pangambil Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
										Persentase Rekomendasi Kajian Tentang Reformasi Birokrasi yang Digunakan dalam Perencanaan dan Pangambil Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
										Persentase Rekomendasi Kajian Tentang Demokrasi yang Digunakan dalam Perencanaan dan Pangambil Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
										Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup yang Digunakan Sebagai Rekomendasi Kebijakan	0,1	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4									
									Sekretariat Daerah																Sekretariat Daerah

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan | VI.89

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																	
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target															
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)										
																	Umum di Wilayah Kecamatan		Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
																											Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
																													Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
																	Program Desa	Penataan	Persentase Usulan Penataan Desa Yang Ditindaklanjuti		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
																	Program Kerjasama Desa	Peningkatan	Persentase Kerjasama Antardesa Terlaksana		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
																	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
																			Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran Tibumtranmas yang Ditindak sesuai aturan	Jumlah yang dengan	NA	100	100	100	100	100							
																			Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
																					Cakupan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Petugas Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
																			Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
3	PN	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING																																
3.1	PP	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Proporsi Penduduk yang Tercakup dalam Program Jaminan Sosial (Persen)	78,7	-	-	-	-	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
			Angka Kelahiran Total	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang Mempunyai KTP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP	97,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00										
			Proporsi Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemerintah (Persen)	65,2	-	-	-	-		Persentase Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang Sudah Memiliki Akte Kematian	NA	NA	NA	NA	NA	NA			Penerbitan KTP Ber-NIK Per Jumlah Penduduk Wajib KTP	97,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
										Persentase Database Kependudukan Tingkat Provinsi yang Akurat	0	0	100	100	100	100			Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	72,18	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
										Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan NIK Database Kependudukan dan KTP dalam Meningkatkan Pelayanan ke Masyarakat	3	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28			Program Pencatatan Sipil	Penerbitan Akta Kelahiran Per Jumlah Kelahiran	94,41	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
										Persentase Anak yang Memiliki Akte Kelahiran	NA	NA	NA	NA	NA	NA					Rasio Penerbitan Akta Kematian	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026													
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
										dalam Mendukung Hak Anak untuk Mendapat Hak Identitas																				
										Rasio Pasangan Berakte Nikah															89,00	92,00	96,00	1,00	1,00	1,00
										Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun															98,96	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Persentase Permohonan Dokumen dan Layanan Data Kependudukan yang Dapat Diproses/Dilayani															100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Persentase Pengelolaan Arsip Pelayanan Adminduk Secara Digital															0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
									Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Skala Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00														
									Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
									Peningkatan Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	11,3	10,69	10,08	9,47	8,86	8,25	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	40,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00						
										Persentase Unmeet Need	8	7,65	7,48	7,39	7,22	7,13	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka Kelahiran Menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, Kelompok Usia 15-19 Tahun (Kelahiran Per 1.000 Perempuan)	25,00	24,00	23,00	20,00	17,00	15,00						
										Presentase KB MKJP	7,5	8,3	8,9	9,7	10,5	11,3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Keluarga yang Terlayani	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00															
								Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																						
								Program Pemberdayaa; Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga, Masyarak Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00															
3.2	PP	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi Penduduk yang Tercakup dalam Program Jaminan Sosial	78,7	-	-	-	98	Urusan Sosial								Urusan Pemerintahan Bidang Sosial													
			Proporsi Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemerintah	65,2	-	-	-	80	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Pemberdayaan Sosial yang Mampu Melaksanakan Peranan dan Fungsi Sosial	NA	17,7	17	19,78	21,27	24,4	Program Pemberdayaan Sosial (SP)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
										Persentase PSKS yang Mendapatkan Pelayanan Pemberdayaan Sosial yang Mampu Melaksanakan Peranan dan Fungsi Sosial	NA	15,87	15,63	16,23	22,84	29,45		Persentase Penyaluran Uang atau Barang Hasil Pengumpulan Kepada Masyarakat yang Membutuhkan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
									Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Korban Nazpza	NA	14,89	21,28	21,28	21,28	21,28	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Terfasilitasi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
										Persentase PMKS yang Mendapatkan Pelayanan,	NA	23,94	19,01	19,01	19,01	19,01		Persentase PPKS (Pemerlu Kesejahteraan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																						
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target																			
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)														
										Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial yang Mampu Melaksanakan Peranan dan Fungsi Sosial								Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (SP)																			
										Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial								NA								16,57	20,67	20,67	20,67	30	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
										Persentase Anak yang Mendapatkan Hak dalam Pelayanan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial								NA								20,25	18,99	18,99	20,25	21,52	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial Selama Satu Tahun	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
										Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								Persentase PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Mampu Melaksanakan Peranan dan Fungsi Sosial								NA	8,54	22,84	22,84	22,84	22,84	Persentase Pemberian Bantuan Sosial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial								100								20	20	20	20	20	Program Penanganan Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola								0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.3	PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	230	217	205	194	183	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
			Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	Peningkatan Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	11,3	10,69	10,08	9,47	8,86	8,25	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Unmet Need	5,00	5,61	5,49	5,39	5,29	5,19														
			Angka Kematian Neonatal (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10		Persentase Unmeet Need	8	7,65	7,48	7,39	7,22	7,13																						
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4		Presentase KB MKJP	7,5	8,3	8,9	9,7	10,5	11,3																						
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi	8,6	8,3	8	7,7	7,4	Urusan Kesehatan							Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																						
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (Kelahiran Hidup Per 1.000 Perempuan)	25	24	21	20	18	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Kepesertaan JKN	78	78	92	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SP)	Persentase Pelayanan Penderita Hipertensi	57,00	57,00	36,00	100,00	100,00	00,00														
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Persen)	24,1	21,1	18,4	16	14		Jumlah Kecamatan yang Memiliki Minimal 1 PKM yang Tersertifikasi Akreditasi	NA	35,94	59,38	73,44	73,44	73,44			Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	100,00	00,00	100,00	100,00	00,00													

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026										
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional	NA	64,29	71,43	71,43	71,43	71,43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SP)	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	90,00	90,00	95,00	97,00	100,00	00,00		
			Insidensi HIV (Per 1.000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18		Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	NA	60	75	85	95	100		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	100,00	100,00	00,00	100,00	100,00	00,00		
			Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	272	252	231	211	190		Persentase Puskesmas yang Menjalankan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	NA	63	65	70	75	80		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	85,00	85,00	37,00	90,00	100,00	00,00		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	325	345	365	385	405		Persentase Penduduk yang Memiliki Kualitas Lingkungan Sehat	NA	79	82	84	87	90		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar	90,00	92,00	94,00	95,00	96,00	97,00		
			Insidensi Hepatitis B (Persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09		Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	NA	7	7	7	7	7		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
			Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7		Angka Kematian Ibu Per Kelahiran Hidup	NA	23	22	21	20	19		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00		
			Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia > 18 Tahun (Persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8		Persentase Kab/Kota yang Membuat Kebijakan yang Mendukung PHBS	NA	70	80	90	90	90		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	00,00		
			Persentase Tekanan Darah Tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1		Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapat Bantuan Pangan Dan Gizi	0	0	0	0	0	0		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00		
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi	65	70	80	90	100	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil	0	0	0	0	0	0	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)		75,00	75,00	30,00	85,00	90,00	00,00			
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	80	85	90	95	100	Persentase Lansia yang Dilayani Sesuai Standar Kesehatan	NA	0	0	0	0	0	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		71,00	100,00	00,00	100,00	100,00	00,00			
												Persentase Puskesmas yang Melayani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	NA	0	0	0		0	0	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,00	99,00	00,00	100,00	100,00	00,00
												Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Anak Balita dalam Mendukung Hak Anak untuk Mendapatkan Hak Kesehatan	0,144	0,1435	0,143	0,1425		0,142	0,1415	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	100,00	00,00	100,00	100,00	00,00
												Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	NA	23	33	43		53	63	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	100,00	00,00	100,00	100,00	00,00
												Persentase Perempuan Usia 30-50 Tahun yang Dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	NA	18	23	28		33	38	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	85,71	100,00	00,00	100,00	100,00	00,00
												Persentase Menurunnya Penyakit Tidak Menular Lainnya	NA	33	32	31		30	29	Proporsi SDM Kesehatan Tersertifikasi Kompetensi	50,00	55,00	50,00	65,00	70,00	75,00

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026							
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Persentase Kabupaten /Kota dengan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru BTA Positif	NA	71	86	86	86	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (SP)	Persentase Penggunaan Obat Rasional	90,00	92,00	94,00	95,00	95,00	95,00
										Prevalensi HIV Pada Penduduk Resiko	NA	10	10	10	10	10		10	40,00	50,00	55,00	75,00	85,00	00,00
										Persentase Kabupaten/Kota Mencapai Eliminasi Malaria	NA	86	86	100	100	100								
										Persentase Penanganan Penyakit Menular Lainnya	NA	100	100	100	100	100								
										Persentase Puskesmas /Rumah Sakit yang Melayani Institusi Pelayanan Wajib Lapor Napza	NA	25	0	0	0	0								
										Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1								
										Persentase Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Akibat Bencana atau Berpotensi Bencana dalam Satu Provinsi	0,08	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3								
										Persentase Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luarbiasa (KLB) yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Satu Provinsi	1	1	1	1	1	1								
										Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Tenaga/SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	NA	2.076	2.284	2.512	2.763		3.039						
										Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	NA	90	94	96	98	100								
Persentase Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat	NA	90	91	92	93	94																		
3.4	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai Rerata PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA	399,1	NA	NA	399,7	Urusan Pendidikan								Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
				NA	388,7	NA	NA	392,3																
				NA	400,4	NA	NA	406,2																
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal Test PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA	34,4	NA	NA	35,6																

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026										
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16		Persentase SMA Terakreditasi A APK SMA Perempuan APK SMA Laki-Laki	0,3313	0,3529	0,3888	0,4063	0,4343	0,4394		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	88,94	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00			
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas (Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16		Rata-Rata Nilai UN SMA	33,33	0,3788	0,4242	0,5	0,5606	0,6061		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	46,31	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00			
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan						Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	92,48	95	97	1	1	1	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Kesetaraan Paket A, B, C	0,00	37,50	50,00	62,50	87,50	100,00				
									Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	0,3482	0,36	0,4	0,45	0,5	0,6		Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SD Dan SMP)	0,00	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71				
									Persentase Guru dengan Nilai Rata-Rata Uji Kompetensi di Atas 50	0,8216	0,85	0,9	0,95	1	1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SP)	Persentase Guru PAUD, SD, SMP yang Bersertifikat Pendidik	0,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00				
			Program Pelayanan Masyarakat Terhadap Pendidikan Publik Wilayah Belitong dan Belitong Timur						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di Wilayah Belitong dan Belitong Timur	NA	0,7661	0,7929	0,8197	0,8464	0,9		Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI	0,00	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00				
																	Persentase Pengawas dan Kepala Sekolah yang Bersertifikat	71,00	71,10	75,00	100,00	100,00	100,00				
																	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs	0,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00				
			Program Pengembangan Bahasa dan Sastra														Pengembangan Muatan Lokal dan Budaya Etnis	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00				
																	Penyediaan Bahan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah yang Penuturnya Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00				
			Urusan Perpustakaan									Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
			Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan									Pertambahan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	NA	0	0	0	0	0		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	1,35	1,37	1,39	1,41	1,43	1,45
												Pertambahan Jumlah Jenis Koleksi Bahan Pustaka	NA	200	350	400	500	550									
												Pertambahan Pengunjung Perpustakaan	NA	100.000	11.500	12.500	13.650	14.870									
			Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan									Presentase Perpustakaan Terakreditasi	NA	0	0	0	0	0									
												Pertambahan Pengelola Perpustakaaan yang Dapat Menerapkan Perpustakaan Sesuai Standar	NA	0	0	0	0	0									
3.5	PP	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
			Prevalensi Anak Usia 13-17 Tahun yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya (Persen)	L : 61,7 P : 62	Turun	Turun	Turun	Turun	Program Peningkatan Pemberdayaan dan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	NA	0,2	0,0667	0,0625	0,0588	0,1111	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (SP)	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	93,50	95,00	97,00	100,00	100,00	100,00			

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026										
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024				2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,211 6475	91,277 94284	91,278 96233	91,334 69578	91,386 27023	Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda yang Bekerja	NA	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102		Persentase Wirausaha Muda	2,00	2,20	2,25	2,50	2,75	3,00		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,244 81017	73,500 50042	73,740 51922	73,965 92027	74,177 47551		Persentase Berprestasi	Pemuda	NA	0,2287	0,2287	0,2287	0,2287	0,2287	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelatihan SDM Kepramukaan	45,00	45,00	50,00	55,00	55,00	55,00	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55		Persentase Kepemudaan Berprestasi	Insan yang dan Berdedikasi yang Dibantu	NA	0,0641	0,0641	0,0641	0,0641	0,0641									
			Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Usia 15-64 Tahun di 12 Bulan Terakhir	Menurun dari 9,4	Turun	Turun	Turun	Turun		Persentase Masyarakat Menjaga Kepemudaan	Peran dalam Nilai-Nilai	NA	0	0	0	0	0									
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
									Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan yang Bekerja		8,29	8,08	7,73	7,52	7,31	7,01	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (SP)	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
								Persentase Kepala Keluarga Perempuan Miskin yang Diberdayakan			10,69	10,68	9,47	8,86	8,25	7,64	Jumlah IR yang Terbina		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
								Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD			3,46	3,52	3,55	3,58	3,61	3,64	Persentase Pelaksanaan RAD PUG		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
									Persentase Perempuan Berkompetensi Lembaga Politik	Jumlah yang di	25,37	26,75	27,77	28,79	29,81	30,83	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
									Persentase Organisasi dan Masyarakat yang Berbasis Gender	Jumlah Lembaga yang Berbasis	NA	0	30	30	30	30		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (SP)	Forum Anak Desa	0,00	5,00	7,00	9,00	9,00	9,00	
									Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan Per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas Di Tingkat Daerah Provinsi		42,97	40,47	37,97	35,47	32,97	30,47			Jumlah Peraturan Dan Kebijakan PHPA	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
									Menurunkan Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Per 100.000 Anak Usia 0-18 Tahun Di Tingkat Daerah Provinsi		0,48	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Mendapat Kategori Khusus	Anak yang dalam Perlindungan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									Persentase Kab/Kota Layak Anak		NA	28,57	42,85	57,14	85,71	100										
3.6	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memiliki Aset Produktif	27,9	-	-	-	40	Urusan Sosial									Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
			Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang	25,6	-	-	-	50	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase PMKS yang Mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	NA	19,64	19,64	19,64	20,55	24,4	Program Pemberdayaan Sosial (SP)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																						
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target																			
				2020	2021	2022	2023	2024				2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)															
			Mengakses Pendanaan Usaha																																				
			Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat dan Dilepaskan untuk TORA (Ha)	630.000	1.600.000	1.850.000	1.350.000	1.100.000																	Persentase PMKS (Fakir Miskin) yang Mendapatkan Bantuan	5,4	5,4	18,15	24,27	23,99	29,45	Persentase Penyaluran Uang atau Barang Hasil Pengumpulan Kepada Masyarakat yang Membutuhkan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Bidang Tanah yang Direistribusi	750.000	-	-	-	7.750.000																	Persentase Debitur yang Membayar Tunggalan Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Disetorkan ke Kas Daerah	NA	12,38	22	19,79	17,8	21,28	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Bidang Tanah yang Dilegalisasi	6.286.087	-	-	-	56.286.087																								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (SP)	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
																																	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial Selama Satu Tahun	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026															
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)								
										Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Sektor Sumber Daya Mineral yang Bersertifikat Kompetensi	17,54	0	17,54	21,3	22,56	23,06																
										Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dari Tenaga Kerja Asing	500.000.000	100	150	200	250	300																
										Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	8	14,29	17,14	20	22,86	25,71																
										Pesentase Lansia Potensial yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	NA	0	0,28	0,28	0,28	0,28																
										Persentase Ex Korban Napza yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	NA	0	10,64	10,64	10,64	10,64																
										Persentase Wanita Tunasosial yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	NA	0	8,62	8,62	8,62	8,62																
										Persentase Penyandang Disabilitas yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	NA	0	0,78	0,78	0,78	0,78																
										Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Tentang Pertanian yang Berkompetensi	0,14	0,14	0,14	0,17	0,17								0,21								
											Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Tentang Kelautan yang Berkompetensi	0,0011	0,0011	0,0011	0,0015	0,0015								0,0019								
									Persentase Pencari Kerja Pariwisata yang Mendapat Pelatihan		0	0,11	0,15	0,15	0,19	0,71																
									Persentase Tenaga Kerja Bidang Sumber Daya Mineral yang Mendapat Pelatihan Pertambangan Berkelanjutan		0	0,14	0,14	0,17	0,17	0,21																
									Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Kompetensi	0,25	30	0	0	0	0																	
									Urusan Kepemudaan dan Olahraga															Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga								
									Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Jumlah Peserta yang Mengikuti Babel Sport Tourism	NA	0,02	0,04	0,06	0,06	0,08								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan Cabang Keolahragaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
										Persentase Atlet Pelajar Berprestasi yang Dibina di Tingkat Provinsi yang Memperoleh Medali	NA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05										Persentase Pembinaan Cabang Keolahragaan	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
										Persentase Insan Olahraga yang Berprestasi	NA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05																

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026									
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
										Persentase Peserta yang Megikuti Olahraga Rekreasi dan Tradisional	NA	0	0	0	0	0									
										Persentase Lansia yang Aktif yang Mengikuti Pelayanan Olah Raga Khusus Lansia	NA	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019									
										Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang Berprestasi di Bidang Keolahragaan	NA	0,0402	0,0402	0,0402	0,0402	0,0402									
										Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang Memiliki Standar Nasional	NA	0,0267	0,0267	0,0267	0,0267	0,0267									
									Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terbangun dalam Mendukung Event Olahraga Regional dan Nasional	NA	0,0833	0,1667	0,1667	0,25	0,25									
										Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang Terbangun yang Difungsikan	NA	0,0833	0,1667	0,1667	0,25	0,25									
4	PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN																							
4.1	PP	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju Modern dan Berkarakter	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	79,06	79,14	-	-	79,38	Kesatuan Bangsa dan Politik							Kesatuan Bangsa dan Politik									
			Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	69,97	70,96	-	-	73,95	Program Ideologi Wawasan Kebangsaan	Bina dan	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	0	0	-	-	-	-	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa	0	100,00	50,00	55,00	60,00	65,00
			Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	76,96	77,34	-	-	78,08			Jumlah kasus konflik SARA	3	3	2	1	0	0	Program Pemberdaya dan Pengawas Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas / LSM / OKP yang berstatus terdaftar	0	100,00	50,00	55,00	60,00	65,00
			Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	53,46	56,70	-	-	66,39	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional		Persentase Jumlah sanggar / paguyuban yang melestarikan seni budaya dalm mendukung ketahanan budaya	0	30	40	50	60	70	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah konflik secara dini dan pasca konflik	0	100,00	55,00	60,00	65,00	70,00
			Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	68,40	69,74	-	-	73,65			Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten / Kota	17	12	9	7	5	4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat	0	100,00	55,00	60,00	65,00	70,00
			Indeks Kerentanan Keluarga	12,00	11,50	-	-	10,00	Program Pembinaan Politik dalam Negeri		Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi berkaitan dengan Politik Daerah	0	7	7	7	7	7								
			Indeks Karakter Remaja	67,92	68,42	-	-	69,92			Tingkat Kinerja Lembaga Demokrasi	0	45	50	60	70	80								
4.2	PP	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat	Nilai Dimensi Warisan Budaya	46,61	49,36	-	-	57,60	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan							Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
			Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	37,38	37,79	-	-	39,01	Program Pelestarian Budaya		Persentase budaya lokal yang dilindungi,	NA	NA	0	0	0	0	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	0	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00

RPJMN Tahun 2020 - 2024										RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026										
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		Karakter dan Nilai Dimensi Ekonomi Memperteguh Jat Budaya Diri Bangsa Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Indeks Kepuasan Masyarakat Ibadah Haji	37,03	40,28	-	-	50,00		dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina							Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	0	50,00	55,00	55,00	60,00	62,00			
			Indeks Kepuasan Masyarakat KUA	80,00	81,00	-	-	84,00									Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah	0	60,00	62,00	65,00	65,00	67,00			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Produk Halal	60,00	65,00	-	-	80,00									Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	0	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00			
			Tingkat Umat terhadap Budaya	60,00	70,00	-	-	90,00									Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan permuseuman	0	60,00	65,00	65,00	70,00	75,00			
4.3	PP	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat Ibadah Haji	85,95	85,96	-	-	86,00	Kesatuan Bangsa dan Politik							Kesatuan Bangsa dan Politik											
			Indeks Kepuasan Masyarakat KUA	80,00	81,00	-	-	84,00	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan NAPZA		150	200	500	700	900	1100	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat	0	100,00	50,00	55,00	60,00	65,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Produk Halal	60,00	65,00	-	-	80,00																			
			Tingkat Umat terhadap Budaya	60,00	70,00	-	-	90,00		Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan pembangunan		0	25	35	45	55	65										
4.4	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,00	12,00	-	-	15,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan											
									Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar		NA	0	0	0	0	0	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	53,12	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00		
									Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan arsip	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip		NA	20	20	20	20	20	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase penyelamatan arsip dari bencana yang terlaksana	0,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00		
									Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan											
									Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan		NA	0	0	0	0	0	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	1,35	1,37	1,39	1,41	1,43	1,45		
										Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka		NA	200	350	400	500	550	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno daerah yang dilestarikan	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00		
									Pertambahan pengunjung perpustakaan		NA	10000	11500	12500	13650	14870											
									Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	Presentase perpustakaan terakreditasi		NA	0	0	0	0	0										
										Pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar		NA	0	0	0	0	0										
5	PN	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR																									
5.1	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Rasio KPR Terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
			Persentase Rumah yang Menempati Hunian	92,46	93,44	94,00	94,63	95,00	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan		0	0	0	0,5	1	0	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau	0	20	40	60	80	100		

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026										
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			dengan Kecukupan Luas Lantai per Kapita							konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil							Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	0,00	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00		
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding) (%)	81,55	83,50	84,80	86,00	87,00			Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan strategis industri terpadu air kelik	0,00	0,00	0,00	0,35	0,70		1,00								
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Perumahan (%)	47,02	47,62	58,23	59,62	60,00			Persentase penyediaan volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	0	0	0,05	0,50	1,00		0,00	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	80,32	85,83	89,76	93,70	96,85	100,00
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak (%)	90,41	92,81	95,9	97,9	100,00			Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	0,238	0,3932	0,55	0,65	0,75		0,85	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SP)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	76,13	77,07	78,00	78,93	79,86	80,79
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Aman (%)	7,30	8,40	10,00	12,20	15,00			Pertumbuhan volume air baku	0,00	0,00	0,10	0,20	0,30		0,40	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rasio sampah terangkut (m3)	0,65	0,00	0,80	0,85	0,90	0,90
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	21,23	23,54	-	-	30,45	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat	88,43	89,82	91,22	93,09	94,95	97,28		
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum bukan Jaringan Perpipaan (%)	69,18	69,27	-	-	69,55		Persentase jumlah jasa yang berkompotensi	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (SP)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	32,00	35,00	38,00	40,00	43,00	45,00		
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (%)	78,10	79,43	82,07	86,03	90		Persentase Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00		Rasio jaringan irigasi	18,40	21,33	24,27	27,21	30,15	33,09		
			Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka (%)	5,95	4,46	-	-	0,00											Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sampah yang Terkelola dengan Baik di Perkotaan (%)	72,92	73,70	75,28	77,64	80											Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00	23,00	31,00	39,00	46,00	54,00	
			Jumlah Kabupaten / Kota yang Terpenuhi Kebutuhan Air Bakunya Secara Berkelanjutan (kabupaten/kota)	163	173	-	-	200										Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan pendukung strategis penataan permukiman pariwisata	0,00	14,29	28,57	57,14	85,71	100,00	

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026								
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Rata-Rata Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)	30	29	29	28	28	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
			Volume Tampung Air Per Kapita (m3/kapita)	52,57	52,57	57,05	58,10	58,49	Program Keciptakarya dan Permukiman	Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Provinsi	NA	0.12	0.33	0.56	0.88	1,00	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase tersedianya layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	0	100	100	100	100	100	
			Persentase Luas Sawah Beririgasi (%)	52,57	52,57	-	-	59,30		Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	NA	0.07	0.26	0.63	0.86	1,00	Program Pengembangan Perumahan (SP)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	
			Luas Daerah Irigasi Premium yang Dimodernisasi (hektare)	0	398.123	-	-	597.226		Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	NA	0	0.25	0.5	0.75	1	Program Kawasan Permukiman (SP)	Persentase permukiman yang tertata	99,07	99,22	99,4	99,61	99,82	100	
										Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	NA	0.04	0.09	0.31	0.42	0.51	Program Kawasan Perumahan Kumuh (SP)	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0	0	0	0	0	0	
										Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	0.35	0	0.5	0.7	0.85	0.95	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (SP)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	100	100	100	100	100	
										Persentase sarana air limbah yang layak	0	0	0	0.22	0.26	0.24									
										Persentase sarana air limbah yang layakdi kawasan kumuh Provinsi	0.83	0	0.85	0.87	0.9	0.95									
										Persentase drainase dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Provinsi	N.A	0	0	0.21	0.22	0.17									
										Persentase drainase dalam kondisi baik di Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi	N.A	0.12	0.3	0.65	0.87	1									
										Persentasesarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi	N.A	0	0	0.6	0.7	0.8									
										Persentasesarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	0.27	0	0.4	0.6	0.7	0.8									
										Program Pembangunan Perumahan Rakyat	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	0	0.0152	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255								
											Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana	154 unit	0,49	0,51	0,00	0,00	0,00								

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026								
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.2	PP	Infrastruktur Ekonomi	Persentase Kondisi Mantap Jalan Nasional /Provinsi/ Kabupaten	92/68 /57	93/69, 5/58,5	-	-	97/75 /65	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
			Panjang Jalan Tol Baru yang Terbangun dan /atau Beroperasi (Km)	481	242	-	-	2500	Program Kebinamargaan	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	0,9095	0,9195	0,9295	0,9395	0,9495	0,9595	Program Penyelenggaraan Jalan (SP)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	79,67	82,00	84,70	87,57	90,11	90,90	
			Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)	81,50	83,00	-	-	94,00		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88			Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah	0,343	0,344	0,35	0,35	0,35	0,35
			Panjang Jalan Baru yang Terbangun (Km)	500	679	-	-	3000		Persentase Panjang JalanProvinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	0,9251	0,9351	0,9451	0,9551	0,9651	0,9751									
			Panjang Jaringan KA yang Terbangun (Kumulatif) (Km'Sp)	6188	6293	-	-	7451		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89									
			Jumlah Pelabuhan Utama yang Memenuhi Standar	1	2	-	-	7		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,01	0,25	0,26									
			Jumlah Rute Subsidi Tol Laut (Rute)	21	26	-	-	25		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik diKawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	0,21									
			Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Baru yang Dibangun (Lokasi)	6	6	-	-	36		Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0,00	0,00	0,00	0,01	0,25	0,26									
			Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (Lokasi)	7,00	12	-	-	21,00		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	0,21									
			Jumlah Rute Jembatan Udara (Rute)	28,00	31	-	-	43,00		Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98									
										Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98									
										Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas	0	0	0	0	0	0									

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026														
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target												
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
										Propinsi dalam kondisi mantap																					
										Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012															
										Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	0,00	0,00	0,00	0,01	0,25	0,26															
										Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	0,21															
									Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan								Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan														
									Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Wisata	NA	0,50	0,20	0,30	0,30	0,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (SP)								Persentase pemenuhan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9,93	17,00	25,00	27,00	32,00	35,00
										Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	NA	0,00	0,00	0,02	0,10	0,03															
										Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	NA	0,00	0,05	0,07	0,10	0,00															
										Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
									Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	NA	0,12	0,15	0,18	0,25	0,30	Program Pengelolaan Pelayaran								Persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran	56,79	60,49	62,96	65,43	65,43	66,67
										Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	NA	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00															
										Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang	NA	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30															
										Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	NA	0,20	0,30	0,00	0,00	0,00															
									Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	Persentase pulau - pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	NA	0,30	0,30	0,40	0,00	0,00															
										Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	NA	0,00	0,10	0,20	0,20	0,00															
									Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin																						

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026								
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	NA	0,10	0,20	0,10	0,00	0,00								
										Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan / dermaga yang layak	NA	0,15	0,17	0,23	0,30	0,00								
5.3	PP	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah Kota yang Dibangun Perlintasan Tidak Sebidang Kereta Api/ Flyover /Underpass	0	3	-	-	6	(bukan kewenangan / tidak diakomodasi oleh daerah)								(bukan kewenangan / tidak diakomodasi oleh daerah)							
5.4	PP	Energi dan Ketenagalistrikan	Jumlah Produksi Tenaga Listrik (TWH)	339.082	359.946	382.696	406.325	431.281	(bukan kewenangan / tidak diakomodasi oleh daerah)								(bukan kewenangan / tidak diakomodasi oleh daerah)							
			Nilai Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07																
			Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (Sambungan Rumah)	715.800	1.470.506	2.410.445	3.210.445	4.027.491																
			Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-Kumulatif (BPCD)	1.151.000	1.151.000	-	-	1.276.000																
5.5	PP	Transformasi Digital	Persentase Rata-Rata Pertumbuhan Sektor TIK	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Infromatika								Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			Persentase Pengguna Internet (%)	72,60	74,20	79,20	80,70	82,30	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	0.23	0.51	0.66	0.86	1	1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Proporsi Individu yang Menguasai / Memiliki Telepon Genggam (%)	70,00	72,00	73,00	74,00	75,70		Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	NA	0.4	0.8	0.9	1	1	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
			Persentase Populasi yang Dijangkau oleh Jaringan Bergerak Pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,50	98,00	98,50	99,00	100,00		Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	NA	0.2	0.4	0.6	0.8	1	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen data gender yang tersedia	0	1	1	1	1	1
									Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Birokrasi	NA	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian							
									Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yang dapat diakses masyarakat	N.A	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data informasi industri di SIINAS	0,00	58,33	58,33	66,67	66,67	75,00
										Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	N.A	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal							
										Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencai kerja	N.A	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	0,00	54,55	63,64	72,73	81,82	100,00
										Persentase informasi berkaitan dengan	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	Urusan Pemerintah Bidang Statistika							

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																				
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target																	
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)												
											penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat																									
											Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat																									
											Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat						Urusan Pemerintah Bidang Persandian																			
											Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat																									
											Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat						Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika																			
															Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								Persentase layanan informasi yang bisa diakses						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
															Program Pengelolaar Aplikasi Informatika (SP)						Tingkat kematangan aspek TIK						1,25	2,00	3,00	3,00	3,00	3,50				
6	PN	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM																																		
6.1	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup							Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup																				
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kota Terpadu Mandiri yang digunakan dalam perencanaan kawasan						Tidak ada	0	0	Ada	0	0	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan hidup						0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50		Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan Kawasan						Tidak ada	0	0	Ada	0	0		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (SP)	Indeks Kualitas Air						56,41	56,51	56,61	56,71	56,81	56,91	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50		Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunakan untuk perencanaan kawasan						Tidak ada	0	0	Ada	0	0			Indeks Kualitas Udara						93,86	93,97	94,08	94,19	94,30	94,41	
											Persentase jumlah kebijakan berkaitan dengan tutupan lahan yang diimplementasikan						NA	0	1 Dok	1 Dok	4 Dok			1 Dok	Indek Kualitas Lahan						45,46	47,48	49,49	51,51	53,54	55,58
											Persentase jumlah kebijakan berkaitan lingkungan						NA	1	1	1	1			1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati						0,00	22,50	32,50	42,50	52,50

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026																												
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target																										
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)																					
																								berkelanjutan yang diimplementasikan																					
																								Rasio jumlah perusahaan dengan jumlah kajian lingkungan hidup yang diimplementasikan	NA	17 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
																								Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase BOD, COD dan TSS	NA	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	0,00	90,00	90,00	90,00	95,00	100,00						
																									Persentase penurunan Konsentrasi SO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	NA	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Penetapan hak MHA, hak kearifan lokal dan/atau hak pengetahuan tradisional	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
																									Persentase penurunan Konsentrasi NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	NA	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
																									Persentase Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	NA	0.6	0.62	0.65	0.67	0.7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pengetahuan teknis tentang lingkungan hidup bagi masyarakat	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						
																									Persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	NA	0.1	0.18	0.25	0.31	0.36	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
																									Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	NA	0,00	0,00	0.05	0,10	0,15	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan sesuai peraturan perundangan, mekanisme di dalam maupun diluar pengadilan	0,00	10,00	15,00	17,00	19,00	20,00					
																										Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional	NA	0,00	-	0.05	0,10	0,15													
																								Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
																								Program Penataan Bangunan dan Luas Ruang Terbuka Hijau 18,48 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00																					
																								6.2	PP	Peningkatan Ketahanan Bencan. dan Iklim	Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Dampak Bencana	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Urusan Pemerintah Bidang Penanggulangan Bencana								Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
			Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim (Persen)	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan	0	72	74	76	78	80	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																					

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026									
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Kecepatan Penyampaian Informasi Peringatan Dini Kepada Masyarakat (Menit)	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	Penanggulangan Bencana	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	80	80	80	85	85	90	dan Penyelamatan Non Kebakaran								
										Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana							Program Penanggulangan Bencana (SP)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
																			Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
																			Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
																			Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3	PP	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Energi (Persen)	-	-	-	-	-	(bukan kewenangan / tidak diakomodasi oleh daerah)																
			Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Lahan (Persen)	-	-	-	-	-																	
			Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah (Persen)	-	-	-	-	-																	
			Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor LPPU (Persen)	-	-	-	-	-																	
			Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Pesisir dan Kelautan	-	-	-	-	-																	
7	PN	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK																							
7.1	PP	Konsolidasi Demokrasi	Jumlah regulasi/ kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	6	3	-	-	2	Kesatuan Bangsa dan Politik							Kesatuan Bangsa dan Politik									
7.2	PP	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67	(bukan kewenangan / tidak diakomodasi oleh daerah)							(bukan kewenangan / tidak diakomodasi oleh daerah)									
7.3	PP	Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	Sekretariat DPRD							Sekretariat DPRD									
									Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	NA	80	80	80	80	80	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam Rencana Lima Tahunan	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022							RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026								
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Perundang-Undangan							(RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi								
7.4	PP	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85	Inspektorat Daerah							Inspektorat Daerah								
			Persentase Pemerintah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Peningkatan Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	4,5	6	7	8	9	10	Program Penyelenggaraan Pengawasan (SP)	Persentase penyelesaian tindakan/temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	85,91	87,00	89,00	91,00	93,00	96,00
			Persentase Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Prosentase rekomendasi pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	88.83	90	95	90	95	95		Persentase penyelesaian tindakan/temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat	70,86	73,00	75,00	80,00	85,00	90,00
										Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	91.63	93	94	95	96	98	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (SP)	Persentase pendampingan asistensi dan hasil yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
									Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Tingkat capaian Maturitas Pegendalian Pemerintah (SPIP)	1	2	3	3	3	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa (SP)	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	2	3	3	3	3	3	Program Penataan Desa	Persentase Usulan Penataan Desa yang Ditindaklanjuti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									Fungsi Penunjang Lainnya							Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Antar desa Terlaksana	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
										Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah	NA	100	100	100	100	100	Kecamatan							
									Program Peningkatan Promosi, Informasi dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunaan daerah	NA	100	100	100	100	100	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah	NA	100	100	100	100	100		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									Sekretariat Daerah							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026							
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya	NA	0.63	0.75	0.78	0.85	0.91	Program Koordinasi dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Persentase Jumlah Pejabat Struktural ASN yang memiliki kinerja yang baik	NA	0.44	0.46	0.47	0.5	0.66	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00
										PersentaseJumlah ASN yang sesuai antara beban kerja dengan kompetensi dan jabatannya	NA	0.77	0.8	0.72	0.86	0.82	Kepegawaian							
									Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat	B	B	B	B	B	B	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelaksanaan program mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja ASN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Persentase instansi pelayanan publik Provinsi yang bersertifikat ISO	N.A	2 unit	3 unit	3 unit	4 unit	5 unit	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SP)	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah daerah	Persentase Jumlah pegawai yang menyampaikan LHKPN	95.08	96	97	99	99.5	100	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
										Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	61.89	63	65	67	70	75	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SP)	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 Pelanggaran (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
										Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	NA	70	75	80	85	90		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									Program Pengembangan Otonomi Daerah	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan	NA	0	0	0	0	0		Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									Program Perencanaan dan Pengadaan ASN serta Pelayanan promosi Kepangkatan dan Pensiun	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	0.79	0.83	0.87	0.92	0.96	0.98								
										Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	0.55	0.64	0.74	0.83	0.92	0.98								
									Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	0,04	0.23	0.42	0.6	0.79	0.97								
										Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	0,32	0,37	0,40	0,42	0.48	0,53								
										Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	0.88	0.92	0.96	0.97	0.99	1,00								

RPJMN Tahun 2020 - 2024									RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022								RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026							
No	Kode	Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2017	2018	2019	2020	2021	2022			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaian	0,11	0,21	0,31	0,40	0,50	0,60								
7.5	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20	(bukan kewenangan / tidak diakomodasi oleh daerah)								(bukan kewenangan / tidak diakomodasi oleh daerah)							
			Global Terrorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24																
			Proporsi Orang Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%																
			Indeks Keamanan Dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4																

*SP: Super Prioritas

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah yang di dalamnya juga memuat indikator kinerja, pagu indikatif target, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Pagu indikator merupakan wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selaa lima tahun mendatang. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Program-program yang telah disertai dengan kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program pada masing-masing urusan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Timur, APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lain.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Berikut adalah kerangka pendanaan Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

NO.	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.	PENDAPATAN DAERAH	824.969.616.431,00	861.049.399.793,56	891.399.836.564,24	924.415.410.323,52	961.277.102.674,50	1.002.387.654.915,47
1.	Pendapatan Asli Daerah	113.255.190.270,00	109.123.252.037,73	110.468.603.293,73	113.218.730.741,00	117.773.806.692,20	125.130.615.340,46
1.1.	Pajak Daerah	65.358.744.794,00	67.459.084.344,00	68.785.353.100,00	71.536.767.224,00	75.113.605.585,20	80.371.557.976,16
1.2.	Retribusi Daerah	4.946.107.500,00	4.950.000.000,00	4.966.107.500,00	5.164.751.800,00	5.422.989.390,00	5.802.598.647,30
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.361.467.234,00	3.918.728.951,73	3.918.728.951,73	3.718.797.975,00	3.718.797.975,00	3.718.797.975,00
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.588.870.742,00	32.795.438.742,00	32.798.413.742,00	32.798.413.742,00	33.518.413.742,00	35.237.660.742,00
2.	Pendapatan Transfer	694.814.276.161,00	728.025.997.755,83	756.524.078.770,51	786.441.381.992,52	817.860.233.512,80	850.868.254.606,73
2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	653.351.093.000,00	682.418.919.100,00	709.345.787.755,00	737.624.442.246,55	767.333.155.574,45	798.555.171.330,23
2.1.1.	Dana Perimbangan	588.933.063.000,00	617.145.747.000,00	643.174.716.450,00	670.510.576.776,30	699.229.356.230,69	729.411.941.419,28
2.1.1.1.	Dana Transfer Umum	472.603.805.000,00	486.352.533.000,00	503.225.977.470,00	520.765.426.067,70	539.002.044.972,48	557.968.718.373,00
2.1.1.1.a	Dana Bagi Hasil (DBH)	57.071.712.000,00	57.071.712.000,00	61.066.731.840,00	65.341.403.068,80	69.915.301.283,62	74.809.372.373,47
2.1.1.1.b	Dana Alokasi Umum (DAU)	415.532.093.000,00	429.280.821.000,00	442.159.245.630,00	455.424.022.998,90	469.086.743.688,87	483.159.345.999,53
2.1.1.2.	Dana Transfer Khusus (DAK)	116.329.258.000,00	130.793.214.000,00	139.948.738.980,00	149.745.150.708,60	160.227.311.258,20	171.443.223.046,28
2.1.2.	Dana Insentif Daerah	17.102.842.000,00	17.957.984.100,00	18.855.883.305,00	19.798.677.470,25	20.788.611.343,76	21.828.041.910,95
2.1.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.5.	Dana Desa	47.315.188.000,00	47.315.188.000,00	47.315.188.000,00	47.315.188.000,00	47.315.188.000,00	47.315.188.000,00
2.2.	Transfer Antar-Daerah	41.463.183.161,00	45.607.078.655,83	47.178.291.015,50	48.816.939.745,97	50.527.077.938,35	52.313.083.276,50
2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	41.463.183.161,00	42.707.078.655,83	43.988.291.015,50	45.307.939.745,97	46.667.177.938,35	48.067.193.276,50
2.2.2.	Bantuan Keuangan	0,00	2.900.000.000,00	3.190.000.000,00	3.509.000.000,00	3.859.900.000,00	4.245.890.000,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.900.150.000,00	23.900.150.000,00	24.407.154.500,00	24.755.297.590,00	25.643.062.469,50	26.388.784.968,28
3.1.	Hibah	16.900.150.000,00	16.900.150.000,00	17.407.154.500,00	17.755.297.590,00	18.643.062.469,50	19.388.784.968,28
3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
B.	BELANJA DAERAH	939.228.718.849,00	953.430.155.053,33	967.539.953.785,83	1.004.266.845.336,21	1.001.438.286.810,89	1.019.155.593.273,68
1.	Belanja Operasi	694.418.965.831,00	704.384.884.898,59	714.500.292.752,19	744.767.431.723,60	735.188.577.779,58	745.766.041.026,40
1.1.	Belanja Pegawai	345.227.897.741,00	350.406.316.207,12	355.662.410.950,22	360.997.347.114,48	366.412.307.321,19	371.908.491.931,01
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	319.166.706.765,00	323.954.207.366,48	328.813.520.476,97	333.745.723.284,13	338.751.909.133,39	343.833.187.770,39
1.5.	Belanja Hibah	25.702.736.325,00	25.702.736.325,00	25.702.736.325,00	45.702.736.325,00	25.702.736.325,00	25.702.736.325,00
1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00	4.321.625.000,00
2.	Belanja Modal	142.713.222.089,00	144.853.920.420,34	147.026.729.226,64	151.437.531.103,44	155.980.657.036,54	160.660.076.747,64
3.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.	Belanja Transfer	101.596.530.929,00	103.191.349.734,40	105.012.931.807,00	107.061.882.509,17	109.269.051.994,77	111.729.475.499,65
4.1.	Belanja Bagi Hasil	7.028.935.229,00	7.240.908.434,40	7.375.146.060,00	7.670.151.902,40	8.053.659.497,52	8.617.415.662,35
4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	94.567.595.700,00	95.950.441.300,00	97.637.785.747,00	99.391.730.606,77	101.215.392.497,25	103.112.059.837,30
	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.259.102.418)	(92.380.755.260)	(76.140.117.222)	(79.851.435.013)	(40.161.184.136)	(16.767.938.358)
C.	PEMBIAYAAN DAERAH						

NO.	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114.259.202.418,00	92.880.755.259,77	81.640.117.221,60	85.351.435.012,69	40.661.184.136,39	17.267.938.358,21
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.657.385.318,00	92.380.755.259,77	81.140.117.221,60	84.851.435.012,69	40.161.184.136,39	16.767.938.358,21
1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.601.817.100,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.4	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	114.259.202.418,00	92.380.755.259,77	76.140.117.221,60	79.851.435.012,69	40.161.184.136,39	16.767.938.358,21
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	63.190.296.639,81	104.643.289.189,39	135.958.572.618,91	152.321.900.219,16	217.086.796.486,81	260.554.687.656,34

7.2 Rencana Program Prioritas

Berikut adalah program pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur dalam lima tahun yang akan datang.

Tabel 7.2 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kematangan perangkat daerah	Skor	28,375	28,375	31.852.594.171,00	28,38	37.493.674.456,00	30,00	44.286.358.177,00	30,00	41.205.676.086,00	37,10	40.846.709.891,00	37,10	195.685.012.781,00	Sekretariat Daerah
				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP	Nilai	6,00	6,00		5,00		5,00		4,00		4,00		4,00		Sekretariat Daerah
				Kualitas pelayanan pimpinan aparatur perangkat daerah	Kategori	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Sekretariat Daerah
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	10.866.611.900,00	100,00	11.121.240.050,00	100,00	11.144.748.802,00	100,00	11.346.476.566,00	100,00	11.528.116.278,00	100,00	56.007.193.596,00	DPUPR
2	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	90,00	6.624.437.066,00	90,00	7.819.019.775,00	90,00	7.969.645.130,00	90,00	8.714.369.950,00	90,00	9.509.170.200,00	90,00	41.437.560.211,00	Dinas Perikanan
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	100,00	6.542.212.298,00	100,00	10.447.136.674,00	100,00	10.966.993.508,00	100,00	11.512.843.184,00	100,00	16.748.424.219,00	100,00	59.627.432.512,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP	Nilai	3,00	3,00	7.388.700.000,00	3,00	8.040.390.000,00	3,00	8.043.544.500,00	3,00	7.943.715.200,00	3,00	10.698.248.783,00	3,00	42.114.598.483,00	Dinas Perhubungan
				Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perhubungan		
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Dinas Perhubungan		
		Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Perhubungan		
2	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	12.975.317.016,00	100,00	15.605.650.000,00	100,00	15.891.410.500,00	100,00	16.619.076.750,00	100,00	17.376.761.500,00	100,00	78.468.215.766,00	Dinas Pertanian dan Pangan
				Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pertanian dan Pangan
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP	Nilai	4,00	4,00		4,00		3,00		3,00		2,00		2,00		Dinas Pertanian dan Pangan
				Perangkat Daerah Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP	Nilai	69,94	71,00		73,00		80,00		83,00		85,00		85,00		Dinas Pertanian dan Pangan
				Perangkat Daerah															
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	2.618.104.000,00	100,00	4.325.000.000,00	100,00	4.351.000.000,00	100,00	4.471.000.000,00	100,00	4.601.000.000,00	100,00	20.366.104.000,00	Kecamatan Damar
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	2.912.360.000,00	100,00	4.875.200.000,00	100,00	5.362.500.000,00	100,00	5.168.000.000,00	100,00	5.648.500.000,00	100,00	23.966.560.000,00	Kecamatan Dendang
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	100,00	3.734.392.500,00	100,00	4.201.530.000,00	100,00	3.983.605.000,00	100,00	3.901.230.000,00	100,00	4.109.000.000,00	100,00	19.929.757.500,00	Kecamatan Gantung

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
					2022		2023		2024		2025		2026							
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	4.416.990.000,00	100,00	5.443.237.500,00	100,00	5.872.923.125,00	100,00	6.572.615.438,00	100,00	6.592.246.209,00	100,00	28.898.012.272,00	Kecamatan Kelapa Kampit			
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	3.629.000.000,00	100,00	5.062.000.000,00	100,00	4.394.000.000,00	100,00	4.576.000.000,00	100,00	5.172.000.000,00	100,00	22.833.000.000,00	Kecamatan Manggar			
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	2.944.838.500,00	100,00	3.745.000.000,00	100,00	3.927.812.500,00	100,00	4.123.690.625,00	100,00	4.015.890.625,00	100,00	18.757.232.250,00	Kecamatan Simpang Pesak			
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	3.337.611.500,00	100,00	3.989.936.500,00	100,00	4.480.874.000,00	100,00	4.560.374.000,00	100,00	4.541.374.000,00	100,00	20.910.170.000,00	Kecamatan Simpang Renggang			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00	5.122.650.000,00	3,00	7.773.000.000,00	3,00	7.971.000.000,00	3,00	8.652.000.000,00	3,00	8.628.000.000,00	3,00	38.146.650.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Lingkungan Hidup
				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Lingkungan Hidup
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Dinas Lingkungan Hidup
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks profesionalisme aparatur	Persen	80,00	85,00	22.956.014.920,00	85,00	22.710.940.920,00	90,00	24.485.940.920,00	90,00	24.987.889.024,00	95,00	25.215.219.024,00	95,00	120.356.004.808,00	Sekretariat DPRD	
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	80,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00			Sekretariat DPRD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Sekretariat DPRD		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	5.797.859.691,00	100,00	7.128.586.560,00	100,00	7.531.773.492,00	100,00	8.288.469.115,00	100,00	8.713.734.303,00	100,00	37.460.423.161,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	4.586.725.000,00	100,00	5.938.674.000,00	100,00	6.092.674.000,00	100,00	6.068.174.000,00	100,00	5.830.174.000,00	100,00	28.516.421.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Persen	0,00	100,00	7.050.526.082,00	100,00	9.072.584.954,00	100,00	8.034.268.560,00	100,00	7.722.875.560,00	100,00	9.302.875.560,00	100,00	41.183.130.716,00	Inspektorat Daerah
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00	99.619.967,00	3,00	103.693.908.000,00	3,00	108.989.851.000,00	3,00	113.703.607.000,00	3,00	113.732.639.000,00	3,00	440.219.624.967,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00	6.354.241.180,00	100,00	8.589.241.180,00	100,00	9.454.241.180,00	100,00	10.124.741.180,00	100,00	11.009.741.180,00	100,00	45.532.205.900,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	0,00	100,00	4.067.263.205,00	100,00	4.309.977.766,00	100,00	4.463.057.321,00	100,00	4.339.822.713,00	100,00	5.009.107.025,00	100,00	22.189.228.030,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,00	76,00	4.362.142.000,00	77,00	6.874.650.000,00	78,00	6.112.110.000,00	80,00	6.903.340.000,00	80,00	7.153.670.000,00	80,00	31.405.912.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Nilai	3,00	3,00	6.429.000.000,00	3,00	7.922.000.000,00	3,00	7.128.000.000,00	3,00	7.125.000.000,00	3,00	7.125.000.000,00	3,00	35.729.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																Sumber Daya Manusia		
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Nilai	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	7.262.520.500,00	100,00	9.180.134.550,00	100,00	8.760.176.225,00	100,00	8.911.022.551,00	100,00	9.597.027.172,00	100,00	43.710.880.998,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	3,00	67,00	5.248.790.000,00	3,00	9.670.500.000,00	3,00	10.802.500.000,00	3,00	11.934.300.000,00	3,00	12.949.500.000,00	3,00	50.605.590.000,00	Dinas Perpustakaan
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Perpustakaan	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	Persen	100,00	25,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Perpustakaan	
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,75	60,00		67,50		68,00		69,00		70,00		70,00		70,00	Dinas Perpustakaan	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	70,00	5.689.700.000,00	73,00	6.790.700.000,00	76,00	6.620.700.000,00	79,00	7.210.700.000,00	82,00	7.291.700.000,00	82,00	33.603.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	0,00	100,00	6.733.300.659,00	100,00	6.694.065.692,00	100,00	7.579.118.976,00	100,00	7.380.207.225,00	100,00	7.911.285.300,00	100,00	36.297.977.852,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	100,00	100,00	165.069.079.500,00	100,00	177.687.500.000,00	100,00	187.490.000.000,00	100,00	197.332.500.000,00	100,00	207.870.000.000,00	100,00	935.449.079.500,00	Dinas Pendidikan
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	Persen	95,00	95,00	17.454.135.528,00	96,00	19.149.842.304,00	97,00	18.337.084.421,00	98,00	18.871.838.640,00	99,00	19.337.180.579,00	99,00	93.150.081.472,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Indeks profesionalisme aparatur	Persen	95,00	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	70,00	8.037.508.500,00	73,00	9.610.497.000,00	76,00	10.527.747.000,00	79,00	11.264.175.000,00	82,00	11.681.738.000,00	82,00	51.121.665.500,00	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	7.488.410.000,00	100,00	8.862.062.700,00	100,00	9.314.707.900,00	100,00	8.627.660.100,00	100,00	9.649.019.500,00	100,00	43.941.860.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	37,17	37,53		37,93		38,29		38,64		39,00		39,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	12,62	13,04		13,79		14,39		14,78		15,10		15,10		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persen	100,00	100,00	8.218.670.592,00	100,00	9.608.000.000,00	100,00	9.426.000.000,00	100,00	9.591.000.000,00	100,00	9.855.000.000,00	100,00	46.698.670.592,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1		01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	55,42	61,09	51.251.212.500,00	64,14	60.496.500.000,00	67,34	66.365.700.000,00	70,70	71.144.000.000,00	74,23	77.035.760.000,00	74,23	326.293.172.500,00	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Persen	88,94	87,00		89,00		91,00		93,00		95,00		95,00		95,00	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Persen	46,31	54,00		58,00		62,00		66,00		70,00		70,00		70,00	Dinas Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	Persen	0,00	37,50	105.000.000,00	50,00	165.000.000,00	62,50	190.000.000,00	87,50	215.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100,00	915.000.000,00	Dinas Pendidikan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		program kesetaraan paket A, B, C																	
		Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	Persen	0,00	28,57		42,86		57,14		71,43		85,71		85,71		Dinas Pendidikan		
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	Persen	0,00	68,00	2.925.500.000,00	70,00	1.877.500.000,00	72,00	475.000.000,00	74,00	550.000.000,00	76,00	645.000.000,00	76,00	6.473.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI	Persen	0,00	89,00		91,00		93,00		95,00		97,00		97,00		Dinas Pendidikan		
		Persentase pengawas dan kepala sekolah yang bersertifikat	Persen	71,00	71,10		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan		
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS	Persen	0,00	68,00		70,00		72,00		74,00		76,00		76,00		Dinas Pendidikan		
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pengembangan Koleksi Muatan Lokal dan Budaya Etnis	Kegiatan	0,00	2,00	50.000.000,00	2,00	70.000.000,00	3,00	80.000.000,00	3,00	90.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	390.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Penyediaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota	Kegiatan	0,00	2,00		2,00		3,00		3,00		4,00		4,00		Dinas Pendidikan		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	57,00	57,00	96.504.737.000,00	86,00	102.601.813.300,00	100,00	91.182.620.500,00	100,00	91.332.959.250,00	100,00	92.560.106.000,00	100,00	474.182.236.050,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen	90,00	90,00		95,00		97,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
		Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	85,00	85,00		87,00		90,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	Persen	90,00	92,00		94,00		95,00		96,00		97,00		97,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	92,00	93,00		94,00		95,00		96,00		97,00		97,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persen	99,00	99,00		99,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pelayanan kesehatan balita	Persen	95,00	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persen	75,00	75,00		80,00		85,00		90,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	71,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen	98,00	99,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	85,71	100,00	14.610.641.000,00	100,00	14.751.026.000,00	100,00	14.892.815.000,00	100,00	15.036.022.000,00	100,00	15.180.661.000,00	100,00	74.471.165.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Persen	50,00	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penggunaan obat rasional	Persen	90,00	92,00	151.000.000,00	94,00	162.000.000,00	95,00	165.000.000,00	95,00	170.000.000,00	95,00	180.000.000,00	95,00	828.000.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persen	40,00	50,00	1.140.000.000,00	65,00	460.000.000,00	75,00	525.000.000,00	85,00	590.000.000,00	100,00	670.000.000,00	100,00	3.385.000.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	32,00	35,00	9.284.937.500,00	38,00	21.059.250.000,00	40,00	30.862.500.000,00	43,00	21.879.250.000,00	45,00	21.890.250.000,00	45,00	104.976.187.500,00	DPUPR
				Rasio jaringan irigasi	m/ha	18,40	21,33		24,27		27,21		30,15		33,09		33,09	DPUPR	
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00	DPUPR	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0,00	23,00		31,00		39,00		46,00		54,00		54,00		DPUPR
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	76,13	77,07	8.017.000.000,00	78,00	14.005.250.000,00	78,93	9.366.750.000,00	79,86	7.692.250.000,00	80,79	8.808.750.000,00	80,79	47.890.000.000,00	DPUPR
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio sampah terangkut (m³)	Persen	0,65	0,75	8.500.000.000,00	0,80	11.400.000.000,00	0,85	4.400.000.000,00	0,90	1.800.000.000,00	0,90	0,00	0,90	26.100.000.000,00	DPUPR
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat	Persen	88,43	89,82	3.940.000.000,00	91,22	5.600.000.000,00	93,09	6.020.000.000,00	94,95	7.550.000.000,00	97,28	9.550.000.000,00	97,28	32.660.000.000,00	DPUPR
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	80,32	85,83	7.549.400.000,00	89,76	12.025.000.000,00	93,70	11.687.500.000,00	96,85	11.375.000.000,00	100,00	11.425.000.000,00	100,00	54.061.900.000,00	DPUPR
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penataan kawasan permukiman pendukung pariwisata strategis	Persen	0,00	14,29	1.950.000.000,00	28,57	1.950.000.000,00	57,14	1.950.000.000,00	85,71	1.950.000.000,00	100,00	1.950.000.000,00	100,00	9.750.000.000,00	DPUPR
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau	Angka	0,00	20,00	300.000.000,00	40,00	600.000.000,00	60,00	900.000.000,00	80,00	700.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00	DPUPR
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	18,48	19,00	1.940.437.500,00	20,00	1.761.500.500,00	20,00	1.762.600.500,00	20,00	1.763.700.500,00	20,00	1.764.800.500,00	20,00	8.993.039.500,00	DPUPR
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	79,67	82,00	23.147.860.219,00	84,70	73.813.000.000,00	87,57	80.788.000.000,00	90,11	77.288.000.000,00	90,90	73.788.000.000,00	90,90	328.824.860.219,00	DPUPR
		Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah	Persen	0,343	0,344		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		DPUPR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Persen	0,00	42,86	713.000.000,00	57,14	715.000.000,00	71,43	718.000.000,00	85,71	719.000.000,00	100,00	720.000.000,00	100,00	3.585.000.000,00	DPUPR
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	77,44	80,00	3.050.000.000,00	80,00	3.600.000.000,00	80,00	2.540.000.000,00	80,00	1.790.000.000,00	80,00	1.340.000.000,00	80,00	12.320.000.000,00	DPUPR
		Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persen	0,00	37,50		62,50		75,00		100,00		0,00		0,00		DPUPR
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	49,50	50,50	1.300.000.000,00	51,50	4.140.000.000,00	52,50	4.300.000.000,00	53,50	4.870.000.000,00	54,50	5.128.000.000,00	54,50	19.738.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	Persen	99,07	99,22	4.255.000.000,00	99,40	2.755.000.000,00	99,61	3.535.000.000,00	99,82	4.148.000.000,00	100,00	4.175.000.000,00	100,00	18.868.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	1.155.000.000,00	0,00	1.270.500.000,00	0,00	1.397.550.000,00	0,00	1.537.310.000,00	0,00	6.410.360.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00	100,00	4.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00	100,00	29.000.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase tersedianya layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	Persen	0,00	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	275.000.000,00	100,00	275.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	1.350.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	100,00	100,00	4.438.362.000,00	100,00	6.646.377.500,00	100,00	7.208.512.500,00	100,00	7.851.012.500,00	100,00	8.289.762.500,00	100,00	34.434.027.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,00	100,00	2.929.501.000,00	100,00	13.043.900.000,00	100,00	13.443.900.000,00	100,00	13.443.900.000,00	100,00	13.443.900.000,00	100,00	56.305.101.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	175.202.000,00	100,00	512.790.000,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	4.287.992.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran (kabupaten/kota)	Persen	60,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	0,00	100,00	1.022.625.200,00	100,00	1.392.006.000,00	100,00	1.461.606.300,00	100,00	1.534.686.615,00	100,00	1.611.420.944,00	100,00	7.022.345.059,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Persen	0,00	100,00	28.099.500,00	100,00	73.500.000,00	100,00	77.175.000,00	100,00	81.033.750,00	100,00	850.854.375,00	100,00	1.110.662.625,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	0,00	100,00	507.044.700,00	100,00	1.422.050.000,00	100,00	1.519.827.500,00	100,00	1.600.053.875,00	100,00	17.339.220.060,00	100,00	22.388.196.135,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	Persen	0,00	100,00	950.090.545,00	100,00	1.713.000.000,00	100,00	1.745.525.000,00	100,00	1.832.863.750,00	100,00	1.925.325.688,00	100,00	8.166.804.983,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pemberian bantuan sosial	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0,00	100,00	830.520.450,00	100,00	1.517.250.000,00	100,00	1.593.112.500,00	100,00	1.672.768.125,00	100,00	1.756.406.531,00	100,00	7.370.057.606,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	Persen	0,00	100,00	40.588.143,00	100,00	45.150.000,00	100,00	47.407.500,00	100,00	49.777.875,00	100,00	5.226.676.875,00	100,00	5.409.600.393,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	1,40	1,41	160.000.000,00	1,41	175.000.000,00	1,42	180.000.000,00	1,43	195.000.000,00	1,43	200.000.000,00	1,43	910.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	Persen	2,40	2,60	1.014.433.000,00	2,70	1.080.000.000,00	2,80	1.150.000.000,00	2,90	1.210.000.000,00	3,00	1.260.000.000,00	3,00	5.714.433.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	35,00	40,00	150.000.000,00	40,00	190.000.000,00	45,00	220.000.000,00	45,00	250.000.000,00	50,00	280.000.000,00	50,00	1.090.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	88,88	89,00	359.810.000,00	89,20	432.000.000,00	89,40	454.000.000,00	89,60	471.000.000,00	89,80	525.000.000,00	89,80	2.241.810.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2 08 02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	0,00	50,00	468.737.000,00	50,00	787.500.000,00	50,00	826.875.000,00	50,00	868.218.750,00	50,00	911.629.686,00	50,00	3.862.960.436,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah IR yang terbina	Persen	0,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Persentase pelaksanaan RAD PUG	Angka	0,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	0,00	100,00	112.189.950,00	100,00	525.000.000,00	100,00	551.250.000,00	100,00	578.812.500,00	100,00	607.753.124,00	100,00	2.375.005.574,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah keluarga yang terlayani	Keluarga	0,00	50,00	27.094.000,00	50,00	157.500.000,00	50,00	165.375.000,00	50,00	173.643.750,00	50,00	182.325.937,00	50,00	705.938.687,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah dokumen data gender yang tersedia	Dokumen	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,00	1,00	828.844.687,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Forum Anak Desa	Desa	0,00	5,00	260.700.000,00	7,00	525.000.000,00	9,00	551.250.000,00	9,00	578.812.500,00	9,00	607.753.124,00	9,00	2.523.515.624,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	Aturan	0,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	Persen	0,00	100,00	45.964.000,00	100,00	630.000.000,00	100,00	661.500.000,00	100,00	694.575.000,00	100,00	2.370.237.187,00	100,00	4.402.276.187,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Kelompok LPM			70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	390.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Angka	82,30	83,30	557.357.500,00	84,40	495.250.000,00	85,40	495.250.000,00	86,50	495.250.000,00	87,50	495.250.000,00	87,50	2.538.357.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	Kecamatan			120.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	0,00	680.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Nilai tambah produk pertanian / Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	Persen	70,00	75,00	100.000.000,00	80,00	250.000.000,00	85,00	250.000.000,00	90,00	250.000.000,00	95,00	250.000.000,00	95,00	1.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN																

KODE	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
	BIDANG PERTANAHAN																
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase izin lokasi yang diberikan	Persen	0,00	20,00	40.000.000,00	40,00	50.000.000,00	60,00	50.000.000,00	80,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	240.000.000,00	DPUPR
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	Persen	0,00	80,00	200.000.000,00	60,00	300.000.000,00	40,00	300.000.000,00	20,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	DPUPR
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Persen	0,00	60,00	150.000.000,00	50,00	150.000.000,00	40,00	150.000.000,00	20,00	150.000.000,00	10,00	150.000.000,00	10,00	750.000.000,00	DPUPR
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase proses penetapan subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah yang terlaksana	Persen	0,00	20,00	350.000.000,00	40,00	600.000.000,00	60,00	600.000.000,00	80,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	2.750.000.000,00	DPUPR
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase permohonan legalitas pertanahan yang disetujui	Persen	0,00	0,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	DPUPR
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Persen	0,00	76,00	250.000,00	76,00	100.000.000,00	76,00	100.000.000,00	76,00	100.000.000,00	76,00	100.000.000,00	76,00	400.250.000,00	DPUPR
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah yang diberikan	Persen	0,00	20,00	200.000.000,00	40,00	200.000.000,00	60,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	DPUPR
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Angka	0,58	0,46	800.000.000,00	0,39	440.000.000,00	0,35	440.000.000,00	0,33	440.000.000,00	0,32	440.000.000,00	0,32	2.560.000.000,00	DPUPR
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	0,00	100,00	200.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	2.050.000.000,00	100,00	6.150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Nilai	56,41	56,51	850.000.000,00	56,61	1.910.000.000,00	56,71	2.740.000.000,00	56,81	2.150.000.000,00	56,91	2.000.000.000,00	56,91	9.650.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	93,86	93,97		94,08		94,19		94,30		94,41		94,41		Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026					
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Indek Kualitas Lahan	Nilai	45,46	47,48		49,49		51,51		53,54		55,58		55,58		Dinas Lingkungan Hidup	
2	11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persen	0,00	22,50	150.000.000,00	32,50	900.000.000,00	42,50	900.000.000,00	52,50	900.000.000,00	62,50	900.000.000,00	62,50	3.750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persen	0,00	90,00	80.000.000,00	90,00	120.000.000,00	90,00	120.000.000,00	90,00	120.000.000,00	90,00	120.000.000,00	90,00	560.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen	0,00	90,00	163.000.000,00	90,00	250.000.000,00	90,00	300.000.000,00	95,00	350.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	1.463.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak MHA, hak kearifan lokal dan/atau hak pengetahuan tradisional	Penetapan Hak	0,00	2,00	80.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	680.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Angka	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup
2	11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pengetahuan teknis tentang lingkungan hidup bagi masyarakat	Persen	0,00	20,00	350.000.000,00	40,00	350.000.000,00	60,00	350.000.000,00	80,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	1.750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Persen	0,00	100,00	100.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan sesuai peraturan perundangan, mekanisme di dalam maupun diluar pengadilan	BA Pengaduan	0,00	10,00	100.000.000,00	15,00	125.000.000,00	17,00	150.000.000,00	19,00	175.000.000,00	20,00	200.000.000,00	20,00	750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Persen	65,04	75,00	5.644.202.000,00	80,00	7.135.000.000,00	85,00	7.635.000.000,00	90,00	7.335.000.000,00	90,00	7.835.000.000,00	90,00	35.584.202.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL																
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP	Angka	97,00	1,00	534.740.000,00	1,00	606.446.400,00	1,00	728.231.040,00	1,00	751.404.144,00	1,00	779.804.144,00	1,00	3.400.625.728,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP	Persen	97,14	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	72,18	80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran	Persen	94,41	97,00	444.220.809,00	100,00	587.642.889,00	100,00	646.407.178,00	100,00	711.047.896,00	100,00	758.175.060,00	100,00	3.147.493.832,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Rasio penerbitan akta kematian	Angka	0,95	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Rasio pasangan berakte nikah	Angka	89,00	92,00		96,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	98,96	99,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani	Persen	100,00	100,00	623.179.500,00	100,00	711.679.500,00	100,00	621.000.000,00	100,00	715.500.000,00	100,00	600.000.000,00	50,00	3.271.359.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital	Persen	0,00	10,00		20,00		30,00		40,00		50,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten	Persen	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	140.000.000,00	50,00	590.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	MASYARAKAT DAN DESA																		
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase usulan penataan desa yang ditindaklanjuti	Persen	0,00	100,00	60.000.000,00	100,00	367.184.947,00	100,00	385.544.194,00	100,00	404.821.404,00	100,00	425.062.472,00	100,00	1.642.613.017,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama antardesa terlaksana	Persen	0,00	100,00	70.000.000,00	100,00	367.500.000,00	100,00	385.875.000,00	100,00	405.168.750,00	100,00	425.427.187,00	100,00	1.653.970.937,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persen	0,00	100,00	2.877.673.000,00	100,00	4.369.789.800,00	100,00	4.590.679.290,00	100,00	4.822.463.254,00	100,00	5.064.686.415,00	100,00	21.725.291.759,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	Persen	0,00	100,00	825.627.000,00	100,00	1.701.000.000,00	100,00	1.786.050.000,00	100,00	1.875.352.500,00	100,00	1.969.120.123,00	100,00	8.157.149.623,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	40,00	50,00	644.095.000,00	75,00	663.734.000,00	75,00	682.084.000,00	100,00	697.540.000,00	100,00	713.730.000,00	100,00	3.401.183.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Unmet Need	Persen	5,00	5,61	1.888.296.000,00	5,49	1.911.242.000,00	5,39	1.883.081.500,00	5,29	1.955.057.000,00	5,19	1.963.591.825,00	5,19	9.601.268.325,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun (kelahiran per 1.000 perempuan)	Persen	25,00	24,00	441.264.000,00	23,00	253.327.000,00	20,00	265.993.500,00	17,00	279.293.500,00	15,00	293.259.000,00	15,00	1.533.137.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	9,93	17,00	11.953.803.500,00	25,00	20.690.999.025,00	27,00	18.179.480.219,00	32,00	18.045.451.629,00	35,00	17.307.294.329,00	35,00	86.177.028.702,00	Dinas Perhubungan
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran	Persen	56,79	60,49	1.563.742.500,00	62,96	1.275.000.000,00	65,43	1.425.000.000,00	65,43	1.650.000.000,00	66,67	1.800.000.000,00	66,67	7.713.742.500,00	Dinas Perhubungan
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	Persen	100,00	100,00	1.739.000.000,00	100,00	2.350.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	1.900.000.000,00	100,00	1.900.000.000,00	100,00	9.889.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan aspek TIK	Angka	1,25	2,00	4.410.000.000,00	3,00	5.475.500.000,00	3,00	6.244.175.000,00	3,00	7.125.511.250,00	3,50	8.136.143.937,00	3,50	31.391.330.187,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	34,15	35,00	85.000.000,00	36,00	90.000.000,00	37,00	90.000.000,00	38,00	100.000.000,00	39,00	110.000.000,00	39,00	475.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	Persen	0,00	12,19	40.000.000,00	12,19	45.000.000,00	14,63	50.000.000,00	14,63	55.000.000,00	17,07	60.000.000,00	17,07	250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	38,21	38,50	280.000.000,00	39,00	290.000.000,00	39,50	290.000.000,00	39,50	300.000.000,00	40,00	310.000.000,00	40,00	1.470.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	94,31	94,55	46.000.000,00	94,75	50.000.000,00	95,00	60.000.000,00	95,25	70.000.000,00	95,50	80.000.000,00	95,50	306.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Persen	0,34	0,50	305.000.000,00	0,55	325.000.000,00	0,60	345.000.000,00	0,65	370.000.000,00	0,75	405.000.000,00	0,75	1.750.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	35,15	35,25	450.000.000,00	35,35	500.000.000,00	35,45	550.000.000,00	35,55	600.000.000,00	35,65	650.000.000,00	35,65	2.750.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait penanaman modal yang telah ditetapkan	Persen	33,33	66,67	50.000.000,00	66,67	200.000.000,00	66,67	250.000.000,00	100,00	210.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	770.000.000,00	DPMPTSP
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	Investor	0,00	1,00	430.000.000,00	2,00	630.187.500,00	2,00	630.187.500,00	2,00	630.187.500,00	2,00	630.187.500,00	2,00	2.950.750.000,00	DPMPTSP
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	82,00	83,50	274.132.500,00	84,00	323.996.000,00	84,50	339.195.800,00	85,00	355.155.000,00	86,00	371.913.000,00	86,00	1.664.392.300,00	DPMPTSP
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	0,00	18,00	101.310.000,00	19,00	583.431.000,00	20,00	583.431.000,00	21,00	583.431.000,00	22,00	583.431.000,00	22,00	2.435.034.000,00	DPMPTSP
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	0,00	54,55	60.000.000,00	63,64	60.000.000,00	72,73	60.000.000,00	81,82	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	300.000.000,00	DPMPTSP
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	93,50	95,00	1.280.000.000,00	97,00	3.080.000.000,00	100,00	3.220.000.000,00	100,00	3.325.000.000,00	100,00	3.355.000.000,00	100,00	14.260.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase wirausaha muda	Persen	2,00	2,20		2,25		2,50		2,75		3,00		3,00		Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persen	100,00	100,00	9.337.479.500,00	100,00	24.561.317.000,00	100,00	23.513.677.450,00	100,00	23.975.578.177,00	100,00	25.155.042.773,00	100,00	106.543.094.900,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persen	80,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pelatihan SDM kepramukaan	Persen	45,00	45,00	120.000.000,00	50,00	1.025.000.000,00	55,00	1.060.000.000,00	55,00	1.165.000.000,00	55,00	1.085.000.000,00	55,00	4.455.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral bagi pembangunan daerah	Persen	57,14	100,00	725.000.000,00	100,00	875.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	950.000.000,00	100,00	950.000.000,00	100,00	4.400.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	0,00	70,00	380.000.000,00	70,00	500.000.000,00	75,00	550.000.000,00	75,00	650.000.000,00	80,00	700.000.000,00	80,00	2.780.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	Persen	0,00	60,00	2.353.555.654,00	62,00	2.385.750.000,00	65,00	2.759.687.500,00	67,00	2.829.687.500,00	70,00	2.899.687.500,00	70,00	13.228.368.154,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	Persen	0,00	50,00	280.000.000,00	55,00	280.000.000,00	55,00	300.000.000,00	60,00	320.000.000,00	62,00	350.000.000,00	62,00	1.530.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah	Persen	0,00	60,00	450.000.000,00	62,00	850.000.000,00	65,00	900.000.000,00	65,00	1.050.000.000,00	67,00	1.100.000.000,00	67,00	4.350.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persen	0,00	55,00	650.000.000,00	60,00	725.000.000,00	65,00	782.500.000,00	70,00	932.750.000,00	75,00	966.025.000,00	75,00	4.056.275.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman	Persen	0,00	60,00	400.000.000,00	65,00	1.350.000.000,00	65,00	1.700.000.000,00	70,00	900.000.000,00	75,00	975.000.000,00	75,00	5.325.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	1,35	1,37	798.210.000,00	1,39	1.575.687.500,00	1,41	1.615.687.500,00	1,43	1.655.687.500,00	1,45	1.695.687.500,00	1,45	7.340.960.000,00	Dinas Perpustakaan
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Persen	20,00	20,00	60.000.000,00	40,00	245.000.000,00	60,00	270.000.000,00	80,00	295.000.000,00	100,00	320.000.000,00	100,00	1.190.000.000,00	Dinas Perpustakaan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	53,12	55,00	328.000.000,00	60,00	562.100.000	65,00	618.310.000	70,00	680.141.000	75,00	748.155.100,00	75,00	2.936.706.100,00	Dinas Perpustakaan
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penyelamatan arsip dari bencana yang terlaksana	Persen	0,00	45,00	45.000.000,00	50,00	308.000.000	55,00	338.800.000	60,00	372.680.000	65,00	409.948.000	65,00	1.474.428.000,00	Dinas Perpustakaan
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pelayanan izin penggunaan arsip tertutup kota yang diberikan	Persen	0,00	10,00	20.000.000,00	15,00	49.500.000	20,00	54.450.000	25,00	59.895.000	30,00	65.884.500	30,00	249.729.500,00	Dinas Perpustakaan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	40.079,00	42.660,00	3.706.000.000,00	43.091,00	10.525.459.400,00	43.526,00	10.279.451.600,00	43.966,00	9.689.799.000,00	44.410,00	7.531.228.400,00	44.410,00	41.731.938.400,00	Dinas Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	137,98	150,00	2.074.000.000,00	160,00	2.558.000.000,00	175,00	4.168.000.000,00	190,00	3.263.400.000,00	215,00	3.242.400.000,00	215,00	15.305.800.000,00	Dinas Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laporan hasil pengawasan	Dokumen	0,00	4,00	0,00	4,00	140.000.000,00	4,00	154.000.000,00	4,00	170.000.000,00	4,00	187.000.000,00	4,00	651.000.000,00	Dinas Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	65,47	59,00	1.340.914.000,00	60,00	3.480.098.000,00	61,00	2.745.960.000,00	62,00	3.317.046.000,00	63,00	2.969.943.000,00	63,00	13.853.961.000,00	Dinas Perikanan
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase capaian kinerja kunjungan wisata Kabupaten Belitung Timur	Persen	0,00	15,00	3.825.000.000,00	15,00	5.950.000.000,00	15,00	6.685.000.000,00	15,00	7.795.000.000,00	15,00	8.245.000.000,00	15,00	32.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Daerah	Persen	0,00	3,00	2.750.000.000,00	3,00	3.700.000.000,00	3,00	4.400.000.000,00	4,00	5.000.000.000,00	4,00	5.600.000.000,00	4,00	21.450.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	0,00	25,00	1.050.000.000,00	25,00	1.550.000.000,00	30,00	1.710.000.000,00	30,00	1.870.000.000,00	30,00	2.030.000.000,00	30,00	8.210.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	Persen	20,00	20,00	1.396.000.000,00	20,00	2.410.500.000,00	20,00	2.367.000.000,00	20,00	2.339.500.000,00	20,00	2.530.000.000,00	20,00	11.043.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	20,00	20,00	2.140.000.000,00	20,00	3.365.000.000,00	20,00	3.076.000.000,00	20,00	3.100.000.000,00	20,00	2.200.000.000,00	20,00	13.881.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan, Penurunan jumlah kasus gangguan reproduksi pada sapi, Penurunan angka kematian pedet, Peningkatan ketersediaan obat hewan dan sarana kesehatan hewan lainnya, Peningkatan jumlah unit usaha hasil ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)	Persen	20,00	20,00	381.000.000,00	20,00	432.000.000,00	20,00	452.500.000,00	20,00	478.000.000,00	20,00	504.000.000,00	20,00	2.247.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan	Persen	20,00	20,00	85.000.000,00	20,00	55.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	65.000.000,00	20,00	70.000.000,00	20,00	375.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya pengetahuan petani, Terklasifikasinya kelas kebun perusahaan	Orang, Perusahaan	50,80	50,00	40.000.000,00	50,00	45.000.000,00	50,80	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan (BPP) dan wilayah binaan (Desa)	Unit	3,00	3,00	740.000.000,00	3,00	1.003.912.000,00	3,00	1.053.912.000,00	4,00	1.103.912.000,00	7,00	1.353.912.000,00	7,00	5.255.648.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	0,00	26,00	30.000.000,00	30,00	30.000.000,00	35,00	30.000.000,00	40,00	30.000.000,00	45,00	30.000.000,00	45,00	150.000.000,00	DPMPTSP
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	0,00	100,00	1.126.000.000,00	100,00	6.950.000.000,00	100,00	8.975.000.000,00	100,00	8.975.000.000,00	100,00	10.980.000.000,00	100,00	37.006.000.000,00	DPMPTSP
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	Angka	3,99	3,79	1.287.000.000,00	3,59	1.192.000.000,00	3,39	1.096.000.000,00	3,19	1.051.000.000,00	2,99	1.005.000.000,00	2,99	5.631.000.000,00	DPMPTSP
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor	Produk	0,00	1,00	230.000.000,00	1,00	275.000.000,00	1,00	275.000.000,00	2,00	275.000.000,00	2,00	275.000.000,00	2,00	1.330.000.000,00	DPMPTSP
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persen	0,00	70,00	195.000.000,00	72,00	1.000.500.000,00	74,00	1.000.500.000,00	76,00	1.000.500.000,00	78,00	1.000.500.000,00	78,00	4.197.000.000,00	DPMPTSP
		Persentase UTP bertanda tera sah yang berlaku	Persen	0,00	72,00		72,50		73,00		73,50		74,00		74,00		DPMPTSP
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Persen	0,00	5,80	1.317.500.000,00	5,85	2.528.000.000,00	5,90	2.444.500.000,00	5,95	2.457.500.000,00	6,00	2.470.500.000,00	6,00	11.218.000.000,00	DPMPTSP
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha	Persen	0,00	25,00	20.000.000,00	27,50	20.000.000,00	30,00	22.000.000,00	32,50	22.000.000,00	35,00	25.000.000,00	35,00	109.000.000,00	DPMPTSP
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri di SIINAS	Persen	0,00	58,33	100.000.000,00	58,33	100.000.000,00	66,67	102.000.000,00	66,67	105.000.000,00	75,00	105.000.000,00	75,00	512.000.000,00	DPMPTSP
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	10.377.912.000,00	100,00	12.963.612.000,00	100,00	13.024.512.000,00	100,00	13.088.457.000,00	100,00	13.314.779.250,00	100,00	62.769.272.250,00	Sekretariat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan dan pembinaan keagamaan yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
		Persentase regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
		Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Persen	100,00	100,00	2.739.865.964,00	100,00	3.050.609.262,00	100,00	3.115.639.726,00	100,00	3.235.171.712,00	100,00	3.334.430.297,00	100,00	15.475.716.961,00	Sekretariat Daerah
		Tingkat kematangan UKPBJ	Level Proaktif	5,00	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		Sekretariat Daerah
4 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase peningkatan kualitas kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan,dan sumber daya alam	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
		SEKRETARIAT DPRD															
		Persentase program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi	Persen	80,00	85,00	9.871.803.143,00	85,00	11.969.018.046,00	85,00	11.928.015.143,00	85,00	13.245.015.143,00	85,00	14.044.498.474,00	85,00	61.058.349.949,00	Sekretariat DPRD
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 01	PERENCANAAN																
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	Persen	0,00	100,00	1.012.439.000,00	100,00	1.110.003.900,00	100,00	1.865.053.750,00	100,00	2.888.830.750,00	100,00	2.312.759.750,00	100,00	9.189.087.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	Persen	0,00	100,00	4.010.300.000,00	100,00	7.450.000.000,00	100,00	7.700.000.000,00	100,00	7.950.000.000,00	100,00	8.200.000.000,00	35.310.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	02		KEUANGAN																
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	10,00	10,00	109.432.255.549,00	10,00	114.667.802.149,00	10,00	120.405.031.662,00	10,00	126.431.634.880,00	10,00	132.762.394.933,00	10,00	603.699.119.173,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
		Persentase realisasi SP2D tepat waktu	Persen	95,00	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		99,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	0,75	0,80		0,81		0,83		0,87		0,88		0,88		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
		Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Persen	85,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
		Ketepatan waktu penetapan Raperda APBD	Angka	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
		Persentase belanja pendidikan	Persen	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
		Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Angka	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Rasio belanja pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	27,00	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
		Ketepatan waktu penetapan Raperda Perubahan APBD	Angka	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
		Persentase belanja kesehatan	Persen	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
		Proporsi pajak terhadap total belanja	Persen	7,00	6,96		7,43		7,56		7,76		8,12		8,12		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	Persen	100,00	100,00	781.671.700,00	100,00	866.977.970,00	100,00	962.599.643,00	100,00	1.070.014.451,00	100,00	1.190.959.451,00	100,00	4.872.223.215,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
	Kesesuaian barang milik daerah dengan nilai aset di neraca	Persen		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	Persen	1,32	1,37	1.808.398.100,00	1,40	1.945.539.306,00	1,42	1.807.344.825,00	1,44	2.293.259.589,00	1,48	1.954.209.835,00	1,48	9.808.751.655,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	Persen		13,16	13,73		14,03		14,17		14,38		14,81		14,81		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
	Kemandirian keuangan daerah	Persen		13,16	13,73		14,03		14,17		14,38		14,81		14,81		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah		
5	03	KEPEGAWAIAN																	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan program pengadaan, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja ASN	Persen	100,00	100,00	3.097.340.656,00	100,00	3.175.697.914,00	100,00	3.269.329.183,00	100,00	3.378.583.759,00	100,00	3.442.753.975,00	100,00	16.363.705.487,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	Persen	100,00	100,00	3.320.000.000,00	100,00	3.470.000.000,00	100,00	3.470.000.000,00	100,00	3.470.000.000,00	100,00	3.470.000.000,00	100,00	17.200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	0,00	50,00	3.750.000.000,00	55,00	5.850.000.000,00	60,00	5.150.000.000,00	65,00	5.150.000.000,00	70,00	5.150.000.000,00	70,00	25.050.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase implemetasi rencana kelitbangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6 01	INSPEKTORAT DAERAH																
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindakanj temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	85,91	87,00	1.394.058.200,00	89,00	1.394.058.200,00	91,00	1.394.058.200,00	93,00	1.394.058.200,00	96,00	1.394.058.200,00	96,00	6.970.291.000,00	Inspektorat Daerah
		Persentase penyelesaian tindakanj temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat	Persen	70,86	73,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		Inspektorat Daerah
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	558.551.500,00	100,00	690.212.000,00	100,00	690.212.000,00	100,00	700.212.000,00	100,00	700.212.000,00	100,00	3.339.399.500,00	Inspektorat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01	KECAMATAN																

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							2022		2023		2024		2025					2026		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	76,00	77,00	273.000.000,00	78,00	205.000.000,00	79,00	210.000.000,00	80,00	120.000.000,00	81,00	125.000.000,00	81,00	933.000.000,00	Kecamatan Damar	
		Indeks kepuasan masyarakat		Persen	86,70	87,00	57.000.000,00	87,30	115.000.000,00	87,60	122.000.000,00	88,00	125.000.000,00	88,50	130.000.000,00	88,50	549.000.000,00	Kecamatan Dendang		
		Indeks kepuasan masyarakat		Persen	88,78	88,79	310.000.000,00	88,80	110.000.000,00	88,82	111.000.000,00	88,84	11.000.000,00	88,85	12.000.000,00	88,85	554.000.000,00	Kecamatan Gantung		
		Indeks kepuasan masyarakat		Persen	82,50	85,00	30.000.000,00	86,00	40.000.000,00	87,00	45.000.000,00	88,00	55.000.000,00	89,00	60.000.000,00	89,00	230.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit		
		Indeks kepuasan masyarakat		Persen	81,31	81,32	265.000.000,00	81,33	145.000.000,00	81,34	145.000.000,00	81,35	145.000.000,00	81,36	145.000.000,00	81,36	845.000.000,00	Kecamatan Manggar		
		Indeks kepuasan masyarakat		Persen	85,94	86,00	25.000.000,00	87,00	235.000.000,00	88,00	235.000.000,00	89,00	235.000.000,00	90,00	235.000.000,00	90,00	965.000.000,00	Kecamatan Simpang Pesak		
		Indeks kepuasan masyarakat		Persen	82,50	82,75	20.215.000,00	83,02	25.000.000,00	83,50	26.000.000,00	84,05	27.000.000,00	85,01	27.500.000,00	85,01	125.715.000,00	Kecamatan Simpang Renggiang		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100,00	100,00	400.000.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	470.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	2.240.000.000,00	Kecamatan Damar	
		Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persen	0,00	100,00	310.000.000,00	100,00	520.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	620.000.000,00	100,00	650.000.000,00	100,00	2.700.000.000,00	Kecamatan Dendang		
		Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persen	0,00	100,00	495.000.000,00	100,00	507.000.000,00	100,00	520.000.000,00	100,00	533.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	2.605.000.000,00	Kecamatan Gantung		
		Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persen	100,00	100,00	500.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	850.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit		
		Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persen	0,00	100,00	450.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	520.000.000,00	100,00	535.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	2.555.000.000,00	Kecamatan Manggar		
		Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persen	0,00	100,00	375.000.000,00	100,00	353.200.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	353.200.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	1.981.400.000,00	Kecamatan Simpang Pesak		
		Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persen	0,00	100,00	352.000.000,00	100,00	355.000.000,00	100,00	357.000.000,00	100,00	360.000.000,00	100,00	365.000.000,00	100,00	1.789.000.000,00	Kecamatan Simpang Renggiang		
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Persen	80,00	80,00	25.000.000,00	85,00	90.000.000,00	87,00	105.000.000,00	90,00	120.000.000,00	95,00	135.000.000,00	95,00	475.000.000,00	Kecamatan Damar

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	0,00	100,00	24.790.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	304.790.000,00	Kecamatan Dendang
		Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	0,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.500.000,00	100,00	6.500.000,00	100,00	7.000.000,00	100,00	32.000.000,00	Kecamatan Gantung
		Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0,00	100,00	20.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	820.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit
		Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	0,00	100,00	60.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	460.000.000,00	Kecamatan Manggar
		Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	100,00	100,00	16.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	176.000.000,00	Kecamatan Simpang Pesak
		Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	100,00	100,00	35.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00	100,00	235.000.000,00	Kecamatan Simpang Renggiang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum	Persen	0,00	100,00	10.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	110.000.000,00	Kecamatan Damar
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum	Persen	0,00	100,00	25.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	565.000.000,00	Kecamatan Dendang
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	Persen	0,00	100,00	40.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	80.000.000,00	Kecamatan Gantung
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum	Persen	100,00	100,00	84.000.000,00	100,00	96.000.000,00	100,00	110.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	540.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	Persen	0,00	100,00	80.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	570.000.000,00	Kecamatan Manggar

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	Persen	0,00	100,00	10.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	90.000.000,00	Kecamatan Simpang Pesak
		Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	Persen	0,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	65.000.000,00	Kecamatan Simpang Renggiang
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100,00	100,00	42.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	90.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	467.000.000,00	Kecamatan Damar
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	75,00	100,00	80.000.000,00	100,00	102.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.000.000,00	100,00	135.000.000,00	100,00	532.000.000,00	Kecamatan Dendang
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	57,00	69,00	39.717.500,00	69,00	39.000.000,00	80,00	41.500.000,00	83,00	41.500.000,00	88,00	41.500.000,00	88,00	203.217.500,00	Kecamatan Gantung
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100,00	100,00	147.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	230.000.000,00	100,00	255.000.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	1.117.000.000,00	Kecamatan Kelapa Kampit
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100,00	100,00	220.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	985.000.000,00	Kecamatan Manggar
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100,00	100,00	57.500.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	265.000.000,00	100,00	1.102.500.000,00	Kecamatan Simpang Pesak
		Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100,00	100,00	122.000.000,00	100,00	87.000.000,00	100,00	97.000.000,00	100,00	99.000.000,00	100,00	99.000.000,00	100,00	504.000.000,00	Kecamatan Simpang Renggiang
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa	Persen	0,00	100,00	1.102.292.100,00	50,00	1.175.387.500,00	55,00	1.238.013.200,00	60,00	1.292.119.400,00	65,00	1.346.838.500,00	65,00	6.154.650.700,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat	Persen	0,00	100,00	1.076.504.200,00	55,00	913.817.800,00	60,00	1.849.270.300,00	65,00	996.821.200,00	70,00	1.079.824.800,00	70,00	5.916.238.300,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas/LSM/OKP yang berstatus terdaftar	Persen	0,00	100,00	90.157.500,00	50,00	90.157.500,00	55,00	90.157.500,00	60,00	94.665.300,00	65,00	94.665.300,00	65,00	459.803.100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat	Persen	0,00	100,00	316.873.700,00	50,00	332.717.400,00	55,00	349.353.000,00	60,00	366.820.800,00	65,00	385.143.900,00	65,00	1.750.908.800,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik	Persen	0,00	100,00	935.517.000,00	55,00	982.290.900,00	60,00	1.031.407.200,00	65,00	1.082.977.700,00	70,00	1.137.126.500,00	70,00	5.169.319.300,00	Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (Tujuan) Kabupaten Belitung Timur

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,12	53,12	55,00	58,00	61,00	63,00	65,00	65,00
2.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	NA	3,20	3,35	3,50	3,65	3,80	3,95	3,95
3.	Indeks Merit System	Nilai 100-400	NA	100,00	102,00	122,00	143,00	163,00	184,00	184,00
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,33	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,70	72,70
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,93	3,50	3,48	3,46	3,40	3,35	3,30	3,30
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,66	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00
7.	PDRB per kapita	Juta Rp	59,47	63,47	64,17	65,20	66,57	68,29	70,39	70,39
8.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	70,92	71,52	71,97	72,43	72,88	73,33	73,78	73,78
9.	Indeks infrastruktur wilayah	Nilai 1-100	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
10.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41
11.	Angka kemiskinan	Persen	6,52	6,45	6,34	6,22	6,11	5,99	5,88	5,88
12.	Indeks Gini	Nilai	0,257	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Belitung Timur

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Indeks Perencanaan	Persen	NA	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00
2.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (T)	Tinggi (T)	Tinggi (T)	Tinggi (T)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	NA	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
4.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
5.	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	NA	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	3,15	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,10
7.	Indeks Kelembagaan	Persen	NA	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00	80,00
8.	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	NA	52,06	54,00	55,00	56,00	57,00	60,00	60,00
9.	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,43	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,00
10.	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	NA	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
11.	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	346,571	359,057	367,382	378,771	390,513	402,814	415,704	415,704

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
12.	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	-0,49	2,96	3,11	3,25	3,40	3,54	3,69	3,69
13.	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	5,82	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	4,50
14.	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	-3,47	3,26	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20
15.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	1,58	1,59	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,65
16.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,52	11,54	11,55	11,57	11,58	11,60	11,61	11,61
17.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,22	8,30	8,37	8,44	8,51	8,58	8,64	8,64
18.	Kabupaten Sehat	Predikat	NA	Padapa	Padapa	Wiwerda	Wiwerda	Wistara	Wistara	Wistara
19.	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	NA	94,65	95,57	96,59	97,68	98,78	99,88	99,88
20.	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	61,97	62,74	64,95	67,23	69,59	72,02	74,52	74,52
21.	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	66,17	69,36	71,96	73,48	75,00	76,52	78,04	78,04
22.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	68,32	69,18	69,70	70,23	70,75	71,28	71,81	71,81
23.	Indeks Risiko Bencana	Angka	-	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40
24.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,700	0,696	0,642	0,588	0,534	0,480	0,426	0,426

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
25.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,19	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
26.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	96,20	96,30	96,50	96,80	97,00	97,50	97,80	97,80
27.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	84,70	84,80	84,85	84,90	84,95	85,00	85,00	85,00
28.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	-0,66	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00
2	Laju Inflasi	Persen	3,11	3 ± 1	3,05	3,00	2,80	2,70	2,50	2,50
3	PDRB per Kapita	Juta Rp	59,47	63,47	64,17	65,20	66,57	68,29	70,39	70,39
4	Angka Kemiskinan	Persen	6,52	6,45	6,34	6,22	6,11	5,99	5,88	5,88
5	Indeks Gini	Nilai Indeks	0,257	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks	70,92	71,52	71,97	72,43	72,88	73,33	73,78	73,78
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,22	8,30	8,37	8,44	8,51	8,58	8,64	8,64
8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,52	11,54	11,55	11,57	11,58	11,60	11,61	11,61
9	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,03	72,13	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,60
10	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	4,77	4,77	4,60	4,50	4,40	4,30	4,20	4,20
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,33	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,70	72,70
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,33	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,70	72,70
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,93	3,50	3,48	3,46	3,40	3,35	3,30	3,30
16	Rasio penduduk yang berkerja	Persen	96,07	98,80	98,82	98,84	98,86	98,88	98,90	98,90
17	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja									0,00
	Sektor industri pengolahan	Persen	6,19	6,53	6,86	7,20	7,54	7,88	8,22	8,22

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Sektor pariwisata	Persen	14,29	13,92	12,50	12,06	11,75	12,19	15,43	15,43
	Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	38,54	42,76	44,55	46,33	48,11	49,90	51,80	51,80
18	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	68,52	68,75	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,00
19	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	33,04	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25	34,50	34,50
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	82,23	82,23	85,30	87,00	87,30	88,31	89,00	89,00
21	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	13,16	13,00	13,73	14,03	14,17	14,38	14,81	14,81
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	84,60	82,30	83,30	84,40	85,40	86,50	87,50	87,50
24	Penguatan cadangan pangan	Ton	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
25	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	3,82	3,90	3,95	4,01	4,12	4,25	4,38	4,38
27	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	0,12	0,19	3,15	0,09	0,11	0,15	0,23	0,23

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
28	Produksi sektor pertanian (padi, sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)	Ton	6.257,59	8.333,78	10.409,96	10.859,96	11.309,96	11.759,96	12.209,96	12.209,96
29	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	3,70	3,71	3,80	3,92	4,01	4,10	4,15	4,15
30	Produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kepala, kopi, aren, kemiri, jambu mete)	Ton	10.039,72	10.289,36	10.539,00	11.039,00	11.539,00	12.039,00	12.539,00	12.539,00
31	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	3,82	3,90	3,95	4,01	4,12	4,25	4,38	4,38
32	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,48	2,48	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	2,90
33	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,65	9,66	9,67	9,68	9,69	9,70	9,71	9,71
34	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	19,85	19,86	19,87	19,88	19,89	19,90	20,00	20,00
35	Pertumbuhan industri	Persen	5,73	5,76	5,80	5,85	5,90	5,95	6,00	6,00
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta	20.115.096,0 0	21.185.052, 00	22.255.008, 00	23.324.964,0 0	24.394.920,0 0	25.464.876,0 0	26.534.832, 00	26.534.832,00
2	Nilai Tukar Petani	Persen	103,94	86,00	86,25	87,37	90,25	92,31	95,65	95,65
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Persen	48,02	47,89	48,31	47,21	47,64	46,25	45,78	45,78

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
4	Rasio ekspor + impor terhadap pdb (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Rasio ketergantungan	Persen	43,90	43,63	43,36	43,09	42,82	42,55	42,29	42,29
6	Angka kriminlitas yang ditangani	Persen	101,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
III. ASPEK PELAYANAN UMUM										
A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1 Pendidikan										
1.1	Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	Persen	55,42	55,42	62,20	66,20	70,20	74,20	78,20	78,20
1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persen	101,78	101,78	103,00	106,00	109,00	112,00	115,00	115,00
1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	90,90	90,90	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00	99,00
1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan (SMP)	Persen	14,44	14,44	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50	19,50
1.5	Angka Partisipasi Murni PAUD	Persen	55,42	55,42	61,09	64,14	67,34	70,70	74,23	74,23
1.6	Angka Partisipasi Murni SD	Persen	88,94	88,94	89,00	90,00	91,00	93,00	95,00	95,00
1.7	Angka partisipasi Murni SMP	Persen	46,31	46,31	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00	70,00
1.8	Angka Partisipasi Sekolah dikdas	Persen	75,31	75,31	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	96,00
1.9	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0,01	0,01	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
1.10	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	1,26	1,26	1,06	0,86	0,66	0,46	0,25	0,25
1.11	Angka Kelulusan SD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	Angka Kelulusan SMP	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.13	Angka Melanjutkan SD Ke SMP	Persen	93,54	93,54	96,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00
1.14	Angka Melanjutkan SMP Ke SMA	Persen	99,94	99,94	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.15	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.16	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.17	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD)	Rasio	170,00	170,00	171,00	172,00	173,00	174,00	175,00	175,00
1.18	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (SMP)	Rasio	39,00	39,00	40,20	40,30	40,40	40,50	40,60	40,60
1.19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SD per 10.000	Rasio	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00
1.20	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SMP per 10.000	Rasio	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
1.21	Rasio guru /murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD)	Rasio	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00
1.22	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (SMP)	Rasio	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
1.23	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	96,50	96,50	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00
1.24	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki2	Persen	99,90	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.25	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	97,15	97,15	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.26	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persen	85,83	85,83	86,81	87,02	87,23	87,44	87,65	87,65
1.27	Guru yang bersertifikat pendidik	Persen	68,80	68,80	69,36	69,71	70,06	70,41	70,76	70,76
1.28	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	96,96	96,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.29	Persentase warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	36,82	36,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.30	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	68,94	68,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.31	Persentase SD/MI berakreditasi minimal A	Persen	14,15	14,15	19,05	22,86	26,67	30,48	34,29	34,29
1.32	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal A	Persen	52,00	52,00	60,00	72,00	84,00	92,00	100,00	100,00
2. Kesehatan										
2.1	Kabupaten Sehat	Predikat	NA	Padapa	Padapa	Wiwerda	Wiwerda	Wistara	Wistara	Wistara

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	96,20	96,30	96,50	96,80	97,00	97,50	97,80	97,80
2.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	10,92	10,50	10,00	9,70	9,50	9,00	8,95	8,95
2.4	Angka Kelangsungan hidup bayi	Per 1.000 KH	989,08	989,50	990,00	990,30	990,50	991,00	991,05	991,05
2.5	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	13,76	13,70	13,60	13,50	13,40	13,30	13,00	13,00
2.6	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	8,54	8,54	7,50	7,00	6,90	6,70	6,50	6,50
2.7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	189,84	160,00	130,00	130,00	120,00	100,00	49,00	49,00
2.8	Rasio Posyandu persatuan balita	Per 1.000 balita	1,28	1,25	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15
2.9	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	23,89	23,70	23,50	22,90	22,60	22,50	22,22	22,22
2.10	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	0,80	0,80	0,80	0,79	0,78	0,76	0,75	0,75
2.11	Rasio dokter (umum dan gigi) per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	50,96	50,96	49,00	48,00	47,60	47,50	47,40	47,40
2.12	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	66,88	66,00	65,00	64,00	63,50	63,00	62,22	62,22
2.13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	96,08	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.14	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,74	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
2.15	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.16	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.17	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	92,03	92,00	92,00	93,00	93,00	94,00	95,00	95,00
2.18	Non Polio AFP rate 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	0,00	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
2.19	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.20	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.21	Penderita diare yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.22	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 100.000 penduduk	1,68	1,68	1,66	1,64	1,62	1,60	1,57	1,57
2.23	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.24	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	89,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.25	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	98,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.26	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.27	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.28	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.29	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	75,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.30	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	71,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.31	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	80,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.32	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	99,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.33	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.34	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	87,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.35	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	67,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.36	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	23,08	23,08	22,70	22,40	22,10	21,80	21,50	21,50
2.37	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74
2.38	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	56,53	56,53	55,70	54,90	54,10	53,30	52,50	52,50
2.39	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	63,70	63,70	62,80	61,90	61,00	60,10	59,20	59,20
2.40	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.42	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.43	Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.44	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	96,20	96,23	96,30	96,35	96,40	96,45	96,50	96,50

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.45	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Persen	60,00	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00
2.46	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.47	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.48	Proporsi pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.49	Persentase penggunaan obat rasional	Persen	87,00	90,00	92,00	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2.50	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	55,17	55,18	55,30	55,50	55,70	55,90	56,00	56,00
2.51	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Persen	96,24	96,50	96,60	96,7	96,80	96,90	97,00	97,00
2.52	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.53	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persen	38,46	46,15	51,28	66,67	76,92	89,74	100,00	100,00
2.54	Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Persen	66,67	76,92	89,74	94,87	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
3.2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	61,97	62,74	64,95	67,23	69,59	72,02	74,52	74,52
3.3	Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	Persen	86,00	86,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00
3.4	Persentase penanganan drainase lingkungan dan perkotaan	Persen	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
3.5	Persentase penanganan jalan kabupaten	Persen	56,99	56,99	58,20	59,60	61,09	62,41	62,85	62,85
3.6	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur	Persen	Na	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
3.7	Persentase pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten	Persen	25,20	25,20	28,17	31,14	33,61	36,58	39,05	39,05
3.8	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persent	Na	Na	14,00	42,00	71,00	85,00	100,00	100,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
4.1	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	66,17	69,36	71,96	73,48	75,00	76,52	78,04	78,04
4.2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, utilitas (PSU)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
4.3	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	NA	94,65	95,57	96,59	97,68	98,78	99,88	99,88
4.4	Rasio rumah layak huni	Persen	46,40	47,00	48,00	49,00	49,50	50,50	51,50	51,50
4.5	Rasio permukiman layak huni	Persen	NA	99,07	99,20	99,40	99,60	99,80	100,00	100,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
5.1	Indeks Risiko Bencana	Persen	-	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40
5.2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4	Persentase penegakan Perda	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Sosial									
6.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,70	0,696	0,642	0,588	0,534	0,480	0,426	0,426
6.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,19	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
6.3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
6.5	PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1	Tenaga Kerja									
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,33	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,70	72,70
1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,93	3,50	3,48	3,46	3,40	3,35	3,30	3,30
1.3	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,43	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,00
1.4	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	84,70	84,80	84,85	84,90	84,95	85,00	85,00	85,00
1.6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	68,52	68,75	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,00
1.7	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	24,27	30,00	35,00	36,00	37,00	38,00	40,00	40,00
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	29,12	40,00	40,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.10	Persentase tenaga kerja formal	Persen	49,00	49,50	49,55	49,60	49,70	49,80	49,80	49,80

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.11	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persen	NA	3,50	4,00	5,00	6,00	6,50	7,00	7,00
1.12	Persentase setengah pengangguran	Persen	NA	29,00	28,20	28,00	27,90	27,00	27,00	27,00
1.13	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	9,00	11,00	10,00	10,00	9,00	9,00	8,00	8,00
1.14	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	88,89	88,88	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80	89,80
1.15	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	84,69	84,70	85,30	85,80	86,40	87,00	88,00	88,00
1.16	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Perusahaan	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
1.17	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1	Anugrah Parahita Ekapraya	Predikat	NA	NA	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama	Utama
2.2	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	NA	NA	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Utama
3	Pangan									
3.1	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita/hari	2.678,00	2.515,00	2.496,00	2.546,00	2.597,00	2.623,00	2.650,00	2.650,00
3.2	Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari	144,22	125,86	66,15	69,46	72,93	78,58	80,41	80,41
3.3	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	84,60	82,30	83,30	84,40	85,40	86,50	87,50	87,50

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
3.4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100,00	100,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	92,00
3.5	Persentase penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan	Persen	2,13	2,13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4	Pertanahan									
4.1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	NA	NA	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
5	Lingkungan Hidup									
5.1	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41
5.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	68,32	69,18	69,70	70,23	70,75	71,28	71,81	71,81
5.3	Persentase pengelolaan persampahan	Persen	65,04	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2	Penerbitan akta perkawinan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3	Penerbitan akta perceraian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4	Penerbitan akta kematian	Persen	96,46	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5	Penyajian data kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.6	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	71,23	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.7	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,96	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
6.8	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	NA	23,33	30,00	50,00	80,00	100,00	100,00	100,00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat yang diberdayakan	Persen	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.2	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persen	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Per perempuan	2,22	2,22	2,20	2,19	2,18	2,15	2,10	2,10
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	33,30	33,30	33,30
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	10,00	10,00	10,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan kependudukan	Lembaga	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8.9	Ratio akseptor KB	Persen	44,00	44,00	43,00	41,00	39,00	37,00	35,00	35,00
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	113,00	89,70	89,70	89,80	89,80	89,90	90,00	90,00
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 – 19) per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19)	Per 1.000 Perempuan	39,83	39,83	37,00	35,00	33,00	31,00	29,00	29,00
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	7,95	7,95	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,10

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
8.13	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	13,28	14,80	15,30	15,80	16,30	16,80	17,30	17,30
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	88,64	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	85,74	82,96	80,17	77,39	74,60	71,82	69,03	69,03
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	75,58	70,39	65,21	60,02	54,84	49,65	44,47	44,47
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	56,64	50,09	43,55	37,00	30,46	23,91	17,37	17,37
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Persen	28,57	28,57	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85
8.19	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Orang	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
8.20	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	204,00	236,00	268,00	300,00	332,00	364,00	396,00	396,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
8.21	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	58,97	58,97	58,97	58,97	58,97	58,97	58,97	58,97
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.23	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57	85,71	85,71
8.24	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	22,59	22,59	23,00	23,50	24,00	24,50	25,00	25,00
8.25	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
8.26	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persentase	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70
9	Perhubungan									
9.1	Rasio konektivitas antar wilayah	Persen	45,90	45,90	52,20	55,20	63,10	71,00	75,60	75,60

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
9.2	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,13	0,13	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
9.3	Persentase pembangunan pelabuhan orang dan barang	Persen	33,33	33,33	33,33	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00
9.4	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	Persen	9,93	9,93	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
9.5	Persentase pemenuhan insfrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	9,93	9,93	17,00	25,00	27,00	32,00	35,00	35,00
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	15,45	15,45	19,09	22,73	24,55	27,27	31,82	31,82
9.7	Persentase pemenuhan insfrastruktur pelayaran	Persen	56,79	56,79	60,49	62,96	65,43	65,43	66,67	66,67
9.8	Jumlah penumpang yang melalui terminal/dermaga/pelabuhan	Orang	8.738,00	8.738,00	9.861,00	10.566,00	10.730,00	10.532,00	10.701,00	10.701,00
10	Komunikasi dan Informatika									
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	3,15	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,10
10.2	Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan	Persen	NA	3,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
10.3	Persentase digitalisasi layanan publik	Persen	NA	3,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
10.4	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persen	67,00	69,00	70,00	75,00	80,00	83,00	85,00	85,00
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
11.1	Persentase koperasi aktif	Persen	62,09	62,92	63,20	63,30	63,40	64,50	64,60	64,60
11.2	Persentase koperasi sehat	Persen	NA	12,19	12,19	12,19	14,63	14,63	17,07	17,07
11.3	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,09	1,83	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,40
11.4	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Persen	0,09	0,34	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,75
11.5	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.6	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	NA	73,17	73,17	78,00	78,00	85,00	85,00	85,00
11.7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah	Persen	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota									
11.8	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	2,06	2,08	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,30
11.9	Persentase fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	37,66	38,00	38,50	38,50	39,00	39,00	40,00	40,00
11.10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	NA	0,90	1,00	1,00	1,20	1,20	1,50	1,50
11.11	Persentase koperasi yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
11.12	Persentase koperasi yang diberikan fasilitasi dukungan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	6,45	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00
11.13	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	
11.14	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	NA	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
11.15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam system <i>Online Data System</i> (ODS)	Persen	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
11.16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persen	NA	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
11.17	Persentase jumlah usaha mikro yang yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
11.18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11.19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
11.20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendamping	Persen	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
12	Penanaman Modal									
12.1	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	346,571	359,057	367,382	378,771	390,513	402,814	415,704	415,704
12.2	Rata-rata tingkat kepatuhan pelayanan	Tingkat Kepatuhan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	tinggi	tinggi
12.3	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	NA	63,00	65,00	67,00	69,00	72,00	74,00	74,00
12.4	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	11,11	11,15	11,20	11,40	11,60	11,80	12,00	12,00
13	Kepemudaan dan Olahraga									
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.2	Persentase wirausaha muda	Persen	2,00	2,00	2,00	2.25	2.5	2.75	3,00	3,00
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Statistik									
14.1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian									
15.1	Tingkat kematangan keamanan informasi	Level	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	Level II	Level II	Level III	Level III	Level III	Level III
16	Kebudayaan									

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
16.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	persen	NA	NA	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
16.2	Terwujudnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	benda/ situs/ kawasan	1.647,00	NA	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	250,00
16.3	Terwujudnya pengelolaan Museum dan Galeri Maritim	museum/ galeri maritim	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
17	Perpustakaan									
17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	74,67	74,67	74,70	74,75	74,80	74,85	75,90	75,90
17.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	23,21	23,21	23,25	23,26	23,27	23,29	23,45	23,45
18	Kearsipan									
18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	64,25	6,43	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00
18.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	61,83	61,83	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00
C.	Fokus Layanan Urusan Pilihan									

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Pariwisata									
1.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	-3,47	3,26	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20
1.2	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	-74,09	NA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.3	Lama tinggal wisatawan (<i>length of stay</i>)	Hari	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
2	Pertanian									
2.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	5,82	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	4,50
2.2	Produksi sektor pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)	Ton	6.257,59	8.333,78	10.409,96	10.859,96	11.309,96	11.759,96	12.209,96	12.209,96
2.3	Produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)	Ton	10.039,72	10.289,36	10.539,00	11.039,00	11.539,00	12.039,00	12.539,00	12.539,00
2.4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton Per Hektar	1,15	2,47	3,79	3,97	4,15	4,33	4,51	4,51
2.5	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	161,00	181,00	201,00	221,00	241,00	261,00	281,00	281,00
2.6	Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya	Ekor	1.679,00	1.784,00	1.904,00	2.036,00	2.181,00	2.341,00	2.517,00	2.517,00
3	Perdagangan									
3.1	PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	527,65	538,20	548,96	559,94	571,14	579,71	585,51	585,51

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
4	Perindustrian									
4.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	-0,49	2,96	3,11	3,25	3,40	3,54	3,69	3,69
4.2	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rupiah	231.367.634,00	235.960.224,00	242.849.110,00	254.902.923,00	267.557.653,00	280.843.311,00	294.791.408,00	294.791.408,00
5	Kelautan dan Perikanan									
5.2	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	-8,87	4,49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5.3	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	8,25	3,50	5,50	6,50	7,50	8,50	10,00	10,00
5.4	Konsumsi ikan	Persen	132,00	102,00	104,00	105,00	106,00	107,00	108,00	108,00
5.6	Cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan	Persen	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	22,00
5.7	Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan	Persen	NA	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	35,00
D.	Fokus Layanan Urusan Fungsi Penunjang									
1.	Perencanaan									
1.1	Indeks Perencanaan	Persen	NA	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00
1.2	Persentase kualitas dokumen perencanaan dengan nilai baik	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama daerah	Persen	75,31	77,85	80,39	82,93	85,46	88,00	90,54	90,54
2.	Keuangan									

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	NA	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
2.2	Ketepatan waktu penetapan Raperda APBD	angka (tepat/tidak)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.3	Ketepatan waktu penetapan Raperda Perubahan APBD	angka (tepat/tidak)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.4	Persentase realisasi SP2D tepat waktu	Persen	100,00	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00
2.5	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	angka (tepat/tidak)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.6	Kesesuaian barang milik daerah dengan nilai aset di neraca	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.7	Kemandirian keuangan daerah	Persen	13,16	13,00	13,73	14,03	14,17	14,38	14,81	14,81
2.8	Persentase belanja pendidikan	Persen	25,00	20,00	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
2.9	Persentase belanja kesehatan	Persen	20,00	10,00	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10
2.10	Persentase SiLPA terhadap APBD	Persen	13,00	12,00	44.477,00	44.477,00	44.477,00	44.477,00	44.477,00	44.477,00
2.11	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Rasio	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
2.12	Persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	NA	0,75	0,80	0,81	0,83	0,87	0,88	0,88
2.13	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Rasio	81,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2.14	<i>Assets management</i>	angka (ada/tidak)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.15	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	Rasio	13,16	13,00	13,73	14,03	14,17	14,38	14,81	14,81

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.16	Proporsi pajak terhadap total belanja	Persen	8,00	7,00	6,96	7,43	7,56	7,76	8,12	8,12
2.17	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3. Kepegawaian										
3.1	Indeks Merit System	Nilai 100-400	NA	100,00	102,00	122,00	143,00	163,00	184,00	184,00
4. Pendidikan dan Pelatihan										
4.1	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	NA	52,06	54,00	55,00	56,00	57,00	60,00	60,00
5. Penelitian dan Pengembangan										
5.1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	1,58	1,59	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,65
5.2	Persentase peningkatan pemanfaatan penelitian dan kajian oleh daerah	Persen	NA	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
5.3	Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah	Persen	NA	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri										
6.1	Persentase bantuan partai politik	Persen	60,00	60,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6.2	Indeks partisipasi politik	Persen	71,00	72,00	74,00	75,00	77,00	80,00	82,00	82,00
6.3	Meningkatnya peran FPK	Persen	30,00	30,00	40,00	47,00	55,00	65,00	75,00	75,00
6.4	Meningkatnya peran intelijen	Persen	33,00	33,00	35,00	40,00	50,00	60,00	80,00	80,00
6.5	Menurunnya kasus penggunaan obat terlarang	Jumlah	6,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pengawasan										
7.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,12	53,12	55,00	58,00	61,00	63,00	65,00	65,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
7.2	Maturitas SPIP	Level	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
7.3	Kapabilitas APIP	Level	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
7.4	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	85,91	85,91	87,00	89,00	91,00	93,00	96,00	96,00
8.	Kewilayahan - Kecamatan									
8.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui kapasitas kecamatan dan pemberdayaan masyarakat	Persen	83,11	83,24	83,97	84,31	84,88	85,29	85,60	85,60
8.2	Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.	Fokus Layanan Urusan Fungsi Pendukung									
1.	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah									
1.1	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (T)	Tinggi (T)	Tinggi (T)	Tinggi (T)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
1.2	Indeks Kelembagaan	Persen	NA	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00	80,00
1.3	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	NA	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
1.4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	NA	3,20	3,35	3,50	3,65	3,80	3,95	3,95
1.5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD			TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.	Unsur Pendukung Sekretariat DPRD									
2.1	Indeks kepuasan DPRD terhadap dukungan dan pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	NA	NA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2.2	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	Persen	52,38	55,00	60,00	62,00	55,00	60,00	65,00	65,00

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Belitung Timur. Proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025, serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dokumen RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun, dan harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintah daerah. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas daerah, serta penetapan indikator kinerja daerah. Pencapaian target indikator kinerja daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD ini, akan tercapai jika seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara kinerja daerah dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dokumen RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dengan demikian, segala bentuk penyelenggaraan pembangunan daerah dan pengelolaan kinerja Perangkat Daerah merujuk pada ketentuan dalam dokumen RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi.

9.1 Pedoman Transisi

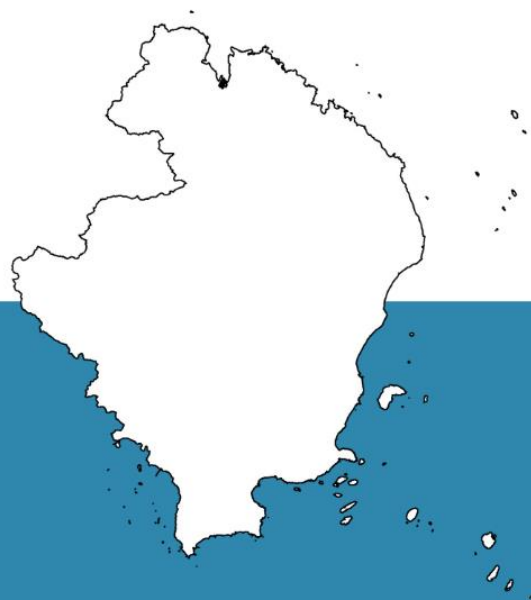
Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan RKPD setelah periode RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Belitung Timur, maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Belitung Timur yang baru. RKPD Tahun 2027 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas RPJMD Kabupaten Belitung Timur yang baru. Selanjutnya, RKPD tersebut dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2027.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan kaidah pelaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan waktu pelaksanaan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya, disusun melalui RKPD yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, maka Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur berkewajiban menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah secara berkala;
5. RPJMD Kabupaten Belitung Timur menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Belitung Timur setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

Selanjutnya untuk dapat menjamin pencapaian visi, misi dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama, antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur.



KABUPATEN BELITUNG TIMUR